



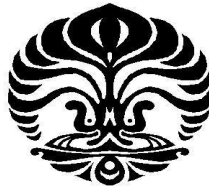
UNIVERSITAS INDONESIA

ARGUMEN DALAM TEKS OPINI MAJALAH *TEMPO*

TESIS

**SRI KUSUMA WINAHYU
NPM: 0906499985**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI MAGISTER LINGUISTIK
DEPOK
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

ARGUMEN DALAM TEKS OPINI MAJALAH *TEMPO*

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Humaniora pada Program Studi Linguistik**

**SRI KUSUMA WINAHYU
NPM: 0906499985**


**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI MAGISTER LINGUISTIK
DEPOK
JULI 2011**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan Universitas Indonesia kepada saya.

Depok, Juli 2011



Sri Kusuma Winahyu

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama: Sri Kusuma Winahyu
NPM: 0906499985**



Tanda Tangan:

Tanggal: 12 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN


Tesis yang diajukan oleh :

nama : Sri Kusuma Winahyu
NPM : 0906499985
Program Studi : Linguistik
Judul : Argumen dalam Teks Opini Majalah *TEMPO*

ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Humaniora pada Program Studi Linguistik, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

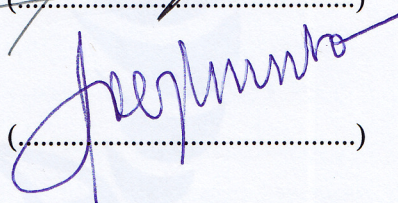
Pembimbing : Dr. Untung Yuwono


(.....)

Penguji : Dr. F.X. Rahyono, M.Hum.


(.....)

Penguji : Dr. Lilie Suratminto


(.....)

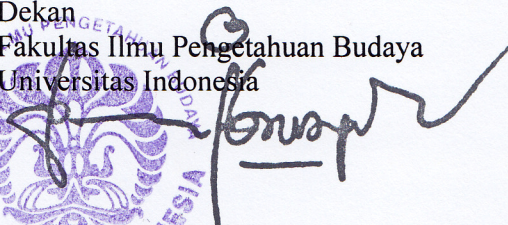

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 12 Juli 2011

oleh

Dekan

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia

Dr. Bambang Wibawarta

NIP 19651023 199003 1 002

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dan memberikan kemudahan sehingga saya dapat menyelesaikan tesis yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Humaniora. Sungguh, hanya atas pertolongan-NYA, tesis ini dapat saya selesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini tidak lupa saya mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada beberapa pihak berikut.

1. Dr. Untung Yuwono, yang telah membimbing saya sejak penulisan proposal hingga selesai menjadi tesis.
2. Dr. F.X. Rahyono, M.Hum. dan Dr. Lilie Suratminto, yang telah memberikan masukan yang berharga bagi kemajuan tesis saya.
3. Dr. Felicia Nuradi Utorodewo, S.S., M.A., yang telah membuka pikiran saya tentang arah penelitian teks argumentatif.
4. Bapak Umar Muslim, S.S., M.A., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Linguistik dan Ibu Wiwin Triwinarti, M.A., selaku pembimbing akademik.
5. Para pengajar di Program Studi Linguistik, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, yaitu Prof. Dr. Benny Hoedoro Hoed; Prof. Dr. Harimurti Kridalaksana; Prof. Dr. Hermina Sutami; Prof. Njaju Jenny Malik; Prof. Dr. Djoko Marihandono, S.S., M.Si.; Dr. Risnowati Martin; Dr. phil. Setiawati Darmodjuwono; Dr. Myrna Laksman; Tommy Christomy, S.S., Grad.Dip., M.A., Ph.D.; dan Sri Munawarah, S.S., M.Hum.
6. Mbak Nur dan Mbak Rita, atas bantuannya selama saya menjalani perkuliahan dan menyelesaikan tesis.
7. Dra. Yeyen Maryani, M.Hum., selaku Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Nasional, yang semasa menjabat sebagai Koordinator Intern Pusat Bahasa telah memberikan izin kepada saya untuk melanjutkan studi ke jenjang S-2.
8. Kepala Bidang Pembelajaran, Kepala Subbidang Proses Pembelajaran, dan rekan-rekan Tim UKBI Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,

Kementerian Pendidikan Nasional, yang telah mendorong saya untuk segera menyelesaikan tesis ini.

9. Rekan-rekan di S-2 Program Studi Linguistik angkatan 2009, khususnya Andalusia, Itra, Pak Yusup, Adi, Susi, Ara, dan Dhuha, yang telah bersama-sama melalui hari-hari sibuk perkuliahan.
10. Keluarga besar Bapak Wibisono Soerodikoesoemo (Alm.) dan Hj. Sri Hartati serta keluarga besar H. Abdul Kadir Ussainar (Alm.) dan Hj. Fatimah Yahu, yang telah memberikan banyak nasihat dan selalu mendoakan saya.
11. Abah Zainal dan Ananda Fawwaz, suami dan anak tercinta, yang telah menyemangati, mendukung, dan selalu mendoakan saya setiap saat. Terima kasih juga atas pengertian dan kesediaannya untuk bekerja sama berbagi waktu selama saya menempuh perkuliahan dan menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, mudah-mudahan Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Adapun tesis ini mungkin merupakan karya yang belum sempurna. Meskipun demikian, saya berharap semoga apa yang tertuang di dalamnya tetap bermanfaat bagi perkembangan studi kajian wacana dan bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Depok, Juli 2011

Sri Kusuma Winahyu

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Kusuma Winahyu
NPM : 0906499985
Program Studi : Linguistik
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya
Jenis Karya : Tesis

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Argumen dalam Teks Opini Majalah *Tempo*

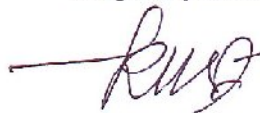
berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 12 Juli 2011

Yang menyatakan



Sri Kusuma Winahyu

ABSTRAK

Nama : Sri Kusuma Winahyu
Program Studi : Linguistik
Judul : Argumen dalam Teks Opini Majalah *TEMPO*

Penelitian ini membahas argumen dalam teks opini Majalah *TEMPO* tahun 2010 dengan topik Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Teori argumen Toulmin yang dimodifikasi oleh Ramage dan Bean diterapkan sebagai alat analisis utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penulis opini menggunakan elemen-elemen argumen dengan lengkap, yaitu *claim*, *ground*, *warrant*, *backing*, *rebuttal*, dan *qualifier*. Elemen-elemen tersebut saling berhubungan dan membentuk pola argumen. Hubungan itu terlihat dari adanya kohesi antartopik-komen dalam elemen-elemen argumen. Dengan demikian, terjadi kesatuan argumen yang menampakkan inti pikiran penulis tentang topik tulisan. Di samping itu, dari hasil penelitian dapat diketahui pula bahwa delapan teks opini Majalah *TEMPO* yang digunakan sebagai data penelitian ini merupakan teks argumentatif. Hal itu ditunjukkan dengan adanya ciri-ciri teks argumentatif, seperti pembuka, isi, dan penutup; penggunaan penalaran deduktif dan induktif; serta adanya usaha penulis mengarahkan pembaca untuk “menyetujui” pikirannya tentang topik tulisan melalui argumen-argumen yang disampaikannya itu.

Kata Kunci: argumen, kohesi, topik-komen

ABSTRACT

Name : Sri Kusuma Winahyu
Study Program: Linguistics
Title : *Arguments in Opinion Texts of TEMPO*

This study discusses the argument in the opinion texts of TEMPO in 2010 with the topic of the 6th President of the Republic of Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Toulmin argument theory which are modified by Ramage and Bean is applied as the main analytical tool. The results of this study show that the writers of opinions use complete elements of an argument, which are claim, ground, warrant, backing, qualifier, and rebuttal. These elements are interconnected to form a pattern of an argument. Relationships are seen from the cohesion between topic-comment in the elements of the argumen. Thereby, these elements occurred the unity argument, which reveal the author's core ideas about the topic of writing. In addition, this research can also show that the eight opinion texts of TEMPO which are used as research data are argumentative texts. This was indicated by the characteristics of argumentative texts, such as introduction, contents, and conclusion; the use of deductive and inductive reasoning; and writers effort to influence the reader to “accept” his thoughts about the subject through the arguments which it conveys.

Key Words: argument, cohesion, topic-comment

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME | ii |
| LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH | vii |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR SINGKATAN JUDUL TEKS OPINI..... | xi |
| DAFTAR BAGAN DAN TABEL..... | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Masalah Penelitian | 3 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 3 |
| 1.4 Ruang Lingkup | 3 |
| 1.5 Kerangka Konseptual..... | 5 |
| 1.6 Metode Penelitian | 6 |
| 1.6.1 Teknik Pengumpulan Korpus | 6 |
| 1.6.2 Teknik Pemilihan Data | 7 |
| 1.6.3 Teknik Klasifikasi Data | 7 |
| 1.6.4 Teknik Analisis Data | 8 |
| 1.7 Kemaknawian Penelitian | 9 |
| 2. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORETIS | 10 |
| 2.1 Tinjauan Pustaka | 10 |
| 2.2 Kerangka Teoretis | 12 |
| 2.2.1 Wacana | 12 |
| 2.2.2 Topik-Komen | 13 |
| 2.2.3 Argumentasi dan Wacana Argumentatif | 15 |
| 2.2.4 Argumen | 16 |
| 2.2.5 Makrostruktur | 20 |
| 2.2.6 Proposisi dan Koherensi | 21 |
| 2.2.7 Kohesi | 24 |
| 2.2.7.1 Kohesi dalam Elemen Argumen | 27 |
| 2.2.7.2 Kesatuan Argumen..... | 29 |
| 3. ANALISIS DATA | 32 |
| 3.1 Pengantar | 32 |
| 3.2 Susunan Elemen Argumen Teks Opini “Jangan Korupsi Bila Menolak Penjara” | 33 |
| 3.2.1 Topik-Komen dalam Elemen Argumen..... | 37 |
| 3.2.2 Hubungan Topik-Komen Antarelemen Argumen..... | 42 |
| 3.3 Susunan Elemen Argumen Teks Opini “Seratus Hari Tak Bergigi” | 45 |
| 3.3.1 Topik-Komen dalam Elemen Argumen..... | 48 |

| | |
|--|-----|
| 3.3.2 Hubungan Topik-Komen Antarelemen Argumen..... | 53 |
| 3.4 Susunan Elemen Argumen Teks Opini “Sang Kerbau Masuk Istana” | 56 |
| 3.4.1 Topik-Komen dalam Elemen Argumen..... | 59 |
| 3.4.2 Hubungan Topik-Komen Antarelemen Argumen..... | 63 |
| 3.5 Susunan Elemen Argumen Teks Opini “Sikap Presiden dalam Episode Akhir Century” | 65 |
| 3.5.1 Topik-Komen dalam Elemen Argumen..... | 68 |
| 3.5.2 Hubungan Topik-Komen Antarelemen Argumen..... | 73 |
| 3.6 Susunan Elemen Argumen Teks Opini “Kembali Kunjungi Negeri Belanda” | 75 |
| 3.6.1 Topik-Komen dalam Elemen Argumen..... | 78 |
| 3.6.2 Hubungan Topik-Komen Antarelemen Argumen..... | 82 |
| 3.7 Susunan Elemen Argumen Teks Opini “SBY dan RMS” | 84 |
| 3.7.1 Topik-Komen dalam Elemen Argumen..... | 87 |
| 3.7.2 Hubungan Topik-Komen Antarelemen Argumen..... | 90 |
| 3.8 Susunan Elemen Argumen Teks Opini “Orang-orang Sekitar Presiden” | 93 |
| 3.8.1 Topik-Komen dalam Elemen Argumen..... | 96 |
| 3.8.2 Hubungan Topik-Komen Antarelemen Argumen..... | 99 |
| 3.9 Susunan Elemen Argumen Teks Opini “Istana Bising Yudhoyono” | 101 |
| 3.9.1 Topik-Komen dalam Elemen Argumen..... | 105 |
| 3.9.2 Hubungan Topik-Komen Antarelemen Argumen..... | 110 |
| 4. PENUTUP | 113 |
| 4.1 Simpulan..... | 113 |
| 4.2 Saran..... | 116 |
| 5. DAFTAR PUSTAKA | 117 |
| 6. LAMPIRAN | 120 |

**DAFTAR SINGKATAN
JUDUL TEKS OPINI**

- JKBMP : “Jangan Korupsi Bila Menolak Penjara”
SHTB : “Seratus Hari Tak Bergigi”
SKMI : “Sang Kerbau Masuk Istana”
SPDEAC : “Sikap Presiden dalam Episode Akhir Century”
KKNB : “Kembali Kunjungi Negeri Belanda”
SDR : “SBY dan RMS”
OSP : “Orang-orang Sekitar Presiden”
IBY : “Istana Bising Yudhoyono”



DAFTAR BAGAN DAN TABEL

| | |
|---|-----|
| Bagan 1.1 Kerangka Konseptual..... | 5 |
| Bagan 1.2 Pola Lengkap Argumen Toulmin | 17 |
| Bagan 2.2 Contoh Argumen Berpola Lengkap | 18 |
| Bagan 1.3 Kesatuan Argumen Teks JKBPM..... | 44 |
| Bagan 2.3 Kesatuan Argumen Teks SHTB..... | 55 |
| Bagan 3.3 Kesatuan Argumen Teks SKMI..... | 64 |
| Bagan 4.3 Kesatuan Argumen Teks SPDEAC..... | 74 |
| Bagan 5.3 Kesatuan Argumen Teks KKNB..... | 83 |
| Bagan 6.3 Kesatuan Argumen Teks SDR..... | 92 |
| Bagan 7.3 Kesatuan Argumen Teks OSP..... | 100 |
| Bagan 8.3 Kesatuan Argumen Teks IBY..... | 111 |
| Tabel 1.1 Judul dan Penulis Teks Opini dengan Topik Presiden SBY | 7 |
| Tabel 1.3 Susunan Elemen Argumen Teks JKBMP | 36 |
| Tabel 2.3 Topik-Komen dalam Elemen Argumen Teks JKBMP..... | 40 |
| Tabel 3.3 Susunan Elemen Argumen Teks SHTB..... | 47 |
| Tabel 4.3 Topik-Komen dalam Elemen Argumen Teks SHTB..... | 51 |
| Tabel 5.3 Susunan Elemen Argumen Teks SKMI..... | 58 |
| Tabel 6.3 Topik-Komen dalam Elemen Argumen Teks SKMI..... | 61 |
| Tabel 7.3 Susunan Elemen Argumen Teks SPDEAC..... | 67 |
| Tabel 8.3 Topik-Komen dalam Elemen Argumen Teks SPDEAC..... | 71 |
| Tabel 9.3 Susunan Elemen Argumen Teks KKNB..... | 77 |
| Tabel 10.3 Topik-Komen dalam Elemen Argumen Teks KKNB..... | 80 |
| Tabel 11.3 Susunan Elemen Argumen Teks SDR..... | 86 |
| Tabel 12.3 Topik-Komen dalam Elemen Argumen Teks SDR..... | 89 |
| Tabel 13.3 Susunan Elemen Argumen Teks OSP..... | 95 |
| Tabel 14.3 Topik-Komen dalam Elemen Argumen Teks OSP..... | 97 |
| Tabel 15.3 Susunan Elemen Argumen Teks IBY..... | 104 |
| Tabel 16.3 Topik-Komen dalam Elemen Argumen Teks IBY | 107 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|-----|
| Lampiran 1. Teks Opini 1: “Jangan Korupsi Bila Menolak Penjara”..... | 120 |
| Lampiran 2. Teks Opini 2: “Seratus Hari Tak Bergigi”..... | 127 |
| Lampiran 3. Teks Opini 3: “Sang Kerbau Masuk Istana”..... | 134 |
| Lampiran 4. Teks Opini 4: “Sikap Presiden dalam Episode Akhir Century”..... | 142 |
| Lampiran 5. Teks Opini 5: “Kembali Kunjungi Negeri Belanda”..... | 151 |
| Lampiran 6. Teks Opini 6: “SBY dan RMS”..... | 159 |
| Lampiran 7. Teks Opini 7: “Orang-orang Sekitar Presiden”..... | 170 |
| Lampiran 8. Teks Opini 8: “Istana Bising Yudhoyono”..... | 179 |
| Lampiran 9. Judul Opini dengan Perulangan Topik di Majalah <i>TEMPO</i> Tahun 2010 | 195 |
| Lampiran 10. Daftar Sumber Data untuk Contoh | 198 |
| Lampiran 11. Daftar Sumber Data..... | 200 |

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wacana argumentatif adalah jenis wacana yang berisi argumen atau pendapat penulis. Melalui argumen-argumen yang dikemukakannya, penulis wacana jenis ini berusaha memengaruhi pikiran pembaca. Dalam wacana argumentatif kebenaran mengenai subjek atau topik wacana sangat ditekankan. Untuk mendukung kebenaran mengenai subjek ini diperlukan data. Oleh karena itu, argumen-argumen selalu disertai dengan data berupa alasan-alasan yang menguatkan yang berasal dari pengetahuan penulis. Dengan demikian, pembaca akan memercayai apa yang disampaikan penulis dan dapat mengubah pikirannya sesuai dengan tujuan penulisan wacana ini.

Wacana argumentatif dapat ditemui dalam berbagai laras, seperti pidato, dialog, tulisan ilmiah, dan kitab suci. Unsur persuasif dalam wacana argumentatif berupa pidato sangat kuat, sedangkan unsur pertentangan dapat tampak dalam wacana argumentatif berupa dialog. Wacana argumentatif berupa tulisan ilmiah cenderung berbentuk induktif. Sementara itu, wacana argumentatif berupa kitab suci mengandung unsur-unsur pragmatis. Argumen-argumen di dalamnya tidak eksplisit sehingga untuk memahaminya dibutuhkan penafsiran lebih lanjut.

Selain beberapa laras wacana argumentatif di atas, opini juga merupakan salah satu wacana argumentatif dalam ranah jurnalistik. Wacana argumentatif berupa opini juga mengandung pertentangan dua kutub. Pertentangan ini adakalanya diangkat oleh penulis dan dibicarakan dalam tulisan hingga salah satu unggul. Akan tetapi, dapat saja hanya diangkat salah satu, sedangkan yang lain dibiarkan berada di luar tulisan, yaitu di dalam pengetahuan pribadi penulis dan pembaca.

Wacana pada dasarnya merupakan sebuah struktur yang berupa unit di atas kalimat. Di dalam wacana terjadi keterkaitan antarkalimat yang berhubungan dengan faktor semantis. Hal itu antara lain ditunjukkan dengan adanya kohesi antarkalimat dalam wacana. Sebuah unit yang berisi kalimat-kalimat yang tidak

saling terikat secara semantis bukan merupakan sebuah wacana. Dengan demikian, kohesi juga menjadi faktor penting dan menjadi ciri wacana.

Di dalam wacana juga selalu terkandung topik yang terkemas dalam kalimat atau dapat juga pada tataran yang lebih kecil, yaitu dalam klausa. Topik tersebut hadir berdampingan dengan komen. Ketika kalimat demi kalimat dalam wacana saling terkait, secara otomatis terjadi keterkaitan topik-komen antarkalimat dalam wacana. Dengan adanya keterkaitan topik-komen antarkalimat, tampak bahwa wacana tersebut runtut secara keseluruhan dan dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca.

Di sisi lain, wacana argumentatif dibangun oleh komponen argumen. Toulmin (2003:7) mengemukakan bahwa argumen seperti organisme yang tumbuh dan memiliki struktur anatomis dan membentuk sebuah susunan. Susunan argumen itu adalah kalimat berupa pernyataan-pernyataan dan dapat membentuk berbagai kemungkinan pola argumen. Dengan adanya kemungkinan pembentukan pola argumen, dapat diduga elemen-elemen argumen dalam pola itu juga saling berhubungan.

Dari penjelasan di atas, baik topik-komen maupun argumen, keduanya berobjek kalimat. Artinya, topik-komen selalu hadir dalam kalimat dan argumen selalu tampil dalam bentuk kalimat pula. Dengan demikian, ketika argumen-argumen itu kemudian membentuk pola, akan terjadi kesatuan argumen yang kemungkinan berhubungan dengan keterkaitan antartopik dan komen. Hal itulah yang menarik bagi saya untuk mengamatinya secara lebih mendalam melalui penelitian ini.

Karena menitikberatkan komponen argumen yang selalu dijumpai dalam wacana argumentatif, penelitian ini menggunakan data berupa wacana argumentatif, yaitu teks opini Majalah *TEMPO*. Selain memiliki ciri-ciri wacana argumentatif sebagaimana telah dikemukakan di atas, teks opini Majalah *TEMPO* juga memiliki ciri-ciri wacana tulis argumentatif yang bersifat umum, seperti pola penulisan yang diawali dengan pembuka, tubuh tulisan, dan penutup yang berupa kesimpulan serta penggunaan penalaran argumentatif, seperti deduktif dan induktif.

Penggunaan teks opini juga dilakukan dengan pertimbangan bahwa di antara laras wacana argumentatif lainnya, teks jenis ini lebih umum dihasilkan oleh masyarakat. Dalam hal ini, selain wartawan *TEMPO*, beberapa penulis teks opini yang digunakan sebagai data penelitian ini adalah masyarakat umum, yaitu Hikmahanto Juwana, guru besar hukum internasional Universitas Indonesia dan Eep Saefulloh Fatah, pemerhati politik, CEO PolMark Indonesia.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pola argumen dalam teks opini Majalah *TEMPO* dan bagaimana elemen-elemen argumen dalam argumen yang berpola itu membentuk kesatuan argumen.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Mengetahui pola argumen dalam teks opini Majalah *TEMPO*.
- b. Mengetahui hubungan antarelemen argumen melalui pengamatan terhadap topik-komen dan kohesi antarelemen argumen.

1.4 Ruang Lingkup

Penelitian ini membahas argumen dan hubungan antarelemen argumen dalam teks opini Majalah *TEMPO*. Teks opini Majalah *TEMPO* dipilih karena di dalam teks ini terkandung argumen-argumen penulis tentang subjek tulisan. Argumen-argumen penulis itu disertai dengan bukti-bukti pendukung yang memperkuatnya. Teks opini tersebut juga mengungkapkan pertentangan, baik secara eksplisit maupun implisit, tentang subjek tulisan. Pertentangan secara eksplisit dalam hal ini antara lain seperti ungkapan-ungkapan penulis yang dapat berupa penilaian atau saran terhadap sikap, tindakan, atau kebijakan subjek dalam memutuskan sesuatu. Contohnya adalah sebagai berikut.

- (1) a. Dalam rapat kabinet 5 November 2009, Presiden menetapkan Program Seratus Hari berisi 45 program dan 129 rencana aksi.

b. Sayang, sebagian besar rencana seratus hari itu malah terasa seperti program rutin.

(*TEMPO*, 25 Januari 2010)

(2) a. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan aparat penegak hukum agar tak asal menangkap dan menahan kepala daerah yang tersandung kasus hukum.

b. Di tengah upaya keras pemerintah memberantas korupsi, pernyataan yang disampaikan ketika membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia di Madiun itu terkesan kontraproduktif.

c. Mestinya Presiden tegas saja mengatakan: kalau tak mau berurusan dengan aparat, tak mau ditahan apalagi dipenjarakan, ya, jangan coba-coba korupsi.

(*TEMPO*, 25 Januari 2010)

Contoh (1b) merupakan penilaian penulis terhadap tindakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang dalam hal ini merupakan subjek tulisan. Tindakan itu terdapat dalam (1a), yaitu penetapan Program Seratus Hari. Sementara itu, contoh (2b) dan (2c) masing-masing merupakan penilaian dan saran penulis tentang sikap presiden, yang merupakan subjek tulisan, yang tercantum pada (2a), yaitu tentang pernyataan presiden berkaitan dengan aparat penegak hukum yang gencar menangkap pejabat daerah yang terbukti korupsi.

Selain itu, teks opini Majalah *TEMPO* juga tampak berciri memiliki tujuan memengaruhi pembaca. Hal itu terlihat dari argumen-argumen yang dihasilkan oleh penulis. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, teks opini Majalah *TEMPO* termasuk dalam ragam teks argumentatif dan memenuhi syarat untuk digunakan sebagai data penelitian ini.

Adapun Majalah *TEMPO* dipilih sebagai sumber data dengan pertimbangan bahwa, pertama, berdasarkan data yang tercantum dalam laman *TEMPO* Media, pada tahun 2010, dengan jumlah pembaca sebanyak 620 ribu dan oplah cetak 180 ribu eksemplar per minggu, Majalah *TEMPO* menguasai 68% pasar majalah berita mingguan. Pertimbangan kedua, Majalah *TEMPO*

merupakan majalah berita yang “bersejarah”. Majalah ini pernah mengalami jatuh-bangun dalam penerbitannya, yaitu pernah dua kali dibredel oleh pemerintahan pada masa Orde Baru. Pembredelan pertama terjadi tahun 1982 dan pembredelan kedua terjadi tahun 1994. Pada tahun 1998 majalah ini berhasil terbit kembali dan akhirnya bahkan kembali menggunakan nama yang sama, yaitu “Majalah *TEMPO*” hingga sekarang.

1.5 Kerangka Konseptual

Berikut bagan kerangka konseptual sebagai landasan dalam penelitian ini.



Teks opini merupakan bagian dari wacana argumentatif. Hal itu tampak dari pengamatan atas penalaran dan struktur teks. Dengan menggunakan teori argumen Toulmin yang dimodifikasi Ramage dan Bean, yang dilengkapi dengan teori makrostruktur, proposisi, dan koherensi, serta pengajuan pertanyaan-pertanyaan untuk menelusuri argumen diketahui bahwa di dalam teks opini terkandung argumen-argumen. Argumen-argumen di dalam teks tersebut membentuk pola argumen. Pola argumen tersusun atas argumen-argumen yang mengandung topik yang muncul bersama dengan komen. Topik dan komen antarargumen berhubungan. Hubungan itu tampak manakala dilakukan pengamatan kohesi antarelemen argumen. Adanya hubungan topik-komen antarelemen argumen menjadikan elemen-elemen argumen tersebut membentuk kesatuan argumen yang merupakan inti pikiran penulis.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Creswell (1994:136) mengungkapkan bahwa salah satu karakteristik penelitian kualitatif adalah dilakukan karena adanya kebutuhan untuk mendalami dan menjelaskan sebuah fenomena. Dalam hal ini hubungan antarelemen argumen dalam teks opini merupakan sebuah fenomena yang perlu diamati secara lebih mendalam sehingga dapat diketahui bahwa topik-komen dalam elemen-elemen argumen menjadikan elemen-elemen argumen dalam teks opini tersebut dapat saling terkait membentuk kesatuan argumen.

Metode kualitatif, menurut Moleong (2002:16) memiliki prosedur penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada, misalnya wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Moleong (2002:16) juga mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.

Demikian halnya dengan penelitian ini. Penelitian mengenai argumen ini juga tidak menggunakan prosedur kuantifikasi atau statistik. Berikut diuraikan teknik pengumpulan korpus, teknik pemilihan data, teknik klasifikasi data, dan teknik analisis data.

1.6.1 Teknik Pengumpulan Korpus

Korpus penelitian ini berupa teks opini Majalah *TEMPO* tahun 2010 yang diperoleh dari laman Majalah *TEMPO*, yaitu “majalah TEMPOonline”, yang beralamat di <http://majalah.tempointeraktif.com>. Pengumpulan korpus dari Majalah *TEMPO* yang terbit awal Januari 2010 hingga akhir Desember 2010 ini disertai dengan pencatatan seluruh teks opini yang ada dalam setiap terbitan. Pencatatan ini dilakukan secara berurutan dalam bentuk tabel, mulai dari tanggal terbit majalah, judul opini, dan topik opini. Dengan demikian, akan tampak topik-topik opini yang hanya dibicarakan satu kali dan yang dibicarakan berulang-ulang dalam beberapa edisi.

1.6.2 Teknik Pemilihan Data

Dari catatan korpus yang telah tersedia, dilakukan pemilihan teks opini sebagai data penelitian. Pemilihan ini didasarkan pada topik opini. Teks opini dengan topik yang paling sering dibicarakan dalam rentang waktu satu tahun penerbitan menjadi teks yang dipilih sebagai data. Hal itu dilakukan dengan pertimbangan bahwa makin banyak diangkat menjadi sebuah tulisan, berarti topik tersebut adalah topik yang paling penting dibandingkan topik-topik yang lain. Untuk itu, langkah selanjutnya adalah mengklasifikasi teks-teks opini yang ada berdasarkan jumlah kemunculannya dalam tiap-tiap edisi.

1.6.3 Teknik Klasifikasi Data

Dalam mengklasifikasi teks opini, dilakukan pengelompokan teks yang memiliki topik-topik yang sama atau topik-topik yang berulang dan yang tidak berulang. Selanjutnya, teks opini dengan topik-topik yang tidak berulang disisihkan karena tidak dijadikan sebagai data penelitian. Sementara itu, pada kelompok teks opini dengan topik-topik yang berulang dilakukan pengamatan agar diketahui mana yang perulangannya paling banyak.

Dari penghitungan kemunculan topik opini, ternyata, topik yang paling kerap berulang adalah topik tentang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden SBY), yaitu delapan kali dalam rentang waktu penerbitan Majalah *TEMPO* dari Januari—Desember 2010. Dengan demikian, teks opini dengan topik Presiden SBY digunakan sebagai data penelitian ini. Berikut disajikan tabel judul dan penulis teks opini dengan topik Presiden SBY.

1.1 Tabel Judul dan Penulis Teks Opini dengan Topik Presiden SBY

| Topik | Judul | Penulis |
|--------------|---|---------------|
| Presiden SBY | 1. “Jangan Korupsi Bila Menolak Penjara” | 1. Wartawan |
| | 2. “Seratus Hari Tak Bergigi” | 2. Wartawan |
| | 3. “Sang Kerbau Masuk Istana” | 3. Wartawan |
| | 4. “Sikap Presiden dalam Episode Akhir Century” | 4. Wartawan |
| | 5. “Kembali Kunjungi Negeri Belanda” | 5. Wartawan |
| | 6. “SBY dan RMS” | 6. Hikmahanto |

| | | |
|--|---|--|
| | 7. “Orang-orang Sekitar Presiden” 8. “Istana Bising Yudhoyono” | Juwana 7. Wartawan 8. Eep Saefulloh Fatah |
|--|---|--|

1.6.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut.

- Penjabaran teks opini secara utuh disertai dengan pengamatan terhadap penalaran dan topik-komen dalam tiap-tiap kalimat (lihat hlm. 120—194).
- Penelusuran elemen argumen *claim* dan *stated reason*.
- Pengamatan terhadap elemen argumen *claim* dan *stated reason* yang menyertainya.
- Penelusuran elemen-elemen argumen *ground*, *warrant*, *backing*, *qualifier*, dan *rebuttal* dengan pengajuan pertanyaan-pertanyaan berikut.
 1. Apa bukti yang mendukung *claim*? (menemukan *ground*)
 2. Apa yang menguatkan *claim* dan menghubungkan *claim* dan *stated reason*? (menemukan *warrant*)
 3. Apa latar belakang *warrant*? (menemukan *backing*)
 4. Adakah kondisi yang berupa kemungkinan perlawanan atau pengecualian? (menemukan *rebuttal*)
 5. Adakah kondisi yang berupa syarat yang berkaitan dengan *claim*? (menemukan *qualifier*)
- Penyusunan pola argumen.
- Penguraian topik-komen dalam elemen-elemen argumen.
- Pengamatan hubungan topik-komen dan kohesi antarelemen argumen yang berpola.
- Penyatuan elemen-elemen argumen yang berpola menjadi kesatuan argumen.

1.7 Kemaknawian Penelitian

Kemaknawian praktis dengan dilakukannya penelitian ini adalah pembaca dapat mengetahui bagaimana Majalah *TEMPO* mengolah berita menjadi tulisan argumentatif berupa opini melalui elemen-elemen argumen yang digunakan penulis. Selain itu, tahapan analisis dalam penelitian ini juga dapat diterapkan sebagai dasar penilaian tulisan argumentatif berupa opini, yaitu menilai kelengkapan argumen dan menilai hubungan antarelemen argumen dalam teks opini. Penilaian itu dapat dimanfaatkan secara luas dalam praktik menulis teks opini oleh individu-individu dalam kehidupan sehari-hari untuk mengukur keberhasilan penulisan mereka.

Penelitian ini juga bermanfaat bagi perkembangan teori kajian wacana, yaitu bahwa teori argumen tidak hanya digunakan untuk mengetahui argumen-argumen jenis apa yang digunakan penulis teks opini, tetapi lebih dari itu. Apabila topik-komen dalam elemen-elemen argumen tersebut diamati, akan tampak bahwa kohesi di dalamnya membuat argumen-argumen tersebut membentuk kesatuan argumen. Kesatuan argumen itu merupakan “produk” dari pola argumen yang berisi inti pikiran penulis tentang topik tulisan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORETIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian dengan objek teks argumentatif telah dilakukan oleh Knudson dari Universitas California. Penelitian tersebut berjudul “Analysis of Argumentative Writing at Two Grade Levels”. Dalam penelitian yang dimuat dalam *Journal of Educational Research*, Volume 85, Nomor 3, Februari 1992, Knudson melakukan pengamatan terhadap siswa tingkat 10 dan 12 dalam hal menulis argumentatif. Tujuan penelitian tersebut adalah melihat apakah terdapat perbedaan tulisan yang dihasilkan apabila sebelumnya para siswa diberikan empat strategi instruksi yang berbeda-beda. Praktik penulisan oleh siswa tersebut dilakukan selama 14 hari. Selama itu siswa dibagi dalam empat kelompok dan setiap kelompok melakukan empat instruksi penulisan secara bergantian. Knudson juga berusaha menilai kualitas-kualitas yang bervariasi di dalam tulisan tersebut dengan model argumentasi Toulmin. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan dari tulisan-tulisan yang dihasilkan berdasarkan empat strategi instruksi. Penggunaan komponen-komponen argumentasi oleh kedua tingkat pelajar tersebut relatif stabil dan perbedaannya hanya pada pengetahuan yang dimilikinya tentang topik tulisan.

Penelitian yang dilakukan oleh Knudson sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Sriasih dari Universitas Negeri Denpasar. Penelitian Sriasih yang berjudul “Perkembangan Struktur Wacana Tulis Argumentatif Siswa Sekolah Dasar” dimuat di *Jurnal Masyarakat Linguistik Indonesia*, Tahun ke-23, Nomor 1, Februari 2005. Penelitian ini diawali dengan pemikiran tentang kenyataan kemampuan menulis pada jenjang sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi di Indonesia yang dinilai masih kurang. Hal itu terutama berkaitan dengan keruntutan pengungkapan gagasan. Namun, bukan berarti siswa tidak memiliki potensi dalam menulis karena menurutnya, dalam keadaan normal, semua siswa memiliki potensi berbahasa, termasuk menulis. Dalam penelitian ini, subjek penelitian, yaitu siswa kelas IV dan VI sekolah dasar distimulasi dengan dua topik tulisan dan diberikan konteks

menulis, yaitu tujuan penulisan dan sasaran tulisan. Dalam hal ini, peneliti berusaha mengamati pola struktur wacana argumentatif yang elemen-elemennya saling berkaitan menggunakan model argumentasi Toulmin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dua elemen utama argumen, yaitu *claim* dan *data* pada hasil tulisan kedua tingkat kelas tersebut sama tinggi. Namun, elemen-elemen lainnya, yaitu *warrant*, *backing*, *qualifier*, dan *rebuttal*, umumnya dijumpai pada tulisan siswa kelas VI dan sedikit sekali dijumpai pada tulisan siswa kelas IV. Hal itu menunjukkan bahwa terdapat proses perkembangan dalam hal kelengkapan penggunaan elemen-elemen argumentasi dalam menulis teks argumentatif oleh siswa sekolah dasar.

Astuti (2007) juga meneliti tentang argumen dalam wacana. Penelitian yang berjudul “Argumentasi dalam Editorial Surat Kabar Berbahasa Indonesia: Kajian pada Harian *Kompas* dan *Media Indonesia*” itu berupa tesis S-2 di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Ia membahas penggunaan elemen argumen Toulmin dalam teks editorial kedua harian tersebut. Pembahasannya meliputi elemen argumen apa saja yang digunakan dan pemarkah apa yang tampak dari elemen-elemen tersebut. Kedua pembahasan itu disertai dengan upaya perbandingan penggunaan pemarkah-pemarkah tersebut dalam harian *Kompas* dan *Media Indonesia*. Di samping itu, Astuti juga membuat persentase kemunculan elemen-elemen argumen dalam keseluruhan datanya sehingga pada akhirnya penelitian itu menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan cara dalam mengemukakan argumen dalam harian *Kompas* dan *Media Indonesia*.

Penelitian yang juga mengkaji argumen dalam wacana dilakukan oleh Nurusyifa (2011). Dalam hal ini wacana yang dipilih Nurusyifa bersifat persuasif. Penelitian berupa tesis S-2 di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia yang berjudul “Argumen dalam Ceramah Motivasi Mario Teguh “Golden Ways” itu berobjek tuturan lisan berupa ceramah motivasi. Nurusyifa mengategorikan ceramah motivasi yang disampaikan oleh motivator Mario Teguh sebagai wacana persuasif, tetapi motivator menggunakan teknik argumen sebagai “alat” persuasinya. Teknik argumen itu digunakan untuk memberikan alasan, sebab, atau penjelasan; membuat perbandingan; memberikan contoh; dan menyebutkan sumber otoritatif. Argumen-argumen itu selanjutnya dianalisis oleh peneliti menggunakan teori argumen Toulmin yang dimodifikasi oleh Ramage dan Bean.

Elemen-elemen argumen yang ditemukan dalam wacana persuasif itu kemudian diklasifikasi berdasarkan tujuan persuasi motivator tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguraian elemen-elemen argumen dalam wacana persuasif berupa ceramah motivasi bermanfaat untuk memahami pesan-pesan inti motivator.

Dari penelitian di atas tampak bahwa semuanya berkonsentrasi pada pola argumen. Adapun kesamaannya dengan penelitian saya adalah sama-sama mengkaji pola argumen dalam wacana. Akan tetapi, dalam penelitian saya elemen-elemen argumen yang membentuk pola itu diamati lebih lanjut untuk dilihat kemungkinannya membentuk kesatuan argumen. Pengamatan itu difokuskan pada hubungan topik-komen dan kohesi antarelemen argumen.

2.2 Kerangka Teoretis

Renkema (2004:205) menyatakan bahwa setelah membaca argumentasi seseorang akan berpikir tentang topik yang didiskusikan dalam wacana. Pendapat itu saya kaitkan dengan pendapat Toulmin (2003:11) bahwa salah satu elemen argumen, yaitu *claim*, merupakan pernyataan yang mengandung kebenaran dan berkaitan dengan judul wacana. Secara tidak langsung, berarti *claim* berkaitan pula dengan topik wacana. Sementara itu, masih menurut Toulmin (2003:87—105), elemen-elemen argumen yang ada dalam wacana dapat saling berhubungan. Hal-hal tersebut di atas membuat saya tertarik untuk melakukan penelitian tentang argumen dan mengaitkan ketiga pernyataan itu guna mengamati lebih jauh kemungkinan terbentuknya kesatuan argumen.

2.2.1 Wacana

Kata *wacana* (*discourse*) berasal dari bahasa Latin *discurrere* ‘mengalir ke sana-ke mari’ yang merupakan nominalisasi kata *discursus* yang melalui beberapa proses pemaknaan selanjutnya menjadi bermakna ‘memberi informasi tentang sesuatu’ (Titscher, 2000:42). Wacana merupakan sebuah tipe struktur yang berupa unit di atas kalimat (Halliday & Hasan, 1976:10). Material dalam kerja kajian wacana mengandung contoh wacana yang sering disebut sebagai teks (Johnstone, 2002:19).

Teks sebagai bahan yang dikaji dalam wacana selalu memiliki keterkaitan antarkalimat. Hal itu menjadi karakteristik penting sebuah wacana. Keterkaitan itu

diformulasikan ke dalam tujuh kriteria bersifat tekstual (de Beaugrande dalam Renkema, 2004:49--51). Pertama, kohesi, yaitu keterkaitan yang dihasilkan ketika interpretasi dari sebuah elemen tekstual bergantung pada elemen lain di dalam teks. Kedua, koherensi, yaitu keterkaitan dengan sesuatu di luar teks yang dimiliki oleh pembaca atau pendengar. Ketiga, intensionalitas, yaitu kesadaran yang dimiliki penulis atau penutur tentang tujuan dari pesan yang disampaikan, misalnya sekadar menyampaikan informasi atau menyampaikan pendapat. Keempat, keberterimaan, berkaitan dengan cara pengungkapan menggunakan kalimat-kalimat yang dapat diterima atau dipahami oleh pembaca atau pendengar. Kelima, informatif, yaitu mengandung informasi tertentu. Keenam, situasional, yaitu bahwa teks yang dihasilkan harus sesuai dengan situasi pemroduksian teks. Ketujuh, intertekstualitas, yaitu bagian-bagian kalimatnya berhubungan dengan bentuk atau makna pada bagian-bagian kalimat yang lain.

2.2.2 Topik-Komen

Topik pada umumnya cenderung *definite*, cenderung berupa pronomina, dan cenderung berupa subjek. Pada tataran kalimat, hal itu dapat terindikasi dengan mudah. Namun, pada tataran wacana, topik lebih akurat ditetapkan setelah dilakukan pembacaan wacana secara utuh (Renkema, 2004:94).

Sebuah wacana selalu mengandung topik, sebagaimana dikemukakan Renkema (2004:90) bahwa topik adalah inti dari wacana. Topik ia definisikan sebagai “*aboutness*” dari sebuah unit wacana. Topik merupakan ide yang kemudian dikembangkan dalam kalimat-kalimat sehingga membentuk wacana. Ide ini adalah sesuatu yang didiskusikan dalam kalimat-kalimat tersebut. Sesuatu itu dapat berupa informasi sebagai latar depan atau latar belakang (*foreground-background information*). Konsep *foreground-background information* berkaitan dengan hal-hal penting yang akan diangkat dalam kalimat. Artinya, dalam sebuah wacana ada informasi yang menjadi latar depan (*foreground information*) dan ada pula informasi yang lebih sebagai latar belakang (*background information*). Givon (1987:175—177) mengungkapkan bahwa topik wacana cenderung merupakan *background information*.

- (3) Setiap kali 30 September melintas, orang sulit melupakan Partai Komunis Indonesia. Bahwa PKI banyak melakukan kesalahan hingga akhirnya tumbang dalam prahara Gerakan 30 September, banyak orang mahfum. Menjelang 1965, ketua umumnya, Dipa Nusantara Aidit, menghadapi dilema yang tidak mudah dipecahkan. (*TEMPO*, 1 Oktober 2007).

Dalam contoh (3), terdapat informasi *Partai Komunis Indonesia* pada kalimat pertama. Namun, dalam kalimat kedua dan ketiga, informasi tersebut menjadi latar belakang, sedangkan latar depannya adalah *Gerakan 30 September* (kalimat kedua) dan *Dipa Nusantara Aidit* (kalimat ketiga). Meskipun demikian, informasi yang menjadi latar depan itu masih berada dalam lingkup informasi yang menjadi latar belakangnya, yaitu *Partai Komunis Indonesia*. Dengan demikian, *Partai Komunis Indonesia* merupakan topik utama atau ide dari wacana tersebut.

Dalam pembicaraan mengenai topik, terdapat pula konsep *given-new*. Dalam hal ini terjadi pertukaran tempat antara topik lama dan topik baru. Hal itu berhubungan dengan pendapat Givon (1983:5) bahwa kalimat (atau klausa) terbagi dalam dua komponen, yaitu topik dan komen. Topik juga biasa disebut tema atau *old information*, sedangkan komen juga biasa disebut fokus, rema, atau *new information*. Topik-komen ini berkaitan dengan *given-new* atau topik lama dan topik baru. Contohnya adalah sebagai berikut.

- (4) Pencanaan program seratus hari, yang tak diwajibkan aturan hukum mana pun di negeri ini, akhirnya menjadi barometer kinerja masa awal pemerintahan kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam rapat kabinet 5 November 2009, Presiden menetapkan Program Seratus Hari berisi 45 program dan 129 rencana aksi. Ia juga mengumumkan lima belas program pilihan yang wajib dilaksanakan, antara lain pemberantasan mafia hukum, revitalisasi industri pertahanan, penanggulangan terorisme, dan penanggulangan permasalahan listrik. (*TEMPO*, 25 Januari 2010).

Dalam contoh (4) frasa *pencanaan program seratus hari* merupakan topik kalimat pertama. Frasa tersebut merupakan bagian atau tepatnya topik dari klausa *pencanaan program seratus hari, yang tak diwajibkan aturan hukum mana pun*

di negeri ini, yang menjadi subjek kalimat dan merupakan topik lama. Akan tetapi, di dalam kalimat pertama terdapat pula frasa *Presiden Susilo Bambang Yudhoyono* dalam klausa *akhirnya menjadi barometer kinerja masa awal pemerintahan kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono* yang merupakan komen. Frasa *Presiden Susilo Bambang Yudhoyono* yang ada dalam komen tersebut merupakan topik baru dan menjadi topik dalam kalimat kedua dan ketiga berbentuk nomina *presiden* dan pronomina *ia*.

Dalam penelitian ini teori tentang penentuan topik-komen, baik yang berada dalam kalimat atau pun dalam klausa, sebagaimana disampaikan oleh Givon di atas akan digunakan sebagai alat analisis.

2.2.3 Argumentasi dan Wacana Argumentatif

Argumentasi merupakan cara mengemukakan pendapat dengan motivasi untuk memengaruhi atau mengubah pendapat atau sikap orang lain. Alat untuk memengaruhi atau mengubah pendapat pembaca itu berupa bukti-bukti yang dapat diterima oleh pembaca sebagai pendapat dan kesimpulan yang benar. Bukti-bukti itu tersusun dalam suatu penalaran, yaitu induksi dan deduksi (Keraf, 2004:3—5). Penalaran induktif diawali dengan penjabaran bukti-bukti yang bersifat khusus dan diakhiri dengan bukti yang bersifat umum. Sebaliknya, penalaran deduktif diawali dengan bukti yang bersifat umum dan dilanjutkan dengan penjabaran berupa bukti-bukti yang bersifat khusus.

Teks argumentatif adalah wacana yang mengandung argumentasi. Sebuah teks argumentatif memiliki struktur atau komposisi berupa pendahuluan, tubuh tulisan, dan penutup (Ramage dan Bean, 1992:228). Pada bagian pendahuluan, umumnya penulis melakukan orientasi mengenai isi tulisan secara umum kepada pembaca. Selanjutnya, orientasi pada bagian pendahuluan itu diuraikan dan dibahas secara lebih mendalam pada bagian tubuh tulisan. Pada bagian penutup, umumnya penulis melakukan penyimpulan mengenai apa yang telah dituliskan sebelumnya. Penyimpulan itu dapat berupa ringkasan yang sangat singkat atas hal-hal yang telah dituliskan pada tubuh tulisan.

Ada beberapa perspektif dalam argumentasi (Renkema, 2004:203—207). Argumentasi dengan perspektif logis atau logika matematis, sebagaimana

dikemukakan oleh Aristoteles, berkaitan dengan cara berpikir, berpendapat, dan berkesimpulan. Dalam hal ini yang dipentingkan adalah cara pemberian alasan yang menentukan validitas argumen yang tersusun dalam bentuk tiga pernyataan dalam satu kesatuan, yaitu premis mayor, premis minor, dan kesimpulan.

Namun, tidak semua elemen argumen dapat diklasifikasikan dalam tiga hal tersebut sehingga berkembang argumentasi berdasarkan perspektif logika hukum, yaitu logika yang berfokus pada *claim* dengan landasan yang solid untuk mendukungnya. Logika hukum itu dianggap Toulmin lebih realistis jika dibandingkan dengan logika matematis. Toulmin (2003:89) menilai bahwa *claim* dan elemen-elemen argumen yang mendukungnya seperti memiliki keterkaitan dengan proses hukum, yaitu pernyataan klaim, bukti dari identifikasi, kesaksian peristiwa, alasan peringanan kesalahan, interpretasi peraturan, dan pernyataan pengecualian.

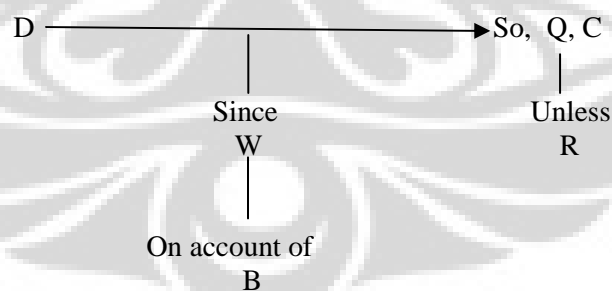
2.2.4 Argumen

Ramage dan Bean (1992:4—5) berpendapat bahwa argumen selalu dalam kerangka persuasif karena argumen menekankan pada penemuan dan penyampaian *judgement* tentang suatu kenyataan melalui pendekatan yang berupa alasan-alasan. Argumen merupakan komponen yang membangun argumentasi. Toulmin (2003:89—100) mengamati bahwa dalam setiap tindakan mengemukakan pendapat atau berargumen selalu terkandung klaim kebenaran (*claim* (C)). *Claim* ini berupa kesimpulan atau pernyataan tesis yang diangkat dan diyakini kebenarannya oleh penulis. *Claim* tersebut menjadi sentral dalam teks. Di dalam sebuah proses argumentasi, baik lisan maupun tulis, *claim* akan selalu diperjelas dan dipertahankan oleh penutur atau penulis. Upaya memperjelas dan mempertahankan *claim* ini akan berhasil apabila didukung oleh *data* (D) atau landasan yang berupa bukti untuk memperkuat *claim*.

Jika bukti yang ada tidak cukup untuk mendukung *claim*, dapat dihadirkan jaminan atau *warrant* (W). *Warrant* merupakan pernyataan yang menghubungkan sebuah *claim* dengan *data*. Meskipun dengan hadirnya *claim*, *data*, dan *warrant* sebuah argumen telah dapat dikatakan tersusun dengan baik, adakalanya *warrant* perlu didukung oleh bukti-bukti pula. Bukti-bukti pendukung *warrant* ini disebut

backing (B). Di samping itu, ketika *claim* merupakan keadaan yang mengandung kemungkinan tertentu, dapat kemudian muncul *qualifier* (Q). Renkema (2004:204) menyebut *qualifier* sebagai syarat. Selanjutnya, dapat pula muncul *rebuttal* (R), yaitu penolakan atau pengecualian. Bagian-bagian argumen yang telah disebutkan di atas dapat membentuk pola, yaitu C-D-W-B-Q-R atau setidaknya pola C-D, yaitu sebuah *claim* dan satu atau lebih *data*.

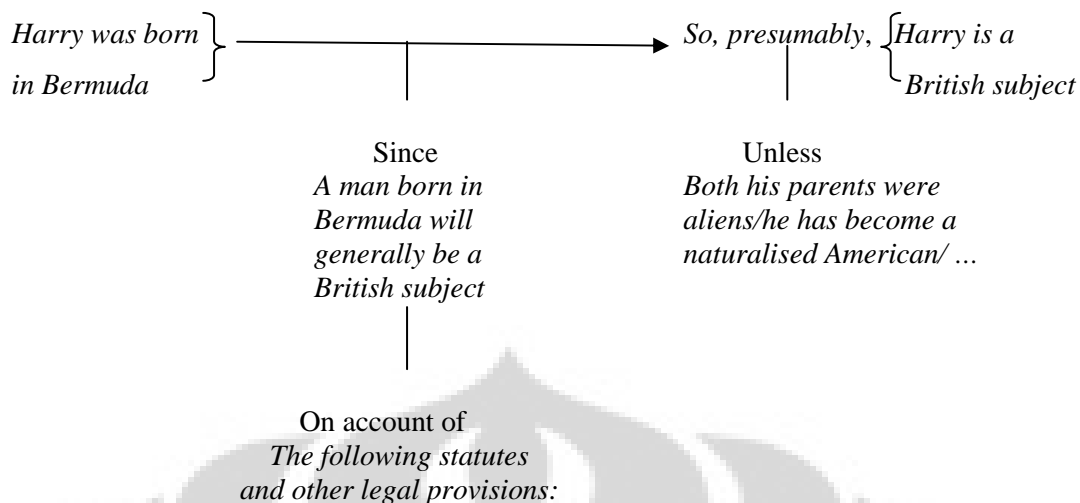
Renkema (2004:203) menegaskan bahwa dalam menyusun elemen-elemen argumen, Toulmin lebih menekankan pada pertanyaan-pertanyaan yang membangun argumen-argumen tersebut. Artinya, setelah *claim* didapat, maka akan timbul pertanyaan mengapa ada *claim* demikian atau seperti apa bukti *claim* itu. Kemudian, ditampillah *data*. Setelah *data* didapat, muncul lagi pertanyaan apa sebenarnya yang menjadi penguat *claim* dan yang menghubungkan *data* dengan *claim* tersebut. Untuk itu, muncullah *warrant*. *Warrant* ini lantas dipertanyakan lagi, yaitu apa latar belakang kemunculan *warrant* tadi. Lalu ditampillah *backing*. Ketika dari elemen-elemen berupa *claim*, *data*, *warrant*, dan *backing* itu memungkinkan muncul kondisi yang berlawanan, maka dapat pula muncul *rebuttal* yang umumnya disyaratkan oleh *qualifier*. Kemunculan keduanya dapat membuat *claim* tertolak atau justru semakin kuat. Bagan di bawah ini menggambarkan keenam elemen argumen Toulmin yang saling berhubungan (Toulmin, 2003: 97).



Bagan 1.2 Pola Lengkap Argumen Toulmin

Hubungan antarelemen argumen yang digambarkan dengan garis dan anak panah sebagaimana digambarkan di atas itulah yang disebut Toulmin sebagai pola (Toulmin, 2003:92).

Berikut contoh elemen-elemen argumen yang telah terisi dan membentuk pola argumen C-D-W-B-Q-R (Toulmin, 2003: 97).



Bagan 2.2 Contoh Argumen Berpola Lengkap

Pada dasarnya, perspektif logis dalam argumen Toulmin ini tampak dalam *claim*, *data*, dan *warrant*. *Warrant* merupakan premis mayor, *data* merupakan premis minor, dan *claim* merupakan kesimpulan.

Warrant : A man born in Bermuda will generally be a British subject.

Data : Harry was born in Bermuda

Claim : Harry is a British subject

Bentuk tersebut kemudian dimodifikasi oleh Ramage dan Bean (1992:105—108). Premis minor yang dalam argumen Toulmin merupakan *data*, dalam Ramage dan Bean menjadi *stated reason*. Hal itu dapat terjadi karena hubungan antara *data* dan *claim* dalam argumen Toulmin merupakan hubungan sebab akibat. Ramage dan Bean yang dikutip oleh Choesin (2004:52) mengatakan bahwa cara membuat *stated reason* adalah dengan menambahkan kata penghubung *karena* sehingga menjadi “[*claim*] karena [*stated reason*]”. Misalnya pada contoh berikut,

- (5) a. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sesungguhnya tak punya pilihan selain mengambil alih tanggung jawab kebijakan penyelamatan Bank Century.
- b. (Karena) Sebagai orang nomor satu pemerintahan negara yang menganut sistem presidensial, di pundak Presidenlah terletak tanggung jawab semua kebijakan eksekutif.

(TEMPO, 1 Maret 2010)

kalimat (5a) merupakan *claim*, sedangkan kalimat (5b) merupakan *stated reason* dari *claim*. Salah satu bagian dari kalimat (5a), yaitu *Presiden Susilo Bambang Yudhoyono* merujuk pada bagian dari kalimat (5b), yaitu *orang nomor satu pemerintahan negara yang menganut sistem presidensial*. Dengan demikian, tampak jelas bahwa keberadaan *claim* akan selalu disertai dengan *stated reason*.

Ramage dan Bean (1992:105) menyatakan bahwa pengungkapan *stated reason* oleh penulis dapat terjadi dalam berbagai model. Ada penulis yang menggabungkannya dalam satu kalimat sehingga masing-masing berbentuk klausa dengan penanda sebab akibat (*karena*), tetapi ada pula yang memisahkannya menjadi dua kalimat dengan penanda sebab akibat yang implisit atau tidak tampak.

Adapun untuk mendukung *claim* (dan *stated reason*) Ramage dan Bean mengemukakan apa yang disebut sebagai *ground*. *Ground* berisi informasi-informasi yang dimiliki oleh penulis sebagai dasar untuk membuat sebuah pernyataan. *Ground* menjadi dasar penguat *claim* dan *stated reason* tersebut. Dengan modifikasi yang dilakukan oleh Ramage dan Bean, maka pola terlengkap argumen tadi menjadi C-G-W-B-Q-R atau setidaknya satu C dan satu atau lebih G.

Berkaitan dengan argumen dengan perspektif logis yang tersusun dalam bentuk premis mayor, premis minor, dan kesimpulan sebagaimana tercantum di atas, pada kenyataannya, tidak semua komponen *warrant*, *stated reason*, dan *claim* saling terikat secara bulat dan utuh demikian. Hal itu karena cara penulis dalam menuangkan tulisan tidak sama. Oleh karena itu, yang terpenting dalam penelitian ini adalah *warrant* merupakan kalimat yang salah satu bagiannya terkait dengan *stated reason* dan *claim* dan kedudukannya menjadi penjamin *claim* dan *stated reason* sebagaimana dikemukakan Choesin (2004:52) berikut.

Warrant: Individu yang dilarang berekspresi akan memperlihatkan gejala frustrasi.

Stated Reason: Banyak individu dilarang berekspresi politik pada masa Orde baru.

Claim: Banyak individu mengalami frustrasi pada masa Orde Baru.

Dari dua elemen argumen dan *stated reason* yang mewakili premis mayor, premis minor, dan kesimpulan di atas, tampak bahwa *warrant* memiliki keterkaitan dengan *stated reason* dan *claim*, yaitu pada *dilarang berekspresi* dan *frustrasi*.

Dilarang berekspresi ditemukan pula pada *stated reason*, sedangkan *frustrasi* ditemukan pula pada *claim*. Kedudukan *warrant* juga menjadi penjamin *claim* dan *stated reason*. Keterkaitan semacam itu juga digunakan dalam penelitian ini untuk penentuan elemen argumen *claim*, elemen argumen *warrant*, dan *stated reason*. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan teori tentang argumen sebagaimana disampaikan oleh Toulmin dengan modifikasi Ramage dan Bean dan langkah-langkah penemuan elemen argumen sebagaimana dikemukakan Renkema, yaitu pengajuan pertanyaan-pertanyaan, sebagai alat analisis.

2.2.5 Makrostruktur

Makrostruktur merupakan struktur semantis global dalam wacana (Van Dijk, 1980: 27). Makrostruktur diperlukan untuk menjelaskan pengertian bahwa kekoherenan sebuah wacana tidak hanya pada level lokal (hubungan antarkalimat), tetapi juga pada level global. Pengertian seperti makna global, referensi global, topik, atau tema sangat berdekatan sehingga makrostruktur diperlukan untuk menjadikan hubungan tersebut lebih eksplisit (Van Dijk, 1980: 10). Renkema (2004: 94) kemudian menyebutkan bahwa makrostruktur adalah makna global dari wacana. Jadi, ketika seseorang membaca sebuah wacana, misalnya, ia dapat merangkum apa yang telah dibacanya. Rangkuman itulah yang disebut sebagai makrostruktur.

Makrostruktur dapat dibentuk menggunakan tiga *macrorules*, yaitu menghapus (*deletion rule*); menggeneralisasi (*generalization rule*); dan mengonstruksi (*costruction rule*) (Van Dijk, 1980: 46—48). *Deletion rule* adalah aturan penghapusan beberapa proposisi yang tidak relevan. *Generalization rule* adalah pengubahan beberapa proposisi yang spesifik ke dalam sebuah proposisi yang lebih general. *Construction rule* adalah mengonstruksi sebuah proposisi dari beberapa proposisi. Berikut contoh dari masing-masing *macrorules*.

- (6) Angka merah itu berasal dari dua persoalan yang menguji kepemimpinan Yudhoyono dalam tiga bulan dan sepuluh hari belakangan ini.
- a. Angka merah itu berasal dari dua persoalan.
 - b. Dua persoalan yang menguji kepemimpinan Yudhoyono.
 - c. Yudhoyono memimpin tiga bulan dan sepuluh hari.

(TEMPO, 25 Januari 2010)

Menggunakan *deletion rule*, proposisi (6b) dan (6c) dapat dieliminasi atau dihapus sehingga hanya ada (6a) sebagai proposisi yang relevan.

(7) Banyak bupati yang dimintai keterangan penyidik, kepala daerah menjadi saksi, bupati berstatus tersangka, bupati berstatus terdakwa, dan kepala daerah dipenjarakan.

a. Para pejabat daerah menjalani proses pengadilan.

Contoh (7a) merupakan proposisi makro dari hasil generalisasi proposisi-proposisi yang ada dalam (7) yang masing-masing bersifat spesifik.

(8) Presiden mencanangkan Program Seratus Hari dengan menetapkan 45 program dan 129 rencana aksi. Ia juga mengumumkan 15 program pilihan yang wajib dilaksanakan. Namun, sebagian besar rencana seratus hari itu malah terasa seperti program rutin.

a. Presiden gagal melaksanakan Program Seratus Hari.

Contoh (8) merupakan contoh *construction rule*. Dalam contoh (8) terdapat kata-kata *Program Seratus Hari* yang disamakan dengan *program rutin*. Hal itu dapat digunakan untuk mengonstruksi sebuah proposisi sebagaimana tercantum dalam (8a), yaitu membuat penyimpulan bahwa Program Seratus Hari gagal.

Penjelasan tentang makrostruktur di atas dimanfaatkan dalam penelitian ini untuk melengkapi tahapan penguraian elemen argumen *claim* dan *stated reason*, yang merupakan makrostruktur dalam kesatuan argumen, dalam bentuk proposisi-proposisi. Sesudah itu, dilakukan pengamatan terhadap hubungan koherensi antarkeduanya.

2.2.6 Proposisi dan Koherensi

Salah satu pembentuk wacana adalah proposisi. Proposisi dimaknai oleh Renkema (2004:87) sebagai makna asertif sederhana dari kalimat. Sebuah kalimat dapat terdiri atas lebih dari satu proposisi. Sebuah proposisi mengandung satu verba sebagai prediktor dan satu atau lebih argumen yang saling berhubungan, misalnya pada contoh berikut.

(9) Badan Pemeriksa Keuangan mengumumkan bahwa dana yang digelontorkan ke daerah tak dilaporkan dengan cara transparan.

a. Badan Pemeriksa Keuangan mengumumkan bahwa x.

- b. Dana tak dilaporkan dengan cara transparan.
- c. Dana digelontorkan ke daerah.

Kalimat pada contoh (9) merupakan proposisi mayor yang terdiri atas tiga proposisi minor. Proposisi minor mengandung satu verba sebagai predikator dan satu atau lebih argumen yang saling berhubungan.

Senada dengan Renkema, Larson (1984:189) menyatakan bahwa proposisi adalah satuan semantis yang terdiri atas konsep-konsep. Konsep yang satu merupakan inti dan konsep yang lain berhubungan langsung dengan konsep inti. Konsep *presiden*, *membantu*, dan *menteri* dapat digabungkan untuk membentuk proposisi-proposisi. Perbuatan *membantu* merupakan konsep kejadian inti. Bentuk proposisi bergantung pada hubungan antarkonsep itu. Apabila presiden yang membantu menteri, proposisinya adalah *presiden membantu menteri*. Apabila menteri yang membantu presiden, proposisinya adalah *menteri membantu presiden*.

Larson (1984:193) menegaskan bahwa proposisi merupakan kesatuan semantis yang terdiri atas konsep, yaitu benda, kejadian, atau atribut. Salah satu konsep itu merupakan inti dan yang lain berhubungan dengan konsep inti melalui sistem relasi. Untuk menandai proposisi kejadian, terlebih dahulu dilakukan pencarian dan pengungkapan konsep kejadian dalam bentuk verba, selanjutnya dilakukan pencarian partisipan, yaitu orang atau benda yang melakukan atau terkena perbuatan. Kemudian dilakukan penyusunan proposisi-proposisi itu berdasarkan urutan kronologisnya.

(10) Presiden menolak undangan Belanda.

- a. Kejadian : *Menolak* dan *undangan*
- b. Partisipan: *Presiden* dan *Belanda*
- c. Proposisi : *Presiden menolak* dan *Belanda mengundang*
- d. Susunan : *Belanda mengundang sebelum Presiden menolak*.

Contoh (10a)—(10d) di atas menunjukkan cara penandaan proposisi kejadian.

Penjelasan mengenai bagaimana mengurai proposisi di atas akan diterapkan sebagai alat analisis dalam penelitian ini, yaitu untuk menguraikan elemen argumen *claim* dan *stated reason* yang merupakan dua proposisi makro yang menunjukkan hubungan sebab-akibat.

Jika proposisi-proposisi merupakan balok-balok yang membangun wacana, koherensi menjadi perekat balok-balok tersebut (Renkema, 2004: 108). Dengan kata lain, koherensi menghubungkan kalimat-kalimat sehingga hubungan antarkalimat itu membawa makna. Renkema (2004:108—109) mengemukakan dua tipe hubungan dalam koherensi, yaitu hubungan penambahan (*additive relation*) dan hubungan kausal (*causal relation*).

Hubungan penambahan dapat diamati melalui konjungsi antarkalimat, seperti *dan*, *atau*, *tetapi*, atau dapat pula dalam bentuk yang ekuivalen dengan hubungan koordinasi tersebut. Salah satu contohnya adalah sebagai berikut.

- (11) Seratus hari pertama memang tak cukup buat menghakimi pemerintahan yang masih akan berkuasa sampai 2014. *Tapi* pada masa “pembuka” ini, perlu dikatakan bahwa Presiden Yudhoyono belum memberikan sesuatu yang membuat publik optimis akan keberhasilan seluruh programnya. (*TEMPO*, 25 Januari 2010).

Contoh (11) menunjukkan adanya hubungan penambahan dengan konjungsi *tapi* yang eksplisit.

Hubungan kausal dapat diartikan sebagai sebuah implikasi antara apa yang diungkapkan dalam kalimat pertama dan kedua. Hubungan kausal dapat pula dimaknai sebagai hubungan yang bertalian dengan sebab-akibat. Ada tujuh macam hubungan kausal sebagai berikut.

- (1) Sebab (*cause*): mengindikasikan kondisi di luar kemauan.

Contoh: *Presiden dan Wakil Presiden tidak memiliki kantor eksekutif yang kuat dan kredibel. Presiden hanya memiliki lingkaran yang bising.*

- (2) Alasan (*reason*): mengindikasikan kehadiran aspek kemauan.

Contoh: *Presiden sedang “mengerem” kerja penegak hukum. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan aparat penegak hukum.*

- (3) Maksud (*means*): mengindikasikan pemanfaatan untuk mencapai kemauan.

Contoh: *Menghadirkan kerbau di Bundaran HI tidak menurunkan pemerintah yang berkuasa. Menghadirkan kerbau hanya agar diperhatikan oleh pemerintah.*

- (4) Konsekuensi (*consequence*): mengindikasikan konsekuensi yang harus dijalani.

Contoh: *Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertanggung jawab dalam kebijakan penyelamatan Bank Century. Presiden bertanggung jawab atas semua kebijakan eksekutif.*

- (5) Tujuan (*purpose*): mengindikasikan konsekuensi kehendak.

Contoh: *Presiden mengangkat staf khusus. Presiden dapat memfungsikan staf khusus untuk mengatasi kelembaman dan resistansi para birokrat dalam menjalankan kebijakan pemerintah.*

- (6) Kondisi (*condition*): mengindikasikan syarat untuk sebuah kemungkinan.

Contoh: *Ini merupakan gugatan perdata. Proses penangkapan dan penahanan tidak ada.*

- (7) Pemakluman (*concession*): mengindikasikan kondisi yang tidak berpengaruh satu dengan yang lain.

Contoh: *Postur politik Yudhoyono sesungguhnya amat meyakinkan. Yudhoyono gagal mendayagunakan potensial yang sudah dalam genggaman.*

Hal-hal yang dijelaskan berkaitan dengan koherensi hubungan kausal dimanfaatkan dalam penelitian ini untuk melihat hubungan antara elemen argumen *claim* dan *stated reason*.

2.2.7 Kohesi

Salah satu karakteristik penting dalam sebuah wacana adalah kohesi (de Beaugrande dalam Renkema, 2004:49--51). Kohesi adalah hubungan semantis yang merujuk pada relasi makna yang muncul di dalam teks. Kohesi terjadi di mana interpretasi dari beberapa elemen di dalam wacana bergantung pada elemen yang lain (Halliday dan Hasan, 1976:4). Ada lima jenis kohesi yaitu substitusi, elipsis, referensi, konjungsi, dan kohesi leksikal.

Menurut Halliday (dalam Renkema, 2004:103—106), substitusi adalah penggantian kata, kelompok kata, atau bagian kalimat dengan kata “*dummy*”. Bentuk tersebut dapat diisi berdasarkan pada kata, kelompok kata, atau bagian kalimat yang ada di awal. Kata, kelompok kata, atau bagian kalimat tersebut dapat berbentuk nomina, verba, atau klausa. Contohnya adalah sebagai berikut.

- (12) a. Dalam pidatonya ketika menunda kunjungan ke Negeri Belanda pada 5 Oktober lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan: akhir-

akhir ini **ada gerakan yang mengajukan persoalan hak asasi manusia ke pengadilan Den Haag, dan menuntut agar Presiden RI ditangkap.**

- b. **Mereka** mengaku dirinya bagian dari Republik Maluku Selatan (RMS).
(*TEMPO*, 11 Oktober 2010)

Bagian kalimat (12a), yaitu klausa *ada gerakan yang mengajukan persoalan hak asasi manusia ke pengadilan Den Haag, dan menuntut agar Presiden RI ditangkap* digantikan dengan kata *mereka* pada (12b).

Elipsis adalah penghapusan kata atau bagian dari sebuah kalimat. Elipsis disebut pula dengan substitusi *zero*. Kata atau bagian kata yang dihapus dapat berupa nomina, verba, atau klausa elipsis. Contohnya adalah sebagai berikut.

- (13) a. Dalam setahun terakhir, publik seolah terbelah **dalam menyikapi kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ...**

- b. Belahan yang kedua \emptyset , dalam proporsi yang lebih kecil di media massa, juga muncul.

(*TEMPO*, 25 Oktober 2010)

Bagian kalimat (13a), yaitu klausa elipsis *dalam menyikapi kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono* tidak ditampilkan (ditandai dengan ' \emptyset ') dalam kalimat (13b).

Referensi berkaitan dengan hubungan antara elemen sebuah wacana dengan elemen lain yang mendahului atau yang mengikutinya dalam wacana yang sama. Pada umumnya, kata "*dummy*" di sini adalah pronomina.

- (14) a. Secara potensial, postur politik **Yudhoyono** sesungguhnya amat meyakinkan.

- b. **Ia** sukses mendongkrak suara Partai Demokrat nyaris tiga kali lipat dari Pemilihan Umum 2004 ke Pemilu 2009.

(*TEMPO*, 25 Oktober 2010)

Yudhoyono pada (14a) digantikan dengan pronomina *ia* dalam kalimat (14b).

Konjungsi merupakan hubungan yang menunjukkan bagaimana kalimat atau klausa berkaitan dengan bagian kalimat yang mendahului atau yang mengikutinya. Terdapat tiga jenis konjungsi, yaitu penggabungan, temporal, dan kausal. Salah satu contohnya adalah sebagai berikut.

- (15) Keterbalikan persepsi elite dan persepsi publik ini tidak mesti berarti bahwa terjadi diskoneksi antara elite dan publik **karena** ketidakpuasan di tingkat elite memiliki resonansi di tingkat publik.

(*TEMPO*, 25 Oktober 2010)

Dalam kalimat (15) tampak keterkaitan dua klausa dihubungkan dengan penggunaan konjungsi kausalitas, yaitu *karena*.

Kohesi leksikal merupakan hubungan antara nomina, verba, adjektiva, dan adverbial yang digunakan dalam segmen-segmen wacana. Terdapat dua tipe kohesi leksikal, yaitu reiterasi dan kolokasi. Reiterasi meliputi repetisi, sinonim, hiponim atau hipernim, meronim, dan antonim. Contohnya adalah sebagai berikut.

- (16) a. Bank Indonesia pernah mengeluarkan **Surat Keputusan Direksi** Nomor 31/32/KEP/DIR pada 29 Mei 1998 tentang penjaminan atas simpanan pihak ketiga dan pasar uang antarbank.
 b. Dalam **surat keputusan** itu disebutkan bank diperkenankan memberikan honor setelah menerima simpanan pihak ketiga.
 (TEMPO, 1 Februari 2010)

Kalimat (16) merupakan contoh kohesi leksikal-repetisi. Frasa nomina *surat keputusan* pada (16b) merujuk pada *Surat Keputusan Direksi* dalam kalimat (16a).

- (17) a. Nasib Oliver belum seberapa dibandingkan dengan penderitaan **Ardiansyah**.
 b. **Pengamen berusia sembilan tahun yang berkeliaran di jalanan Jakarta itu** tak cuma harus menghadapi orang dewasa yang culas, tapi juga monster jalanan yang mengerikan: penjahat seksual yang tak kenal belas kasihan.
 (TEMPO, 25 Januari 2010)

Kalimat (17) merupakan contoh kohesi leksikal-sinonim. Nomina *Ardiansyah* pada (17a) disinonimkan dengan *pengamen berusia sembilan tahun yang berkeliaran di jalanan Jakarta* dalam kalimat (17b), yang merupakan status Ardiansyah.

- (18) a. Pada zaman reformasi ini, seharusnya Presiden tak usah repot-repot memberi angin bagi para **kepala daerah**.
 b. Adalah gejala positif manakala **bupati, wali kota, hingga gubernur** yang diduga korup kini tak bisa lagi main mata dengan aparat.
 (TEMPO, 25 Januari 2010)

Kalimat (18) merupakan contoh kohesi leksikal-hiponim, yaitu tampak pada penggunaan frasa nomina *kepala daerah* pada (18a) yang kemudian dijabarkan dengan *bupati, wali kota, dan gubernur* dalam kalimat (18b).

- (19) a. Pria yang tengah diburu oleh pengadilan pidana internasional atas kejahatan perang di wilayah Darfur Barat itu lolos dari hantaman **sepatu**.
 b. Dalam budaya Arab, menunjukkan **sol sepatu** saja kepada seseorang merupakan tindakan penghinaan.
 (TEMPO, 1 Februari 2010)

Kalimat (19) merupakan contoh kohesi leksikal-meronim. *Sol sepatu* dalam kalimat (19b) merupakan bagian dari *sepatu* pada (19a).

- (20) a. Tak hanya **pebisnis domestik** yang ia layani.
 b. Beberapa tahun terakhir Zainul kerap memfasilitasi **usahawan asing** yang datang ke Kotabaru.
 (TEMPO, 1 Februari 2010)

Kalimat (20) merupakan contoh kohesi leksikal-antonim. *Pebisnis domestik* dalam kalimat (20a) merupakan antonim dari *usahawan asing* dalam kalimat (20b).

Tipe kohesi leksikal lainnya, yaitu kolokasi, menekankan pada hubungan antara kata-kata atas dasar hubungan selingkung, misalnya kata-kata *kongres* dan *politikus* atau *sekolah* dan *belajar*. Berikut salah satu contohnya.

- (21) a. Yang kemudian tampak bukan hanya menyiratkan betapa fasihnya bangsa ini menggunakan **kekerasan** untuk menyelesaikan aneka persoalan bersahaja.
 b. Sebab, biasanya, **bentrokan** berdarah seperti ini bertolak dari persoalan sepele di antara dua individu.
 (TEMPO, 4 Oktober 2010)

Kata *kekerasan* pada (21a) dan *bentrokan* pada (21b) di atas mencerminkan kata-kata yang selingkung.

2.2.7.1 Kohesi dalam Elemen Argumen

Kohesi menghubungkan bagian tertentu dari argumen yang telah berbentuk pola. Pola argumen berisi elemen-elemen argumen yang masing-masing tidak berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan. Hubungan itu terjadi antartopik, antartopik dan komen, atau antarkomen dan komen dalam tiap-tiap elemen argumen. Contoh di bawah ini menggambarkan hal tersebut.

- (22) a. *Claim:* Jangan sampai Presiden disangka sedang "mengerem" kerja penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi.

Stated Reason: (Karena) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan aparat penegak hukum agar tak asal menangkap dan menahan kepala daerah yang tersandung kasus hukum.

- b. *Ground:* (1) Sudah banyak pejabat daerah yang dimintai keterangan penyidik, menjadi saksi, berstatus tersangka, terdakwa, dan tak sedikit pula yang sampai dipenjarakan. (2) Sampai tahun lalu, sedikitnya ada 50-an bupati rawan perkara yang dikategorikan kejahatan luar biasa ini.

- c. *Warrant*: Letak masalah justru pada tren perbuatan pidana kepala daerah yang semakin menjadi-jadi, bukan buruknya kinerja aparat penegak hukum.
- d. *Backing*: (1) Badan Pemeriksa Keuangan mengumumkan dana yang digelontorkan ke daerah umumnya tak dilaporkan secara transparan dan akuntabel. (2) Laporan keuangan daerah yang mendapat opini dengan penilaian tidak wajar meningkat tajam dari 10 daerah (2004) menjadi 59 daerah pada 2007. (3) Ada 157 daerah yang pengelolaan keuangannya dinilai membahayakan, yang artinya terbuka peluang terjadi pidana korupsi.
- e. *Qualifier*: Mestinya Presiden tegas saja mengatakan: kalau tak mau berurusan dengan aparat, tak mau ditahan apalagi dipenjarakan, ya, jangan coba-coba korupsi.
- f. *Rebuttal*: Namun membuka celah sejak awal bahwa para petinggi daerah itu tak perlu ditahan jelas merupakan kemunduran.

(Elemen-elemen argumen dalam “Jangan Korupsi Bila Menolak Penjara”, *TEMPO*, 25 Januari 2010.)

Topik dalam *claim* dan topik dalam *stated reason*, yaitu *Presiden* dan *Presiden Susilo Bambang Yudhoyono* terikat oleh hubungan kohesi referensi. Hubungan kohesi leksikal-hiponim mengikat komen dalam *stated reason* dan topik dalam *ground* (1), yaitu *kepala daerah* dan *pejabat daerah*. Kohesi leksikal hiponim juga mengikat topik dalam *ground* (1) dan bagian dari topik dalam *ground* (2), yaitu *pejabat daerah* dan *bupati*.

Bagian dari komen dalam *warrant*, yaitu *kinerja aparat penegak hukum*, dan bagian dari komen dalam *claim*, yaitu *kerja penegak hukum*, terikat dalam hubungan kohesi leksikal-repetisi. Selain itu, bagian dari komen dalam *warrant* dan bagian dari komen dalam *stated reason*, yaitu *kepala daerah*, juga terikat dalam hubungan kohesi leksikal-repetisi.

Topik-komen dalam *backing* (1), yaitu *dana yang digelontorkan ke daerah umumnya tak dilaporkan secara transparan dan akuntabel*; topik-komen dalam

backing (2), yaitu laporan keuangan daerah yang mendapat opini dengan penilaian tidak wajar meningkat tajam dari 10 daerah (2004) menjadi 59 daerah pada 2007; serta topik-komen dalam *backing* (3), yaitu ada 157 daerah yang pengelolaan keuangannya dinilai membahayakan terikat dalam hubungan kohesi leksikal-hiponim dengan komen dalam *warrant*, justru pada tren perbuatan pidana kepala daerah yang semakin menjadi-jadi, tepatnya pada tren perbuatan pidana kepala daerah.

Topik dalam *qualifier* dan topik dalam *claim*, yaitu *Presidenterikat* dalam hubungan kohesi leksikal-repetisi. Kohesi gramatikal berupa substitusi *zero* mengikat topik dalam *rebuttal*, yaitu *Presiden* (yang ditandai dengan \emptyset) dan topik dalam *claim*, yaitu *Presiden*.

Sebagaimana contoh (22) dan penjelasan di atas, kohesi dalam hubungan topik-komen antarelemen argumen juga diamati dalam penelitian ini.

2.2.7.2 Kesatuan Argumen

Kesatuan argumen akan terbentuk setelah kohesi antarelemen argumen-argumen yang berpola teridentifikasi. Kesatuan argumen dari contoh identifikasi kohesi antarelemen argumen-argumen di atas adalah sebagai berikut.

Jangan sampai **Presiden** disangka sedang "mengerem" **kerja penegak hukum**, termasuk **Komisi Pemberantasan Korupsi**. (Karena) **Presiden Susilo Bambang Yudhoyono** mengingatkan aparat penegak hukum agar tak asal menangkap dan menahan **kepala daerah** yang tersandung kasus hukum. Sudah banyak **pejabat daerah** yang dimintai keterangan penyidik, menjadi saksi, berstatus tersangka, terdakwa, dan tak sedikit pula yang sampai dipenjarakan. Sampai tahun lalu, sedikitnya ada 50-an **bupati** rawan perkara yang dikategorikan kejahatan luar biasa ini. Letak masalah justru pada **tren perbuatan pidana kepala daerah** yang semakin menjadi-jadi, bukan buruknya **kinerja aparat penegak hukum**. **Badan Pemeriksa Keuangan** mengumumkan **dana yang digelontorkan ke daerah umumnya tak dilaporkan secara transparan dan akuntabel**. **Laporan keuangan daerah yang mendapat opini dengan penilaian tidak wajar meningkat tajam dari 10 daerah (2004) menjadi 59 daerah pada 2007**. **Ada 157 daerah yang pengelolaan keuangannya dinilai membahayakan**, yang artinya terbuka peluang terjadi pidana korupsi. Namun, \emptyset membuka celah sejak awal bahwa para petinggi daerah itu tak perlu ditahan jelas merupakan kemunduran. Mestinya **Presiden** tegas saja mengatakan: kalau tak mau berurusan dengan aparat, tak mau ditahan apalagi dipenjarakan, ya, jangan coba-coba korupsi.

Keterangan:

- ① : Kohesi Referensi
- ② : Kohesi Leksikal Hiponim
- ③ : Kohesi Leksikal Hiponim
- ④ : Kohesi Leksikal Repetisi
- ⑤ : Kohesi Leksikal Repetisi

- 6 : Kohesi Leksikal Hiponim
- 7 : Kohesi Leksikal Repetisi
- 8 : Kohesi Elipsis

Kesatuan argumen seperti tercantum di atas ditampilkan pada akhir analisis tiap-tiap teks opini. Dengan demikian, akan tampak bagaimana elemen-elemen argumen dalam argumen yang berpola itu membentuk kesatuan argumen.



BAB 3

ANALISIS DATA

3.1 Pengantar

Sebagaimana telah saya kemukakan pada bab sebelumnya, analisis data yang berupa teks opini (lihat hlm. 120—197) dilakukan menggunakan teori tentang argumen, yaitu teori argumen Toulmin (2003) yang dimodifikasi oleh Ramage dan Bean (1992). Elemen argumen berupa *claim* yang dilengkapi dengan *stated reason* ditemukan dengan cara mencari pernyataan berupa kesimpulan atau pernyataan tesis atau pernyataan utama yang diangkat dan diyakini kebenarannya oleh penulis dan menjadi sentral dalam tulisan, yang mengandung sebab-akibat. Perlu dicermati di sini bahwa hubungan sebab-akibat, selain dapat ditemukan berada dalam satu kalimat, dapat pula ditemukan dalam dua kalimat yang berbeda.

Selain itu, untuk memperjelas adanya hubungan sebab-akibat, elemen argumen *claim* yang dilengkapi dengan *stated reason* tersebut kemudian diuraikan menjadi proposisi-proposisi. Penguraian menjadi bentuk-bentuk proposisi itu akan menggunakan teori proposisi yang dikemukakan oleh Larson (1984) dan Renkema (2004).

Selanjutnya proposisi-proposisi yang terurai dari elemen argumen *claim* dan *stated reason* itu disusun sehingga menampakkan hubungan sebab-akibat. Penyusunan itu dilakukan dengan berpedoman pada teori makrostruktur yang dikemukakan oleh Van Dijk (1980).

Langkah terakhir berkaitan dengan elemen argumen *claim* dan *stated reason* adalah mengamati hubungan sebab-akibat antara proposisi *claim* dan *stated reason* yang telah tersusun tadi. Dalam langkah ini digunakan teori koherensi yang dikemukakan oleh Renkema (2004).

Setelah hubungan *claim* dan *stated reason* diyakini jelas menunjukkan sebab-akibat, barulah dilakukan penelusuran elemen-elemen argumen lainnya. Sebagaimana telah saya kemukakan pada bab sebelumnya, penelusuran itu dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut.

- (1) Apa bukti yang mendukung *claim*? (menemukan *ground*)

- (2) Apa yang menguatkan *claim* dan menghubungkan *claim* dan *stated reason*? (menemukan *warrant*)
- (3) Apa latar belakang *warrant*? (menemukan *backing*)
- (4) Adakah kondisi yang berupa kemungkinan perlawanan atau pengecualian? (menemukan *rebuttal*)
- (5) Adakah kondisi yang berupa syarat yang berkaitan dengan *claim*? (menemukan *qualifier*)

Kalimat jawaban dari pertanyaan (1) adalah *ground*; kalimat jawaban dari pertanyaan (2) adalah *warrant*; kalimat jawaban dari pertanyaan (3) adalah *backing*; kalimat jawaban dari pertanyaan (4) adalah *rebuttal*; dan kalimat jawaban dari pertanyaan (5) adalah *qualifier*.

Elemen-elemen argumen yang telah ditemukan dari tiap-tiap teks opini selanjutnya disusun dalam tabel susunan elemen argumen. Kemudian, analisis dilanjutkan dengan mengamati hubungan topik-komen dan kohesi antarelemen argumen. Penentuan topik-komen dilakukan berdasarkan teori topik yang dikemukakan Renkema (2004:90—93), bahwa topik kalimat pada umumnya cenderung berupa subjek, dan teori topik-komen yang dikemukakan Givon (1983:5), bahwa kalimat (atau klausa) terbagi dalam dua komponen, yaitu topik dan komen. Dalam hal ini, apabila sebuah kalimat terdiri atas dua klausa atau lebih, dilakukan pengamatan terhadap kemungkinan adanya dua topik-komen atau lebih. Setelah topik-komen dalam tiap-tiap kalimat atau klausa—dalam hal ini berarti dalam tiap-tiap elemen argumen--ditentukan, kohesi dalam hubungan topik-komen antarelemen argumen tersebut diamati. Pengamatan atas kohesi tersebut didasarkan pada teori kohesi yang dikemukakan oleh Halliday (dalam Renkema, 2004).

3.2 Susunan Elemen Argumen Teks Opini

“Jangan Korupsi Bila Menolak Penjara”

Penelusuran elemen argumen dalam teks ini menghasilkan temuan *claim* yang terpisah dari *stated reason*. Kalimat yang menunjukkan *claim* adalah kalimat ke-4 dalam paragraf ke-1, yaitu *jangan sampai Presiden disangka sedang "mengerem" kerja penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi* dan yang menunjukkan *stated reason* adalah kalimat ke-1 dalam paragraf ke-1, yaitu

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan aparat penegak hukum agar tak asal menangkap dan menahan kepala daerah yang tersandung kasus hukum. Keduanya membentuk pernyataan yang menunjukkan sebab-akibat sebagai berikut.

Claim: Jangan sampai Presiden disangka sedang "mengerem" kerja penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi.

Stated Reason: (Karena) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan aparat penegak hukum agar tak asal menangkap dan menahan kepala daerah yang tersandung kasus hukum.

Jika digabungkan, bentuk pernyataan sebab-akibat dari elemen argumen *claim* dan *stated reason* adalah sebagai berikut.

Jangan sampai Presiden disangka sedang "mengerem" kerja penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan aparat penegak hukum agar tak asal menangkap dan menahan kepala daerah yang tersandung kasus hukum.

Untuk memperjelas hubungan sebab-akibat di atas, elemen argumen *claim* dan *stated reason* diuraikan dalam bentuk proposisi-proposisi. Selanjutnya dilakukan pengamatan pada keduanya untuk melihat adanya koherensi kausal. Proposisi dalam elemen argumen *claim* adalah sebagai berikut.

- (1) (Orang) jangan sampai menyangka;
- (2) Presiden sedang "mengerem" kerja penegak hukum;
- (3) Presiden sedang "mengerem" Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sementara itu, proposisi dalam *stated reason* adalah sebagai berikut.

- (1) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan aparat penegak hukum;
- (2) Aparat penegak hukum tak asal menangkap kepala daerah;
- (3) Aparat penegak hukum tak asal menahan kepala daerah;
- (4) Kepala daerah yang tersandung kasus hukum.

Proposisi yang relevan di antara ketiga proposisi dalam *claim* adalah (2) *Presiden sedang "mengerem" kerja penegak hukum*. Proposisi yang relevan di antara keempat proposisi dalam *stated reason* adalah (1) *Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan aparat penegak hukum*. Koherensi keduanya tampak berupa hubungan alasan, yaitu hubungan yang mengindikasikan kehadiran aspek kemauan. Dalam hal ini penulis opini menangkap kehadiran aspek kemauan

Presiden dalam tindakan *mengingatkan aparat penegak hukum*. Hal itu kemudian diwujudkan oleh penulis opini dengan pilihan kata “mengerem” sebagai kesan penulis terhadap tindakan presiden mengingatkan aparat penegak hukum.

Setelah *claim* ditemukan, diajukan pertanyaan untuk mendapatkan *ground*, yaitu apa bukti kerja penegak hukum yang seolah “direm” oleh Presiden. Kalimat yang menunjukkan jawaban dari pertanyaan itu adalah kalimat ke-3 dan kalimat ke-4 dalam paragraf ke-3, yaitu *sudah banyak pejabat daerah yang dimintai keterangan penyidik, menjadi saksi, berstatus tersangka, terdakwa, dan tak sedikit pula yang sampai dipenjarakan dan sampai tahun lalu, sedikitnya ada 50-an bupati rawan perkara yang dikategorikan kejahatan luar biasa ini*.

Setelah *ground* ditemukan, diajukan pertanyaan untuk mendapatkan *warrant*, yaitu apa yang menguatkan kalimat *jangan sampai Presiden disangka sedang "mengerem" kerja penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi* dan menghubungkan kalimat tersebut dengan kalimat *Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan aparat penegak hukum agar tak asal menangkap dan menahan kepala daerah yang tersandung kasus hukum*. Kalimat yang merupakan jawaban dari pertanyaan di atas adalah kalimat ke-2 dalam paragraf ke-2, yaitu *letak masalah justru pada tren perbuatan pidana kepala daerah yang semakin menjadi-jadi, bukan buruknya kinerja aparat penegak hukum*.

Selanjutnya, untuk menemukan *backing*, diajukan pertanyaan, yaitu apa yang melatarbelakangi kalimat *letak masalah justru pada tren perbuatan pidana kepala daerah yang semakin menjadi-jadi, bukan buruknya kinerja aparat penegak hukum*. Jawaban pertanyaan itu adalah kalimat ke-2, kalimat ke-3, dan kalimat ke-4 dalam paragraf ke-7, yaitu *Badan Pemeriksa Keuangan mengumumkan dana yang digelontorkan ke daerah umumnya tak dilaporkan secara transparan dan akuntabel; laporan keuangan daerah yang mendapat opini dengan penilaian tidak wajar meningkat tajam dari 10 daerah (2004) menjadi 59 daerah pada 2007; dan ada 157 daerah yang pengelolaan keuangannya dinilai membahayakan, yang artinya terbuka peluang terjadi pidana korupsi*.

Setelah elemen-elemen argumen seperti *claim*, *ground*, *warrant* dan *backing* ditemukan, pertanyaan untuk mendapatkan elemen *rebuttal* adalah adakah kondisi yang berupa kemungkinan pengecualian atau perlawanan.

Jawaban pertanyaan tersebut adalah kalimat ke-2 dalam paragraf ke-5, yaitu *namun membuka celah sejak awal bahwa para petinggi daerah itu tak perlu ditahan jelas merupakan kemunduran*. Dalam hal ini, penulis opini menggunakan kata *namun* untuk menandai perlawanan tersebut.

Di samping itu, untuk mendapatkan elemen *qualifier*, diajukan pertanyaan, yaitu adakah kondisi yang berupa syarat yang berkaitan dengan *claim*. Jawabannya adalah kalimat ke-3 dalam paragraf ke-5, yaitu *mestinya Presiden tegas saja mengatakan: kalau tak mau berurusan dengan aparat, tak mau ditahan apalagi dipenjarakan, ya, jangan coba-coba korupsi*. Penulis opini tampak menggunakan modalitas *mestinya* dan menguatkannya dengan klausa yang didahului dengan *kalau* pada *kalau tak mau berurusan dengan aparat...* sehingga secara keseluruhan kalimat tersebut mencerminkan sebuah kondisi persyaratan.

Tabel 1.3 Susunan Elemen Argumen Teks JKBMP

| Judul Opini | Elemen Argumen |
|----------------|---|
| JKBMP | <p><i>Claim:</i> (Paragraf ke-1, kalimat ke-4)</p> <p>Jangan sampai Presiden disangka sedang "mengerem" kerja penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p style="text-align: right;"><i>Stated Reason</i> (Paragraf ke-1, kalimat ke-1)</p> <p>(Karena) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan aparat penegak hukum agar tak asal menangkap dan menahan kepala daerah yang tersandung kasus hukum.</p> <p><i>Ground:</i> (Paragraf ke-3, kalimat ke-3 dan kalimat ke-4)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah banyak pejabat daerah yang dimintai keterangan penyidik, menjadi saksi, berstatus tersangka, terdakwa, dan tak sedikit pula yang sampai dipenjarakan. 2. Sampai tahun lalu, sedikitnya ada 50-an bupati rawan perkara yang dikategorikan kejahatan luar biasa ini. |
| | <p><i>Warrant:</i> (Paragraf ke-2, kalimat ke-2)</p> <p>Letak masalah justru pada tren perbuatan pidana kepala daerah yang semakin menjadi-jadi, bukan buruknya kinerja aparat penegak hukum</p> |

| |
|---|
| <p><i>Backing:</i> (Paragraf ke-7, kalimat ke-2, kalimat ke-3, dan kalimat ke-4)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Pemeriksa Keuangan mengumumkan dana yang digelontorkan ke daerah umumnya tak dilaporkan secara transparan dan akuntabel 2. Laporan keuangan daerah yang mendapat opini dengan penilaian tidak wajar meningkat tajam dari 10 daerah (2004) menjadi 59 daerah pada 2007 3. Ada 157 daerah yang pengelolaan keuangannya dinilai membahayakan, yang artinya terbuka peluang terjadi pidana korupsi. |
| <p><i>Qualifier:</i> (Paragraf ke-5, kalimat ke-3)</p> <p>Mestinya Presiden tegas saja mengatakan: kalau tak mau berurusan dengan aparat, tak mau ditahan apalagi dipenjarakan, ya, jangan coba-coba korupsi.</p> |
| <p><i>Rebuttal:</i> (Paragraf ke-5 kalimat ke-2)</p> <p>Namun membuka celah sejak awal bahwa para petinggi daerah itu tak perlu ditahan jelas merupakan kemunduran.</p> |

3.2.1 Topik-Komen dalam Elemen Argumen

Dalam elemen argumen *claim*, *jangan sampai Presiden disangka sedang "mengerem" kerja penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi*, terdapat tiga topik dan komen karena elemen argumen tersebut terdiri atas tiga klausa. Topik-komen dalam klausa pertama adalah *Presiden* dan *jangan sampai disangka*; topik-komen dalam klausa kedua adalah *Presiden jangan sampai disangka* (lesap) dan *sedang "mengerem" kerja penegak hukum*; dan topik-komen dalam klausa ketiga adalah *Presiden* (lesap) dan *termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi*. Ada pun *stated reason*, *Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan aparat penegak hukum agar tak asal menangkap dan menahan kepala daerah yang tersandung kasus hukum*, yang terdiri atas tiga klausa, memiliki tiga topik-komen. Topik-komen dalam klausa pertama adalah *Presiden Susilo Bambang Yudhoyono* dan *mengingatkan aparat penegak hukum*; topik dan komen dalam klausa kedua adalah *aparat penegak hukum* (lesap) dan *tak asal menangkap dan menahan*; sedangkan topik dan komen dalam klausa ketiga adalah *kepala daerah* dan *yang tersandung kasus hukum*.

Elemen argumen *ground* pertama, *sudah banyak pejabat daerah yang dimintai keterangan penyidik, menjadi saksi, berstatus tersangka, terdakwa, dan*

tak sedikit pula yang sampai dipenjarakan, terdiri atas lima klausa sehingga terdapat lima topik-komen dalam kalimat tersebut. Topik-komen pada klausa pertama adalah *pejabat daerah dan sudah banyak yang dimintai keterangan penyidik*; topik-komen pada klausa kedua adalah *pejabat daerah (lesap) dan menjadi saksi*; topik-komen pada klausa ketiga adalah *pejabat daerah (lesap) dan berstatus tersangka*; topik-komen pada klausa keempat adalah *pejabat daerah (lesap) dan terdakwa*; dan topik-komen pada klausa kelima adalah *pejabat daerah (lesap) dan tak sedikit pula yang sampai dipenjarakan*.

Sementara itu, elemen argumen *ground* kedua, *sampai tahun lalu, sedikitnya ada 50-an bupati rawan perkara yang dikategorikan kejahatan luar biasa ini*, terdiri atas dua klausa sehingga terdapat dua topik-komen dalam kalimat tersebut. Topik-komen pada klausa pertama adalah *sedikitnya ada 50-an bupati dan sampai tahun lalu rawan* serta pada klausa kedua adalah *perkara dan yang dikategorikan kejahatan luar biasa ini*.

Elemen argumen *warrant*, *letak masalah justru pada tren pembuatan pidana kepala daerah yang semakin menjadi-jadi, bukan buruknya kinerja aparat penegak hukum*, terdiri atas dua klausa sehingga dalam kalimat tersebut ada dua topik-komen. Topik-komen pada klausa pertama adalah *letak masalah dan justru pada tren pembuatan pidana kepala daerah yang semakin menjadi-jadi*, sedangkan topik-komen pada klausa kedua adalah *letak masalah (lesap) dan bukan buruknya kinerja aparat penegak hukum*.

Elemen argumen *backing* pertama, *Badan Pemeriksa Keuangan mengumumkan dana yang digelontorkan ke daerah umumnya tak dilaporkan secara transparan dan akuntabel*, terdiri atas tiga klausa sehingga memiliki tiga topik-komen. Topik-komen dalam klausa pertama adalah *Badan Pemeriksa Keuangan dan mengumumkan*; topik-komen dalam klausa kedua adalah *dana dan yang digelontorkan ke daerah*; sedangkan topik-komen dalam klausa ketiga adalah *dana yang digelontorkan ke daerah dan umumnya tak dilaporkan secara transparan dan akuntabel*.

Elemen argumen *backing* kedua, *laporan keuangan daerah yang mendapat opini dengan penilaian tidak wajar meningkat tajam dari 10 daerah (2004) menjadi 59 daerah pada 2007*, mengandung dua klausa sehingga dalam elemen argumen tersebut terdapat dua topik-komen. Topik-komen dalam klausa

pertama adalah *laporan keuangan daerah* dan yang mendapat opini dengan *penilaian tidak wajar*, sedangkan topik-komen dalam klausa kedua adalah *laporan keuangan daerah yang mendapat opini dengan penilaian tidak wajar dan meningkat tajam dari 10 daerah (2004) menjadi 59 daerah pada 2007*.

Elemen argumen *backing* ketiga, *ada 157 daerah yang pengelolaan keuangannya dinilai membahayakan, yang artinya terbuka peluang terjadi pidana korupsi*, terdiri atas dua klausa yang masing-masing memiliki topik-komen yang berbeda. Topik-komen dalam klausa pertama adalah *ada 157 daerah dan yang pengelolaan keuangannya dinilai membahayakan*; sedangkan topik-komen dalam klausa kedua adalah *yang artinya dan terbuka peluang terjadi pidana korupsi*.

Elemen argumen *qualifier*, mestinya *Presiden tegas saja mengatakan: kalau tak mau berurusan dengan aparat, tak mau ditahan apalagi dipenjarakan, ya, jangan coba-coba korupsi*, terdiri atas empat klausa sehingga memiliki empat topik-komen. Topik dan komen pada klausa pertama adalah *Presiden dan mestinya tegas saja mengatakan*; topik dan komen pada klausa kedua adalah *pejabat daerah (lesap) dan kalau tak mau berurusan dengan aparat*; topik dan komen pada klausa ketiga adalah *pejabat daerah (lesap) dan tak mau ditahan apalagi dipenjarakan*; serta topik-komen pada klausa keempat adalah *pejabat daerah (lesap) dan ya, jangan coba-coba korupsi*.

Elemen argumen *rebuttal*, *namun membuka celah sejak awal bahwa para petinggi daerah itu tak perlu ditahan jelas merupakan kemunduran*, merupakan kalimat berklausa tiga sehingga mengandung tiga topik-komen. Topik-komen dalam klausa pertama adalah *Presiden (lesap) dan membuka celah sejak awal*; topik-komen dalam klausa kedua adalah *para petinggi daerah itu dan tak perlu ditahan*; dan topik-komen dalam klausa ketiga adalah *Presiden (lesap) membuka celah sejak awal bahwa para petinggi daerah itu tak perlu ditahan dan jelas merupakan kemunduran*.

Tabel 2.3 Topik-Komen dalam Elemen Argumen Teks JKBM

| Judul Opini | Elemen Argumen |
|-------------|---|
| BMP | <p>Claim: (Paragraf ke-1, kalimat ke-4)</p> <p>Jangan sampai Presiden disangka sedang "mengerem" kerja penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden 2. Ø (jangan sampai Presiden disangka) 3. Ø (Presiden mengerem) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jangan sampai disangka 2. Sedang "mengerem" kerja penegak hukum 3. Termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi <p style="text-align: right;">Stated Reason (Paragraf ke-1, kalimat ke-1)</p> <p>(Karena) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan aparat penegak hukum agar tak asal menangkap dan menahan kepala daerah yang tersandung kasus hukum.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden Susilo Bambang Yudoyono 2. ø (aparat penegak hukum) 3. Kepala daerah <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengingatkan aparat penegak hukum 2. Agar tak asal menangkap dan menahan 3. Yang tersandung kasus hukum |
| | <p>Ground: (Paragraf ke-3, kalimat ke-3 dan kalimat ke-4)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah banyak pejabat daerah yang dimintai keterangan penyidik, menjadi saksi, berstatus tersangka, terdakwa, dan tak sedikit pula yang sampai dipenjarakan. <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat daerah 2. Ø (pejabat daerah) 3. Ø (pejabat daerah) 4. Ø (pejabat daerah) 5. Ø (pejabat daerah) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah banyak yang dimintai keterangan penyidik 2. Menjadi saksi 3. Berstatus tersangka 4. Terdakwa 5. Tak sedikit pula yang sampai dipenjarakan. <ol style="list-style-type: none"> 2. Sampai tahun lalu, sedikitnya ada 50-an bupati rawan perkara yang dikategorikan kejahatan luar biasa ini. |

| | |
|--|--|
| | <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati rawan perkara yang dikategorikan kejahatan luar biasa ini 2. Ø (perkara) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sampai tahun lalu, sedikitnya ada 50-an 2. Yang dikategorikan kejahatan luar biasa ini |
| | <p>Warrant: (Paragraf ke-2, kalimat ke-2)</p> <p>Letak masalah justru pada tren perbuatan pidana kepala daerah yang semakin menjadi-jadi, bukan buruknya kinerja aparat penegak hukum.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Letak masalah 2. Ø (letak masalah) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Justru pada tren perbuatan pidana kepala daerah yang semakin menjadi-jadi 2. Bukan buruknya kinerja aparat penegak hukum |
| | <p>Backing: (Paragraf ke-7, kalimat ke-2, kalimat ke-3, dan kalimat ke-4)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Pemeriksa Keuangan mengumumkan dana yang digelontorkan ke daerah umumnya tak dilaporkan secara transparan dan akuntabel <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Pemeriksa Keuangan 2. Dana 3. Ø (dana yang digelontorkan ke daerah) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumumkan 2. Yang digelontorkan ke daerah 3. Umumnya tak dilaporkan secara transparan dan akuntabel <ol style="list-style-type: none"> 2. Laporan keuangan daerah yang mendapat opini dengan penilaian tidak wajar meningkat tajam dari 10 daerah (2004) menjadi 59 daerah pada 2007 <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan keuangan daerah 2. Ø (laporan keuangan daerah mendapat opini dengan penilaian tidak wajar) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang mendapat opini dengan penilaian tidak wajar 2. Meningkat tajam dari 10 daerah (2004) menjadi 59 daerah pada 2007 <ol style="list-style-type: none"> 3. Ada 157 daerah yang pengelolaan keuangannya dinilai membahayakan, yang artinya terbuka peluang terjadi pidana korupsi. <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada 157 daerah 2. Yang artinya |

| |
|--|
| <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang pengelolaan keuangannya dinilai membahayakan 2. Terbuka peluang terjadi pidana korupsi |
| <p>Qualifier: (Paragraf ke-8, kalimat ke-1)</p> <p>Mestinya Presiden tegas saja mengatakan: kalau tak mau berurusan dengan aparat, tak mau ditahan apalagi dipenjarakan, ya, jangan coba-coba korupsi.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden 2. Ø (pejabat daerah) 3. Ø (pejabat daerah) 4. Ø (pejabat daerah) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mestinya tegas saja mengatakan 2. Kalau tak mau berurusan dengan aparat 3. Tak mau ditahan apalagi dipenjarakan 4. Ya, jangan coba-coba korupsi |
| <p>Rebuttal: (Paragraf ke-5 kalimat ke-2)</p> <p>Namun membuka celah sejak awal bahwa para petinggi daerah itu tak perlu ditahan jelas merupakan kemunduran.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ø (presiden) 2. Para petinggi daerah itu 3. Ø ((presiden) membuka celah sejak awal bahwa para petinggi daerah itu tak perlu ditahan) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka celah sejak awal 2. Tak perlu ditahan 3. Jelas merupakan kemunduran |

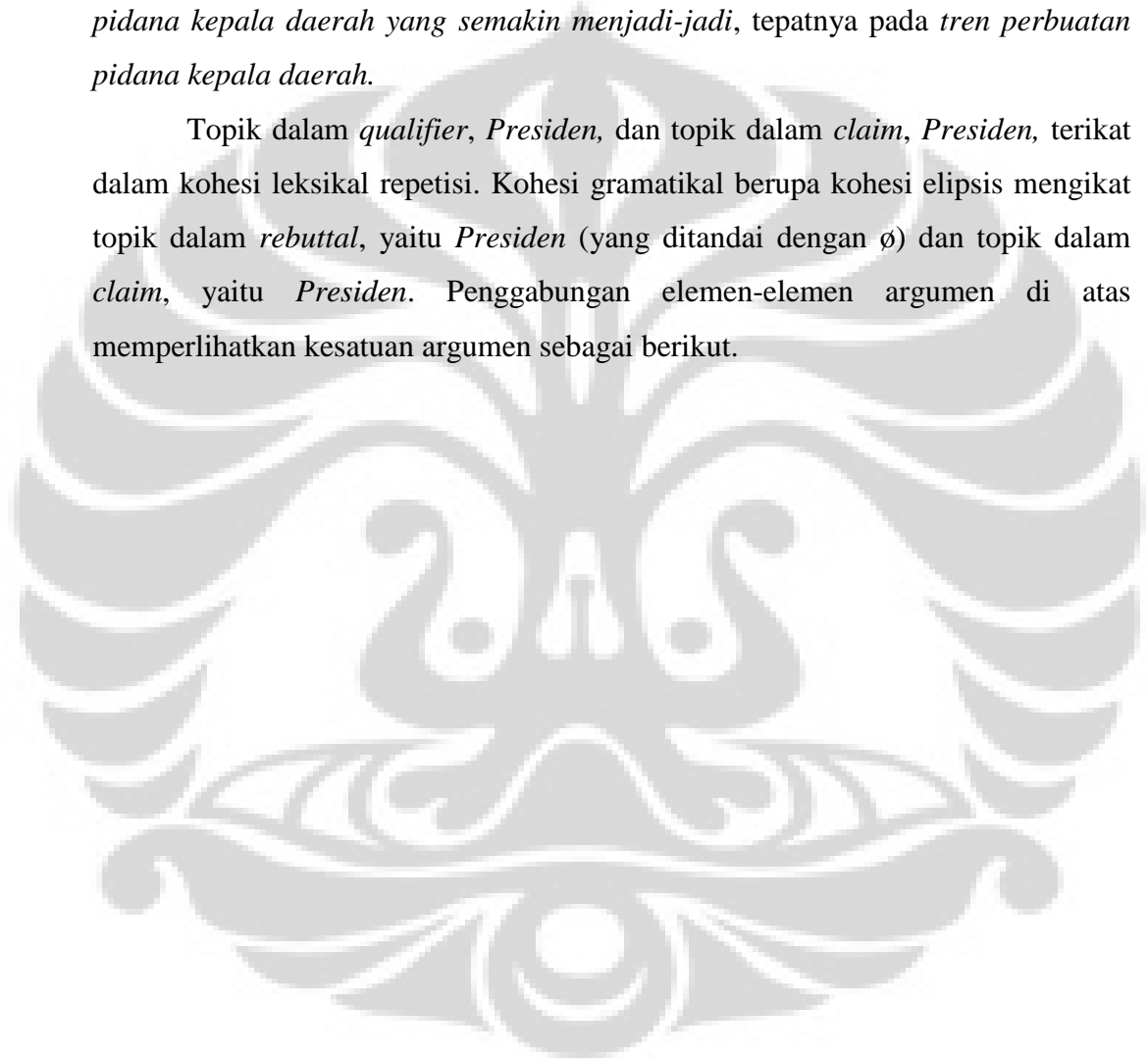
3.2.2 Hubungan Topik-Komen Antarelemen Argumen

Topik dalam *claim* dan topik dalam *stated reason*, yaitu *Presiden* dan *Presiden Susilo Bambang Yudhoyono* terikat oleh hubungan kohesi referensi. Hubungan kohesi leksikal hiponim mengikat komen dalam *stated reason* dan topik dalam *ground* (1), yaitu *kepala daerah* dan *pejabat daerah*. kohesi leksikal hiponim juga mengikat topik dalam *ground* (1) dan bagian dari topik dalam *ground* (2), yaitu *pejabat daerah* dan *bupati*.

Bagian dari komen dalam *warrant*, *kinerja aparat penegak hukum*, dan bagian dari komen dalam *claim*, *kerja penegak hukum*, terikat dalam hubungan kohesi leksikal repetisi. Bagian dari komen dalam *warrant* dan bagian dari komen dalam *stated reason*, yaitu *kepala daerah*, juga terikat dalam hubungan kohesi leksikal repetisi. Topik-komen dalam *backing* (1), *dana yang digelontorkan ke*

daerah umumnya tak dilaporkan secara transparan dan akuntabel; topik-komen dalam backing (2), laporan keuangan daerah yang mendapat opini dengan penilaian tidak wajar meningkat tajam dari 10 daerah (2004) menjadi 59 daerah pada 2007; serta topik-komen dalam backing (3), ada 157 daerah yang pengelolaan keuangannya dinilai membahayakan terikat hubungan kohesi leksikal hiponim dengan komen dalam warrant, justru pada tren perbuatan pidana kepala daerah yang semakin menjadi-jadi, tepatnya pada tren perbuatan pidana kepala daerah.

Topik dalam *qualifier, Presiden*, dan topik dalam *claim, Presiden*, terikat dalam kohesi leksikal repetisi. Kohesi gramatikal berupa kohesi elipsis mengikat topik dalam *rebuttal*, yaitu *Presiden* (yang ditandai dengan \emptyset) dan topik dalam *claim*, yaitu *Presiden*. Penggabungan elemen-elemen argumen di atas memperlihatkan kesatuan argumen sebagai berikut.



Jangan sampai **Presiden** disangka sedang "mengerem" **kerja penegak hukum**, termasuk **Komisi Pemberantasan Korupsi**. (Karena) **Presiden Susilo Bambang Yudhoyono** mengingatkan aparat penegak hukum agar tak asal menangkap dan menahan **kepala daerah** yang tersandung kasus hukum. Sudah banyak **pejabat daerah** yang dimintai keterangan penyidik, menjadi saksi, berstatus tersangka, terdakwa, dan tak sedikit pula yang sampai dipenjarakan. Sampai tahun lalu, sedikitnya ada 50-an **bupati** rawan perkara yang dikategorikan kejahatan luar biasa ini. Letak masalah justru pada **tren perbuatan pidana kepala daerah** yang semakin menjadi-jadi, bukan buruknya **kinerja aparat penegak hukum**. **Badan Pemeriksa Keuangan** mengumumkan **dana yang digelontorkan ke daerah umumnya tak dilaporkan secara transparan dan akuntabel**. **Laporan keuangan daerah yang mendapat opini dengan penilaian tidak wajar meningkat tajam dari 10 daerah (2004) menjadi 59 daerah pada 2007**. **Ada 157 daerah yang pengelolaan keuangannya dinilai membahayakan**, yang artinya terbuka peluang terjadi pidana korupsi. Namun, \emptyset membuka celah sejak awal bahwa para petinggi daerah itu tak perlu ditahan jelas merupakan kemunduran. Mestinya **Presiden** tegas saja mengatakan: kalau tak mau berurusan dengan aparat, tak mau ditahan apalagi dipenjarakan, ya, jangan coba-coba korupsi.

Bagan 1.3 Kesatuan Argumen Teks JKBM

Keterangan:

- 1 : Kohesi Referensi
- 2 : Kohesi Leksikal Hiponim
- 3 : Kohesi Leksikal Hiponim
- 4 : Kohesi Leksikal Repetisi
- 5 : Kohesi Leksikal Repetisi
- 6 : Kohesi Leksikal Hiponim

7 : Kohesi Leksikal Repetisi

8 : Kohesi Elipsis

3.3 Susunan Elemen Argumen Teks Opini “Seratus Hari Tak Bergigi”

Sama dengan teks opini 3.2 di atas, elemen argumen *claim* dalam teks opini “Seratus Hari Tak Bergigi” juga ditemukan terpisah dari *stated reason*. *Claim* dalam teks opini ini adalah kalimat ke-1 dalam paragraf ke-8, yaitu *seratus hari pertama memang tak cukup buat menghakimi pemerintahan yang masih akan berkuasa sampai 2014*, sedangkan *stated reason* dalam hal ini adalah kalimat ke-2 dalam paragraf ke-1, yaitu *jika efektivitas kerja pemerintah yang menjadi ukuran, harus dikatakan Yudhoyono mendapat rapor dengan angka merah*.

Keduanya membentuk pernyataan yang menunjukkan sebab-akibat sebagai berikut.

Claim: Seratus hari pertama memang tak cukup buat menghakimi pemerintahan yang masih akan berkuasa sampai 2014.

Stated Reason: (Karena) Jika efektivitas kerja pemerintah yang menjadi ukuran, harus dikatakan Yudhoyono mendapat rapor dengan angka merah.

Penggabungan keduanya dapat menghasilkan pernyataan sebab-akibat sebagai berikut.

Seratus hari pertama memang tak cukup buat menghakimi pemerintahan yang masih akan berkuasa sampai 2014 karena jika efektivitas kerja pemerintah yang menjadi ukuran, harus dikatakan Yudhoyono mendapat rapor dengan angka merah.

Untuk memperjelas hubungan sebab-akibat di atas, dilakukan penguraian proposisi dari keduanya. Proposisi-proposisi dalam elemen argumen *claim* adalah sebagai berikut.

- (1) Seratus hari pertama tak cukup;
- (2) (Orang) menghakimi pemerintah;
- (3) Pemerintah yang masih akan berkuasa sampai 2014.

Adapun dalam *stated reason* terkandung proposisi-proposisi berikut.

- (1) Jika efektivitas kerja pemerintah diukur;

- (2) (Orang) mengatakan;
- (3) Yudhoyono mendapat rapor;
- (4) Rapor Yudhoyono berangka merah.

Apabila proposisi-proposisi di atas dikonstruksi, terbentuk dua pernyataan yang mewakili *claim* dan *stated reason* berikut.

- (1) *Orang tidak dapat menghakimi pemerintah yang masih akan berkuasa sampai 2014 hanya dalam seratus hari pertamanya.*
- (2) *Orang mengatakan efektivitas kerja pemerintah mendapat angka merah.*

Koherensi kausal yang tercermin dari dua pernyataan itu adalah adanya hubungan konsekuensi, yaitu hubungan yang mengindikasikan konsekuensi yang harus dijalani. Artinya, jika dilakukan penghakiman terhadap seratus hari pertama kerja pemerintah, konsekuensinya adalah efektivitas kerja pemerintah buruk.

Setelah *claim* ditemukan, diajukan pertanyaan untuk mendapatkan *ground*, yaitu apa bukti efektivitas kerja pemerintah Yudhoyono yang mendapat angka merah. Kalimat yang menunjukkan jawaban dari pertanyaan itu adalah kalimat ke-1, ke-2, dan ke-3 dalam paragraf ke-2, yaitu *angka merah itu berasal dari dua persoalan yang menguji kepemimpinan Yudhoyono dalam tiga bulan dan sepuluh hari belakangan ini; pertama, persetujuan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan kepolisian serta kejaksaan; dan kedua, penyelamatan Bank Century pada November 2008 yang dipersoalkan Dewan Perwakilan Rakyat setelah setahun "tenggelam".*

Setelah *ground* ditemukan, diajukan pertanyaan untuk mendapatkan *warrant*, yaitu apa yang menguatkan kalimat *seratus hari pertama memang tak cukup buat menghakimi pemerintahan yang masih akan berkuasa sampai 2014* dan menghubungkan kalimat tersebut dengan kalimat *jika efektivitas kerja pemerintah yang menjadi ukuran, harus dikatakan Yudhoyono mendapat rapor dengan angka merah*. Kalimat yang merupakan jawaban dari pertanyaan di atas adalah kalimat ke-1, paragraf ke-1, yaitu *pencanangan program seratus hari, yang tak diwajibkan aturan hukum mana pun di negeri ini, akhirnya menjadi barometer kinerja masa awal pemerintahan kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.*

Kemudian, untuk menemukan *backing*, diajukan pertanyaan, yaitu apa yang melatarbelakangi kalimat *pencanangan program seratus hari, yang tak*

diwajibkan aturan hukum mana pun di negeri ini, akhirnya menjadi barometer kinerja masa awal pemerintahan kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jawaban pertanyaan itu adalah kalimat ke-2 dan kalimat ke-3 dalam paragraf ke-6, yaitu *dalam rapat kabinet 5 November 2009, Presiden menetapkan Program Seratus Hari berisi 45 program dan 129 rencana aksi dan ia juga mengumumkan lima belas program pilihan yang wajib dilaksanakan, antara lain pemberantasan mafia hukum, revitalisasi industri pertahanan, penanggulangan terorisme, dan penanggulangan permasalahan listrik.*

Selanjutnya, pertanyaan untuk mendapatkan elemen *rebuttal* adalah adakah kondisi yang berupa kemungkinan pengecualian atau perlawanan. Jawaban pertanyaan tersebut adalah kalimat ke-3 dalam paragraf ke-8, yaitu *masih banyak waktu untuk mengejar "target" yang luput di seratus hari pertama, termasuk untuk memperbaiki efektivitas kerja pemerintah.* Dalam hal ini, penulis opini menggunakan klausa *masih banyak waktu untuk mengejar "target" yang luput di seratus hari pertama* untuk menandai kondisi pengecualian tersebut.

Terakhir, untuk mendapatkan elemen *qualifier*, diajukan pertanyaan, yaitu adakah kondisi yang berupa syarat yang berkaitan dengan *claim*. Jawabannya adalah kalimat ke-4 dalam paragraf ke-8, yaitu *asalkan, sikap kepemimpinan Presiden ikut berubah: lebih berani mengambil tindakan tegas di saat yang tepat.* Penulis opini tampak menggunakan kata *asalkan* sehingga secara keseluruhan kalimat tersebut mencerminkan sebuah kondisi persyaratan.

Tabel 3.3 Susunan Elemen Argumen Teks SHTB

| Judul Opini | Elemen Argumen |
|-------------|---|
| SHTB | <p><i>Claim:</i> (Paragraf ke-8, kalimat ke-1)</p> <p>Seratus hari pertama memang tak cukup buat menghakimi pemerintahan yang masih akan berkuasa sampai 2014.</p> <p style="text-align: right;"><i>Stated Reason</i> (Paragraf ke-1, kalimat ke-2)</p> <p>(Karena) Jika efektivitas kerja pemerintah yang menjadi ukuran, harus dikatakan Yudhoyono mendapat rapor dengan angka merah.</p> |

| | |
|---|---|
| | |
| <i>Ground:</i> (Paragraf ke-2, kalimat ke-1, ke-2, dan ke-3) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Angka merah itu berasal dari dua persoalan yang menguji kepemimpinan Yudhoyono dalam tiga bulan dan sepuluh hari belakangan ini. 2. Pertama, persetujuan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan kepolisian serta kejaksaan. 3. Kedua, penyelamatan Bank Century pada November 2008 yang dipersiapkan Dewan Perwakilan Rakyat setelah setahun "tenggelam". |
| <i>Warrant:</i> (Paragraf ke-1, kalimat ke-1) | Pencanangan program seratus hari, yang tak diwajibkan aturan hukum mana pun di negeri ini, akhirnya menjadi barometer kinerja masa awal pemerintahan kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. |
| <i>Backing:</i> (Paragraf ke-6, kalimat ke-2 dan kalimat ke-3) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam rapat kabinet 5 November 2009, Presiden menetapkan Program Seratus Hari berisi 45 program dan 129 rencana aksi. 2. Ia juga mengumumkan lima belas program pilihan yang wajib dilaksanakan, antara lain pemberantasan mafia hukum, revitalisasi industri pertahanan, penanggulangan terorisme, dan penanggulangan permasalahan listrik. |
| <i>Qualifier:</i> (Paragraf ke-8 kalimat ke-4) | Asalkan, sikap kepemimpinan Presiden ikut berubah: lebih berani mengambil tindakan tegas di saat yang tepat. |
| <i>Rebuttal:</i> (Paragraf ke-8 kalimat ke-3) | Masih banyak waktu untuk mengejar "target" yang luput di seratus hari pertama, termasuk untuk memperbaiki efektivitas kerja pemerintah. |

3.3.1 Topik-Komen dalam Elemen Argumen

Elemen argumen *claim*, *seratus hari pertama memang tak cukup buat menghakimi pemerintahan yang masih akan berkuasa*, mengandung dua topik-komen. Topik-komen yang pertama adalah *seratus hari pertama dan memang tak cukup buat menghakimi*, topik-komen yang kedua adalah *pemerintahan dan yang masih akan berkuasa*. Sementara itu, *stated reason*, *jika efektivitas kerja pemerintah yang menjadi ukuran, harus dikatakan Yudhoyono mendapat rapor dengan angka merah*, merupakan kalimat dengan dua klausa sehingga memiliki

dua topik-komen. Topik-komen dalam klausa pertama, *efektivitas kerja pemerintah yang menjadi ukuran*, adalah *efektivitas kerja pemerintah dan yang menjadi ukuran*, sedangkan dalam klausa kedua, *harus dikatakan Yudhoyono mendapat rapor dengan angka merah*, adalah *Yudhoyono dan harus dikatakan mendapat rapor dengan angka merah*.

Elemen argumen *ground* pertama, *angka merah itu berasal dari dua persoalan yang menguji kepemimpinan Yudhoyono dalam tiga bulan dan sepuluh hari belakangan ini*, terdiri atas dua klausa sehingga memiliki dua topik-komen. Topik-komen dalam klausa pertama adalah *angka merah itu dan berasal*, sedangkan topik-komen dalam klausa kedua adalah *dua persoalan dan yang menguji kepemimpinan Yudhoyono dalam tiga bulan dan sepuluh hari belakangan ini*.

Elemen argumen *ground* kedua, *pertama, persetujuan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan kepolisian serta kejaksaan*, terdiri atas dua klausa sehingga dalam kalimat tersebut terdapat dua topik-komen. Topik-komen dalam klausa pertama adalah *persoalan (lesap) dan pertama*, sedangkan topik-komen dalam klausa kedua adalah *Komisi Pemberantasan Korupsi dengan kepolisian serta kejaksaan dan persetujuan*.

Elemen argumen *ground* ketiga, *kedua, penyelamatan Bank Century pada November 2008 yang dipersoalkan Dewan Perwakilan Rakyat setelah setahun "tenggelam"*, terdiri atas dua klausa sehingga di dalam elemen argumen tersebut terdapat dua topik-komen. Topik-komen dalam klausa pertama adalah *persoalan (lesap) dan kedua*, sedangkan topik-komen dalam klausa kedua adalah *penyelamatan Bank Century pada November 2008 dan yang dipersoalkan Dewan Perwakilan Rakyat setelah setahun "tenggelam"*.

Elemen argumen *warrant*, *pencanangan program seratus hari, yang tak diwajibkan aturan hukum mana pun di negeri ini, akhirnya menjadi barometer kinerja masa awal pemerintahan kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono*, terdiri atas dua klausa sehingga dalam elemen argumen tersebut terdapat dua topik-komen. Topik-komen dalam klausa pertama adalah *pencanangan program seratus hari dan yang tak diwajibkan aturan hukum mana pun di negeri ini*, sedangkan topik-komen dalam klausa kedua adalah *pencanangan program seratus hari yang tak diwajibkan aturan hukum mana pun di negeri ini dan*

akhirnya menjadi barometer kinerja masa awal pemerintahan kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Elemen argumen *backing* pertama, dalam rapat kabinet 5 November 2009, Presiden menetapkan Program Seratus Hari berisi 45 program dan 129 rencana aksi, terdiri atas dua klausa sehingga dalam elemen argumen tersebut ada dua topik-komen. Topik-komen dalam klausa pertama adalah *Presiden* dan dalam rapat kabinet 5 November 2009, menetapkan, sedangkan topik-komen dalam klausa kedua adalah *Program Seratus Hari* dan berisi 45 program dan 129 rencana aksi.

Elemen argumen *backing* kedua, ia juga mengumumkan lima belas program pilihan yang wajib dilaksanakan, antara lain pemberantasan mafia hukum, revitalisasi industri pertahanan, penanggulangan terorisme, dan penanggulangan permasalahan listrik, juga merupakan kalimat yang terdiri atas tiga klausa sehingga dalam kalimat tersebut terdapat tiga topik-komen. Topik-komen dalam klausa pertama adalah *Ia* dan juga mengumumkan; topik-komen dalam klausa kedua adalah *lima belas program pilihan* dan yang wajib dilaksanakan; serta topik-komen dalam klausa ketiga adalah *lima belas program pilihan yang wajib dilaksanakan* (lesap) dan antara lain pemberantasan mafia hukum, revitalisasi industri pertahanan, penanggulangan terorisme, dan penanggulangan permasalahan listrik.

Elemen argumen *qualifier*, *asalkan, sikap kepemimpinan Presiden ikut berubah: lebih berani mengambil tindakan tegas di saat yang tepat*, merupakan kalimat yang terdiri atas dua klausa sehingga dalam kalimat tersebut terdapat dua topik-komen. Topik-komen dalam klausa pertama adalah *sikap kepemimpinan Presiden* dan *asalkan, ikut berubah*, sedangkan topik-komen dalam klausa kedua adalah *lebih berani dan mengambil tindakan tegas di saat yang tepat*.

Terakhir, elemen argumen *rebuttal*, *masih banyak waktu untuk mengejar "target" yang luput di seratus hari pertama, termasuk untuk memperbaiki efektivitas kerja pemerintah*, merupakan kalimat yang mengandung empat klausa sehingga dalam kalimat tersebut terdapat empat topik-komen. Topik-komen dalam klausa pertama adalah *waktu* dan *masih banyak*; topik-komen dalam klausa kedua adalah *masih banyak waktu* dan *untuk mengejar*; topik-komen dalam klausa ketiga adalah *"target"* dan *yang luput di seratus hari pertama*; topik-komen dalam

klausa keempat adalah *masih banyak waktu* (lesap) dan *termasuk untuk memperbaiki efektivitas kerja pemerintah*.

Tabel 4.3 Topik-Komen dalam Elemen Argumen Teks SHTB

| Judul Opini | Elemen Argumen |
|-------------|--|
| SHTB | <p>Claim: (Paragraf ke-8, kalimat ke-1)</p> <p>Seratus hari pertama memang tak cukup buat menghakimi pemerintahan yang masih akan berkuasa sampai 2014.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seratus hari pertama 2. Pemerintahan <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memang tak cukup buat menghakimi 2. Yang masih akan berkuasa sampai 2014 <p style="text-align: right;">Stated Reason (Paragraf ke-1, kalimat ke-2)</p> <p>(Karena) Jika efektivitas kerja pemerintah yang menjadi ukuran, harus dikatakan Yudhoyono mendapat rapor dengan angka merah.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Efektivitas kerja pemerintah 2. Yudhoyono <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang menjadi ukuran 2. Harus dikatakan mendapat rapor dengan angka merah |
| | <p>Ground: (Paragraf ke-2, kalimat ke-1, ke-2, dan ke-3)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Angka merah itu berasal dari dua persoalan yang menguji kepemimpinan Yudhoyono dalam tiga bulan dan sepuluh hari belakangan ini. <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Angka merah itu 2. Dua persoalan <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berasal 2. Yang menguji kepemimpinan Yudhoyono dalam tiga bulan dan sepuluh hari belakangan ini <p>2. Pertama, persetujuan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan kepolisian serta kejaksaan.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ø (persoalan) 2. Komisi Pemberantasan Korupsi dengan kepolisian serta kejaksaan <p>Komen:</p> |

| | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertama 2. Perseteruan <p>3. Kedua, penyelamatan Bank Century pada November 2008 yang dipersoalkan Dewan Perwakilan Rakyat setelah setahun "tenggelam".</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ø (persoalan) 2. Penyelamatan Bank Century pada November 2008 <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kedua 2. Yang dipersoalkan Dewan Perwakilan Rakyat setelah setahun "tenggelam". |
| | <p>Warrant: (Paragraf ke-1, kalimat ke-1)</p> <p>Pencanangan program seratus hari, yang tak diwajibkan aturan hukum mana pun di negeri ini, akhirnya menjadi barometer kinerja masa awal pemerintahan kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencanangan program seratus hari 2. Ø (Pencanangan program seratus hari yang tak diwajibkan aturan hukum mana pun di negeri ini) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang tak diwajibkan aturan hukum mana pun di negeri ini 2. Akhirnya menjadi barometer kinerja masa awal pemerintahan kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono |
| | <p>Backing: (Paragraf ke-6, kalimat ke-2 dan kalimat ke-3)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam rapat kabinet 5 November 2009, Presiden menetapkan Program Seratus Hari berisi 45 program dan 129 rencana aksi. <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden 2. Program Seratus Hari <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam rapat kabinet 5 November 2009, menetapkan 2. Berisi 45 program dan 129 rencana aksi <p>2. Ia juga mengumumkan lima belas program pilihan yang wajib dilaksanakan, antara lain pemberantasan mafia hukum, revitalisasi industri pertahanan, penanggulangan terorisme, dan penanggulangan permasalahan listrik.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ia 2. Lima belas program pilihan 3. Ø (lima belas program pilihan) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Juga mengumumkan 2. Yang wajib dilaksanakan 3. Antara lain pemberantasan mafia hukum, revitalisasi industri pertahanan, penanggulangan terorisme, dan penanggulangan permasalahan listrik |

| |
|---|
| <p>Qualifier: (Paragraf ke-8 kalimat ke-4)</p> <p>Asalkan, sikap kepemimpinan Presiden ikut berubah: lebih berani mengambil tindakan tegas di saat yang tepat.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap kepemimpinan Presiden 2. Lebih berani <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asalkan, ikut berubah 2. Mengambil tindakan tegas di saat yang tepat |
| <p>Rebuttal: (Paragraf ke-8 kalimat ke-3)</p> <p>Masih banyak waktu untuk mengejar "target" yang luput di seratus hari pertama, termasuk untuk memperbaiki efektivitas kerja pemerintah.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu 2. Ø (masih banyak waktu) 3. "target" 4. Ø (masih banyak waktu) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih banyak 2. Untuk mengejar 3. Yang luput di seratus hari pertama 4. Termasuk untuk memperbaiki efektivitas kerja pemerintah |

3.3.2 Hubungan Topik-Komen Antarelemen Argumen

Elemen argumen *claim* dan *stated reason* terikat dalam hubungan kohesi leksikal hiponim. Hal itu tampak dari hubungan antara topik-komen *pemerintahan yang masih akan berkuasa* dalam *claim* dan topik *Yudhoyono* dalam *stated reason*. Sementara itu, bagian dari komen dalam *stated reason*, yaitu *angka merah*, dan topik dalam *ground* (1), yaitu *angka merah itu*, terikat dalam hubungan kohesi leksikal repetisi. Topik dalam elemen argumen *ground* (1), *dua persoalan*, berhubungan dengan topik dalam elemen argumen *ground* (2) dan (3). Topik dalam elemen argumen *ground* (2) dan (3) yang keduanya lesap (ditandai dengan \emptyset) itu, terikat dalam kohesi elipsis dengan topik dalam elemen argumen *ground* (1), *dua persoalan*.

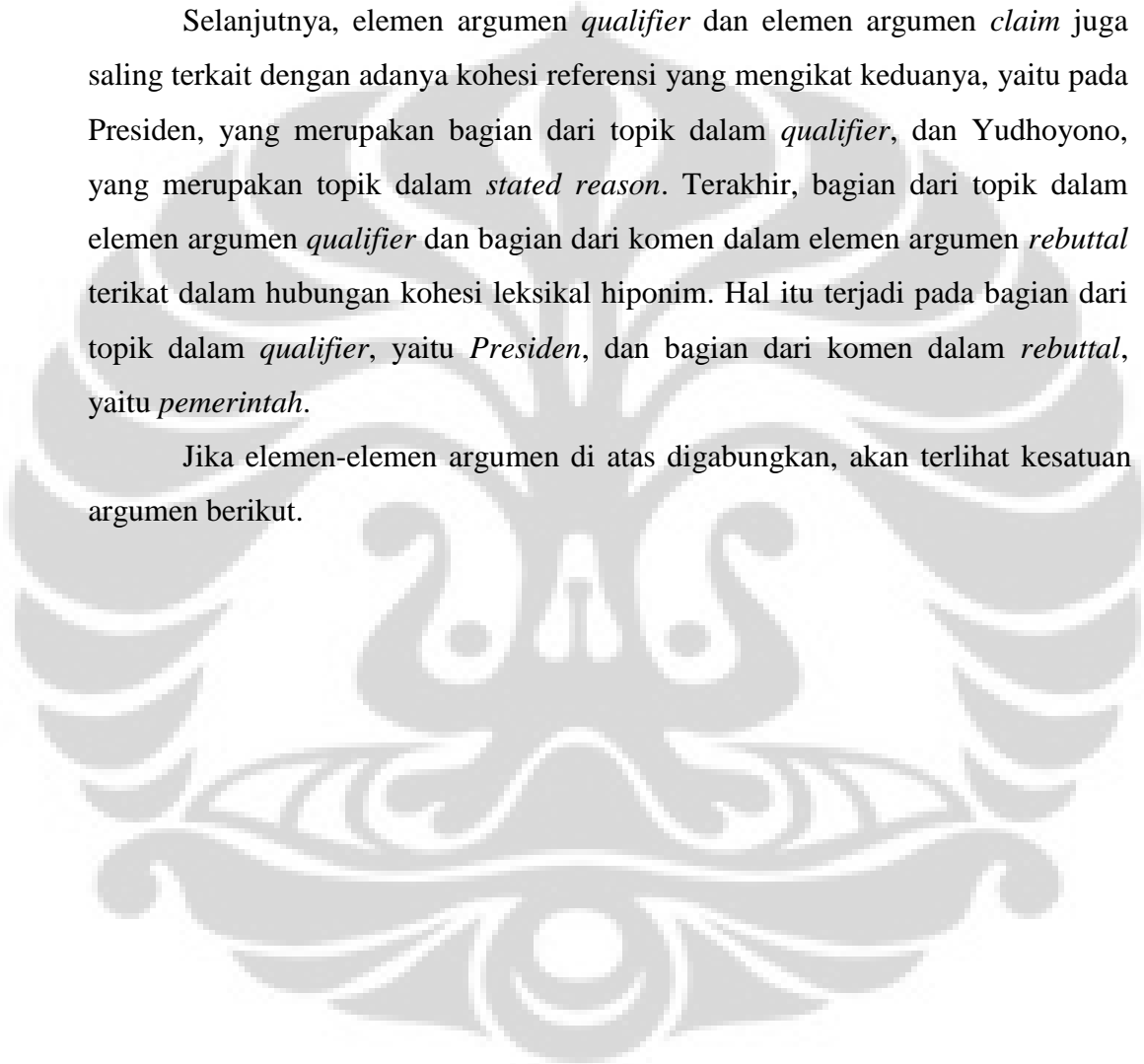
Bagian dari topik dalam elemen argumen *warrant*, *program seratus hari*, terikat dalam hubungan kohesi leksikal sinonim dengan topik dalam elemen argumen *claim*, *seratus hari pertama*. Selain itu, elemen argumen *warrant* ini juga berhubungan dengan *stated reason*. Bagian dari komen *Presiden Susilo*

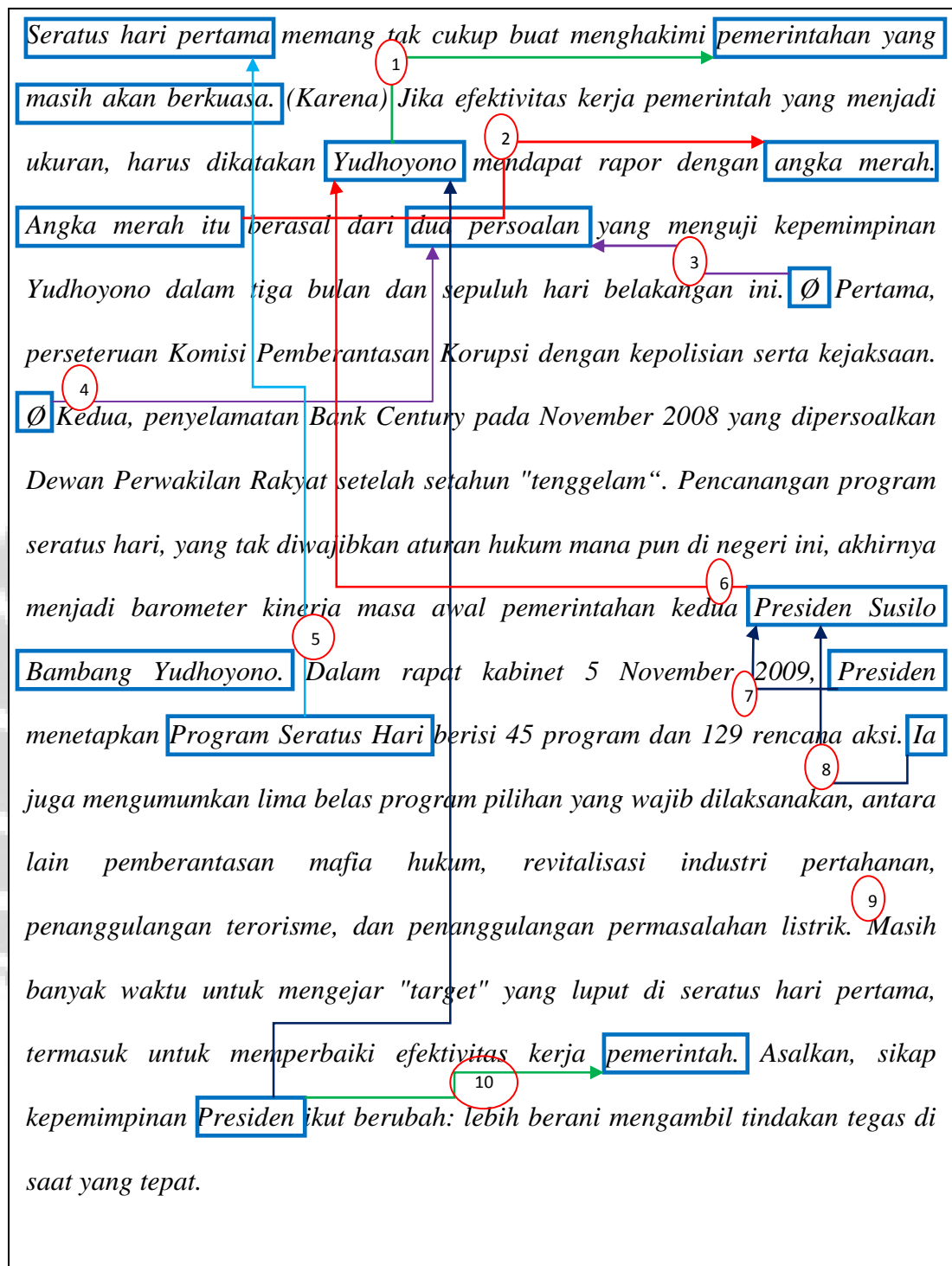
Bambang Yudhoyono dalam *warrant* terikat dalam hubungan repetisi dengan topik *Yudhoyono* dalam *stated reason*.

Dua elemen argumen *backing* terikat dalam kohesi referensi dengan elemen argumen *warrant*. Ikatan itu tampak dari topik *Presiden* dalam *backing* (1) dan topik *Ia* dalam *backing* (2) terhadap bagian dari komen *warrant*, yaitu *Presiden Susilo Bambang Yudhoyono*.

Selanjutnya, elemen argumen *qualifier* dan elemen argumen *claim* juga saling terkait dengan adanya kohesi referensi yang mengikat keduanya, yaitu pada *Presiden*, yang merupakan bagian dari topik dalam *qualifier*, dan *Yudhoyono*, yang merupakan topik dalam *stated reason*. Terakhir, bagian dari topik dalam elemen argumen *qualifier* dan bagian dari komen dalam elemen argumen *rebuttal* terikat dalam hubungan kohesi leksikal hiponim. Hal itu terjadi pada bagian dari topik dalam *qualifier*, yaitu *Presiden*, dan bagian dari komen dalam *rebuttal*, yaitu *pemerintah*.

Jika elemen-elemen argumen di atas digabungkan, akan terlihat kesatuan argumen berikut.



**Keterangan:****Bagan 2.3 Kesatuan Argumen Teks SHTB**

- 1 : Kohesi Leksikal Hiponim
- 2 : Kohesi Leksikal Repetisi
- 3 : Kohesi Elipsis
- 4 : Kohesi Elipsis

- 5 : Kohesi Leksikal Sinonim
- 6 : Kohesi Leksikal Repetisi
- 7 : Kohesi Referensi
- 8 : Kohesi Referensi
- 9 : Kohesi Referensi
- 10 : Kohesi Leksikal Hiponim

3.4 Susunan Elemen Argumen Teks Opini “Sang Kerbau Masuk Istana”

Elemen argumen dalam teks SKMI terpisah dari *stated reason*. *Claim* dalam teks opini ini adalah kalimat ke-1 dalam paragraf ke-4, yaitu *siapa pun yang menghadirkan kerbau di Bundaran HI, dia pasti tahu kabinet tak akan goyang, Presiden tak beringsut sebuku pun dari kursinya*, sedangkan *stated reason* dalam hal ini adalah kalimat ke-2 dalam paragraf ke-8, yaitu *maksudnya jelas untuk merebut perhatian dan menciptakan tekanan agar pemerintah melakukan perbaikan sesuai dengan keinginan pemrotes*.

Keduanya membentuk pernyataan yang menunjukkan sebab-akibat sebagai berikut.

Claim: Siapa pun yang menghadirkan kerbau di Bundaran HI, dia pasti tahu kabinet tak akan goyang, Presiden tak beringsut sebuku pun dari kursinya.

Stated Reason: (Karena) Maksudnya jelas untuk merebut perhatian dan menciptakan tekanan agar pemerintah melakukan perbaikan sesuai dengan keinginan pemrotes.

Penggabungan keduanya dapat membentuk pernyataan sebab-akibat sebagai berikut.

Siapa pun yang menghadirkan kerbau di Bundaran HI, dia pasti tahu kabinet tak akan goyang, Presiden tak beringsut sebuku pun dari kursinya karena maksudnya jelas untuk merebut perhatian dan menciptakan tekanan agar pemerintah melakukan perbaikan sesuai dengan keinginan pemrotes.

Jika diuraikan, tampak bahwa elemen argumen *claim* memiliki beberapa proposisi berikut.

- (1) Siapa pun yang menghadirkan kerbau di Bundaran HI;
- (2) Dia pasti tahu;

- (3) Kabinet tak akan goyang;
- (4) Presiden tak beringsut dari kursinya.

Adapun *stated reason* terdiri atas beberapa proposisi sebagai berikut.

- (1) Maksud menghadirkan kerbau;
- (2) Merebut perhatian;
- (3) Menciptakan tekanan;
- (4) Pemerintah melakukan perbaikan;
- (5) Perbaikan yang sesuai dengan keinginan pemrotes.

Empat proposisi dalam *claim*, dapat dikonstruksi menjadi proposisi baru, yaitu *menghadirkan kerbau di Bundaran HI tidak menurunkan pemerintah yang berkuasa*. Sementara itu, lima proposisi dalam *stated reason* juga dapat dikonstruksi menjadi *menghadirkan kerbau hanya agar diperhatikan oleh pemerintah*.

Antara proposisi *menghadirkan kerbau di Bundaran HI tidak menurunkan pemerintah yang berkuasa* dan *menghadirkan kerbau hanya agar diperhatikan oleh pemerintah* terdapat koherensi kausal yang mencerminkan hubungan maksud, yaitu hubungan yang mengindikasikan pemanfaatan untuk mencapai kemauan. Maksud itu diletakkan oleh penulis opini dalam *stated reason*, yaitu *agar diperhatikan oleh pemerintah*, sedangkan aktivitas yang memiliki maksud demikian ia letakkan dalam *claim*, yaitu *menghadirkan kerbau di Bundaran HI*. Pendeknya, penulis menilai ada indikasi demonstran memanfaatkan kerbau untuk mencapai kemauan mereka.

Setelah *claim* ditemukan, diajukan pertanyaan untuk mendapatkan *ground*, yaitu apa bukti menghadirkan kerbau hanya untuk merebut perhatian. Kalimat yang menunjukkan jawaban dari pertanyaan itu adalah kalimat ke-2 dalam paragraf ke-4, yaitu *si penggeret kerbau mendapat banyak liputan media, barangkali ada juga sebagian masyarakat yang terwakili aspirasinya-karena urusan Bank Century yang digerujuk Rp 6,7 triliun, pagar mahal Istana, mobil mewah menteri, atau isu lain*. Dalam hal ini penulis opini mengangkat apa yang diketahuinya bahwa protes dengan menggeret kerbau menjadikan pemrotes diliput oleh banyak media.

Setelah *ground* ditemukan, diajukan pertanyaan untuk mendapatkan *warrant*, yaitu apa yang menguatkan kalimat *siapa pun yang menghadirkan*

*kerbau di Bundaran HI, dia pasti tahu kabinet tak akan goyang, Presiden tak beringsut sebuku pun dari kursinya dan menghubungkan kalimat tersebut dengan kalimat maksudnya jelas untuk merebut perhatian dan menciptakan tekanan agar pemerintah melakukan perbaikan sesuai dengan keinginan pemrotes. Kalimat yang merupakan jawaban dari pertanyaan di atas adalah kalimat ke-1 dalam paragraf ke-8, yaitu *kita tahu, protes memang lazim dilakukan dengan ekspresi dipompa habis.**

Setelah itu, untuk menemukan *backing*, diajukan pertanyaan, yaitu apa yang melatarbelakangi kalimat *kita tahu, protes memang lazim dilakukan dengan ekspresi dipompa habis.* Jawaban pertanyaan itu adalah kalimat ke-2 dalam paragraf ke-2, yaitu *kadang kala rasa gemas—karena satu dan lain sebab—bisa mendatangkan kegilaan mendadak.*

Setelah *claim, ground, warrant, dan backing* ditemukan, pertanyaan untuk mendapatkan elemen *rebuttal* adalah adakah kondisi yang berupa kemungkinan pengecualian atau perlawanan. Jawaban pertanyaan tersebut adalah kalimat ke-1 dalam paragraf ke-11, yaitu *maka bukan aturan lebih ketat yang diperlukan, melainkan cara komunikasi yang lebih sehat.* Dalam hal ini, penulis opini menggunakan klausa yang diawali dengan *bukan* dan *melainkan* untuk menandai kondisi pengecualian tersebut.

Selanjutnya, untuk mendapatkan elemen *qualifier*, diajukan pertanyaan, yaitu adakah kondisi yang berupa syarat yang berkaitan dengan *claim*. Jawabannya adalah kalimat ke-4 dalam paragraf ke-10, yaitu *bila Presiden terganggu, ia bisa mengadu ke polisi.* Penulis opini tampak menggunakan modalitas *bisa* dan kata *bila* sehingga secara keseluruhan kalimat tersebut mencerminkan sebuah kondisi persyaratan.

Tabel 5.3 Susunan Elemen Argumen Teks SKMI

| Judul Opini | Elemen Argumen |
|-------------|---|
| SKMI | <p><i>Claim:</i> (Paragraf ke-4, kalimat ke-1)</p> <p>Siapa pun yang menghadirkan kerbau di Bundaran HI, dia pasti tahu kabinet tak akan goyang, Presiden tak beringsut sebuku pun dari kursinya.</p> |

| | |
|--|--|
| | <p style="text-align: right;"><i>Stated Reason</i> (Paragraf ke-8, kalimat ke-2)</p> <p>(Karena) Maksudnya jelas untuk merebut perhatian dan menciptakan tekanan agar pemerintah melakukan perbaikan sesuai dengan keinginan pemrotes.</p> |
| | <p><i>Ground:</i> (Paragraf ke-4, kalimat ke-2)</p> <p>Si penggeret kerbau mendapat banyak liputan media, barangkali ada juga sebagian masyarakat yang terwakili aspirasinya-karena urusan Bank Century yang digerujuk Rp 6,7 triliun, pagar mahal Istana, mobil mewah menteri, atau isu lain.</p> |
| | <p><i>Warrant:</i> (Paragraf ke-8, kalimat ke-1)</p> <p>Kita tahu, protes memang lazim dilakukan dengan ekspresi dipompa habis.</p> |
| | <p><i>Backing:</i> (Paragraf ke-2, kalimat ke-2)</p> <p>Kadang kala rasa gemas—karena satu dan lain sebab—bisa mendatangkan kegilaan mendadak.</p> |
| | <p><i>Qualifier:</i> (Paragraf ke-10 kalimat ke-4)</p> <p>Bila Presiden terganggu, ia bisa mengadu ke polisi.</p> |
| | <p><i>Rebuttal:</i> (Paragraf ke-11 kalimat ke-1)</p> <p>Maka bukan aturan lebih ketat yang diperlukan, melainkan cara komunikasi yang lebih sehat.</p> |

3.4.1 Topik-Komen dalam Elemen Argumen

Elemen argumen *claim* dalam teks opini “Sang Kerbau Masuk Istana”, yaitu *siapa pun yang menghadirkan kerbau di Bundaran HI, dia pasti tahu kabinet tak akan goyang, Presiden tak beringsut sebuku pun dari kursinya*, merupakan kalimat dengan empat klausa. Dengan demikian, kalimat tersebut memiliki empat topik-komen. Topik-komen dalam klausa pertama adalah *siapa pun* dan *yang menghadirkan kerbau di Bundaran HI*; topik-komen dalam klausa kedua adalah *dia* dan *pasti tahu*; topik-komen dalam klausa ketiga adalah *kabinet* dan *tak akan goyang*; dan topik-komen dalam klausa keempat adalah *Presiden* dan *tak beringsut sebuku pun dari kursinya*.

Sementara itu, *stated reason*, *maksudnya jelas untuk merebut perhatian dan menciptakan tekanan agar pemerintah melakukan perbaikan sesuai dengan keinginan pemrotes*, juga terdiri atas tiga klausa sehingga memiliki tiga topik-

komen. Topik-komen dalam klausa pertama adalah *maksudnya* dan *jelas*; topik-komen dalam klausa kedua adalah *maksudnya jelas* dan *untuk merebut perhatian menciptakan tekanan*; dan topik-komen dalam klausa ketiga adalah *pemerintah* dan *agar melakukan perbaikan sesuai dengan keinginan pemrotes*.

Elemen argumen *ground*, *si penggeret kerbau mendapat banyak liputan media*, *barangkali ada juga sebagian masyarakat yang terwakili aspirasinya karena urusan Bank Century yang digerujuk Rp 6,7 triliun*, *pagar mahal Istana*, *mobil mewah menteri*, *atau isu lain*, merupakan kalimat dengan enam klausa. Akan tetapi, tidak semua klausa itu memiliki topik-komen yang lengkap. Ada beberapa klausa yang hanya memiliki topik saja. Klausa pertama, *si penggeret kerbau mendapat banyak liputan media* memiliki topik *si penggeret kerbau* dan komen *mendapat banyak liputan media*; klausa kedua *barangkali ada juga sebagian masyarakat yang terwakili aspirasinya* memiliki topik *ada juga sebagian masyarakat* dan *barangkali yang terwakili aspirasinya*; klausa ketiga *urusan Bank Century yang digerujuk Rp 6,7 triliun* memiliki topik *urusan Bank Century* dan komen *yang digerujuk Rp 6,7 triliun*. Sementara itu, klausa keempat hingga keenam masing-masing hanya memiliki topik, yaitu *pagar mahal Istana*, *mobil mewah menteri*, dan *isu lain*.

Elemen argumen *warrant*, *kita tahu*, *protes memang lazim dilakukan dengan ekspresi dipompa habis*, merupakan kalimat dengan tiga klausa sehingga memiliki tiga topik-komen. Topik dan komen dalam klausa pertama adalah *kita* dan *tahu*; topik-komen dalam klausa kedua adalah *protes* dan *memang lazim dilakukan*; dan topik-komen dalam klausa ketiga adalah *ekspresi* dan *dipompa habis*.

Topik-komen dalam elemen argumen *backing*, *kadang kala rasa gemas—karena satu dan lain sebab—bisa mendatangkan kegilaan mendadak*, adalah *rasa gemas karena satu dan lain sebab* dan *kadang kala bisa mendatangkan kegilaan mendadak*. Sementara itu, elemen argumen *qualifier*, *bila Presiden terganggu*, *ia bisa mengadu ke polisi*, merupakan kalimat dengan dua klausa sehingga memiliki dua topik-komen. Topik-komen dalam klausa pertama adalah *Presiden* dan *bila terganggu*, sedangkan topik-komen dalam klausa kedua adalah *Ia* dan *bisa mengadu ke polisi*.

Terakhir, elemen argumen *rebuttal*, maka bukan aturan lebih ketat yang diperlukan, melainkan cara komunikasi yang lebih sehat, juga terdiri atas dua klausa sehingga elemen argumen tersebut memiliki dua topik-komen. Topik-komen dalam klausa pertama adalah *aturan lebih ketat* dan *bukan yang diperlukan*, sedangkan topik-komen dalam klausa kedua adalah *cara komunikasi* dan *yang lebih sehat*.

Tabel 6.3 Topik-Komen dalam Elemen Argumen Teks SKMI

| Judul Opini | Elemen Argumen |
|-------------|---|
| SKMI | <p>Claim: (Paragraf ke-4, kalimat ke-1)</p> <p>Siapa pun yang menghadirkan kerbau di Bundaran HI, dia pasti tahu kabinet tak akan goyang, Presiden tak beringsut sebuku pun dari kursinya.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Siapa pun 2. Dia 3. Kabinet 4. Presiden <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang menghadirkan kerbau di Bundaran HI 2. Pasti tahu 3. Tak akan goyang 4. Tak beringsut sebuku pun dari kursinya <p style="text-align: right;">Stated Reason (Paragraf ke-8, kalimat ke-2)</p> <p>(Karena) Maksudnya jelas untuk merebut perhatian dan menciptakan tekanan agar pemerintah melakukan perbaikan sesuai dengan keinginan pemrotos.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maksudnya 2. Ø (maksudnya jelas) 3. Ø (maksudnya jelas) 4. Pemerintah <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jelas 2. Untuk merebut perhatian 3. (Untuk) menciptakan tekanan 4. Agar melakukan perbaikan sesuai dengan keinginan pemrotos <p>Ground: (Paragraf ke-4, kalimat ke-2)</p> <p>Si penggeret kerbau mendapat banyak liputan media, barangkali ada juga sebagian masyarakat yang terwakili aspirasinya-karena urusan Bank Century yang digerujuk Rp 6,7 triliun, pagar mahal Istana, mobil mewah menteri, atau</p> |

| |
|--|
| <p>isu lain.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si penggeret kerbau 2. Ada juga sebagian masyarakat 3. Urusan Bank Century 4. Ø (urusan) Pagar mahal Istana 5. Ø (urusan) Mobil mewah menteri 6. Ø (urusan) Isu lain <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapat banyak liputan media 2. Barangkali yang terwakili aspirasinya 3. Yang digerujuk Rp 6,7 triliun 4. Ø 5. Ø 6. Ø |
| <p>Warrant: (Paragraf ke-8, kalimat ke-1)</p> <p>Kita tahu, protes memang lazim dilakukan dengan ekspresi dipompa habis.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kita 2. Protes 3. Ekspresi <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahu 2. Memang lazim dilakukan 3. Dipompa habis |
| <p>Backing: (Paragraf ke-2, kalimat ke-2)</p> <p>Kadang kala rasa gemas—karena satu dan lain sebab—bisa mendatangkan kegilaan mendadak.</p> <p>Topik: Rasa gemas karena satu dan lain sebab</p> <p>Komen: Kadang kala bisa mendatangkan kegilaan mendadak</p> |
| <p>Qualifier: (Paragraf ke-10 kalimat ke-4)</p> <p>Bila Presiden terganggu, ia bisa mengadu ke polisi.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden 2. Ia <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bila terganggu 2. Bisa mengadu ke polisi |
| <p>Rebuttal: (Paragraf ke-11 kalimat ke-1)</p> <p>Maka bukan aturan lebih ketat yang diperlukan, melainkan cara komunikasi yang lebih sehat.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aturan lebih ketat |

| | |
|--|--|
| | 2. Melainkan cara komunikasi Komen: 1. Bukan yang diperlukan 2. Yang lebih sehat |
|--|--|

3.4.2 Hubungan Topik-Komen Antarelemen Argumen

Dari tabel di atas, tampak bahwa hubungan antara *claim* dan *stated reason* terikat oleh kohesi referensi, yaitu antara bagian dari komen *menghadirkan kerbau di Bundaran HI* dalam *claim* dan klitik *-nya* pada topik *maksudnya* dalam *stated reason*. Klitik *-nya* di sana merujuk pada *menghadirkan kerbau di Bundaran HI*.

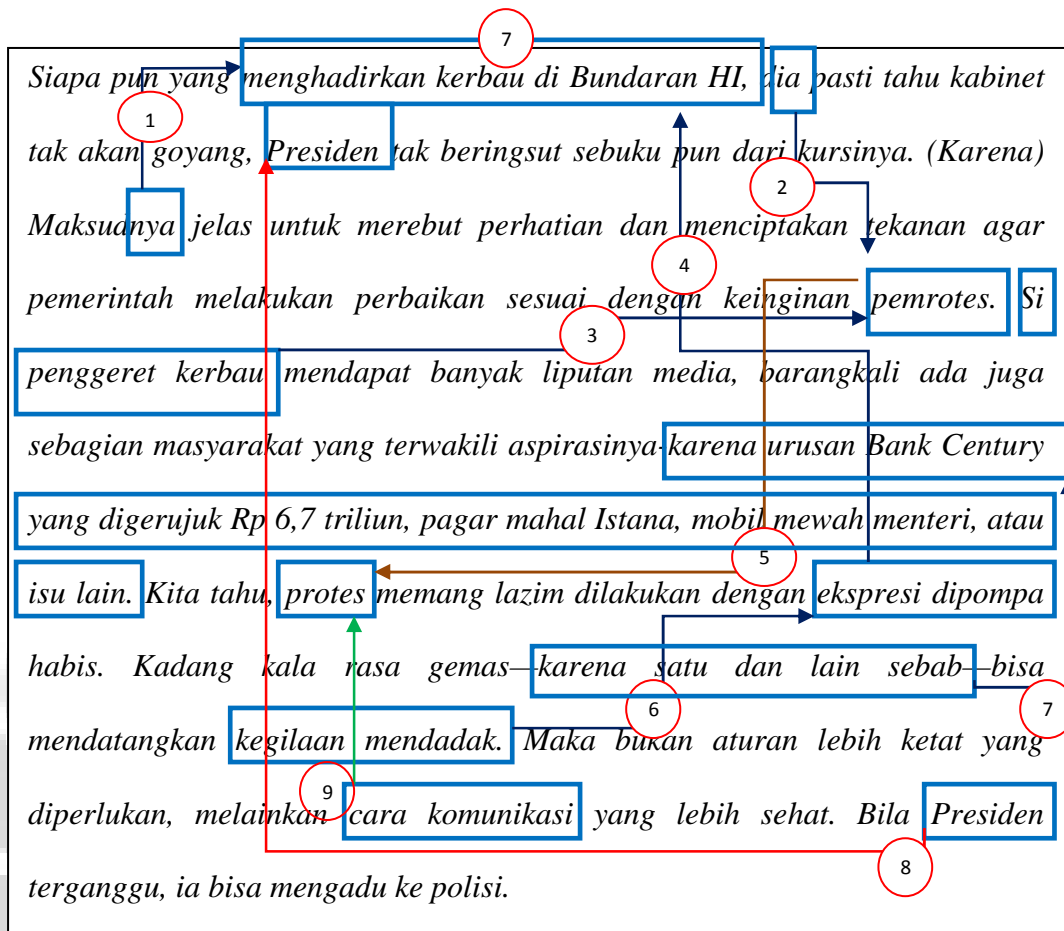
Kohesi referensi juga mengikat *claim*, *stated reason*, dan *ground*, yaitu topik *dia* dalam *claim*, bagian dari komen dalam *stated reason*, *pemrotes*, dan topik *si penggeret kerbau* dalam *ground*. *Dia* merujuk pada *pemrotes*. Demikian pula dengan *si penggeret kerbau*, juga merujuk pada *pemrotes*.

Kohesi referensi juga mengikat *warrant* dengan *claim*. Topik-komen *ekspresi dipompa habis* pada *warrant* merujuk pada bagian dari komen *menghadirkan kerbau di Bundaran HI* pada *claim*. Selain itu, hubungan kohesi leksikal meronim tampak mengikat topik dalam *warrant*, yaitu *protes*, dengan bagian dari komen dalam *stated reason*, yaitu *pemrotes*. Kemudian, antara *backing* dan *warrant*, terdapat ikatan berupa referensi, yaitu pada bagian dari komen *kegilaan mendadak* dalam *backing* yang merujuk pada topik-komen *ekspresi dipompa habis* dalam *warrant*.

Dalam teks opini SKMI ini terjadi pula keterkaitan antara *backing* dan *ground*. Hal itu tampak dari bagian dari topik dalam *backing*, *karena satu dan lain sebab*, dan bagian dari komen pada *ground*, *karena urusan Bank Century yang digerujuk Rp 6,7 triliun, pagar mahal Istana, mobil mewah menteri, atau isu lain*, yang terikat dalam kohesi referensi.

Topik *presiden* pada *qualifier* terikat dalam hubungan kohesi leksikal repetisi dengan topik *presiden* pada *claim*. Sementara itu, hubungan kohesi leksikal hiponim mengikat *rebuttal* dengan *warrant*, yaitu bagian dari topik dalam *rebuttal*, *cara komunikasi*, dan topik *protes* pada *warrant*.

Berikut kesatuan argumen yang dapat terbentuk dari penggabungan elemen-elemen argumen di atas.



Bagan 3.3 Kesatuan Argumen Teks SKMI

Keterangan:

- 1 : Kohesi Referensi
- 2 : Kohesi Referensi
- 3 : Kohesi Referensi
- 4 : Kohesi Referensi
- 5 : Kohesi Leksikal Meronim
- 6 : Kohesi Referensi
- 7 : Kohesi Referensi
- 8 : Kohesi Leksikal Repetisi
- 9 : Kohesi Leksikal Hiponim

3.5 Susunan Elemen Argumen Teks Opini

“Sikap Presiden dalam Episode Akhir Century”

Elemen argumen *claim* dalam teks opini ini juga terpisah dari *stated reason*. Kalimat yang merupakan *claim* adalah kalimat ke-1 dalam paragraf ke-1, yaitu *Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sesungguhnya tak punya pilihan selain mengambil alih tanggung jawab kebijakan penyelamatan Bank Century*, sedangkan kalimat yang merupakan *stated reason* adalah kalimat ke-2 dalam paragraf ke-1, yaitu *sebagai orang nomor satu pemerintahan negara yang menganut sistem presidensial, di pundak Presidenlah terletak tanggung jawab semua kebijakan eksekutif*.

Keduanya membentuk pernyataan yang menunjukkan sebab-akibat sebagai berikut.

Claim: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sesungguhnya tak punya pilihan selain mengambil alih tanggung jawab kebijakan penyelamatan Bank Century.

Stated Reason: (Karena) Sebagai orang nomor satu pemerintahan negara yang menganut sistem presidensial, di pundak Presidenlah terletak tanggung jawab semua kebijakan eksekutif.

Penyatuan keduanya dapat membentuk pernyataan sebab-akibat sebagai berikut.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sesungguhnya tak punya pilihan selain mengambil alih tanggung jawab kebijakan penyelamatan Bank Century karena sebagai orang nomor satu pemerintahan negara yang menganut sistem presidensial, di pundak Presidenlah terletak tanggung jawab semua kebijakan eksekutif.

Untuk memperjelas hubungan sebab-akibat antara *claim* dan *stated reason* perlu dilihat pada bagian mana tepatnya hubungan sebab-akibat itu terjadi. Dalam elemen argumen *claim* ada proposisi-proposisi berikut.

- (1) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak punya pilihan;
- (2) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengambil alih tanggung jawab;
- (3) Tanggung jawab kebijakan proses menyelamatkan Bank Century.

Dalam *stated reason* terdapat proposisi-proposisi berikut.

- (1) (Presiden) sebagai orang nomor satu pemerintahan;
- (2) Negara yang menganut sistem presidensial;

(3) Presiden bertanggung jawab atas semua kebijakan eksekutif .

Proposisi-proposisi dalam *claim* dapat dikonstruksi menjadi *Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertanggung jawab dalam kebijakan penyelamatan Bank Century*. Adapun proposisi yang relevan dari tiga proposisi dalam *stated reason* adalah *Presiden bertanggung jawab atas semua kebijakan eksekutif*.

Dua proposisi yang relevan tersebut menampakkan koherensi kausal yang mencerminkan hubungan konsekuensi, yaitu hubungan yang mengindikasikan konsekuensi yang harus dijalani. Dalam hal ini, penulis opini berpendapat bahwa kebijakan penyelamatan Bank Century merupakan tanggung jawab Presiden. Hal itu merupakan konsekuensi yang harus dijalannya, bahwa sebagai presiden, Susilo Bambang Yudhoyono mempunyai banyak tanggung jawab yang harus diemban.

Setelah *claim* ditemukan, diajukan pertanyaan untuk mendapatkan *ground*, yaitu apa bukti tindakan mengambil alih tanggung jawab kebijakan penyelamatan Bank Century. Kalimat yang menunjukkan jawaban dari pertanyaan itu adalah kalimat ke-1 dalam paragraf ke-2, yaitu *walaupun agak terlambat, Presiden harus berani "pasang badan" melindungi dua orang kepercayaannya yang kini menjadi sasaran tembak Panitia Khusus Hak Angket Century, yakni Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani* dan kalimat ke-3 dalam paragraf ke-5, yaitu *sebaliknya, Presiden juga harus menjelaskan kebijakan penyelamatan yang menelan dana Rp 6,7 triliun di bank gurem itu*. Dalam hal ini penulis opini mengangkat situasi yang diketahuinya bahwa presiden justru tidak pasang badan melindungi wakil presiden dan menteri keuangan. Presiden, menurut pengetahuan penulis opini, juga tidak menjelaskan dana Rp 6,7 triliun untuk menyelamatkan Bank Century.

Selanjutnya, setelah *ground* ditemukan, diajukan pertanyaan untuk mendapatkan *warrant*, yaitu apa yang menguatkan kalimat *Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sesungguhnya tak punya pilihan selain mengambil alih tanggung jawab kebijakan penyelamatan Bank Century* dan menghubungkan kalimat tersebut dengan kalimat *sebagai orang nomor satu pemerintahan negara yang menganut sistem presidensial, di pundak Presidenlah terletak tanggung jawab semua kebijakan eksekutif*. Kalimat yang merupakan jawaban dari pertanyaan di atas adalah kalimat ke-3 dalam paragraf ke-2, yaitu *bahwa dialah*

pihak yang berkewajiban memikul risiko apa pun yang muncul dari kebijakan penyelamatan Century.

Untuk mendapatkan *backing*, pertanyaan yang diajukan adalah apa yang melatarbelakangi kalimat *bahwa dialah pihak yang berkewajiban memikul risiko apa pun yang muncul dari kebijakan penyelamatan Century.* Jawaban pertanyaan itu adalah kalimat ke-2 dalam paragraf ke-10 dan kalimat ke-1 dalam paragraf ke-11, yaitu *kalaupun, misalnya, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan rekomendasi terhadap pejabat tertentu yang diduga bersalah dalam proses bailout, tak usah panik dan bila Panitia Khusus menduga ada pelanggaran pidana, temuan itu harus dibawa ke ranah hukum.*

Setelah *claim*, *ground*, *warrant*, dan *backing* ditemukan, pertanyaan untuk mendapatkan elemen *rebuttal* adalah adakah kondisi yang berupa kemungkinan pengecualian atau perlawanan. Jawaban pertanyaan tersebut adalah kalimat ke-3 dalam paragraf ke-8, yaitu *tapi, bila demi kekuasaan Presiden harus mengorbankan pembantunya yang tak bersalah-melalui reshuffle kabinet atau barter atau pertukaran bentuk apa pun-perlu disadari bahwa "rongrongan" lawan politik itu tak akan berhenti sampai di situ.* Dalam hal ini, penulis opini menggunakan kata *tapi* untuk menandai kondisi perlawanan tersebut.

Selanjutnya, untuk mendapatkan elemen *qualifier*, diajukan pertanyaan, yaitu adakah kondisi yang berupa syarat yang berkaitan dengan *claim*. Jawabannya adalah kalimat ke-1 dalam paragraf ke-13, yaitu *Presiden Yudhoyono harus berani menegaskan sikap untuk tidak lagi berkompromi.* Penulis opini tampak menggunakan modalitas *harus* sehingga secara keseluruhan kalimat tersebut mencerminkan sebuah kondisi persyaratan.

Tabel 7.3 Susunan Elemen Argumen Teks SPDEAC

| Judul Opini | Elemen Argumen |
|--------------------|--|
| SPDEAC | <p><i>Claim:</i> (Paragraf ke-1, kalimat ke-1)</p> <p>Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sesungguhnya tak punya pilihan selain mengambil alih tanggung jawab kebijakan penyelamatan Bank Century.</p> |

| | |
|--|--|
| | <p style="text-align: right;"><i>Stated Reason</i> (Paragraf ke-1, kalimat ke-2)</p> <p>(Karena) Sebagai orang nomor satu pemerintahan negara yang menganut sistem presidensial, di pundak Presidenlah terletak tanggung jawab semua kebijakan eksekutif.</p> |
| | <p><i>Ground:</i> (Paragraf ke-2, kalimat ke-1 dan paragraf ke-5, kalimat ke-3)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Walau agak terlambat, Presiden harus berani "pasang badan" melindungi dua orang kepercayaannya yang kini menjadi sasaran tembak Panitia Khusus Hak Angket Century, yakni Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. 2. Sebaliknya, Presiden juga harus menjelaskan kebijakan penyelamatan yang menelan dana Rp 6,7 triliun di bank gurem itu. |
| | <p><i>Warrant:</i> (Paragraf ke-2, kalimat ke-3)</p> <p>Bahwa dialah pihak yang berkewajiban memikul risiko apa pun yang muncul dari kebijakan penyelamatan Century.</p> |
| | <p><i>Backing:</i> (Paragraf ke-10, kalimat ke-2 dan paragraf ke-11, kalimat ke-1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kalaupun, misalnya, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan rekomendasi terhadap pejabat tertentu yang diduga bersalah dalam proses bailout, tak usah panik. 2. Bila Panitia Khusus menduga ada pelanggaran pidana, temuan itu harus dibawa ke ranah hukum. |
| | <p><i>Qualifier:</i> (Paragraf ke-13, kalimat ke-1)</p> <p>Presiden Yudhoyono harus berani menegaskan sikap untuk tidak lagi berkompromi.</p> |
| | <p><i>Rebuttal:</i> (Paragraf ke-8, kalimat ke-3)</p> <p>Tapi, bila demi kekuasaan Presiden harus mengorbankan pembantunya yang tak bersalah-melalui reshuffle kabinet atau barter atau pertukaran bentuk apa pun-perlu disadari bahwa "rongrongan" lawan politik itu tak akan berhenti sampai di situ.</p> |

3.5.1 Topik-Komen dalam Elemen Argumen

Elemen argumen *claim*, *Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sesungguhnya tak punya pilihan selain mengambil alih tanggung jawab kebijakan penyelamatan Bank Century*, merupakan kalimat dengan dua klausa sehingga memiliki dua topik dan dua komen. Topik-komen dalam klausa pertama adalah *Presiden Susilo Bambang Yudhoyono* dan *sesungguhnya tak punya pilihan*, sedangkan topik-

komen dalam klausa kedua adalah *Presiden Susilo Bambang Yudhoyono* (lesap) dan *mengambil alih tanggung jawab kebijakan penyelamatan Bank Century*. Sementara itu, topik-komen dalam *stated reason*, sebagai orang nomor satu pemerintahan negara yang menganut sistem presidensial, di pundak Presidenlah terletak tanggung jawab semua kebijakan eksekutif, adalah sebagai orang nomor satu pemerintahan negara yang menganut sistem presidensial dan di pundak Presidenlah terletak tanggung jawab semua kebijakan eksekutif.

Elemen argumen *ground* pertama, *walau agak terlambat, Presiden harus berani "pasang badan" melindungi dua orang kepercayaannya yang kini menjadi sasaran tembak Panitia Khusus Hak Angket Century, yakni Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani*, merupakan kalimat yang terdiri atas tiga klausa sehingga dalam kalimat tersebut terdapat tiga topik-komen. Topik-komen dalam klausa pertama adalah *Presiden* dan *walau agak terlambat, harus berani "pasang badan"*; topik-komen dalam klausa kedua adalah *walau agak terlambat, Presiden harus berani "pasang badan" dan melindungi*; dan topik-komen dalam klausa ketiga adalah *dua orang kepercayaannya, yakni Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani* dan *yang kini menjadi sasaran tembak Panitia Khusus Hak Angket Century*.

Elemen argumen *ground* kedua, *sebaliknya, Presiden juga harus menjelaskan kebijakan penyelamatan yang menelan dana Rp 6,7 triliun di bank gurem itu*, merupakan kalimat dengan dua klausa yang masing-masing memiliki topik-komen yang berbeda. Topik-komen dalam klausa pertama adalah *Presiden* dan *sebaliknya, juga harus menjelaskan*, sedangkan topik-komen dalam klausa kedua adalah *kebijakan penyelamatan dan yang menelan dana Rp 6,7 triliun di bank gurem itu*.

Elemen argumen *warrant*, *bahwa dialah pihak yang berkewajiban memikul risiko apa pun yang muncul dari kebijakan penyelamatan Century*, terdiri atas dua klausa yang masing-masing memiliki topik-komen yang berbeda. Topik-komen dalam klausa pertama adalah *dialah* dan *pihak yang berkewajiban memikul*, sedangkan topik-komen dalam klausa kedua adalah *risiko apapun dan yang muncul dari kebijakan penyelamatan Century*.

Elemen argumen *backing* pertama, *walaupun, misalnya, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan rekomendasi terhadap pejabat tertentu*

yang diduga bersalah dalam proses bailout, tak usah panik, terdiri atas tiga klausa. Topik-komen dalam klausa pertama adalah *rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat* dan *kalaupun, misalnya, menetapkan rekomendasi*; topik-komen dalam klausa kedua adalah *pejabat tertentu* dan *yang diduga bersalah dalam proses bailout*; dan topik-komen dalam klausa ketiga adalah *Presiden (lesap)* dan *tak usah panik*. Adapun *backing* kedua, *bila Panitia Khusus menduga ada pelanggaran pidana, temuan itu harus dibawa ke ranah hukum*, terdiri atas dua klausa. Topik-komen dalam klausa pertama adalah *Panitia Khusus* dan *bila menduga ada pelanggaran pidana*, sedangkan topik-komen dalam klausa kedua adalah *temuan itu* dan *harus dibawa ke ranah hukum*.

Elemen argumen *qualifier*, *Presiden Yudhoyono harus berani menegaskan sikap untuk tidak lagi berkompromi*, yang juga merupakan kalimat dengan dua klausa, memiliki dua topik-komen. Topik-komen dalam klausa pertama adalah *Presiden Yudhoyono* dan *harus berani menegaskan sikap*, sedangkan topik-komen dalam klausa kedua adalah *Presiden Yudhoyono (lesap)* dan *tidak lagi berkompromi*.

Terakhir, elemen argumen *rebuttal*, *tapi, bila demi kekuasaan Presiden harus mengorbankan pembantunya yang tak bersalah-melalui reshuffle kabinet atau barter atau pertukaran bentuk apa pun-perlu disadari bahwa "rongrongan" lawan politik itu tak akan berhenti sampai di situ*, terdiri atas lima klausa sehingga memiliki lima topik-komen. Topik-komen dalam klausa pertama adalah *Presiden* dan *tapi, bila demi kekuasaan harus mengorbankan*; topik-komen dalam klausa kedua adalah *pembantunya* dan *yang tak bersalah*; topik-komen dalam klausa ketiga adalah *tapi, bila demi kekuasaan Presiden harus mengorbankan pembantunya yang tak bersalah* dan *melalui reshuffle kabinet atau barter atau pertukaran bentuk apa pun*; topik-komen dalam klausa keempat adalah *Presiden (lesap)* dan *perlu disadari*; dan topik-komen dalam klausa kelima adalah *"rongrongan" lawan politik itu* dan *tak akan berhenti sampai di situ*.

Tabel 8.3 Topik-Komen dalam Elemen Argumen Teks SPDEAC

| Judul Opini | Elemen Argumen |
|-------------|--|
| SPDEAC | <p>Claim: (Paragraf ke-1, kalimat ke-1)</p> <p>Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sesungguhnya tak punya pilihan selain mengambil alih tanggung jawab kebijakan penyelamatan Bank Century.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2. Ø (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesungguhnya tak punya pilihan 2. Selain mengambil alih tanggung jawab kebijakan penyelamatan Bank Century. <p style="text-align: right;">Stated Reason (Paragraf ke-1, kalimat ke-2)</p> <p>(Karena) Sebagai orang nomor satu pemerintahan negara yang menganut sistem presidensial, di pundak Presidenlah terletak tanggung jawab semua kebijakan eksekutif.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ø (presiden) 2. Negara 3. Tanggung jawab semua kebijakan eksekutif <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai orang nomor satu pemerintahan 2. Yang menganut sistem presidensial 3. Terletak di pundak Presiden |
| | <p>Ground: (Paragraf ke-2, kalimat ke-1 dan paragraf ke-5, kalimat ke-3)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Walau agak terlambat, Presiden harus berani "pasang badan" melindungi dua orang kepercayaannya yang kini menjadi sasaran tembak Panitia Khusus Hak Angket Century, yakni Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden 2. Ø (Presiden) 3. Dua orang kepercayaannya, yakni Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Walau agak terlambat, harus berani "pasang badan" 2. Melindungi 3. Yang kini menjadi sasaran tembak Panitia Khusus Hak Angket Century <ol style="list-style-type: none"> 2. Sebaliknya, Presiden juga harus menjelaskan kebijakan penyelamatan yang menelan dana Rp 6,7 triliun di bank gurem itu. <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden 2. Kebijakan penyelamatan |

| | |
|--|--|
| | <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebaliknya, juga harus menjelaskan 2. Yang menelan dana Rp 6,7 triliun di bank gurem itu <hr/> <p>Warrant: (Paragraf ke-2, kalimat ke-3)</p> <p>Bahwa dialah pihak yang berkewajiban memikul risiko apa pun yang muncul dari kebijakan penyelamatan Century.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dialah 2. Risiko apapun <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak yang berkewajiban memikul 2. Yang muncul dari kebijakan penyelamatan Century <hr/> <p>Backing: (Paragraf ke-10, kalimat ke-2 dan Paragraf ke-11, kalimat ke-1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kalaupun, misalnya, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan rekomendasi terhadap pejabat tertentu yang diduga bersalah dalam proses bailout, tak usah panik. <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat 2. Pejabat tertentu 3. Ø (presiden) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kalaupun, misalnya, menetapkan rekomendasi 2. Yang diduga bersalah dalam proses bailout 3. Tak usah panik <ol style="list-style-type: none"> 2. Bila Panitia Khusus menduga ada pelanggaran pidana, temuan itu harus dibawa ke ranah hukum. <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Panitia Khusus 2. Temuan itu <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bila menduga ada pelanggaran pidana 2. Harus dibawa ke ranah hukum <hr/> <p>Qualifier: (Paragraf ke-13, kalimat ke-1)</p> <p>Presiden Yudhoyono harus berani menegaskan sikap untuk tidak lagi berkompromi.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden Yudhoyono 2. Ø (Presiden Yudhoyono) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harus berani menegaskan sikap 2. Tidak lagi berkompromi <hr/> <p>Rebuttal: (Paragraf ke-8, kalimat ke-3)</p> <p>Tapi, bila demi kekuasaan Presiden harus mengorbankan pembantunya yang tak bersalah-melalui reshuffle kabinet atau barter atau pertukaran</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | <p>bentuk apa pun-perlu disadari bahwa "rongrongan" lawan politik itu tak akan berhenti sampai di situ.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden 2. Pembantunya 3. Ø (tapi, bila demi kekuasaan Presiden harus mengorbankan pembantunya yang tak bersalah) 4. Ø (presiden) 5. "Rongrongan" lawan politik itu <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tapi, bila demi kekuasaan harus mengorbankan 2. Yang tak bersalah 3. Melalui reshuffle kabinet atau barter atau pertukaran bentuk apa pun 4. Perlu disadari 5. Tak akan berhenti sampai di situ |
|--|--|

3.4.2 Hubungan Topik-Komen Antarelemen Argumen

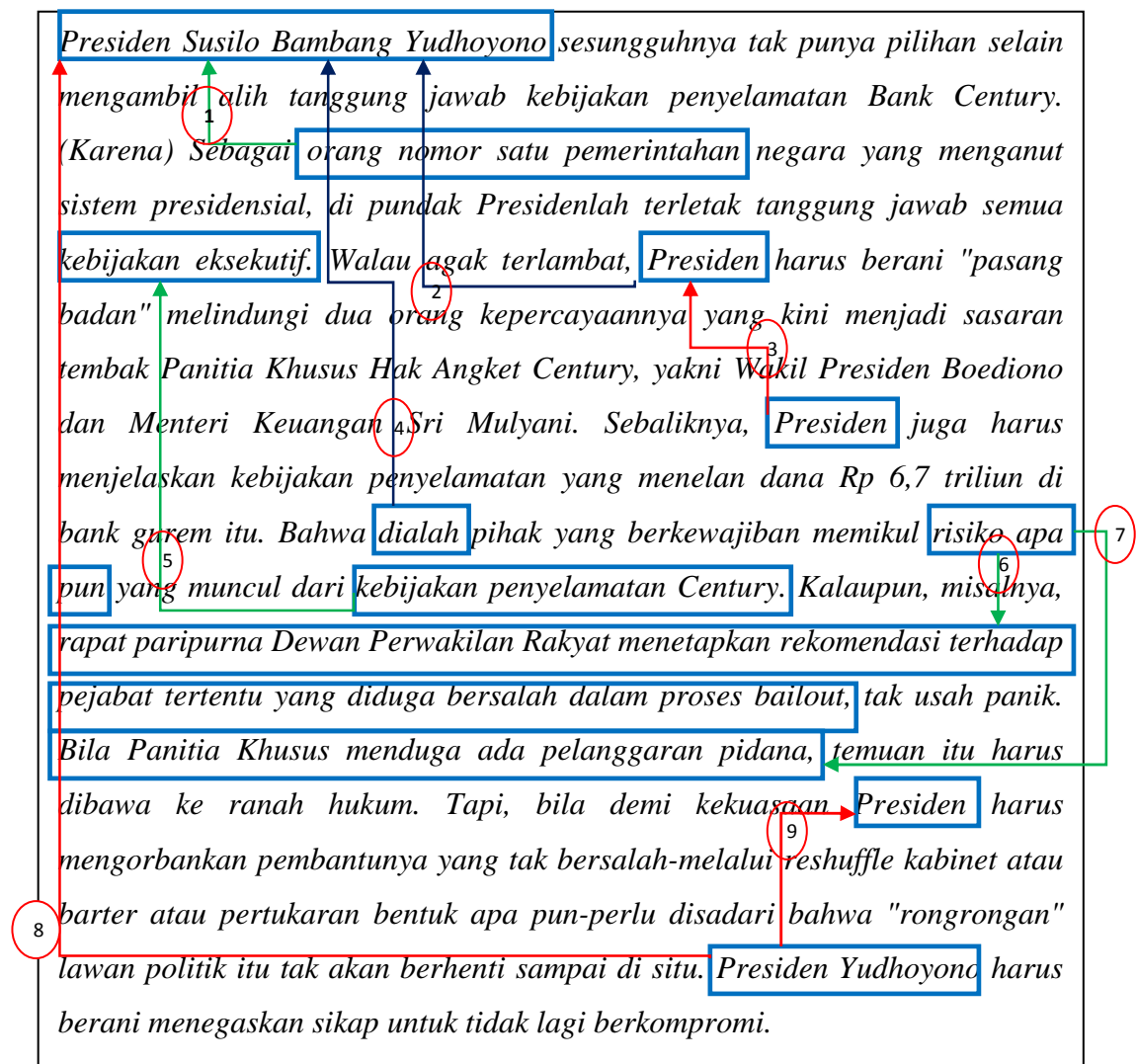
Topik dalam elemen argumen *claim*, yaitu *Presiden Susilo Bambang Yudhoyono*, dan bagian dari komen dalam *stated reason*, yaitu *orang nomor satu pemerintahan*, terikat dalam hubungan kohesi leksikal hiponim. Kohesi referensi mengikat topik dalam elemen argumen *ground* (1) dan bagian dari topik dalam *stated reason*. Topik dalam elemen argumen *ground* (1), yaitu *Presiden*, dan bagian dari komen dalam *stated reason*, yaitu *orang nomor satu pemerintahan*, terikat dalam hubungan kohesi leksikal sinonim. Sementara itu, hubungan kohesi leksikal repetisi mengikat elemen *ground* (1) dan (2) melalui topik dalam *ground* (1) dan (2), yaitu *Presiden*.

Hubungan antara elemen argumen *warrant* dan elemen argumen *claim* diikat dengan kohesi referensi, yaitu antara topik *dialah* dalam *warrant* dan topik *Presiden Susilo Bambang Yudhoyono* dalam *claim*. Di samping itu, bagian dari komen dalam *warrant*, yaitu *kebijakan penyelamatan Century*, juga berhubungan dengan bagian dari komen dalam *stated reason*, yaitu *kebijakan eksekutif*. Keduanya terikat dalam hubungan kohesi leksikal hiponim.

Elemen argumen *warrant* dan elemen argumen *backing* (1) dan (2) terikat oleh hubungan kohesi leksikal hiponim yang terjadi antara topik-komen dalam *warrant*, yaitu *risiko apa pun yang muncul dari kebijakan penyelamatan Century* dan topik-komen dalam *backing* (1), *rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan rekomendasi terhadap pejabat tertentu yang diduga bersalah dalam*

proses bailout, serta topik-komen dalam *backing* (2), bila Panitia Khusus menduga ada pelanggaran pidana.

Hubungan kohesi leksikal repetisi menjadi pengikat antara topik dalam *claim*, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan topik pada *qualifier*, yaitu pada *Presiden Yudhoyono*. Terakhir, elemen argumen *rebuttal* dan elemen argumen *qualifier* terikat oleh hubungan referensi, yaitu antara topik *Presiden* dalam *rebuttal* dan topik *Presiden Yudhoyono* dalam *qualifier*. Elemen-elemen argumen di atas dapat bersatu membentuk kesatuan sebagai berikut.



Keterangan:

Bagan 4.3 Kesatuan Argumen Teks SPDEAC

- 1 : Kohesi Leksikal Hiponim
- 2 : Kohesi Referensi
- 3 : Kohesi Leksikal Repetisi

- 4 : Kohesi Referensi
- 5 : Kohesi Leksikal Hiponim
- 6 : Kohesi Leksikal Hiponim
- 7 : Kohesi Leksikal Hiponim
- 8 : Kohesi Leksikal Repetisi
- 9 : Kohesi Referensi

3.6 Susunan Elemen Argumen Teks Opini

“Kembali Kunjungi Negeri Belanda”

Penelusuran elemen argumen dalam teks opini KKNB menghasilkan temuan *claim* yang terpisah dari *stated reason*. *Claim* dalam hal ini adalah kalimat ke-1 dalam paragraf ke-1, yaitu *mestinya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak secara mendadak membatalkan keberangkatannya ke Belanda*, sedangkan *stated reason* dalam hal ini adalah kalimat ke-1 dalam paragraf ke-4, yaitu *sikap Presiden Yudhoyono yang mendadak balik kanan justru "kemenangan" bagi RMS*.

Claim dan *stated reason* membentuk pernyataan yang menunjukkan sebab-akibat sebagai berikut.

Claim: Mestinya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak secara mendadak membatalkan keberangkatannya ke Belanda.

Stated Reason: (Karena) Sikap Presiden Yudhoyono yang mendadak balik kanan justru "kemenangan" bagi RMS.

Pengabungan keduanya membentuk pernyataan sebab-akibat sebagai berikut.

Mestinya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak secara mendadak membatalkan keberangkatannya ke Belanda karena sikap Presiden Yudhoyono yang mendadak balik kanan justru "kemenangan" bagi RMS.

Elemen argumen *claim* di atas terdiri atas dua proposisi sebagai berikut.

- (1) Presiden SBY membatalkan keberangkatannya ke Belanda;
- (2) Pembatalan keberangkatan Presiden SBY ke Belanda dilakukan secara mendadak.

Sementara itu, *stated reason* juga mengandung dua proposisi sebagai berikut.

- (1) Presiden Yudhoyono bersikap balik kanan;
- (2) RMS “menang”.

Proposisi yang relevan dari elemen argumen *claim* dan *stated reason* masing-masing adalah *Presiden SBY membatalkan keberangkatannya ke Belanda* dan *RMS menang*. Dari kedua proposisi itu tampak adanya koherensi kausal yang mencerminkan hubungan konsekuensi, yaitu hubungan yang mengindikasikan konsekuensi yang harus dijalani. Penulis opini di sini berpendapat bahwa dengan batalnya kunjungan Presiden SBY ke Belanda, ada kesan yang kemudian muncul, yaitu RMS seolah-olah menang. “Kemenangan” RMS ini merupakan konsekuensi yang harus dijalani atau “ditelan” oleh Presiden SBY.

Setelah *claim* ditemukan, diajukan pertanyaan untuk mendapatkan *ground*, yaitu apa bukti yang membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membatalkan keberangkatannya ke Belanda. Kalimat yang menunjukkan jawaban dari pertanyaan itu adalah kalimat ke-2, ke-3, dan ke-4 dalam paragraf ke-2, yaitu *semula, Presiden mendapat kabar bahwa aktivis Republik Maluku Selatan menggugat ke pengadilan Belanda meminta Yudhoyono ditangkap; yang dipersalahkan adalah pelanggaran hak asasi manusia di Maluku; dan gugatan dimasukkan beberapa hari sebelum Yudhoyono bertolak*.

Setelah *ground* ditemukan, diajukan pertanyaan untuk mendapatkan *warrant*, yaitu apa yang menguatkan kalimat *Mestinya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak secara mendadak membatalkan keberangkatannya ke Belanda* dan menghubungkan kalimat tersebut dengan kalimat *sikap Presiden Yudhoyono yang mendadak balik kanan justru "kemenangan" bagi RMS*. Kalimat yang merupakan jawaban dari pertanyaan di atas adalah kalimat ke-2 dalam paragraf ke-4, yaitu *menjadikan gugatan kelompok separatis itu sebagai alasan pembatalan hanya membesar-besarkan mereka yang sesungguhnya sudah tak punya gigi*.

Kemudian, pertanyaan untuk menemukan *backing* adalah apa yang melatarbelakangi kalimat *menjadikan gugatan kelompok separatis itu sebagai alasan pembatalan hanya membesar-besarkan mereka yang sesungguhnya sudah tak punya gigi*. Jawaban pertanyaan itu adalah kalimat ke-3, ke-4, dan ke-5 dalam paragraf ke-4, yaitu *di Belanda, keberadaan mereka tak diakui pemerintah; aktivis RMS di pengasingan saat ini umumnya orang tua yang tak punya banyak*

aktivitas; dan RMS bukan apa-apa jika dibandingkan dengan aktivis Gerakan Aceh Merdeka di Swedia, sebelum perjanjian damai Helsinki.

Setelah *claim*, *ground*, *warrant*, dan *backing* ditemukan, pertanyaan untuk mendapatkan elemen *rebuttal* adalah adakah kondisi yang berupa kemungkinan pengecualian atau perlawanan. Jawaban pertanyaan tersebut adalah kalimat ke-1 dalam paragraf ke-8, yaitu *tak ada salahnya jika Presiden memberikan sinyal kepada pemerintah Belanda bahwa ia menyadari kekeliruannya*. Di sini penulis opini mengemukakan kalimat yang berupa saran terhadap subjek untuk menandai kondisi pengecualian tersebut.

Selanjutnya, untuk mendapatkan elemen *qualifier*, diajukan pertanyaan, yaitu adakah kondisi yang berupa syarat yang berkaitan dengan *claim*. Jawabannya adalah kalimat ke-4 dalam paragraf ke-7, yaitu *Presiden harus menjadwalkan ulang kunjungan kenegaraan yang sudah dipersiapkan matang oleh tuan rumah tersebut*. Penulis opini menggunakan modalitas *harus* sehingga secara keseluruhan kalimat tersebut mencerminkan sebuah kondisi persyaratan.

Tabel 9.3 Susunan Elemen Argumen Teks KKNB

| Judul Opini | Elemen Argumen |
|-------------|--|
| KKNB | <p><i>Claim:</i> (Paragraf ke-1, kalimat ke-1)</p> <p>Mestinya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak secara mendadak membatalkan keberangkatannya ke Belanda.</p> <p style="text-align: right;"><i>Stated Reason</i> (Paragraf ke-4, kalimat ke-1)</p> <p>(Karena) Sikap Presiden Yudhoyono yang mendadak balik kanan justru "kemenangan" bagi RMS.</p> |
| | <p><i>Ground:</i> (Paragraf ke-2, kalimat ke-2, ke-3, dan ke-4)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semula, Presiden mendapat kabar bahwa aktivis Republik Maluku Selatan menggugat ke pengadilan Belanda meminta Yudhoyono ditangkap. 2. Yang dipersoalkan adalah pelanggaran hak asasi manusia di Maluku. 3. Gugatan dimasukkan beberapa hari sebelum Yudhoyono bertolak. |

| |
|--|
| <p><i>Warrant:</i> (Paragraf ke-4, kalimat ke-2)</p> <p>Menjadikan gugatan kelompok separatis itu sebagai alasan pembatalan hanya membesar-besarkan mereka yang sesungguhnya sudah tak punya gigi.</p> |
| <p><i>Backing:</i> (Paragraf ke-4, kalimat ke-3, ke-4, dan ke-5)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Di Belanda, keberadaan mereka tak diakui pemerintah. 2. Aktivistis RMS di pengasingan saat ini umumnya orang tua yang tak punya banyak aktivitas. 3. RMS bukan apa-apa jika dibandingkan dengan aktivis Gerakan Aceh Merdeka di Swedia, sebelum perjanjian damai Helsinki. |
| <p><i>Qualifier:</i> (Paragraf ke-7, kalimat ke-4)</p> <p>Presiden harus menjadwalkan ulang kunjungan kenegaraan yang sudah dipersiapkan matang oleh tuan rumah tersebut.</p> |
| <p><i>Rebuttal:</i> (Paragraf ke-8, kalimat ke-1)</p> <p>Tak ada salahnya jika Presiden memberikan sinyal kepada pemerintah Belanda bahwa ia menyadari kekeliruannya.</p> |

3.6.1 Topik-Komen dalam Elemen Argumen

Topik-komen dalam elemen argumen *claim*, *mestinya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak secara mendadak membatalkan keberangkatannya ke Belanda*, adalah *Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mestinya tidak secara mendadak membatalkan keberangkatannya ke Belanda*. Sementara itu, *stated reason*, yaitu *sikap Presiden Yudhoyono yang mendadak balik kanan justru "kemenangan" bagi RMS*, merupakan kalimat dengan dua klausa. Topik-komen dalam klausa pertama adalah *sikap Presiden Yudhoyono dan yang mendadak balik kanan*, sedangkan topik-komen dalam klausa kedua adalah *Presiden Yudhoyono yang mendadak balik kanan dan justru "kemenangan" bagi RMS*.

Elemen argumen *ground* pertama, *semula, Presiden mendapat kabar bahwa aktivis Republik Maluku Selatan menggugat ke pengadilan Belanda meminta Yudhoyono ditangkap*, merupakan kalimat dengan tiga klausa. Topik-komen dalam klausa pertama adalah *Presiden dan semula, mendapat kabar*; topik-komen dalam klausa kedua adalah *aktivis Republik Maluku Selatan dan menggugat ke pengadilan Belanda*; dan topik-komen dalam klausa ketiga adalah *aktivis Republik Maluku Selatan (lesap) dan meminta Yudhoyono ditangkap*.

Topik-komen dalam elemen argumen *ground* kedua, yang dipersoalkan adalah pelanggaran hak asasi manusia di Maluku, adalah yang dipersoalkan dan adalah pelanggaran hak asasi manusia di Maluku. Adapun elemen argumen *ground* ketiga, gugatan dimasukkan beberapa hari sebelum Yudhoyono bertolak, merupakan kalimat dengan dua klausa. Topik-komen dalam klausa pertama adalah *gugatan* dan *dimasukkan*, sedangkan topik-komen dalam klausa kedua adalah *Yudhoyono* dan *sebelum beberapa hari bertolak*.

Elemen argumen *warrant*, menjadikan gugatan kelompok separatis itu sebagai alasan pembatalan hanya membesar-besarkan mereka yang sesungguhnya sudah tak punya gigi, terdiri atas dua klausa. Topik-komen dalam klausa pertama adalah *menjadikan gugatan kelompok separatis itu sebagai alasan pembatalan* dan *hanya membesar-besarkan*, sedangkan topik-komen dalam klausa kedua adalah *mereka* dan *yang sesungguhnya sudah tak punya gigi*.

Kemudian, topik-komen elemen argumen *backing* pertama, di Belanda, keberadaan mereka tak diakui pemerintah, adalah keberadaan mereka dan di Belanda, tak diakui pemerintah. Adapun elemen argumen *backing* kedua, aktivis RMS di pengasingan saat ini umumnya orang tua yang tak punya banyak aktivitas, merupakan kalimat yang terdiri atas dua klausa. Topik-komen dalam klausa pertama adalah *aktivis RMS di pengasingan* dan *saat ini umumnya*, sedangkan topik-komen dalam klausa kedua adalah *orang tua* dan *yang tak punya banyak aktivitas*. Elemen argumen *backing* ketiga, *RMS bukan apa-apa jika dibandingkan dengan aktivis Gerakan Aceh Merdeka di Swedia, sebelum perjanjian damai Helsinki*, terdiri atas dua klausa. Topik dan komen dalam klausa pertama adalah *RMS* dan *bukan apa-apa*, sedangkan topik dan komen dalam klausa kedua adalah *RMS (lesap)* dan *jika dibandingkan dengan aktivis Gerakan Aceh Merdeka di Swedia, sebelum perjanjian damai Helsinki*.

Elemen argumen *qualifier*, *Presiden harus menjadwalkan ulang kunjungan kenegaraan yang sudah dipersiapkan matang oleh tuan rumah tersebut*, merupakan kalimat dengan dua klausa sehingga di dalamnya terdapat dua topik-komen. Topik-komen dalam klausa pertama adalah *Presiden* dan *harus menjadwalkan ulang*, sedangkan topik-komen dalam klausa kedua adalah *kunjungan kenegaraan* dan *yang sudah dipersiapkan matang oleh tuan rumah tersebut*.

Sementara itu, elemen argumen *rebuttal*, *tak ada salahnya jika Presiden memberikan sinyal kepada pemerintah Belanda bahwa ia menyadari kekeliruannya*, merupakan kalimat dengan dua klausa. Topik-komen dalam klausa pertama adalah *Presiden* dan *tak ada salahnya jika memberikan sinyal kepada pemerintah Belanda*, sedangkan topik-komen dalam klausa kedua adalah *Ia* dan *menyadari kekeliruannya*.

Tabel 10.3 Topik-Komen dalam Elemen Argumen Teks KKNB

| Judul Opini | Elemen Argumen |
|-------------|---|
| KKNB | <p>Claim: (Paragraf ke-1, kalimat ke-1)</p> <p>Mestinya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak secara mendadak membatalkan keberangkatannya ke Belanda.</p> <p>Topik: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono</p> <p>Komen: Mestinya tidak secara mendadak membatalkan keberangkatannya ke Belanda</p> <p style="text-align: right;">Stated Reason (Paragraf ke-4, kalimat ke-1)</p> <p>(Karena) Sikap Presiden Yudhoyono yang mendadak balik kanan justru "kemenangan" bagi RMS.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap Presiden Yudhoyono 2. Ø (sikap Presiden Yudhoyono yang mendadak balik kanan) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang mendadak balik kanan 2. Justru "kemenangan" bagi RMS |
| | <p>Ground: (Paragraf ke-2, kalimat ke-2, ke-3, dan ke-4)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semula, Presiden mendapat kabar bahwa aktivis Republik Maluku Selatan menggugat ke pengadilan Belanda meminta Yudhoyono ditangkap. <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden 2. Aktivis Republik Maluku Selatan 3. Ø (Aktivis Republik Maluku Selatan) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semula, mendapat kabar 2. Menggugat ke pengadilan Belanda 3. Meminta Yudhoyono ditangkap <p>2. Yang dipersoalkan adalah pelanggaran hak asasi manusia di Maluku.</p> <p>Topik: Yang dipersoalkan</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>Komen: Adalah pelanggaran hak asasi manusia di Maluku</p> <p>3. Gugatan dimasukkan beberapa hari sebelum Yudhoyono bertolak.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gugatan 2. Yudhoyono <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dimasukkan 2. Beberapa hari sebelum bertolak |
| | <p>Warrant: (Paragraf ke-4, kalimat ke-2)</p> <p>Menjadikan gugatan kelompok separatis itu sebagai alasan pembatalan hanya membesar-besarkan mereka yang sesungguhnya sudah tak punya gigi.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan gugatan kelompok separatis itu sebagai alasan pembatalan 2. Mereka <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hanya membesar-besarkan 2. Yang sesungguhnya sudah tak punya gigi |
| | <p>Backing: (Paragraf ke-4, kalimat ke-3, ke-4, dan ke-5)</p> <p>1. Di Belanda, keberadaan mereka tak diakui pemerintah.</p> <p>Topik: Keberadaan mereka</p> <p>Komen: Di Belanda, tak diakui pemerintah</p> <p>2. Aktivis RMS di pengasingan saat ini umumnya orang tua yang tak punya banyak aktivitas.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktivis RMS di pengasingan 2. Orang tua <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saat ini umumnya 2. Yang tak punya banyak aktivitas <p>3. RMS bukan apa-apa jika dibandingkan dengan aktivis Gerakan Aceh Merdeka di Swedia, sebelum perjanjian damai Helsinki.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RMS 2. Ø (RMS) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukan apa-apa 2. Jika dibandingkan dengan aktivis Gerakan Aceh Merdeka di Swedia, sebelum perjanjian damai Helsinki |

| |
|--|
| <p>Qualifier: (Paragraf ke-7, kalimat ke-4)</p> <p>Presiden harus menjadwalkan ulang kunjungan kenegaraan yang sudah dipersiapkan matang oleh tuan rumah tersebut.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden 2. Kunjungan kenegaraan <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harus menjadwalkan ulang 2. Yang sudah dipersiapkan matang oleh tuan rumah tersebut |
| <p>Rebuttal: (Paragraf ke-8, kalimat ke-1)</p> <p>Tak ada salahnya jika Presiden memberikan sinyal kepada pemerintah Belanda bahwa ia menyadari kekeliruannya.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden 2. Ia <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tak ada salahnya jika memberikan sinyal kepada pemerintah Belanda 2. Menyadari kekeliruannya |

3.6.2 Hubungan Topik-Komen Antarelemen Argumen

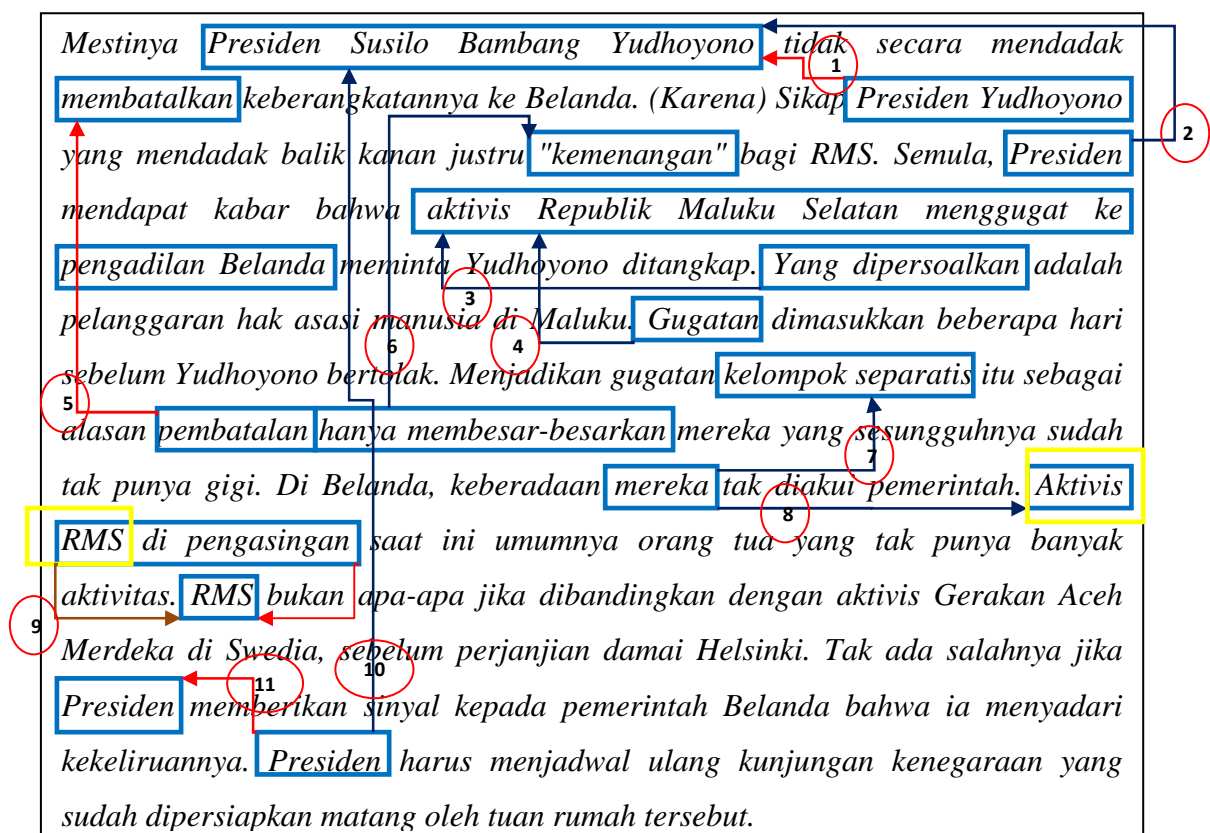
Elemen argumen *claim* dan *stated reason* terikat hubungan kohesi leksikal repetisi, yaitu pada topik dalam *claim*, *Presiden Susilo Bambang Yudhoyono*, dan pada bagian dari topik dalam *stated reason*, yaitu *Presiden Yudhoyono*. Kohesi referensi mengikat *claim* dan *ground* (1), tepatnya antara topik dalam *claim*, *Presiden Susilo Bambang Yudhoyono*, dan topik dalam *ground* (1), *Presiden*.

Elemen *ground* (1) dan (2) terikat oleh kohesi referensi, yaitu antara topik dalam *ground* (2), *yang dipersoalkan*, dan topik-komen dalam *ground* (2), *aktivis Republik Maluku Selatan menggugat ke pengadilan Belanda*. Hubungan yang sama juga mengikat *ground* (2) dan (3), yaitu pada topik dalam *ground* (3), *gugatan*, dan topik-komen dalam *ground* (1), *aktivis Republik Maluku Selatan menggugat ke pengadilan Belanda*.

Hubungan kohesi leksikal repetisi mengikat elemen argumen *warrant* dengan elemen argumen *claim*, pada bagian dari topik dalam *warrant*, *pembatalan*, dan bagian dari komen dalam *claim*, yaitu *membatalkan*. Kohesi referensi mengikat elemen argumen *warrant* dan *stated reason*, pada komen dalam *warrant*, yaitu *hanya membesar-besarkan*, dan bagian dari komen dalam *stated reason*, yaitu “*kemenangan*”.

Elemen argumen *warrant* dan elemen argumen *backing* terikat oleh adanya kohesi referensi, yaitu antara bagian dari topik dalam *backing*, mereka dalam *keberadaan mereka*, dan bagian dari topik dalam *warrant*, yaitu *kelompok separatis* dalam *menjadikan gugatan kelompok separatis itu sebagai alasan pembatalan*. Elemen argumen *backing* (1) dan *backing* (2) juga terikat oleh kohesi referensi, tepatnya pada bagian dari topik dalam *backing* (1), mereka dalam *keberadaan mereka*, dan topik dalam *backing* (2), *aktivis RMS di pengasingan*. Elemen argumen *backing* (2) terikat hubungan meronim dengan elemen argumen *backing* (3), yaitu pada bagian dari topik *backing* (2), *aktivis RMS*, dan topik pada *backing* (3), *RMS*.

Elemen argumen *qualifier* terikat dengan elemen argumen *claim* dengan hubungan kohesi referensi, yaitu pada topik dalam *qualifier*, *Presiden*, dan topik dalam *claim*, *Presiden Susilo Bambang Yudhoyono*. Hubungan kohesi leksikal repetisi, juga mengikat elemen argumen *qualifier* dan *rebuttal*, yaitu topik dalam *qualifier* dan topik dalam *rebuttal*, yaitu *Presiden*. Penggabungan elemen-elemen argumen di atas menghasilkan kesatuan argumen sebagai berikut.



Bagan 5.3 Kesatuan Argumen Teks KKNB

Keterangan:

- 1 : Kohesi Leksikal Repetisi
- 2 : Kohesi Referensi
- 3 : Kohesi Referensi
- 4 : Kohesi Referensi
- 5 : Kohesi Leksikal Repetisi
- 6 : Kohesi Referensi
- 7 : Kohesi Referensi
- 8 : Kohesi Referensi
- 9 : Kohesi Leksikal Meronim
- 10 : Kohesi Referensi
- 11 : Kohesi Leksikal Repetisi

3.7 Susunan Elemen Argumen Teks Opini “SBY dan RMS”

Tidak seperti teks-teks opini sebelumnya, penelusuran elemen argumen dalam teks ini menghasilkan temuan *claim* yang menyatu dengan *stated reason* sehingga masing-masing bukan berupa kalimat tersendiri, melainkan dua klausa dalam sebuah kalimat majemuk yang menunjukkan hubungan *sebab-akibat*. *Stated reason* merupakan anak kalimat yang mendahului *claim* yang merupakan induk kalimat. *Claim* dan *stated reason* dalam teks opini ini adalah kalimat ke-1 dalam paragraf ke-4, yaitu *karena ini merupakan gugatan perdata, sebenarnya tidak ada proses penangkapan atau penahanan*.

Jika susunan *claim* dan *stated reason* diumpamakan terbalik, keduanya dapat membentuk pernyataan sebagai berikut.

Sebenarnya tidak ada proses penangkapan atau penahanan karena ini merupakan gugatan perdata.

Proposisi dalam pernyataan tersebut adalah sebagai berikut.

- (1) Proses penangkapan tidak ada;
- (2) Proses penahanan tidak ada;
- (3) Ini merupakan gugatan perdata.

Konstruksi dari proposisi-proposisi tersebut adalah sebagai berikut.

Ini merupakan gugatan perdata. Proses penangkapan dan penahanan tidak ada.

Dengan demikian, tampak adanya koherensi kausal kondisi, yaitu situasi yang mengindikasikan syarat untuk sebuah kemungkinan. Dalam hal ini, penulis kemungkinan bermaksud sebaliknya, yaitu bahwa proses penangkapan dan penahanan akan ada bila gugatannya adalah gugatan pidana.

Setelah *claim* ditemukan, diajukan pertanyaan untuk mendapatkan *ground*, yaitu apa bukti gugatan perdata yang dimaksud sehingga tidak ada proses penangkapan atau penahanan. Kalimat yang menunjukkan jawaban dari pertanyaan itu adalah kalimat ke-3 dalam paragraf ke-3 dan kalimat ke-2 dalam paragraf ke-7, yaitu *dan RMS mengajukan upaya hukum berupa gugatan yang dikategorikan dalam ranah hukum perdata dan para penggugat meminta kepada pengadilan agar memerintahkan Kementerian Luar Negeri Belanda untuk mencabut imunitas yang ada pada SBY sebagai kepala negara ketika beliau berkunjung ke Belanda.*

Setelah *ground* ditemukan, diajukan pertanyaan untuk mendapatkan *warrant*, yaitu apa yang menguatkan klausa *sebenarnya tidak ada proses penangkapan atau penahanan* dan menghubungkan klausa tersebut dengan klausa *karena ini merupakan gugatan perdata*. Kalimat yang merupakan jawaban dari pertanyaan di atas adalah kalimat ke-2 dalam paragraf ke-4, yaitu *hukum perdata tidak mengenal penangkapan atau penahanan.*

Selanjutnya, untuk menemukan *backing*, diajukan pertanyaan, yaitu apa yang melatarbelakangi kalimat *hukum perdata tidak mengenal penangkapan atau penahanan*. Jawaban pertanyaan itu adalah kalimat ke-1, ke-2, dan ke-3 dalam paragraf ke-5, yaitu *penangkapan ataupun penahanan hanya dapat dilakukan dalam ranah hukum pidana; inisiatif dimulainya proses perkara pidana haruslah institusi negara, seperti kejaksaan atau kepolisian; dan tidak mungkin perkara pidana dilakukan oleh individu yang tidak memegang jabatan dalam institusi negara.*

Setelah *claim*, *ground*, *warrant*, dan *backing* ditemukan, pertanyaan untuk mendapatkan elemen *rebuttal* adalah adakah kondisi yang berupa kemungkinan pengecualian atau perlawanan. Jawaban pertanyaan tersebut adalah kalimat ke-1 dalam paragraf ke-12, yaitu *sayangnya, pemerintah Indonesia termakan oleh intimidasi yang dilakukan RMS*. Dalam hal ini, penulis opini

menggunakan pilihan kata *sayangnya* untuk menandai kondisi perlawanan tersebut.

Selanjutnya, untuk mendapatkan elemen *qualifier*, diajukan pertanyaan, yaitu adakah kondisi yang berupa syarat yang berkaitan dengan *claim*. Jawabannya adalah kalimat ke-2 dalam paragraf ke-14, yaitu *seharusnya KBRI Den Haag ataupun Kementerian Luar Negeri meminta para ahli hukum, baik di Belanda maupun Indonesia, untuk mempelajari upaya hukum yang dilancarkan oleh RMS sebelum memberikan masukan kepada Presiden*. Penulis opini menggunakan modalitas *seharusnya* sehingga secara keseluruhan kalimat tersebut mencerminkan sebuah kondisi persyaratan.

Tabel 11.3 Susunan Elemen Argumen Teks SDR

| Judul Opini | Elemen Argumen |
|-------------|---|
| SDR | <p><i>Claim</i> dan <i>Stated Reason</i> (Paragraf ke-4, kalimat ke-1)</p> <p>Karena ini merupakan gugatan perdata, sebenarnya tidak ada proses penangkapan atau penahanan.</p> |
| | <p><i>Ground:</i> (Paragraf ke-3, kalimat ke-3 dan Paragraf ke-7, kalimat ke-2)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dan RMS mengajukan upaya hukum berupa gugatan yang dikategorikan dalam ranah hukum perdata. 2. Para penggugat meminta kepada pengadilan agar memerintahkan Kementerian Luar Negeri Belanda untuk mencabut imunitas yang ada pada SBY sebagai kepala negara ketika beliau berkunjung ke Belanda. |
| | <p><i>Warrant:</i> (Paragraf ke-4, kalimat ke-2)</p> <p>Hukum perdata tidak mengenal penangkapan atau penahanan.</p> |
| | <p><i>Backing:</i> (Paragraf ke-5, kalimat ke-1, ke-2, dan ke-3)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penangkapan ataupun penahanan hanya dapat dilakukan dalam ranah hukum pidana. 2. Inisiatif dimulainya proses perkara pidana haruslah institusi negara, seperti kejaksaan atau kepolisian. 3. Tidak mungkin perkara pidana dilakukan oleh individu yang tidak memegang jabatan dalam institusi negara. |

| |
|--|
| <p><i>Qualifier:</i> (Paragraf ke-14, kalimat ke-2)</p> <p>Seharusnya KBRI Den Haag ataupun Kementerian Luar Negeri meminta para ahli hukum, baik di Belanda maupun Indonesia, untuk mempelajari upaya hukum yang dilancarkan oleh RMS sebelum memberikan masukan kepada Presiden.</p> |
| <p><i>Rebuttal:</i> (Paragraf ke-12, kalimat ke-1)</p> <p>Sayangnya, pemerintah Indonesia termakan oleh intimidasi yang dilakukan RMS.</p> |

3.7.1 Topik-Komen dalam Elemen Argumen

Dalam elemen argumen *claim* yang menyatu dengan *stated reason*, karena ini merupakan gugatan perdata, sebenarnya tidak ada proses penangkapan atau penahanan, terkandung dua topik-komen karena elemen argumen claim merupakan kalimat dengan dua klausa. Topik-komen dalam klausa pertama adalah *ini* dan *karena merupakan gugatan perdata*, sedangkan topik-komen dalam klausa kedua adalah proses penangkapan atau penahanan dan sebenarnya tidak ada.

Selanjutnya, elemen argumen *ground* pertama, dan RMS mengajukan upaya hukum berupa gugatan yang dikategorikan dalam ranah hukum perdata, merupakan kalimat dengan dua klausa. Topik-komen dalam klausa pertama adalah RMS dan mengajukan upaya hukum, sedangkan topik-komen dalam klausa kedua adalah gugatan dan yang dikategorikan dalam ranah hukum perdata. Elemen argumen *ground* kedua, para penggugat meminta kepada pengadilan agar memerintahkan Kementerian Luar Negeri Belanda untuk mencabut imunitas yang ada pada SBY sebagai kepala negara ketika beliau berkunjung ke Belanda, merupakan kalimat dengan empat klausa sehingga di dalam kalimat tersebut terdapat empat topik-komen. Topik-komen dalam klausa pertama adalah para penggugat dan meminta kepada pengadilan; topik-komen dalam klausa kedua adalah pengadilan dan agar memerintahkan Kementerian Luar Negeri Belanda; topik-komen klausa ketiga adalah Kementerian Luar Negeri Belanda dan untuk mencabut imunitas yang ada pada SBY sebagai kepala negara; dan topik-komen dalam klausa keempat adalah beliau dan ketika berkunjung ke Belanda.

Topik-komen dalam elemen argumen *warrant*, hukum perdata tidak mengenal penangkapan atau penahanan, adalah hukum perdata dan tidak

mengenal penangkapan atau penahanan. Kemudian, elemen argumen *backing* dalam teks opini ini ada 3 kalimat. Topik dan komen dalam kalimat pertama, *penangkapan ataupun penahanan hanya dapat dilakukan dalam ranah hukum pidana, adalah penangkapan ataupun penahanan dan hanya dapat dilakukan dalam ranah hukum pidana*. Kalimat kedua, *inisiatif dimulainya proses perkara pidana haruslah institusi negara, seperti kejaksaan atau kepolisian*, terdiri atas dua klausa. Topik-komen dalam klausa pertama adalah *inisiatif dan dimulainya proses perkara pidana*, sedangkan topik-komen dalam klausa kedua adalah *inisiatif dimulainya proses perkara pidana (lesap) dan haruslah institusi negara, seperti kejaksaan atau kepolisian*. Demikian pula kalimat ketiga *tidak mungkin perkara pidana dilakukan oleh individu yang tidak memegang jabatan dalam institusi negara*, yang terdiri atas dua klausa, memiliki dua topik dan komen. Topik-komen dalam klausa pertama adalah *perkara pidana dan tidak mungkin dilakukan* dan topik-komen dalam klausa kedua adalah *individu dan yang tidak memegang jabatan dalam institusi negara*.

Elemen argumen *qualifier*, *seharusnya KBRI Den Haag ataupun Kementerian Luar Negeri meminta para ahli hukum, baik di Belanda maupun Indonesia, untuk mempelajari upaya hukum yang dilancarkan oleh RMS sebelum memberikan masukan kepada Presiden*, merupakan kalimat dengan tiga klausa. Topik-komen dalam klausa pertama adalah *KBRI Den Haag ataupun Kementerian Luar Negeri dan seharusnya meminta para ahli hukum, baik di Belanda maupun Indonesia*; topik-komen dalam klausa kedua adalah *para ahli hukum, baik di Belanda maupun Indonesia dan untuk mempelajari upaya hukum yang dilancarkan oleh RMS*; dan topik-komen dalam klausa ketiga adalah *KBRI Den Haag ataupun Kementerian Luar Negeri (lesap) dan sebelum memberikan masukan kepada Presiden*.

Terakhir, elemen argumen *rebuttal*, *sayangnya, pemerintah Indonesia termakan oleh intimidasi yang dilakukan RMS*, merupakan kalimat dengan dua klausa. Topik-komen dalam klausa pertama adalah *pemerintah Indonesia dan sayangnya, termakan*, sedangkan topik-komen dalam klausa kedua adalah *intimidasi dan yang dilakukan RMS*.

Tabel 12.3 Topik-Komen dalam Elemen Argumen Teks SDR

| Judul Opini | Elemen Argumen |
|-------------|--|
| SDR | <p><i>Claim dan Stated Reason</i> (Paragraf ke-4, kalimat ke-1)</p> <p>Karena ini merupakan gugatan perdata, sebenarnya tidak ada proses penangkapan atau penahanan.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ini 2. Proses penangkapan atau penahanan <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Karena merupakan gugatan perdata 2. Sebenarnya tidak ada |
| | <p><i>Ground:</i> (Paragraf ke-3, kalimat ke-3 dan Paragraf ke-7, kalimat ke-2)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dan RMS mengajukan upaya hukum berupa gugatan yang dikategorikan dalam ranah hukum perdata. <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RMS 3. Gugatan <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan upaya hukum 2. Yang dikategorikan dalam ranah hukum perdata <ol style="list-style-type: none"> 2. Para penggugat meminta kepada pengadilan agar memerintahkan Kementerian Luar Negeri Belanda untuk mencabut imunitas yang ada pada SBY sebagai kepala negara ketika beliau berkunjung ke Belanda. <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Para penggugat 2. Pengadilan 3. Kementerian Luar Negeri Belanda 4. Beliau <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta kepada pengadilan 2. Agar memerintahkan Kementerian Luar Negeri Belanda 3. Untuk mencabut imunitas yang ada pada SBY sebagai kepala negara 4. Ketika berkunjung ke Belanda |
| | <p><i>Warrant:</i> (Paragraf ke-4, kalimat ke-2)</p> <p>Hukum perdata tidak mengenal penangkapan atau penahanan.</p> <p>Topik: Hukum perdata</p> <p>Komen: Tidak mengenal penangkapan atau penahanan</p> |
| | <p><i>Backing:</i> (Paragraf ke-5, kalimat ke-1, ke-2, dan ke-3)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penangkapan ataupun penahanan hanya dapat dilakukan dalam ranah hukum pidana. |

| |
|--|
| <p>Topik: Penangkapan ataupun penahanan</p> <p>Komen: Hanya dapat dilakukan dalam ranah hukum pidana</p> <p>2. Inisiatif dimulainya proses perkara pidana haruslah institusi negara, seperti kejaksaan atau kepolisian.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inisiatif 2. Ø (Inisiatif dimulainya proses perkara pidana) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dimulainya proses perkara pidana 2. Haruslah institusi negara, seperti kejaksaan atau kepolisian <p>3. Tidak mungkin perkara pidana dilakukan oleh individu yang tidak memegang jabatan dalam institusi negara.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkara pidana 2. Individu <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mungkin dilakukan 2. Yang tidak memegang jabatan dalam institusi negara |
| <p>Qualifier: (Paragraf ke-14, kalimat ke-2)</p> <p>Seharusnya KBRI Den Haag ataupun Kementerian Luar Negeri meminta para ahli hukum, baik di Belanda maupun Indonesia, untuk mempelajari upaya hukum yang dilancarkan oleh RMS sebelum memberikan masukan kepada Presiden.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KBRI Den Haag ataupun Kementerian Luar Negeri 2. Para ahli hukum, baik di Belanda maupun Indonesia 3. ø (KBRI Den Haag ataupun Kementerian Luar Negeri) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seharusnya meminta para ahli hukum, baik di Belanda maupun Indonesia 2. Untuk mempelajari upaya hukum yang dilancarkan oleh RMS 3. Sebelum memberikan masukan kepada Presiden |
| <p>Rebuttal: (Paragraf ke-12, kalimat ke-1)</p> <p>Sayangnya, pemerintah Indonesia termakan oleh intimidasi yang dilakukan RMS.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Indonesia 2. Intimidasi <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Sayangnya, termakan 4. Yang dilakukan RMS |

3.7.2 Hubungan Topik-Komen Antarelelemen Argumen

Elemen argumen *claim* yang menyatu dengan *stated reason* terikat dengan elemen argumen *ground* (1) melalui kohesi referensi. Bagian yang menunjukkan

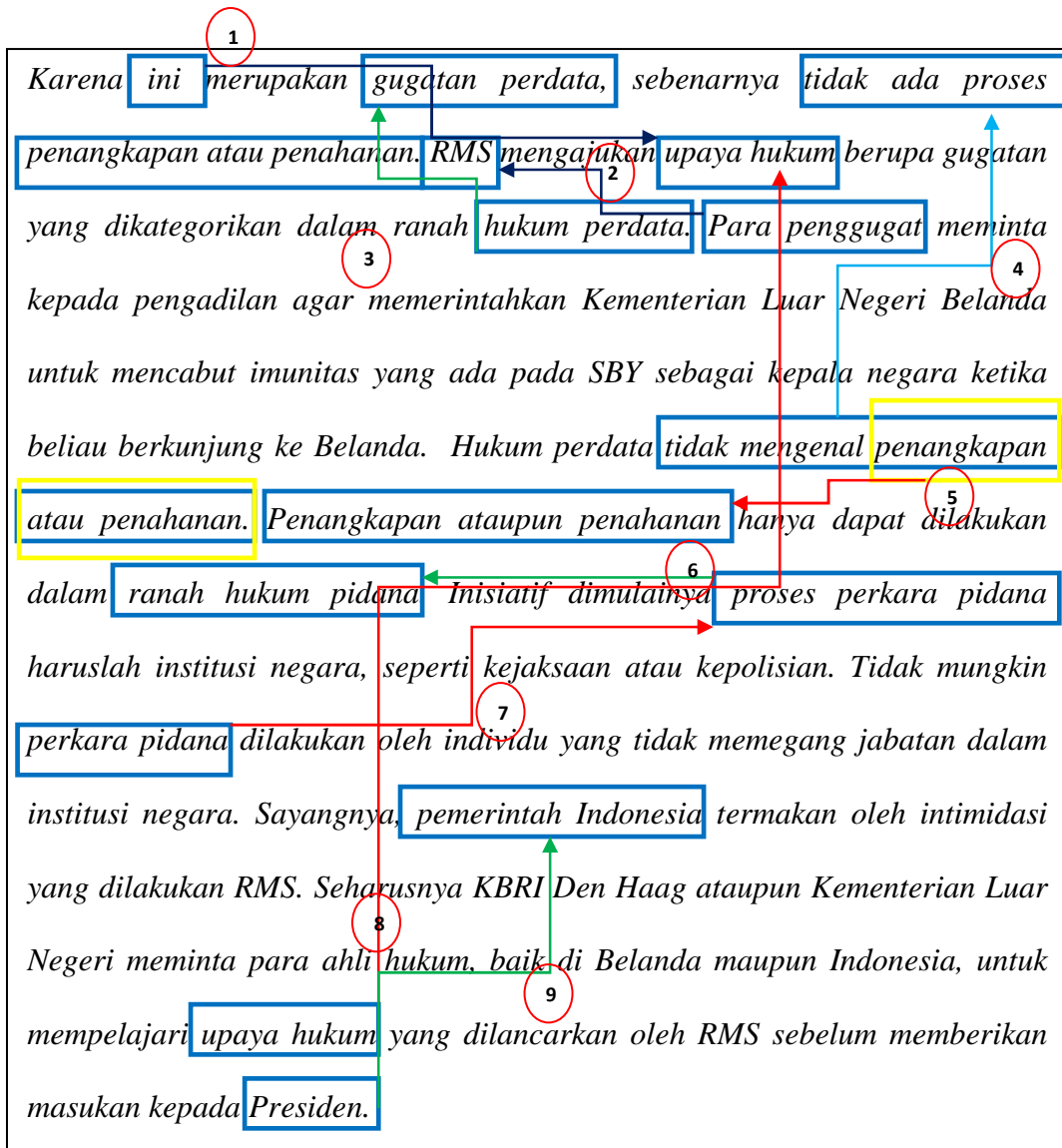
hal itu adalah topik dalam *claim*, yaitu *ini*, dan bagian dari komen dalam *ground* (1), yaitu *upaya hukum*. Sementara itu, elemen argumen *ground* (1) dan (2) juga diikat oleh adanya kohesi referensi, yaitu pada topik dalam *ground* (1), *RMS*, dan topik dalam *ground* (2), *para penggugat*.

Elemen argumen *warrant* dan elemen argumen *claim* (bagian *stated reason*) diikat dengan kohesi leksikal hiponim, yaitu pada bagian dari komen dalam *claim*, *gugatan perdata*, dan topik dalam *warrant*, *hukum perdata*. Di samping itu, komen dalam *warrant*, *tidak mengenal penangkapan atau penahanan*, terikat dalam hubungan kohesi leksikal sinonim dengan topik-komen dalam *claim*, yaitu *sebenarnya tidak ada proses penangkapan atau penahanan*.

Selanjutnya elemen argumen *warrant* dan elemen argumen *backing* (1) berhubungan dengan adanya kohesi leksikal repetisi yang mengikat keduanya, yaitu pada bagian dari komen dalam *warrant*, *penangkapan atau penahanan*, dan topik dalam *backing* (1), *penangkapan ataupun penahanan*. Sementara itu, elemen argumen *backing* (1) dan (2) terikat dalam hubungan kohesi leksikal hiponim, yaitu pada bagian dari komen dalam *backing* (1), *ranah hukum pidana*, dan pada bagian dari komen dalam *backing* (2), *proses perkara pidana*. Kemudian, hubungan kohesi leksikal repetisi mengikat elemen argumen *backing* (2) dan (3), yaitu pada bagian dari komen dalam *backing* (2), *proses perkara pidana*, dan topik dalam *backing* (3), *perkara pidana*.

Selanjutnya, elemen argumen *qualifier* dan elemen argumen *claim* terikat dalam hubungan kohesi leksikal repetisi. Hal itu tampak dari bagian dari komen dalam *qualifier* dan bagian dari komen dalam *claim*, yaitu *upaya hukum*. Terakhir, hubungan kohesi leksikal hiponim mengikat elemen argumen *qualifier* dan elemen argumen *rebuttal*, yaitu pada bagian dari komen dalam *qualifier*, *Presiden*, dan topik dalam *rebuttal*, *pemerintah Indonesia*.

Jika dilakukan penggabungan elemen-elemen argumen di atas, akan terlihat kesatuan argumen sebagai berikut.



Bagan 6.3 Kesatuan Argumen Teks SDR

Keterangan:

- 1 : Kohesi Referensi
- 2 : Kohesi Referensi
- 3 : Kohesi Leksikal Hiponim
- 4 : Kohesi Leksikal Sinonim
- 5 : Kohesi Leksikal Repetisi
- 6 : Kohesi Leksikal Hiponim
- 7 : Kohesi Leksikal Repetisi

- 8 : Kohesi Leksikal Repetisi
- 9 : Kohesi Leksikal Hiponim

3.8 Susunan Elemen Argumen Teks Opini “Orang-orang Sekitar Presiden”

Penyisiran elemen argumen dalam teks ini menghasilkan temuan *claim* yang terpisah dari *stated reason*. *Claim* dalam teks opini ini adalah kalimat ke-1 dalam paragraf ke-6, yaitu *Presiden memang berhak mengangkat staf khusus*, sedangkan *stated reason* adalah kalimat ke-12 dalam paragraf ke-6, yaitu *orang-orang kepercayaan presiden ini bisa difungsikan mengatasi kelembaman, juga resistansi, para birokrat dalam menjalankan kebijakan pemerintah*.

Keduanya membentuk pernyataan yang menunjukkan sebab-akibat sebagai berikut.

Claim: Presiden memang berhak mengangkat staf khusus.

Stated Reason: (Karena) Orang-orang kepercayaan presiden ini bisa difungsikan mengatasi kelembaman, juga resistansi, para birokrat dalam menjalankan kebijakan pemerintah.

Jika digabungkan sedemikian rupa, keduanya dapat membentuk pernyataan sebab-akibat sebagai berikut.

Presiden memang berhak mengangkat staf khusus karena orang-orang kepercayaan presiden ini bisa difungsikan mengatasi kelembaman, juga resistansi, para birokrat dalam menjalankan kebijakan pemerintah.

Adapun hubungan sebab-akibat akan lebih spesifik terlihat apabila elemen argumen *claim* dan *stated reason* diuraikan dalam bentuk proposisi-proposisi dan diamati kekoherensiannya. Elemen argumen *claim* memiliki proposisi sebagai berikut.

- (1) Presiden memiliki hak;
- (2) Presiden mengangkat staf khusus.

Sementara itu, *stated reason* mengandung proposisi-proposisi berikut.

- (1) (Presiden) dapat memfungsikan staf khusus;
- (2) (Staf khusus) mengatasi kelembaman;
- (3) (Staf khusus) mengatasi resistansi para birokrat;
- (4) Para birokrat menjalankan kebijakan pemerintah.

Proposisi yang relevan dari dua proposisi dalam *claim* adalah *presiden mengangkat staf khusus*. Adapun proposisi-proposisi dalam *stated reason* dapat dikonstruksi sehingga membentuk proposisi baru, yaitu *presiden dapat memfungsikan staf khusus untuk mengatasi kelembaman dan resistansi para birokrat dalam menjalankan kebijakan pemerintah*. Dengan demikian, tampak adanya koherensi kausal yang mencerminkan hubungan tujuan dalam dua proposisi tersebut. Hubungan tujuan merupakan hubungan yang mengindikasikan konsekuensi kehendak Penulis opini di sini berpendapat bahwa sebenarnya ada konsekuensi-konsekuensi yang dapat dicapai oleh presiden sehubungan dengan kehendaknya mengangkat staf khusus.

Selanjutnya, setelah *claim* ditemukan, diajukan pertanyaan untuk mendapatkan *ground*, yaitu apa bukti bahwa *orang-orang kepercayaan presiden ini bisa difungsikan mengatasi kelembaman, juga resistansi, para birokrat dalam menjalankan kebijakan pemerintah*. Kalimat yang menunjukkan jawaban dari pertanyaan itu adalah kalimat ke-1 dan ke-2 dalam paragraf ke-9, yaitu *Presiden, misalnya, bisa memanfaatkan staf khusus untuk mengawasi jalannya koalisi pendukungnya di Dewan Perwakilan Rakyat dan mereka juga perlu ditugasi menjadi penghubung Istana dan DPR untuk urusan legislasi*.

Setelah *ground* ditemukan, kemudian diajukan pertanyaan untuk mendapatkan *warrant*, yaitu apa yang menguatkan kalimat *Presiden memang berhak mengangkat staf khusus* dan menghubungkan kalimat tersebut dengan kalimat *orang-orang kepercayaan presiden ini bisa difungsikan mengatasi kelembaman, juga resistansi, para birokrat dalam menjalankan kebijakan pemerintah*. Kalimat yang merupakan jawaban dari pertanyaan di atas adalah kalimat ke-1 dalam paragraf ke-11, yaitu *staf khusus yang kuat dan bekerja sesuai porsi bisa sangat membantu presiden mengeluarkan kebijakan dengan tepat dan cepat*.

Selanjutnya, untuk menemukan *backing*, diajukan pertanyaan, yaitu apa yang melatarbelakangi kalimat *staf khusus yang kuat dan bekerja sesuai porsi bisa sangat membantu presiden mengeluarkan kebijakan dengan tepat dan cepat*. Jawaban pertanyaan itu adalah kalimat ke-2 dan ke-3 dalam paragraf ke-10, yaitu *mereka bisa saja menyelenggarakan survei rutin buat mengetahui respons*

masyarakat dalam berbagai kebijakan dan survei ini memungkinkan presiden memilih kebijakan yang selaras dengan keinginan orang banyak.

Setelah *claim*, *ground*, *warrant*, dan *backing* ditemukan, pertanyaan untuk mendapatkan elemen *rebuttal* adalah adakah kondisi yang berupa kemungkinan perlawanan. Jawaban pertanyaan tersebut adalah kalimat ke-3 dalam paragraf ke-6, yaitu *tapi tak perlu menjadikan staf khusus ini sebagai semacam "ujung tombak" pemerintahan*. Dalam hal ini, penulis opini menggunakan pilihan kata *tapi* untuk menandai kondisi perlawanan tersebut.

Terakhir, untuk mendapatkan elemen *qualifier*, diajukan pertanyaan, yaitu adakah kondisi yang berupa syarat yang berkaitan dengan *claim*. Jawabannya adalah kalimat ke-2 dalam paragraf ke-8, yaitu *Presiden mesti mengacu kembali pada tugas staf khusus seperti diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 43A Tahun 2009*. Penulis opini menggunakan modalitas *mestinya* sehingga secara kalimat tersebut mencerminkan sebuah kondisi persyaratan.

Tabel 13.3 Susunan Elemen Argumen Teks OSP

| Judul Opini | Elemen Argumen |
|-------------|---|
| OSP | <p><i>Claim</i> (Paragraf ke-6, kalimat ke-1)</p> <p>Presiden memang berhak mengangkat staf khusus.</p> <p style="text-align: right;"><i>Stated Reason</i> (Paragraf ke-6, kalimat ke-12)</p> <p>Orang-orang kepercayaan presiden ini bisa difungsikan mengatasi kelembaman, juga resistansi, para birokrat dalam menjalankan kebijakan pemerintah.</p> |
| | <p><i>Ground:</i> (Paragraf ke-9, kalimat ke-1 dan ke-2)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden, misalnya, bisa memanfaatkan staf khusus untuk mengawasi jalannya koalisi pendukungnya di Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Mereka juga perlu ditugasi menjadi penghubung Istana dan DPR untuk urusan legislasi. |
| | <p><i>Warrant:</i> (Paragraf ke-11, kalimat ke-1)</p> <p>Staf khusus yang kuat dan bekerja sesuai porsi bisa sangat membantu presiden mengeluarkan kebijakan dengan tepat dan cepat.</p> |

| | |
|--|--|
| | <p><i>Backing:</i> (Paragraf ke-10, kalimat ke-2 dan ke-3)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mereka bisa saja menyelenggarakan survei rutin buat mengetahui respons masyarakat dalam berbagai kebijakan. 2. Survei ini memungkinkan presiden memilih kebijakan yang selaras dengan keinginan orang banyak. |
| | <p><i>Qualifier:</i> (Paragraf ke-8, kalimat ke-2)</p> <p>Presiden mesti mengacu kembali pada tugas staf khusus seperti diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 43A Tahun 2009.</p> |
| | <p><i>Rebuttal:</i> (Paragraf ke-6, kalimat ke-3)</p> <p>Tapi tak perlu menjadikan staf khusus ini sebagai semacam "ujung tombak" pemerintahan.</p> |

3.8.1 Topik-Komen dalam Elemen Argumen

Topik-komen dalam elemen argumen *claim*, *Presiden memang berhak mengangkat staf khusus*, adalah Presiden dan memang berhak mengangkat staf khusus. Sementara itu, topik-komen dalam *stated reason*, *orang-orang kepercayaan presiden ini bisa difungsikan mengatasi kelembaman, juga resistansi, para birokrat dalam menjalankan kebijakan pemerintah*, adalah *orang-orang kepercayaan presiden ini dan bisa difungsikan mengatasi kelembaman, juga resistansi, para birokrat dalam menjalankan kebijakan pemerintah*.

Elemen argumen *ground* pertama, *Presiden, misalnya, bisa memanfaatkan staf khusus untuk mengawasi jalannya koalisi pendukungnya di Dewan Perwakilan Rakyat*, yang merupakan kalimat dengan dua klausa, memiliki dua topik-komen. Topik-komen dalam klausa pertama adalah *Presiden* dan *misalnya, bisa memanfaatkan staf khusus*, sedangkan topik-komen dalam klausa kedua adalah *staf khusus (lesap) dan mengawasi jalannya koalisi pendukungnya di Dewan Perwakilan Rakyat*. Sementara itu, topik-komen elemen argumen *ground* kedua, *mereka juga perlu ditugasi menjadi penghubung Istana dan DPR untuk urusan legislasi*, adalah *mereka dan juga perlu ditugasi menjadi penghubung Istana dan DPR untuk urusan legislasi*.

Elemen argumen *warrant*, *staf khusus yang kuat dan bekerja sesuai porsi bisa sangat membantu presiden mengeluarkan kebijakan dengan tepat dan cepat*, terdiri atas tiga klausa. Topik-komen dalam klausa pertama adalah *staf khusus* dan

yang kuat dan bekerja sesuai porsi; topik-komen dalam klausa kedua adalah *staf khusus yang kuat dan bekerja sesuai porsi* (lesap) dan *bisa sangat membantu*; dan topik-komen dalam klausa ketiga adalah *Presiden* dan *mengeluarkan kebijakan dengan tepat dan cepat*.

Elemen argumen *backing* (1), *mereka bisa saja menyelenggarakan survei rutin buat mengetahui respons masyarakat dalam berbagai kebijakan*, terdiri atas dua klausa. Topik-komen dalam klausa pertama adalah *mereka* dan *bisa saja menyelenggarakan survei rutin*, sedangkan topik-komen dalam klausa kedua adalah *mereka* (lesap) dan *mengetahui respons masyarakat dalam berbagai kebijakan*. Elemen argumen *backing* (2), *survei ini memungkinkan presiden memilih kebijakan yang selaras dengan keinginan orang banyak*, terdiri atas tiga klausa. Topik-komen dalam klausa pertama adalah *survei ini* dan *memungkinkan*; topik-komen dalam klausa kedua adalah *Presiden* dan *memilih*; dan topik-komen dalam klausa ketiga adalah *kebijakan* dan *yang selaras dengan keinginan orang banyak*.

Elemen argumen *qualifier*, *Presiden mesti mengacu kembali pada tugas staf khusus seperti diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 43A Tahun 2009*, terdiri atas dua klausa. Topik-komen dalam klausa pertama adalah *Presiden* dan *mesti mengacu kembali*, sedangkan topik-komen dalam klausa kedua adalah *tugas staf khusus* dan *seperti diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 43A Tahun 2009*. Topik-komen elemen argumen *rebuttal*, *tapi tak perlu menjadikan staf khusus ini sebagai semacam "ujung tombak" pemerintahan*, adalah *Presiden* (lesap) dan *tak perlu menjadikan staf khusus ini* dan *sebagai semacam "ujung tombak" pemerintahan*.

Tabel 14.3 Topik-Komen dalam Elemen Argumen Teks OSP

| Judul Opini | Elemen Argumen |
|-------------|---|
| OSP | <p>Claim (Paragraf ke-6, kalimat ke-1)</p> <p>Presiden memang berhak mengangkat staf khusus.</p> <p>Topik: Presiden</p> <p>Komen: Memang berhak mengangkat staf khusus</p> |

| | |
|--|--|
| | <p style="text-align: right;">Stated Reason (Paragraf ke-6, kalimat ke-2)</p> <p>Orang-orang kepercayaan presiden ini bisa difungsikan mengatasi kelembaman, juga resistansi, para birokrat dalam menjalankan kebijakan pemerintah.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Orang-orang kepercayaan presiden ini 2. Ø (para birokrat) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bisa difungsikan mengatasi kelembaman, juga resistansi 2. Dalam menjalankan kebijakan pemerintah |
| | <p>Ground: (Paragraf ke-9, kalimat ke-1 dan ke-2)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden, misalnya, bisa memanfaatkan staf khusus untuk mengawasi jalannya koalisi pendukungnya di Dewan Perwakilan Rakyat. <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden 2. Ø (staf khusus) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Misalnya, bisa memanfaatkan staf khusus 2. Mengawasi jalannya koalisi pendukungnya di Dewan Perwakilan Rakyat <p>2. Mereka juga perlu ditugasi menjadi penghubung Istana dan DPR untuk urusan legislasi.</p> <p>Topik: Mereka</p> <p>Komen: Juga perlu ditugasi menjadi penghubung Istana dan DPR untuk urusan legislasi</p> |
| | <p>Warrant: (Paragraf ke-11, kalimat ke-1)</p> <p>Staf khusus yang kuat dan bekerja sesuai porsi bisa sangat membantu presiden mengeluarkan kebijakan dengan tepat dan cepat.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Staf khusus 2. Ø (staf khusus yang kuat dan bekerja sesuai porsi) 3. Presiden <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang kuat dan bekerja sesuai porsi 2. Bisa sangat membantu 3. Mengeluarkan kebijakan dengan tepat dan cepat |
| | <p>Backing: (Paragraf ke-10, kalimat ke-2 dan ke-3)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mereka bisa saja menyelenggarakan survei rutin buat mengetahui respons masyarakat dalam berbagai kebijakan. <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mereka 2. Ø (mereka) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bisa saja menyelenggarakan survei rutin |

| |
|---|
| <p>3. Mengetahui respons masyarakat dalam berbagai kebijakan</p> <p>2. Survei ini memungkinkan presiden memilih kebijakan yang selaras dengan keinginan orang banyak.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Survei ini 2. Presiden 3. Kebijakan <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memungkinkan 2. Memilih 3. Yang selaras dengan keinginan orang banyak |
| <p>Qualifier: (Paragraf ke-8, kalimat ke-2)</p> <p>Presiden mesti mengacu kembali pada tugas staf khusus seperti diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 43A Tahun 2009.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden 2. Tugas staf khusus <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mesti mengacu kembali 2. Seperti diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 43A Tahun 2009 |
| <p>Rebuttal: (Paragraf ke-6, kalimat ke-3)</p> <p>Tapi tak perlu menjadikan staf khusus ini sebagai semacam "ujung tombak" pemerintahan.</p> <p>Topik: Ø (Presiden)</p> <p>Komen: Tapi tak perlu menjadikan staf khusus ini sebagai semacam "ujung tombak" pemerintahan</p> |

3.8.2 Hubungan Topik-Komen Antarelemen Argumen

Elemen argumen *claim* dan *stated reason* terikat kohesi referensi, pada bagian dari komen dalam *claim*, *staf khusus*, dan topik dalam *stated reason*, *orang-orang kepercayaan Presiden*. Elemen argumen *ground* (1) dan elemen argumen *claim* terikat kohesi leksikal repetisi, yaitu pada topik dalam *ground* dan topik dalam *claim*, *Presiden*. *Ground* (1) dan (2) terikat kohesi referensi, pada bagian dari komen dalam *ground* (1), *staf khusus*, dan topik dalam *ground* (2), *mereka*.

Elemen argumen *warrant* terikat kohesi leksikal repetisi dengan *claim* melalui topik dalam *warrant* dan bagian dari komen dalam *claim*, *staf khusus*. *Warrant* juga terkait dengan *stated reason* melalui hubungan kohesi leksikal

antonim antara bagian dari komen dalam *warrant*, *cepat*, dan bagian dari komen dalam *stated reason*, *kelembaman*. Keduanya bermuara pada *kebijakan*.

Elemen argumen *warrant* dan *backing* (1) terikat kohesi referensi, antara *mereka*, topik dalam *backing*, dan *staf khusus*, bagian dari topik dalam *warrant*. *Backing* (1) dan (2) terikat melalui kohesi leksikal repetisi pada bagian dari komen dalam *backing* (1), *survei rutin*, dan topik dalam *backing* (2), *survei ini*.

Elemen argumen *qualifier* dan *claim* terikat kohesi leksikal repetisi, pada topik dalam *qualifier* dan topik dalam *claim*, *Presiden*. Elemen argumen *rebuttal* dan elemen argumen *claim* terikat dalam kohesi elipsis, pada bagian dari topik dalam *rebuttal*, *Presiden* (lesap), dan topik dalam *claim*, *Presiden*. Elemen argumen *rebuttal* dan *qualifier* terikat kohesi leksikal repetisi, pada bagian dari komen dalam *rebuttal* dan bagian dari topik dalam *qualifier*, yaitu *staf khusus*.

Ketika elemen-elemen argumen di atas digabungkan, akan menghasilkan kesatuan argumen sebagai berikut.



Bagan 7.3 Kesatuan Argumen Teks OSP

Keterangan:

- 1 : Kohesi Referensi
- 2 : Kohesi Referensi
- 3 : Kohesi Referensi
- 4 : Kohesi Leksikal Repetisi
- 5 : Kohesi Leksikal Antonim
- 6 : Kohesi Leksikal Referensi
- 7 : Kohesi Leksikal Repetisi
- 8 : Kohesi Leksikal Repetisi
- 9 : Kohesi Elipsis
- 10 : Kohesi Leksikal Repetisi

3.9 Susunan Elemen Argumen Teks Opini “Istana Bising Yudhoyono”

Claim dalam teks opini ini juga ditemukan terpisah dari *stated reason*. *Claim* dalam teks opini ini adalah kalimat ke-1 dalam paragraf ke-11, yaitu *dipandang dari perspektif ilmu politik dan pemerintahan, kesimpulannya sederhana belaka: Presiden dan Wakil Presiden bekerja di tengah absennya kantor eksekutif presiden yang kuat dan kredibel*, sedangkan *stated reason* adalah kalimat ke-1 dalam paragraf ke-8, yaitu *yang kita saksikan selama setahun ini adalah lingkaran di seputar Presiden yang bising*.

Keduanya membentuk pernyataan yang menunjukkan sebab-akibat sebagai berikut.

Claim: Dipandang dari perspektif ilmu politik dan pemerintahan, kesimpulannya sederhana belaka: Presiden dan Wakil Presiden bekerja di tengah absennya kantor eksekutif presiden yang kuat dan kredibel..

Stated Reason: (Karena) Yang kita saksikan selama setahun ini adalah lingkaran di seputar Presiden yang bising.

Jika digabungkan, keduanya dapat membentuk pernyataan sebab-akibat sebagai berikut.

Dipandang dari perspektif ilmu politik dan pemerintahan, kesimpulannya sederhana belaka: Presiden dan Wakil Presiden bekerja di tengah absennya kantor eksekutif presiden yang kuat dan kredibel karena yang kita saksikan selama setahun ini adalah lingkaran di seputar Presiden yang bisung.

Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana hubungan sebab-akibat antara keduanya, perlu dilakukan penguraian keduanya dalam bentuk proposisi-proposisi. Elemen argumen *claim* memiliki proposisi berikut.

- (1) (Seseorang) memandang dari perspektif ilmu politik dan pemerintahan;
- (2) (Seseorang) menyimpulkan;
- (3) Kesimpulan yang sederhana;
- (4) Presiden dan Wakil Presiden bekerja;
- (5) Kantor eksekutif absen;
- (6) Kantor eksekutif yang kuat dan kredibel.

Adapun *stated reason* mengandung beberapa proposisi berikut.

- (1) Selama setahun kita menyaksikan;
- (2) Di seputar Presiden (ada) lingkaran;
- (3) Lingkaran yang bisung.

Konstruksi terhadap proposisi argumen *claim* adalah *Presiden dan Wakil Presiden tidak memiliki kantor eksekutif yang kuat dan kredibel* dan konstruksi terhadap proposisi *stated reason* adalah *Presiden hanya memiliki lingkaran yang bisung*.

Kedua konstruksi proposisi di atas menunjukkan koherensi kausal yang mencerminkan hubungan sebab, yaitu mengindikasikan kondisi di luar kemauan. Penulis opini dalam hal ini menganggap bahwa lingkaran yang bisung itu mungkin bukan atas kemauan Presiden. Artinya, Presiden mungkin saja berharap “lingkarannya” tidak hanya bisa bisung. Namun, selama satu tahun ternyata lingkaran itu “hanya” bisung sehingga tampak di mata penulis bahwa presiden dan wakilnya memang tidak memiliki kantor eksekutif yang kuat dan kredibel.

Selanjutnya, setelah *claim* ditemukan, diajukan pertanyaan untuk mendapatkan *ground*, yaitu apa bukti absennya kantor eksekutif presiden yang kuat dan kredibel dan lingkaran di seputar Presiden yang bisung. Kalimat yang menunjukkan jawaban dari pertanyaan itu adalah kalimat ke-3 dalam paragraf ke-

8, yaitu *kepentingan dan sikap Istana dikomunikasikan melalui banyak mulut dan celaknya dengan kualitas pesan yang kurang terjaga.*

Setelah *ground* ditemukan, kemudian diajukan pertanyaan untuk mendapatkan *warrant*, yaitu apa yang menguatkan kalimat *dipandang dari perspektif ilmu politik dan pemerintahan, kesimpulannya sederhana belaka: Presiden dan Wakil Presiden bekerja di tengah absennya kantor eksekutif presiden yang kuat dan kredibel* dan menghubungkan kalimat tersebut dengan kalimat yang kita saksikan selama setahun ini adalah lingkaran di seputar *Presiden yang bising*. Kalimat yang merupakan jawaban dari pertanyaan di atas adalah kalimat ke-2 dalam paragraf ke-5, yaitu *di antaranya selama setahun ini-melanjutkan kecenderungan lima tahun sebelumnya-Yudhoyono tak memiliki "kantor eksekutif presiden" yang berkemampuan menyokong kerja presiden (dan wakil presiden) secara optimal.*

Selanjutnya, untuk menemukan *backing*, diajukan pertanyaan, yaitu apa yang melatarbelakangi kalimat *di antaranya selama setahun ini-melanjutkan kecenderungan lima tahun sebelumnya-Yudhoyono tak memiliki "kantor eksekutif presiden" yang berkemampuan menyokong kerja presiden (dan wakil presiden) secara optimal*. Jawaban pertanyaan itu adalah kalimat ke-1 dalam paragraf ke-6 dan kalimat ke-2 dan ke-3 dalam paragraf ke-10, yaitu *yang dimiliki Yudhoyono adalah beberapa lapis organisasi yang tambun di Istana, yang terbukti tak bekerja efektif serta kurang mampu menjaga komunikasi, koordinasi, dan sinergi; kredibilitas, akurasi, serta akuntabilitas informasi dan pesan yang diterima publik dari mereka layak dipertanyakan; dan semakin hari semakin terbukti bahwa Presiden dikelilingi staf yang sangat bersemangat-berpolitik penuh atraksi seperti peserta karnaval-tapi miskin kemauan dan ketekunan untuk bekerja secara birokratis dan teknokratis dalam senyap.*

Setelah *claim*, *ground*, *warrant*, dan *backing* ditemukan, pertanyaan untuk mendapatkan elemen *rebuttal* adalah adakah kondisi yang berupa kemungkinan pengecualian atau perlawanan. Jawaban pertanyaan tersebut adalah kalimat ke-1 dalam paragraf ke-8, yaitu *dalam praktek presidensialisme yang mapan, kerja di seputar presiden adalah kerja yang senyap, jauh dari liputan media dan sorot kamera*. Dalam hal ini, penulis opini menggunakan pilihan kata

senyap yang berlawanan dengan *bising* untuk menandai kondisi perlawanan tersebut.

Terakhir, untuk mendapatkan elemen *qualifier*, diajukan pertanyaan, yaitu adakah kondisi yang berupa syarat yang berkaitan dengan *claim*. Jawabannya adalah kalimat ke-1 dalam paragraf ke-22, yaitu *belajar dari pengalaman setahun terakhir, ada baiknya Presiden Yudhoyono menata ulang kantor eksekutif presiden dengan mereformasi lapis demi lapis organisasi dan birokrasi Istana yang tambun, tak efisien, dan tak efektif itu*. Penulis opini menggunakan *ada baiknya* untuk menandai kondisi persyaratan.

Tabel 15.3 Susunan Elemen Argumen Teks IBY

| Judul Opini | Elemen Argumen |
|-------------|--|
| IBY | <p>Claim (Paragraf ke-11, kalimat ke-1)</p> <p>Dipandang dari perspektif ilmu politik dan pemerintahan, kesimpulannya sederhana belaka: Presiden dan Wakil Presiden bekerja di tengah absennya kantor eksekutif presiden yang kuat dan kredibel.</p> <p style="text-align: right;">Stated Reason (Paragraf ke-8, kalimat ke-1)</p> <p style="text-align: right;">Yang kita saksikan selama setahun ini adalah lingkaran di seputar Presiden yang bising.</p> <p>Ground: (Paragraf ke-8, kalimat ke-3)</p> <p>Kepentingan dan sikap Istana dikomunikasikan melalui banyak mulut dan celakanya dengan kualitas pesan yang kurang terjaga.</p> <p>Warrant: (Paragraf ke-5, kalimat ke-2)</p> <p>Di antaranya selama setahun ini-melanjutkan kecenderungan lima tahun sebelumnya-Yudhoyono tak memiliki "kantor eksekutif presiden" yang berkemampuan menyokong kerja presiden (dan wakil presiden) secara optimal.</p> <p>Backing: (Paragraf ke-6, kalimat ke-1 dan Paragraf ke-10, kalimat ke-2 dan ke-3)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang dimiliki Yudhoyono adalah beberapa lapis organisasi yang tambun di Istana, yang terbukti tak bekerja efektif serta kurang mampu menjaga komunikasi, koordinasi, dan sinergi. 2. Kredibilitas, akurasi, serta akuntabilitas informasi dan pesan yang diterima publik dari mereka layak dipertanyakan. |

| | |
|--|---|
| | 3. Semakin hari semakin terbukti bahwa Presiden dikelilingi staf yang sangat bersemangat-berpolitik penuh atraksi seperti peserta karnaval-tapi miskin kemauan dan ketekunan untuk bekerja secara birokratis dan teknokratis dalam senyap. |
| | <p>Qualifier: (Paragraf ke-22, kalimat ke-1)</p> <p>Belajar dari pengalaman setahun terakhir, ada baiknya Presiden Yudhoyono menata ulang kantor eksekutif presiden dengan mereformasi lapis demi lapis organisasi dan birokrasi Istana yang tambun, tak efisien, dan tak efektif itu.</p> |
| | <p>Rebuttal: (Paragraf ke-8, kalimat ke-1)</p> <p>Dalam praktek presidensialisme yang mapan, kerja di seputar presiden adalah kerja yang senyap, jauh dari liputan media dan sorot kamera.</p> |

3.9.1 Topik-Komen dalam Elemen Argumen

Elemen argumen *claim*, dipandang dari perspektif ilmu politik dan pemerintahan, kesimpulannya sederhana belaka: *Presiden dan Wakil Presiden bekerja di tengah absennya kantor eksekutif presiden yang kuat dan kredibel*, merupakan kalimat dengan dua klausa sehingga dalam kalimat tersebut terdapat dua topik-komen. Topik-komen dalam klausa pertama adalah *kesimpulannya sederhana belaka dan dipandang dari perspektif ilmu politik dan pemerintahan*, sedangkan topik-komen dalam klausa kedua adalah *Presiden dan Wakil Presiden dan bekerja di tengah absennya kantor eksekutif presiden yang kuat dan kredibel*. Sementara itu, *Stated Reason*, yang kita saksikan selama setahun ini adalah *lingkaran di seputar Presiden yang bisings*, juga merupakan kalimat dengan dua klausa sehingga dalam kalimat tersebut terdapat dua topik-komen. Topik-komen dalam klausa pertama adalah *yang kita saksikan selama setahun ini dan adalah*, sedangkan topik-komen dalam klausa kedua adalah *lingkaran di seputar Presiden dan yang bisings*.

Elemen argumen *ground*, *kepentingan dan sikap Istana dikomunikasikan melalui banyak mulut dan celaknya dengan kualitas pesan yang kurang terjaga*, terdiri atas dua klausa yang berarti memiliki dua topik-komen. Topik dan komen dalam klausa pertama adalah *kepentingan dan sikap Istana dan dikomunikasikan melalui banyak mulut*; sedangkan topik dan komen dalam klausa kedua adalah *celaknya dengan kualitas pesan dan yang kurang terjaga*.

Kemudian, elemen argumen *warrant*, *di antaranya selama setahun ini-melanjutkan kecenderungan lima tahun sebelumnya-Yudhoyono tak memiliki*

"kantor eksekutif presiden" yang berkemampuan menyokong kerja presiden (dan wakil presiden) secara optimal, yang merupakan kalimat dengan dua klausa, memiliki dua topik-komen dalam tiap-tiap klausanya. Topik-komen dalam klausa pertama adalah Yudhoyono dan di antaranya selama setahun ini-melanjutkan kecenderungan lima tahun sebelumnya- tak memiliki, sedangkan topik-komen dalam klausa kedua adalah "kantor eksekutif presiden" dan yang berkemampuan menyokong kerja presiden (dan wakil presiden) secara optimal.

Elemen argumen *backing* pertama, yang dimiliki Yudhoyono adalah beberapa lapis organisasi yang tambun di Istana, yang terbukti tak bekerja efektif serta kurang mampu menjaga komunikasi, koordinasi, dan sinergi, juga merupakan kalimat dengan tiga klausa. Tiga topik-komen dalam tiap-tiap klausa adalah yang dimiliki Yudhoyono dan adalah, dalam klausa pertama; beberapa lapis organisasi dan yang tambun di Istana, dalam klausa kedua; dan beberapa lapis organisasi yang tambun di Istana (lesap) dan yang terbukti tak bekerja efektif serta kurang mampu menjaga komunikasi, koordinasi, dan sinergi, dalam klausa ketiga.

Selanjutnya, elemen argumen *backing* kedua, kredibilitas, akurasi, serta akuntabilitas informasi dan pesan yang diterima publik dari mereka layak dipertanyakan, merupakan kalimat dengan dua klausa sehingga dalam kalimat itu ada dua topik-komen. Topik-komen dalam klausa pertama adalah kredibilitas, akurasi, serta akuntabilitas informasi dan pesan dan yang diterima publik dari mereka, sedangkan topik-komen dalam klausa kedua adalah kredibilitas, akurasi, serta akuntabilitas informasi dan pesan yang diterima publik dari mereka dan layak dipertanyakan.

Sementara itu, elemen argumen *backing* ketiga, semakin hari semakin terbukti bahwa Presiden dikelilingi staf yang sangat bersemangat-berpolitik penuh atraksi seperti peserta karnaval-tapi miskin kemauan dan ketekunan untuk bekerja secara birokratis dan teknokratis dalam senyap, yang merupakan kalimat dengan tiga klausa, memiliki tiga topik-komen. Topik-komen dalam klausa pertama adalah Presiden dan semakin hari semakin terbukti bahwa dikelilingi; topik-komen dalam klausa kedua adalah staf dan yang sangat bersemangat-berpolitik penuh atraksi seperti peserta karnaval; topik-komen dalam klausa ketiga adalah dan staf (lesap) dan miskin kemauan dan ketekunan untuk bekerja secara birokratis dan teknokratis dalam senyap.

Elemen argumen *qualifier*, *belajar dari pengalaman setahun terakhir*, *ada baiknya Presiden Yudhoyono menata ulang kantor eksekutif presiden dengan mereformasi lapis demi lapis organisasi dan birokrasi Istana yang tambun, tak efisien, dan tak efektif itu*, merupakan kalimat yang terdiri atas enam klausa sehingga dalam kalimat tersebut terdapat enam topik-komen. Topik-komen dalam klausa pertama adalah *Presiden Yudhoyono* dan *belajar dari pengalaman setahun terakhir*; topik-komen dalam klausa kedua adalah *Presiden Yudhoyono* (lesap) dan *ada baiknya menata ulang kantor eksekutif presiden*; topik-komen dalam klausa ketiga adalah *Presiden Yudhoyono* (lesap) dan *mereformasi*; topik-komen dalam klausa keempat adalah *lapis demi lapis organisasi dan birokrasi Istana* dan *yang tambun*; topik-komen dalam klausa kelima adalah *lapis demi lapis organisasi dan birokrasi Istana* (lesap) dan *yang* (lesap) *tak efisien*; dan *lapis demi lapis organisasi dan birokrasi Istana* (lesap) dan *yang* (lesap) *tak efektif itu*.

Elemen argumen *rebuttal*, *dalam praktek presidensialisme yang mapan, kerja di seputar presiden adalah kerja yang senyap, jauh dari liputan media dan sorot kamera*, juga merupakan kalimat dengan tiga klausa sehingga dalam kalimat tersebut terdapat empat topik-komen. Topik dan komen dalam klausa yang pertama adalah *dalam praktek presidensialisme* dan *yang mapan*; topik dalam klausa kedua adalah *kerja di seputar presiden* dan *adalah*; topik dan komen dalam klausa ketiga adalah *kerja* dan *yang senyap*; dan topik dan komen dalam klausa keempat adalah *kerja* (lesap) dan *jauh dari liputan media dan sorot kamera*.

Tabel 16.3 Topik-Komen dalam Elemen Argumen Teks IBY

| Judul Opini | Elemen Argumen |
|-------------|---|
| IBY | <p>Claim (Paragraf ke-11, kalimat ke-1)</p> <p>Dipandang dari perspektif ilmu politik dan pemerintahan, kesimpulannya sederhana belaka: Presiden dan Wakil Presiden bekerja di tengah absennya kantor eksekutif presiden yang kuat dan kredibel.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesimpulannya 2. Presiden dan Wakil Presiden <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dipandang dari perspektif ilmu politik dan pemerintahan, sederhana belaka 2. Bekerja di tengah absennya kantor eksekutif presiden yang kuat dan kredibel |

| | |
|--|--|
| | <p style="text-align: right;"><i>Stated Reason</i> (Paragraf ke-8, kalimat ke-1)</p> <p>Yang kita saksikan selama setahun ini adalah lingkaran di seputar Presiden yang bisings.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang kita saksikan selama setahun ini 2. Lingkaran di seputar Presiden <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adalah 2. Yang bisings |
| | <p>Ground: (Paragraf ke-8, kalimat ke-3)</p> <p>Kepentingan dan sikap Istana dikomunikasikan melalui banyak mulut dan celakanya dengan kualitas pesan yang kurang terjaga.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepentingan dan sikap Istana 2. Celakanya dengan kualitas pesan <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dikomunikasikan melalui banyak mulut 2. Yang kurang terjaga |
| | <p>Warrant: (Paragraf ke-5, kalimat ke-2)</p> <p>Di antaranya selama setahun ini-melanjutkan kecenderungan lima tahun sebelumnya-Yudhoyono tak memiliki "kantor eksekutif presiden" yang berkemampuan menyokong kerja presiden (dan wakil presiden) secara optimal.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yudhoyono 2. "Kantor eksekutif presiden" <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Di antaranya selama setahun ini-melanjutkan kecenderungan lima tahun sebelumnya- tak memiliki 2. Yang berkemampuan menyokong kerja presiden (dan wakil presiden) secara optimal |
| | <p>Backing: (Paragraf ke-6, kalimat ke-1 dan Paragraf ke-10, kalimat ke-2 dan ke-3)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang dimiliki Yudhoyono adalah beberapa lapis organisasi yang tambun di Istana, yang terbukti tak bekerja efektif serta kurang mampu menjaga komunikasi, koordinasi, dan sinergi. <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang dimiliki Yudhoyono 2. Beberapa lapis organisasi 3. Ø (beberapa lapis organisasi yang tambun di Istana) 4. Ø (beberapa lapis organisasi yang tambun di Istana) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adalah 2. Yang tambun di Istana 3. Yang terbukti tak bekerja efektif |

| | |
|--|--|
| | <p>4. Kurang mampu menjaga komunikasi, koordinasi, dan sinergi</p> <p>2. Kredibilitas, akurasi, serta akuntabilitas informasi dan pesan yang diterima publik dari mereka layak dipertanyakan.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kredibilitas, akurasi, serta akuntabilitas informasi dan pesan 2. Ø (kredibilitas, akurasi, serta akuntabilitas informasi dan pesan yang diterima publik dari mereka) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang diterima publik dari mereka 2. Layak dipertanyakan <p>3. Semakin hari semakin terbukti bahwa Presiden dikelilingi staf yang sangat bersemangat-berpolitik penuh atraksi seperti peserta karnaval-tapi miskin kemauan dan ketekunan untuk bekerja secara birokratis dan teknokratis dalam senyap.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden 2. Staf 3. Ø (staf) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semakin hari semakin terbukti bahwa dikelilingi 2. Yang sangat bersemangat-berpolitik penuh atraksi seperti peserta karnaval 3. Miskin kemauan dan ketekunan untuk bekerja secara birokratis dan teknokratis dalam senyap |
| | <p>Qualifier: (Paragraf ke-22, kalimat ke-1)</p> <p>Belajar dari pengalaman setahun terakhir, ada baiknya Presiden Yudhoyono menata ulang kantor eksekutif presiden dengan mereformasi lapis demi lapis organisasi dan birokrasi Istana yang tambun, tak efisien, dan tak efektif itu.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden Yudhoyono 2. Ø (Presiden Yudhoyono) 3. Ø (Presiden Yudhoyono) 4. Lapis demi lapis organisasi dan birokrasi Istana 5. Ø (lapis demi lapis organisasi dan birokrasi Istana) 6. Ø (lapis demi lapis organisasi dan birokrasi Istana) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belajar dari pengalaman setahun terakhir 2. Ada baiknya menata ulang kantor eksekutif presiden 3. Mereformasi 4. Yang tambun 5. (yang) Tak efisien 6. (yang) Tak efektif itu |
| | <p>Rebuttal: (Paragraf ke-8, kalimat ke-1)</p> <p>Dalam praktek presidensialisme yang mapan, kerja di seputar presiden adalah kerja yang senyap, jauh dari liputan media dan sorot kamera.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam praktek presidensialisme 2. Kerja di seputar presiden |

| | |
|--|--|
| | 3. Kerja 4. Ø (kerja) Komen: 1. Yang mapan 2. Adalah 3. Yang senyap 4. Jauh dari liputan media dan sorot kamera |
|--|--|

3.9.2 Hubungan Topik-Komen Antarelemen Argumen

Elemen argumen *claim* dan *stated reason* terkait dengan adanya kohesi leksikal antonim yang mengikat keduanya. Hal itu terlihat pada bagian dari komen dalam *claim*, *kantor eksekutif presiden yang kuat dan kredibel*, dan topik-komen dalam *stated reason*, *lingkaran di seputar Presiden yang bisings*. Kohesi referensi mengikat *stated reason* dan elemen argumen *ground*, pada komen dalam *stated reason*, *yang bisings*, dan bagian dari komen dalam *ground*, *banyak mulut*.

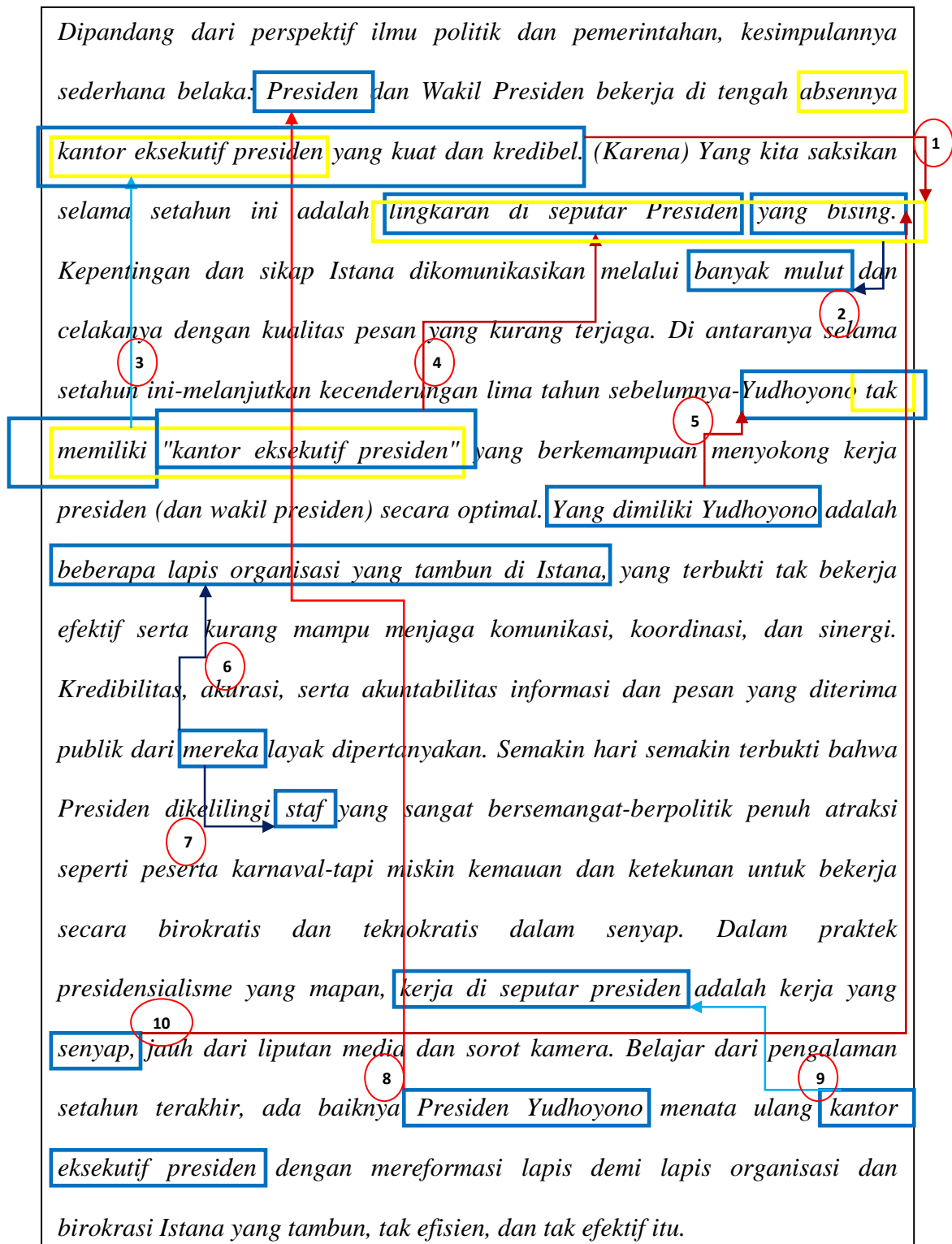
Kohesi leksikal sinonim menghubungkan elemen argumen *warrant* dan elemen argumen *claim*, pada topik dan bagian dari komen dalam *warrant*, *tak memiliki "kantor eksekutif presiden"*, dan bagian dari komen dalam *claim*, *absennya kantor eksekutif presiden*. Hubungan kohesi leksikal referensi mengikat *warrant* dengan *stated reason*, yaitu pada topik dalam *warrant*, *"kantor eksekutif presiden"*, dan topik dalam *stated reason*, yaitu *lingkaran di seputar Presiden*.

Elemen argumen *warrant* dan elemen argumen *backing* (1) terikat dalam hubungan kohesi leksikal antonim, pada topik dan bagian dari komen dalam *warrant*, *Yudhoyono* dan *tak memiliki*, dan topik dalam *backing* (1), *yang dimiliki Yudhoyono*. Selanjutnya, elemen argumen *backing* (2) terikat dalam kohesi referensi dengan *backing* (1), tepatnya pada bagian dari komen dalam *backing* (2), *mereka*, yang merujuk pada topik-komen dalam *backing* (1), yaitu *beberapa lapis organisasi yang tambun di Istana*. *Backing* (2) juga terikat dalam kohesi referensi dengan *backing* (3), pada bagian dari komen dalam *backing* (2), *mereka*, dengan topik dalam *backing* (3), yaitu *staf*.

Hubungan kohesi referensi mengikat elemen argumen *qualifier* dan elemen argumen *claim*, yaitu pada bagian dari topik dalam *claim*, *Presiden*, dan topik dalam *qualifier*, *Presiden Yudhoyono*. Terakhir, hubungan kohesi leksikal sinonim mengikat elemen argumen *qualifier* dan elemen argumen *rebuttal*, yaitu pada bagian dari komen dalam *qualifier*, *kantor eksekutif presiden*, dan topik dalam *rebuttal*, *kerja di seputar presiden*. Hubungan kohesi leksikal antonim

mengikat elemen argumen *rebuttal* dan *stated reason*, pada bagian dari komen dalam *rebuttal*, *senyap*, dan bagian dari komen dalam *stated reason*, *bising*.

Penggabungan elemen-elemen argumen di atas akan menunjukkan kesatuan argumen sebagai berikut.



Bagan 8.3 Kesatuan Argumen Teks IBY

Keterangan:

- 1 : Kohesi Leksikal Antonim
- 2 : Kohesi Referensi
- 3 : Kohesi Leksikal Sinonim
- 4 : Kohesi Referensi
- 5 : Kohesi Leksikal Antonim
- 6 : Kohesi Referensi
- 7 : Kohesi Referensi
- 8 : Kohesi Referensi
- 9 : Kohesi Leksikal Sinonim
- 10 : Kohesi Leksikal Antonim

BAB 4 PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, tampak bahwa argumen dalam delapan teks opini Majalah *TEMPO* sebagai data dalam penelitian ini berpola lengkap, yaitu *claim*, *ground*, *warrant*, *backing*, *qualifier*, dan *rebuttal* (C-G-W-B-Q-R). Pada umumnya, elemen argumen *claim* diletakkan oleh penulis di bagian pembuka atau di bagian isi wacana. Adapun *stated reason* yang menyertai elemen argumen *claim* lebih sering terpisah atau tidak berada dalam kalimat yang sama dengan *claim*. Pemisahan elemen argumen *claim* dari *stated reason* itu agaknya menunjukkan kecenderungan bahwa Majalah *TEMPO* memiliki gaya penulisan jurnalistik yang mengedepankan *claim* tentang topik tulisan, tetapi “menyimpan” alasannya di dalam *stated reason* yang terpisah.

Pemisahan elemen argumen *claim* dari *stated reason* pada teks opini yang ditulis oleh wartawan itu makin tampak manakala ada satu teks, yang dihasilkan oleh penulis nonwartawan, yang justru menyatukan *claim* dan *stated reason*. Menarik pula bahwa penulis umum yang menyatukan *claim* dan *stated reason* itu bahkan belum menyinggung topik tulisan di dalam *claim*-nya. Ia memasukkan subjek atau topik tulisan pada *ground* dan baru “menghantam”-nya pada *rebuttal*. *Rebuttal* hasil tulisan nonwartawan itu juga tidak seperti *rebuttal* yang dihasilkan oleh wartawan. *Rebuttal* itu diawali dengan kata *sayangnya*, kata yang lebih halus bila dibandingkan dengan pilihan kata para wartawan, yaitu *tapi* dan *namun*. Meskipun demikian, ketiga kata tersebut dalam hal ini dinilai sama-sama menunjukkan perlawanan. Jika dikaji lebih jauh, barangkali ada tujuan tertentu mengapa penulisan *claim* dalam teks opini majalah tersebut cenderung demikian. Untuk itu, kecenderungan mengenai hal itu dapat diteliti lebih lanjut.

Elemen argumen *ground* lebih sering diangkat oleh penulis dalam jumlah lebih dari satu, demikian pula dengan elemen argumen *backing*. Hal itulah yang membuat *claim* penulis menjadi semakin kuat karena didukung oleh latar belakang bukti yang berlapis-lapis. Sementara itu, elemen argumen *rebuttal*

ditemukan tidak selalu berupa kondisi yang berlawanan dengan jajaran *claim*, *ground*, *warrant*, dan *backing*, tetapi dapat pula berupa kondisi pengecualian. Hal itu terdukung oleh elemen argumen *qualifier* yang kemudian juga tidak selalu mematahkan, tetapi dapat pula menguatkan *claim*.

Pada umumnya, elemen-elemen argumen ini memiliki pemarkah tertentu, misalnya *claim* selalu disertai kata *karena*, baik implisit maupun eksplisit; *rebuttal* mengandung perlawanan, seperti *namun*, *bukan-melainkan*, dan *tapi*; dan *qualifier* mengandung modalitas, seperti *mesti*, *harus*, dan *bisa*. Akan tetapi, tidak semua elemen *rebuttal* dan *qualifier* mengandung pemarkah seperti disebutkan di atas. Namun pada intinya, meskipun tidak terdapat pemarkah dalam kedua elemen tersebut, kalimat *qualifier* selalu mencerminkan kondisi persyaratan dan kalimat *rebuttal* selalu mencerminkan kondisi penolakan, perlawanan, atau pengecualian.

Selain itu, tidak sama benar dengan penelitian terdahulu, yaitu penelitian Sriasih (2005) dan Nurusyifa (2011) yang menyatakan bahwa elemen argumen *warrant* umumnya berpemarkah *adalah*, elemen argumen *warrant* dalam delapan teks opini majalah *TEMPO* ini tidak tampak menggunakan pemarkah *adalah*. Meskipun demikian, ada kalanya *warrant* dalam hal ini memang dapat diumpamakan sebagai kalimat yang berpemarkah *adalah*. Artinya, elemen argumen *warrant* tidak akan berubah makna apabila dimasukkan kata *adalah* ke dalamnya, misalnya pada elemen argumen *warrant* dalam teks opini “Sikap Presiden dalam Episode Akhir Century” serta elemen argumen *warrant* dalam teks opini “SBY dan RMS”.

Selanjutnya, elemen argumen *backing* didapati pada umumnya selalu berupa fakta yang berlandaskan hukum atau hasil penelitian, misalnya elemen argumen *backing* dalam teks opini “Jangan Korupsi Bila Menolak Penjara” dan elemen argumen *backing* dalam teks opini “Seratus Hari Tak Bergigi”.

Di samping itu, sesuai dengan ciri argumentasi, argumen dalam delapan teks opini Majalah *TEMPO* tersebut bersifat memengaruhi pembaca. Pengaruh itu terbangun dari semua elemen argumen penulis yang tersusun membentuk pola dan saling berhubungan membentuk kesatuan argumen. Hubungan itu terjadi karena adanya kohesi dalam topik-komen antarelemen argumen. Kohesi yang dominan menghubungkan elemen-elemen argumen tersebut adalah kohesi referensi dan

kohesi leksikal repetisi yang digunakan untuk merujuk atau menyataulangkan sebutan presiden.

Adapun pengaruh yang ditanamkan penulis kepada pembaca melalui kesatuan argumen tadi adalah pikiran dan kesan penulis tentang topik tulisan. Penulis memberi kesan subjek atau topik tulisan sebagai pribadi yang ketegasan dan keberaniannya dipertanyakan. Hal itu tampak dari kesatuan argumen dalam teks opini “Jangan Korupsi Bila menolak Penjara”; “Seratus Hari Tak Bergigi”; dan “Sikap Presiden dalam Episode Akhir Century”. Penulis teks opini “Sang Kerbau Masuk Istana” juga mempertanyakan ketahanan emosi subjek tulisan dalam menghadapi demonstrasi yang menyinggung dirinya, sedangkan penulis teks opini “Kembali Kunjungi Negeri Belanda” serta “SBY dan RMS” mempertanyakan kebijakan subjek atau topik tulisan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, penulis juga mempertanyakan profesionalisme subjek dalam mengatur “kantor eksekutifnya”. Hal itu tampak dalam kesatuan argumen teks opini “Orang-orang Sekitar Presiden” dan “Istana Bising Yudhoyono”.

Kesatuan argumen yang didapat melalui pengamatan lebih jauh terhadap argumen yang berpola itu selanjutnya dapat dipandang sebagai “wacana mini” yang tercuplik dari teks opini yang utuh, yang merupakan inti pikiran penulis. Dengan kata lain, setelah kesatuan argumen itu tertangkap, kita dapat mengetahui hal utama yang sebenarnya ingin disampaikan penulis dalam sebuah wacana.

4.2 Saran

Penelitian mengenai argumen dalam wacana argumentatif semacam ini masih sangat terbuka dan menarik untuk didalami lebih jauh. Penyisiran teks untuk menentukan elemen-elemen argumen yang tentu merupakan tantangan tersendiri dan memerlukan berbagai pertimbangan, menjadi salah satu alasan untuk itu. Adapun faktor jumlah data yang terbatas, yang membuat penelitian ini hanya menyimpulkan sebatas data yang ada dan tidak dapat dilakukan generalisasi secara umum terhadap teks opini Majalah *TEMPO*, merupakan alasan berikutnya. Terakhir, kesatuan argumen dalam teks opini yang ditemukan melalui pengamatan lebih lanjut terhadap elemen-elemen argumen yang berpola merupakan hal baru. Ini membuat penelitian yang berkaitan dengan argumen masih sangat mungkin

untuk dikaji lebih dalam, misalnya kemungkinan kesatuan argumen itu berpengaruh pada kesinambungan topik wacana secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan, dkk. (2003). *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Astuti. (2007). “Argumentasi dalam Editorial Surat Kabar Berbahasa Indonesia: Kajian pada Harian Kompas dan Media Indonesia”. Tesis, FIB UI. (Tidak Dipublikasikan).
- Choesin, Ezra M. (2004). “Menyusun Struktur Argumen”. dalam Yunita T. Winarto, dkk. *Karya Tulis Ilmiah Sosial: Menyiapkan, Menulis, dan Mencermatinya*. (hlm. 49—61). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Creswell, John W. (2002). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches* (Angkatan III dan IV KIK-UI bekerja sama dengan Nur Khabibah, Penerjemah). Jakarta: KIK Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Givon, Talmy. (1987). “Beyond Foreground and Background”. dalam Russel S. Tomlin (ed). *Coherence and Grounding In Discourse*. (pp. 175—188). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamin Publishing Company.
- Givon, Talmy. (1983). “Topic Continuity in Discourse: An Introduction”. dalam T. Givon (ed.). *Topic Continuity in Discourse: A Quantitative Cross-Language Study*. (pp. 5—41). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamin Publishing Company.
- Halliday, M.A.K. & R. Hasan. (1976). *Cohesion in English*. London: Longman.
- Hietanen, Mika. (2010). “The Gospel of Matthew as a Literary Argument”. *Argumentation*. 1: 63—86. www.springerlink.com. (diunduh: 10 Oktober 2010).
- Johnstone, Barbara. (2002). *Discourse Analysis*. United Kingdom: Blackwell Publishing.
- Keraf, Gorys. (2004). *Argumentasi dan Narasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Knudson, Ruth E. (1992). “Analysis of Argumentative Writing at Two Grade Levels”. *Journal of Educational Research*. 3: 169—179. www.proquest.com/pqdweb. (diunduh: 9 Oktober 2010).

- Kridalaksana, Harimurti. (2002) *Struktur, Kategori, dan Fungsi dalam Teori Sintaksis*. Jakarta: Universitas Katolik Atma Jaya.
- Kock, Christian. (2009). "Choice is Not True or False: The Domain of Retorical Argumentation". *Argumentation*. 1: 61—80. www.springerlink.com. (diunduh: 9 Oktober 2010).
- Larson, Mildred L. (1984). *Meaning Based Translation, A Guide to Cross-language Equivalence*. Maryland: University Press of America.
- Moleong, Lexy J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurusyifa. (2011). "Argumen dalam Ceramah Motivasi Mario Teguh "Golden Ways". Tesis, FIB UI. (Tidak Dipublikasikan)
- Nunan, David. (1993). *Introducing Discourse Analysis*. England: Penguin English.
- Ramage, John D. & John C. Bean. (1992). *Writing Arguments*. New York: Macmillan Publishing Company.
- Renkema, Jan. (2004). *Introduction To Discourse Studies*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- Sriasih, Sang Ayu Putu. (2005). "Perkembangan Struktur Wacana Tulis Argumentatif Siswa Sekolah Dasar". *Jurnal Masyarakat Linguistik Indonesia*. 1: 51—61. www.gigapedia.com. (diunduh:27 September 2010).
- Suparno. (1993). *Konstruksi Tema Rema dalam Bahasa Indonesia Lisan Tidak Resmi Masyarakat Kotamadya Malang*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Titscher, Stefan, *et al.* (2000). *Methods of Text and Discourse Analysis*. (Prof. Dr. Abdul Syukur Ibrahim, Ed. dan Gazali, dkk., Penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Toulmin, Stephen E. (1974). *The Uses of Argument*. New York: Cambridge University Press.
- Toulmin, Stephen E. (2003). *The Uses of Argument*. New York: Cambridge University Press. www.gigapedia.com. (diunduh:27 September 2010).
- "Toulmin Demonstration". <http://writing.colostate.edu>. (diunduh: 9 Oktober 2010).

- Triwulandari. (2010). "Teks Hasil Menulis Berstimulus Teks dan Hasil Menulis Berstimulus Nonteks Dilihat dari Kohesi, Koherensi, dan Alur Wacana". Tesis, FIB UI. (Tidak Dipublikasikan)
- Van Dijk, Teun A. (1980). *Macrostructure: An Interdisciplinary Study of Global Structures In Discourse, Interaction, and Cognition*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers. www.gigapedia.com. (diunduh:15 Januari 2011).

LAMPIRAN 1

Teks Opini 1: “Jangan Korupsi Bila Menolak Penjara” (JKBMP)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan aparat penegak hukum agar tak asal menangkap dan menahan kepala daerah yang tersandung kasus hukum. Di tengah upaya keras pemerintah memberantas korupsi, pernyataan yang disampaikan ketika membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia di Madiun itu terkesan kontraproduktif. Salah-salah orang bisa menerjemahkan *statement* itu sebagai bentuk "perlindungan" Presiden untuk bupati yang terlibat tindak pidana korupsi. Jangan sampai Presiden disangka sedang "mengerem" kerja penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sebaiknya Presiden tidak salah baca terhadap tuntutan rame-rame para bupati ini. Letak masalah justru pada tren perbuatan pidana kepala daerah yang semakin menjadi-jadi, bukan buruknya kinerja aparat penegak hukum. Aparat justru harus didukung dalam melaksanakan tugasnya tanpa "pilih bulu", termasuk ketika berhadapan dengan sejumlah pejabat publik di daerah yang dulu-dulunya seakan tak tersentuh hukum.

Pada zaman reformasi ini, seharusnya Presiden tak usah repot-repot memberi angin bagi para kepala daerah. Adalah gejala positif manakala bupati, wali kota, hingga gubernur yang diduga korup kini tak bisa lagi main mata dengan aparat. Sudah banyak pejabat daerah yang dimintai keterangan penyidik, menjadi saksi, berstatus tersangka, terdakwa, dan tak sedikit pula yang sampai dipenjarakan. Sampai tahun lalu, sedikitnya ada 50-an bupati rawan perkara yang dikategorikan kejahatan luar biasa ini.

Pepatah "walau langit runtuh, hukum tetap harus tegak" karena harus dijalankan tanpa kompromi. Tak ada masalah serius dengan roda pemerintahan di daerah jika pucuk pimpinannya terpaksa ditahan. Aktivitas birokrasi akan berjalan seperti biasa, karena sudah ada mekanisme pendelegasian wewenang yang jelas ketika bupati, misalnya, sementara waktu berada di tahanan, atau bahkan akhirnya dicopot karena terbukti bersalah. Kekhawatiran Asosiasi tentang macetnya pemerintahan daerah kalau 50 persen bupati ditahan rasanya berlebihan.

Penahanan memang bukanlah keharusan. Namun membuka celah sejak awal bahwa para petinggi daerah itu tak perlu ditahan jelas merupakan kemunduran. Sepanjang aparat bertindak obyektif dan punya dasar hukum untuk menahan, sebaiknya tak usah ragu-ragu. Tindakan hukum ini dapat dibenarkan karena korupsi tergolong pidana dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih, seperti juga kejahatan narkoba.

Toh masih ada celah untuk "menuntut" keadilan: meminta penangguhan penahanan atau bahkan menggugat aparat jika bertindak serampangan. Presiden Yudhoyono seyogianya tak perlu melenturkan prosedur hukum ini ketika merespons "tuntutan" yang dikumandangkan oleh Bupati Pacitan Sujono tadi.

Apalagi fakta menunjukkan kecenderungan penyalahgunaan keuangan daerah semakin tinggi. Badan Pemeriksa Keuangan mengumumkan dana yang digelontorkan ke daerah umumnya tak dilaporkan secara transparan dan akuntabel. Laporan keuangan daerah yang mendapat opini dengan penilaian tidak wajar meningkat tajam dari 10 daerah (2004) menjadi 59 daerah pada 2007. Ada

157 daerah yang pengelolaannya dinilai membahayakan, yang artinya terbuka peluang terjadi pidana korupsi.

Mestinya Presiden tegas saja mengatakan: kalau tak mau berurusan dengan aparat, tak mau ditahan apalagi dipenjarakan, ya, jangan coba-coba korupsi. (*TEMPO*, 25 Januari 2010).

Penjabaran Teks Opini 1:

| Para graf | Komposisi Paragraf/ Penalaran | Kalimat |
|-----------|-------------------------------|--|
| 1 | Pembuka/ Deduktif | <p>1. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan aparat penegak hukum agar tak asal menangkap dan menahan kepala daerah yang tersandung kasus hukum.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden Susilo Bambang Yudoyono 2. ∅ (aparat penegak hukum) 3. Kepala daerah <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengingatkan aparat penegak hukum 2. Agar tak asal menangkap dan menahan 3. Yang tersandung kasus hukum |
| | | <p>2. Di tengah upaya keras pemerintah memberantas korupsi, pernyataan yang disampaikan ketika membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia di Madiun itu terkesan kontraproduktif.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah 2. Pernyataan 3. ∅ (presiden) 4. ∅ (pernyataan yang disampaikan ketika membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia di Madiun itu) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Di tengah upaya keras memberantas korupsi, 2. Yang disampaikan 3. Ketika membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia di Madiun itu 4. Terkesan kontraproduktif |
| | | <p>3. Salah-salah orang bisa menerjemahkan <i>statement</i> itu sebagai bentuk "perlindungan" Presiden untuk bupati yang terlibat tindak pidana korupsi.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Orang 2. <i>Statement</i> itu 3. Untuk bupati <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Salah-salah bisa menerjemahkan 2. Sebagai bentuk "perlindungan" Presiden 3. Yang terlibat tindak pidana korupsi |

| | | |
|---|---------------|---|
| | | <p>4. Jangan sampai Presiden disangka sedang "mengerem" kerja penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden 2. Ø (jangan sampai Presiden disangka) 3. Ø (Presiden mengerem) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jangan sampai disangka 2. Sedang "mengerem" kerja penegak hukum 3. Termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi |
| 2 | Isi/ Induktif | <p>1. Sebaiknya Presiden tidak salah baca terhadap tuntutan rame-rame para bupati ini.</p> <p>Topik: Presiden</p> <p>Komen: Sebaiknya tidak salah baca terhadap tuntutan rame-rame para bupati ini.</p> |
| | | <p>2. Letak masalah justru pada tren perbuatan pidana kepala daerah yang semakin menjadi-jadi, bukan buruknya kinerja aparat penegak hukum.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Letak masalah 2. Ø (letak masalah) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Justru pada tren perbuatan pidana kepala daerah yang semakin menjadi-jadi; 2. Bukan buruknya kinerja aparat penegak hukum |
| | | <p>3. Aparat justru harus didukung dalam melaksanakan tugasnya tanpa "pilih bulu", termasuk ketika berhadapan dengan sejumlah pejabat publik di daerah yang dulu-dulunya seakan tak tersentuh hukum.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aparat 2. Ø (aparat) 3. Ø (aparat) 4. Sejumlah pejabat publik di daerah <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Justru harus didukung 2. Melaksanakan tugasnya tanpa "pilih bulu" 3. Termasuk ketika berhadapan 4. Yang dulu-dulunya seakan tak tersentuh hukum. |
| 3 | Isi/ Deduktif | <p>1. Pada zaman reformasi ini, seharusnya Presiden tak usah repot-repot memberi angin bagi para kepala daerah.</p> <p>Topik: Presiden</p> <p>Komen: Pada zaman reformasi ini, seharusnya tak usah repot-repot memberi angin bagi para kepala daerah.</p> |
| | | <p>2. Adalah gejala positif manakala bupati, wali kota, hingga gubernur yang diduga korup kini tak bisa lagi main mata dengan aparat.</p> |

| | | |
|---|------------------|--|
| | | <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manakala bupati, wali kota, hingga gubernur 2. Ø (bupati, wali kota, hingga gubernur) 3. Ø (manakala bupati, wali kota, hingga gubernur yang diduga korup kini tak bisa lagi main mata dengan aparat) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang diduga korup 2. Kini tak bisa lagi main mata dengan aparat 3. Adalah gejala positif |
| | | <p>3. Sudah banyak pejabat daerah yang dimintai keterangan penyidik, menjadi saksi, berstatus tersangka, terdakwa, dan tak sedikit pula yang sampai dipenjarakan.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat daerah 2. Ø (pejabat daerah) 3. Ø (pejabat daerah) 4. Ø (pejabat daerah) 5. Ø (pejabat daerah) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah banyak yang dimintai keterangan penyidik 2. Menjadi saksi 3. Berstatus tersangka 4. Terdakwa 5. Dan tak sedikit pula yang sampai dipenjarakan. |
| | | <p>4. Sampai tahun lalu, sedikitnya ada 50-an bupati rawan perkara yang dikategorikan kejahatan luar biasa ini.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati rawan perkara yang dikategorikan kejahatan luar biasa ini 2. Ø (perkara) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sampai tahun lalu, sedikitnya ada 50-an 2. Yang dikategorikan kejahatan luar biasa ini |
| 4 | Isi/ Deduktif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pepatah "walau langit runtuh, hukum tetap harus tegak" karena harus dijalankan tanpa kompromi. <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum 2. Ø (hukum) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pepatah "walau langit runtuh, tetap harus tegak" 2. Harus dijalankan tanpa kompromi |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 2. Tak ada masalah serius dengan roda pemerintahan di daerah jika pucuk pimpinannya terpaksa ditahan. <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Roda pemerintahan di daerah 2. Pucuk pimpinannya <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tak ada masalah serius 2. Jika terpaksa ditahan |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 3. Aktivitas birokrasi akan berjalan seperti biasa, karena sudah ada mekanisme pendelegasian wewenang yang jelas ketika bupati, misalnya, sementara waktu berada di tahanan, atau |

| | | |
|---|--------------|--|
| | | <p>bahkan akhirnya dicopot karena terbukti bersalah.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktivitas birokrasi 2. Mekanisme pendelegasian wewenang yang jelas 3. Bupati 4. Ø (bupati) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akan berjalan seperti biasa 2. Sudah ada 3. Ketika misalnya, sementara waktu berada di tahanan 4. Atau bahkan akhirnya dicopot karena terbukti bersalah |
| | | <p>2. Kekhawatiran Asosiasi tentang macetnya pemerintahan daerah kalau 50 persen bupati ditahan rasanya berlebihan.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kekhawatiran Asosiasi 2. 50 persen bupati 3. Ø (Kekhawatiran Asosiasi tentang macetnya pemerintahan daerah kalau 50 persen bupati ditahan) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tentang macetnya pemerintahan daerah 2. Kalau ditahan 3. Rasanya berlebihan |
| 5 | Isi/Induktif | <p>1. Penahanan memang bukanlah keharusan.</p> <p>Topik:</p> <p>Penahanan</p> <p>Komen:</p> <p>Memang bukanlah keharusan</p> |
| | | <p>2. Namun membuka celah sejak awal bahwa para petinggi daerah itu tak perlu ditahan jelas merupakan kemunduran.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ø (presiden) 2. Para petinggi daerah itu 3. Ø ((presiden) membuka celah sejak awal bahwa para petinggi daerah itu tak perlu ditahan) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka celah sejak awal 2. Tak perlu ditahan 3. Jelas merupakan kemunduran |
| | | <p>3. Sepanjang aparat bertindak obyektif dan punya dasar hukum untuk menahan, sebaiknya tak usah ragu-ragu.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aparat 2. Ø (aparat) 3. Ø (aparat) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sepanjang bertindak obyektif 2. Punya dasar hukum untuk menahan 3. Sebaiknya tak usah ragu-ragu. |
| | | <p>4. Tindakan hukum ini dapat dibenarkan karena korupsi tergolong pidana dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih, seperti juga kejahatan narkoba.</p> |

| | | |
|---|--------------|--|
| | | <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tindakan hukum ini 2. Korupsi <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat dibenarkan 2. Tergolong pidana dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih, seperti juga kejahatan narkoba. |
| 6 | Isi/Induktif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Toh masih ada celah untuk "menuntut" keadilan: meminta penangguhan penahanan atau bahkan menggugat aparat jika Ø bertindak serampangan. <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Celah 2. Ø (pejabat daerah) 3. Ø (pejabat daerah) 4. Ø (pejabat daerah) 5. Ø (pejabat daerah) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toh masih ada 2. Celah "menuntut" keadilan 3. Meminta penangguhan penahanan 4. Atau bahkan menggugat aparat 5. Jika bertindak serampangan |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 2. Presiden Yudhoyono seyogianya tak perlu melenturkan prosedur hukum ini ketika merespons "tuntutan" yang dikumandangkan oleh Bupati Pacitan Sujono tadi. <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden Yudhoyono 2. Ø (Presiden Yudhoyono) 3. "tuntutan" <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seyogianya tak perlu melenturkan prosedur hukum ini 2. Ketika merespons 3. Yang dikumandangkan oleh Bupati Pacitan Sujono tadi |
| 7 | Isi/Deduktif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apalagi fakta menunjukkan kecenderungan penyalahgunaan keuangan daerah semakin tinggi. <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fakta 2. Kecenderungan penyalahgunaan keuangan daerah <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apalagi menunjukkan 2. Semakin tinggi |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 2. Badan Pemeriksa Keuangan mengumumkan dana yang digelontorkan ke daerah umumnya tak dilaporkan secara transparan dan akuntabel. <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Pemeriksa Keuangan 2. Dana 3. Ø (dana yang digelontorkan ke daerah) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumumkan 2. Yang digelontorkan ke daerah 3. Umumnya tak dilaporkan secara transparan dan akuntabel |

| | | |
|---|---------|--|
| | | <p>3. Laporan keuangan daerah yang mendapat opini dengan penilaian tidak wajar meningkat tajam dari 10 daerah (2004) menjadi 59 daerah pada 2007.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan keuangan daerah 2. Ø (laporan keuangan daerah mendapat opini dengan penilaian tidak wajar) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang mendapat opini dengan penilaian tidak wajar 2. Meningkat tajam dari 10 daerah (2004) menjadi 59 daerah pada 2007 |
| | | <p>4. Ada 157 daerah yang pengelolaan keuangannya dinilai membahayakan, yang artinya terbuka peluang terjadi pidana korupsi.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada 157 daerah 2. Yang artinya <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang pengelolaan keuangannya dinilai membahayakan 2. Terbuka peluang terjadi pidana korupsi |
| 8 | Penutup | <p>1. Mestinya Presiden tegas saja mengatakan: kalau tak mau berurusan dengan aparat, tak mau ditahan apalagi dipenjarakan, ya, jangan coba-coba korupsi</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden 2. Ø (pejabat daerah) 3. Ø (pejabat daerah) 4. Ø (pejabat daerah) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mestinya tegas saja mengatakan 2. Kalau tak mau berurusan dengan aparat 3. Tak mau ditahan apalagi dipenjarakan 4. Ya, jangan coba-coba korupsi |

LAMPIRAN 2

Teks Opini 2: “Seratus Hari Tak Bergigi” (SHTB)

Pencanangan program seratus hari, yang tak diwajibkan aturan hukum mana pun di negeri ini, akhirnya menjadi barometer kinerja masa awal pemerintahan kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jika efektivitas kerja pemerintah yang menjadi ukuran, harus dikatakan Yudhoyono mendapat rapor dengan angka merah. Dia tak mampu mengelola modal hasil pemilihan umum yang sangat besar, yakni dukungan lebih dari 60 persen pemilih.

Angka merah itu berasal dari dua persoalan yang menguji kepemimpinan Yudhoyono dalam tiga bulan dan sepuluh hari belakangan ini. Pertama, perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan kepolisian serta kejaksaan. Kedua, penyelamatan Bank Century pada November 2008 yang dipersoalkan Dewan Perwakilan Rakyat setelah setahun "tenggelam". Dalam dua ujian itu, Yudhoyono tak kunjung menemukan cara efektif menyelesaikan masalah agar tak berlarut-larut.

Ongkosnya sangat mahal. Kelambatan pucuk pimpinan pemerintah bersikap dalam perseteruan antarlembaga penegak hukum itu membuat seluruh energi terkuras untuk kasus ini. Pemberantasan korupsi bagai terhenti di tengah pertikaian. Presiden baru mengambil sikap setelah muncul tekanan publik yang luar biasa. Jika sejak awal diberesi, misalnya dengan mencopot pejabat di kepolisian yang menjadi biang pertikaian, niscaya masalah itu lekas tuntas.

Seandainya Presiden mengambil tanggung jawab atas penyelamatan Bank Century, barangkali persoalan tak berkembang semakin luas. Semestinya diyakini bahwa keputusan itu diambil secara benar demi menyelamatkan ekonomi, sehingga tak perlu ada keraguan untuk mengambil alih. Presiden tak patut membiarkan para pembantunya menjadi bulan-bulanan serangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Lazimnya presiden terpilih dengan dukungan meyakinkan, semangat kemenangan masih terasa dan itu membuat kepemimpinannya segar dan antusias. Ada contohnya. Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt, misalnya, segera setelah dilantik pada 1933, merangkul semua pihak untuk mengatasi depresi ekonomi yang melanda negerinya. Dengan kepemimpinan efektif, ia meloloskan lima belas undang-undang ke Kongres pada seratus hari pertama pemerintahannya.

Pemerintahan Yudhoyono dan Boediono bukannya tak menyiapkan rencana. Dalam rapat kabinet 5 November 2009, Presiden menetapkan Program Seratus Hari berisi 45 program dan 129 rencana aksi. Ia juga mengumumkan lima belas program pilihan yang wajib dilaksanakan, antara lain pemberantasan mafia hukum, revitalisasi industri pertahanan, penanggulangan terorisme, dan penanggulangan permasalahan listrik.

Sayang, sebagian besar rencana seratus hari itu malah terasa seperti program rutin. Pertikaian antarlembaga hukum dan heboh Bank Century yang tak cepat diselesaikan juga membuat semua program bagai hilang ditelan angin. Bisa dimengerti bila Wakil Presiden Boediono perlu memerintahkan para menteri berbicara di media massa agar program-program mereka terpublikasi.

Seratus hari pertama memang tak cukup buat menghakimi pemerintahan yang masih akan berkuasa sampai 2014. Tapi pada masa "pembuka" ini, perlu

dikatakan bahwa Presiden Yudhoyono belum memberikan sesuatu yang membuat publik optimistis akan keberhasilan seluruh programnya. Masih banyak waktu untuk mengejar "target" yang luput di seratus hari pertama, termasuk untuk memperbaiki efektivitas kerja pemerintah. Asalkan, sikap kepemimpinan Presiden ikut berubah: lebih berani mengambil tindakan tegas di saat yang tepat. (*TEMPO*, 25 Januari 2010).

Penjabaran Teks Opini 2

| Paragraf | Komposisi Paragraf/ Penalaran | Kalimat |
|----------|-------------------------------|---|
| 1 | Pembuka/ Deduktif | <p>1. Pencanaan program seratus hari, yang tak diwajibkan aturan hukum mana pun di negeri ini, akhirnya menjadi barometer kinerja masa awal pemerintahan kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencanaan program seratus hari 2. Ø (pencanangan program seratus hari, yang tak diwajibkan aturan hukum mana pun di negeri ini) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang tak diwajibkan aturan hukum mana pun di negeri ini 2. Akhirnya menjadi barometer kinerja masa awal pemerintahan kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono |
| | | <p>2. Jika efektivitas kerja pemerintah yang menjadi ukuran, harus dikatakan Yudhoyono mendapat rapor dengan angka merah.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Efektivitas kerja pemerintah 2. Yudhoyono <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika yang menjadi ukuran, 2. Harus dikatakan mendapat rapor dengan angka merah. |
| | | <p>3. Dia tak mampu mengelola modal hasil pemilihan umum yang sangat besar, yakni dukungan lebih dari 60 persen pemilih.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dia 2. Modal hasil pemilihan umum 3. Dukungan <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tak mampu mengelola 2. Yang sangat besar 3. Yakni lebih dari 60 persen pemilih. |
| 2 | Isi/ Induktif | <p>1. Angka merah itu berasal dari dua persoalan yang menguji kepemimpinan Yudhoyono dalam tiga bulan dan sepuluh hari belakangan ini.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Angka merah itu 2. Dua persoalan |

| | | |
|---|------------------|---|
| | | <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berasal 2. Yang menguji kepemimpinan Yudhoyono dalam tiga bulan dan sepuluh hari belakangan ini |
| | | <p>2. Pertama, persetujuan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan kepolisian serta kejaksaan.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ø (persoalan) 2. Komisi Pemberantasan Korupsi dengan kepolisian serta kejaksaan <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertama 2. Persetujuan |
| | | <p>3. Kedua, penyelamatan Bank Century pada November 2008 yang dipersoalkan Dewan Perwakilan Rakyat setelah setahun "tenggelam".</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ø (persoalan) 2. Penyelamatan Bank Century pada November 2008 <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kedua 2. Yang dipersoalkan Dewan Perwakilan Rakyat setelah setahun "tenggelam". |
| | | <p>4. Dalam dua ujian itu, Yudhoyono tak kunjung menemukan cara efektif menyelesaikan masalah agar tak berlarut-larut.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yudhoyono 2. Cara efektif 3. Ø (masalah) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam dua ujian itu, tak kunjung menemukan 2. Menyelesaikan masalah 3. Agar tak berlarut-larut |
| 3 | Isi/ Deduktif | <p>1. Ongkosnya sangat mahal.</p> <p>Topik: Ongkosnya</p> <p>Komen: Sangat mahal</p> |
| | | <p>2. Kelambatan pucuk pimpinan pemerintah bersikap dalam persetujuan antarlembaga penegak hukum itu membuat seluruh energi terkuras untuk kasus ini.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelambatan pucuk pimpinan pemerintah 2. Persetujuan 3. Ø (kelambatan pucuk pimpinan pemerintah bersikap dalam persetujuan antarlembaga penegak hukum itu) 4. Seluruh energi <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bersikap 2. Antarlembaga penegak hukum itu 3. Membuat 4. Terkuras untuk kasus ini |

| | | |
|---|------------------|---|
| | | <p>3. Pemberantasan korupsi bagai terhenti di tengah pertikaian.</p> <p>Topik: Pemberantasan korupsi</p> <p>Komen: Bagai terhenti di tengah pertikaian</p> |
| | | <p>4. Presiden baru mengambil sikap setelah muncul tekanan publik yang luar biasa.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden 2. Setelah tekanan publik yang luar biasa <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baru mengambil sikap 2. Muncul. |
| | | <p>5. Jika sejak awal diberesi, misalnya dengan mencopot pejabat di kepolisian yang menjadi biang pertikaian, niscaya masalah itu lekas tuntas.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ø (masalah itu) 2. Ø (presiden) 3. Ø (pejabat di kepolisian) 4. Masalah itu <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika sejak awal diberesi 2. Misalnya dengan mencopot pejabat di kepolisian 3. Yang menjadi biang pertikaian 4. Niscaya lekas tuntas. |
| 4 | Isi/ Deduktif | <p>1. Seandainya Presiden mengambil tanggung jawab atas penyelamatan Bank Century, barangkali persoalan tak berkembang semakin luas.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden; 2. Persoalan <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seandainya mengambil tanggung jawab atas penyelamatan Bank Century, 2. Barangkali tak berkembang semakin luas |
| | | <p>3. Semestinya diyakini bahwa keputusan itu diambil secara benar demi menyelamatkan ekonomi, sehingga tak perlu ada keraguan untuk mengambil alih.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan itu 2. Ø (semestinya diyakini bahwa keputusan itu diambil secara benar) 3. Keraguan 4. Ø (Presiden) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semestinya diyakini diambil secara benar 2. Demi menyelamatkan ekonomi 3. Sehingga tak perlu ada 4. Untuk mengambil alih |

| | | |
|---|------------------|---|
| | | <p>4. Presiden tak patut membiarkan para pembantunya menjadi bulan-bulanan serangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden 2. Para pembantunya <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tak patut membiarkan 2. Menjadi bulan-bulanan serangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. |
| 5 | Isi/ Deduktif | <p>1. Lazimnya presiden terpilih dengan dukungan meyakinkan, semangat kemenangan masih terasa dan itu membuat kepemimpinannya segar dan antusias.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden terpilih 2. Semangat kemenangan 3. Itu 4. Kepemimpinannya <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lazimnya dengan dukungan meyakinkan 2. Masih terasa 3. Membuat 4. Segar dan antusias |
| | | <p>2. Ada contohnya.</p> <p>Topik: Contohnya</p> <p>Komen: Ada</p> |
| | | <p>3. Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt, misalnya, segera setelah dilantik pada 1933, merangkul semua pihak untuk mengatasi depresi ekonomi yang melanda negerinya.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt, misalnya 2. Ø (Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt) 3. Ø (semua pihak) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Segera setelah dilantik pada 1933 2. Merangkul semua pihak 3. Mengatasi depresi ekonomi yang melanda negerinya |
| | | <p>4. Dengan kepemimpinan efektif, ia meloloskan lima belas undang-undang ke Kongres pada seratus hari pertama pemerintahannya.</p> <p>Topik: Ia</p> <p>Komen: Dengan kepemimpinan efektif, meloloskan lima belas undang-undang ke Kongres pada seratus hari pertama pemerintahannya.</p> |
| 6 | Isi/ Deduktif | <p>1. Pemerintahan Yudhoyono dan Boediono bukannya tak menyiapkan rencana.</p> |

| | | |
|---|------------------|---|
| | | <p>Topik: Pemerintahan Yudhoyono dan Boediono</p> <p>Komen: Bukannya tak menyiapkan rencana</p> |
| | | <p>2. Dalam rapat kabinet 5 November 2009, Presiden menetapkan Program Seratus Hari berisi 45 program dan 129 rencana aksi.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden 2. Program Seratus Hari <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam rapat kabinet 5 November 2009, menetapkan 2. Berisi 45 program dan 129 rencana aksi |
| | | <p>3. Ia juga mengumumkan lima belas program pilihan yang wajib dilaksanakan, antara lain pemberantasan mafia hukum, revitalisasi industri pertahanan, penanggulangan terorisme, dan penanggulangan permasalahan listrik.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ia 2. Lima belas program pilihan 3. Ø (lima belas program pilihan) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Juga mengumumkan 2. Yang wajib dilaksanakan 3. Antara lain pemberantasan mafia hukum, revitalisasi industri pertahanan, penanggulangan terorisme, dan penanggulangan permasalahan listrik |
| 7 | Isi/ Deduktif | <p>1. Sayang, sebagian besar rencana seratus hari itu malah terasa seperti program rutin.</p> <p>Topik: Sebagian besar rencana seratus hari itu</p> <p>Komen: Sayang, malah terasa seperti program rutin.</p> |
| | | <p>2. Pertikaian antarlembaga hukum dan heboh Bank Century yang tak cepat diselesaikan juga membuat semua program bagai hilang ditelan angin.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertikaian antarlembaga hukum dan heboh Bank Century 2. Ø (pertikaian antarlembaga hukum dan heboh Bank Century yang tak cepat diselesaikan) 3. Semua program <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang tak cepat diselesaikan 2. Juga membuat 3. Bagai hilang ditelan angin. |
| | | <p>3. Bisa dimengerti bila Wakil Presiden Boediono perlu memerintahkan para menteri berbicara di media massa agar program-program mereka terpublikasi.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Presiden Boediono 2. Ø (bisa dimengerti Wakil Presiden Boediono) |

| | | |
|---|----------------------|--|
| | | <p>3. Para menteri 4. Program-program mereka</p> <p>Komen:</p> <p>1. Bisa dimengerti 2. Bila perlu memerintahkan 3. Berbicara di media massa 4. Terpublikasi</p> |
| 8 | Penutup/ Deduktif | <p>1. Seratus hari pertama memang tak cukup buat menghakimi pemerintahan yang masih akan berkuasa sampai 2014.</p> <p>Topik:</p> <p>1. Seratus hari pertama 2. Pemerintahan</p> <p>Komen:</p> <p>1. Memang tak cukup buat menghakimi 2. Yang masih akan berkuasa sampai 2014</p> |
| | | <p>2. Tapi pada masa "pembuka" ini, perlu dikatakan bahwa Presiden Yudhoyono belum memberikan sesuatu yang membuat publik optimistis akan keberhasilan seluruh programnya.</p> <p>Topik:</p> <p>1. Presiden Yudhoyono 2. Ø (Presiden Yudhoyono) 3. Sesuatu</p> <p>Komen:</p> <p>1. Tapi pada masa "pembuka" ini, perlu dikatakan 2. belum memberikan 3. yang membuat publik optimistis akan keberhasilan seluruh programnya.</p> |
| | | <p>3. Masih banyak waktu untuk mengejar "target" yang luput di seratus hari pertama, termasuk untuk memperbaiki efektivitas kerja pemerintah.</p> <p>Topik:</p> <p>1. Waktu 2. Ø (masih banyak waktu) 3. "target" 4. Ø (masih banyak waktu)</p> <p>Komen:</p> <p>1. Masih banyak 2. Untuk mengejar 3. Yang luput di seratus hari pertama 4. Termasuk untuk memperbaiki efektivitas kerja pemerintah</p> |
| | | <p>4. Asalkan, sikap kepemimpinan Presiden ikut berubah: lebih berani mengambil tindakan tegas di saat yang tepat.</p> <p>Topik:</p> <p>1. Sikap kepemimpinan Presiden 2. Lebih berani</p> <p>Komen:</p> <p>1. Asalkan, ikut berubah 2. Mengambil tindakan tegas di saat yang tepat</p> |

LAMPIRAN 3

Teks Opini 3: "Sang Kerbau Masuk Istana" (SKMI)

Apa yang dipikirkan para demonstran ketika menghela seekor kerbau untuk memprotes Presiden Susilo Bambang Yudhoyono? Membuat Presiden kesal, ngambek, merasa tak dihargai, lalu mundur? Atau sekadar menarik perhatian publik sebagai yang pertama mengajak kerbau unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia?

Jawabannya tak terlalu penting. Kadang kala rasa gemas-karena satu dan lain sebab-bisa mendatangkan kegilaan mendadak. Hendry Mulyadi, seorang penonton sepak bola di Stadion Senayan, geregetan melihat pemain PSSI tak kuasa menandingi kesebelasan Oman. Ia melompati pagar, masuk lapangan hijau, merebut bola dari kaki pemain PSSI, dan menggiringnya sampai gawang lawan-sebelum diringkus petugas.

Seandainya pun Hendry mencetak gol, ia sangat waras untuk tahu "gol"-nya tak mengubah apa-apa. Bila publik terkesan bersimpati kepadanya, itu lantaran ia "mewakili" perasaan orang banyak yang kecewa terhadap permainan PSSI.

Siapa pun yang menghadirkan kerbau di Bundaran HI, dia pasti tahu kabinet tak akan goyang, Presiden tak beringsut sebuku pun dari kursinya. Si penggeret kerbau mendapat banyak liputan media, barangkali ada juga sebagian masyarakat yang terwakili aspirasinya-karena urusan Bank Century yang digerujuk Rp 6,7 triliun, pagar mahal Istana, mobil mewah menteri, atau isu lain.

Si pemrotes tak akan mendapat lebih dari itu. Malah ide nakal itu mengundang antipati sebagian orang untuk sejumlah alasan. Satu yang terpenting, olok-olok itu langsung berbalik menuding muka sendiri. Bila "bapak" negeri disamakan dengan kerbau, pasti banyak di antara kita, "anak-anak" negeri, yang menolak keras disebut gudel-anak kerbau dengan kecerdasan jauh di belakang induknya.

Orang Toraja pasti punya keberatan sendiri. Bagi rakyat di kawasan Provinsi Sulawesi Selatan itu, kerbau bukan binatang sembarangan. Karembau merupakan hewan paling penting dalam kehidupan sosial, ritual, dan kepercayaan, bahkan alat ukur status sosial.

Agak mengerikan membayangkan demo tandingan yang mungkin dilakukan pendukung Presiden. Kalau mereka menganggap sang pemimpin "macan" atau "banteng", akankah Bundaran HI suatu hari nanti menjadi semacam taman margasatwa?

Kita tahu, protes memang lazim dilakukan dengan ekspresi dipompa habis. Maksudnya jelas untuk merebut perhatian dan menciptakan tekanan agar pemerintah melakukan perbaikan sesuai dengan keinginan pemrotes. Pemerintah sangat mudah memilih: mengikuti keinginan pemrotes atau menolak. Tentu pemerintah punya kaki-tangan untuk menyaring protes yang punya dasar kuat, dan mana yang asal njeplak. Perbaikan merupakan jawaban terbaik atas protes yang didukung fakta jelas.

Perlu disadari, perbaikan sebaik apa pun tak akan menyenangkan semua orang. Maka protes dan kritik-bila pemerintah tak membangkitkan kembali kebiasaan orde yang doyan membungkam pendapat kritis-akan selalu muncul. Tanpa ketahanan saraf yang terlatih, mereka yang menerima kritik akan mudah

berkeluh kesah, gampang terpancing menumpahkan unek-unek, atau mulai tergoda untuk mengambil jalan "keras".

Sebaliknya, kritik yang disampaikan tanpa tata krama justru menurunkan mutu kritik itu. Salah-salah sang pemrotes malah terjerumus dalam urusan pidana. Meskipun Mahkamah Konstitusi sudah menghapus dua pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, masih tersedia sejumlah pasal untuk menghukum pelaku penghinaan. Bila Presiden terganggu, ia bisa mengadu ke polisi.

Maka bukan aturan lebih ketat yang diperlukan, melainkan cara komunikasi yang lebih sehat. (*TEMPO*, 8 Februari 2010).

Penjabaran Teks Opini 3

| Paragraf | Komposisi Paragraf/ Penalaran | Kalimat |
|----------|-------------------------------|---|
| 1 | Pembuka/ Deduktif | <p>1. Apa yang dipikirkan para demonstran ketika menghela seekor kerbau untuk memprotes Presiden Susilo Bambang Yudhoyono?</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa 2. Ø (para demonstran) 3. Ø (para demonstran) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang dipikirkan para demonstran 2. Ketika menghela seekor kerbau 3. Memprotes Presiden Susilo Bambang Yudhoyono? |
| | | <p>2. Membuat Presiden kesal, ngambek, merasa tak dihargai, lalu mundur?</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ø (para demonstran) 2. Presiden 3. Ø (presiden) 4. Ø (presiden) 5. Ø (presiden) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat 2. Kesal 3. Ngambek 4. Merasa tak dihargai 5. Lalu mundur |
| | | <p>3. Atau sekadar menarik perhatian publik sebagai yang pertama mengajak kerbau unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia?</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ø (para demonstran) 2. Sebagai yang pertama <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atau sekadar menarik perhatian publik 2. Mengajak kerbau unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia? |

| | | |
|---|--|---|
| 2 | Pembuka/ Deduktif (dengan paragraf ke-3) | <p>1. Jawabannya tak terlalu penting.</p> <p>Topik: Jawabannya</p> <p>Komen: Tak terlalu penting</p> |
| | | <p>2. Kadang kala rasa gemas -karena satu dan lain sebab-bisa mendatangkan kegilaan mendadak.</p> <p>Topik: Rasa gemas -karena satu dan lain sebab-</p> <p>Komen: Kadang kala bisa mendatangkan kegilaan mendadak</p> |
| | | <p>3. Hendry Mulyadi, seorang penonton sepak bola di Stadion Senayan, geregetan melihat pemain PSSI tak kuasa menandingi kesebelasan Oman.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hendry Mulyadi, seorang penonton sepak bola di Stadion Senayan, 2. Pemain PSSI <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Geregetan melihat 2. Tak kuasa menandingi kesebelasan Oman |
| | | <p>4. Ia melompati pagar, masuk lapangan hijau, merebut bola dari kaki pemain PSSI, dan menggiringnya sampai gawang lawan-sebelum diringkus petugas.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ia 2. Ø (ia) 3. Ø (ia) 4. Ø (ia) 5. Ø (ia) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melompati pagar, 2. Masuk lapangan hijau, 3. Merebut bola dari kaki pemain PSSI, 4. Menggiringnya sampai gawang lawan- 5. Sebelum diringkus petugas |
| 3 | Pembuka | <p>1. Seandainya pun Hendry mencetak gol, ia sangat waras untuk tahu "gol"-nya tak mengubah apa-apa.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hendry; 2. Ia 3. "Gol"-nya <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seandainya pun mencetak gol 2. Sangat waras untuk tahu 3. Tak mengubah apa-apa. |
| | | <p>2. Bila publik terkesan bersimpati kepadanya, itu lantaran ia "mewakili" perasaan orang banyak yang kecewa terhadap permainan PSSI.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publik 2. Itu |

| | | |
|---|------------------|--|
| | | <p>3. Perasaan orang banyak</p> <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bila terkesan bersimpati kepadanya 2. lantaran "mewakili" 3. yang kecewa terhadap permainan PSSI. |
| 4 | Isi/ Deduktif | <p>1. Siapa pun yang menghadirkan kerbau di Bundaran HI, dia pasti tahu kabinet tak akan goyang, Presiden tak beringsut sebuku pun dari kursinya.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Siapa pun 2. Dia 3. Kabinet 4. Presiden <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang menghadirkan kerbau di Bundaran HI 2. Pasti tahu 3. Tak akan goyang 4. Tak beringsut sebuku pun dari kursinya |
| | | <p>2. Si penggeret kerbau mendapat banyak liputan media, barangkali ada juga sebagian masyarakat yang terwakili aspirasinya-karena urusan Bank Century yang digerujuk Rp 6,7 triliun, pagar mahal Istana, mobil mewah menteri, atau isu lain.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si penggeret kerbau 2. Ada juga sebagian masyarakat 3. Urusan Bank Century 4. Ø (urusan) Pagar mahal Istana 5. Ø (urusan) Mobil mewah menteri 6. Ø (urusan) Isu lain <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapat banyak liputan media 2. Barangkali yang terwakili aspirasinya 3. Yang digerujuk Rp 6,7 triliun 4. Ø 5. Ø 6. Ø |
| 5 | Isi/ Deduktif | <p>1. Si pemrotes tak akan mendapat lebih dari itu.</p> <p>Topik: Si pemrotes</p> <p>Komen: Tak akan mendapat lebih dari itu.</p> |
| | | <p>2. Malah ide nakal itu mengundang antipati sebagian orang untuk sejumlah alasan.</p> <p>Topik: Ide nakal itu</p> <p>Komen: Malah mengundang antipati sebagian orang untuk sejumlah alasan.</p> |
| | | <p>3. Satu yang terpenting, olok-olok itu langsung berbalik menuding muka sendiri.</p> |

| | | |
|---|------------------|---|
| | | <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Satu 2. Olok-olok itu 3. Ø (olok-olok itu langsung berbalik) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang terpenting 2. Langsung berbalik 3. Menuding muka sendiri |
| | | <p>4. Bila "bapak" negeri disamakan dengan kerbau, pasti banyak di antara kita, "anak-anak" negeri, yang menolak keras disebut gudel-anak kerbau dengan kecerdasan jauh di belakang induknya.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Bapak" negeri 2. "Anak-anak" negeri 3. Ø (pasti banyak di antara kita, "anak-anak" negeri, yang menolak keras) 4. Anak kerbau <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bila disamakan dengan kerbau 2. Pasti banyak di antara kita yang menolak keras 3. Disebut gudel 4. Dengan kecerdasan jauh di belakang induknya |
| 6 | Isi/ Deduktif | <p>1. Orang Toraja pasti punya keberatan sendiri.</p> <p>Topik: Orang Toraja</p> <p>Komen: Pasti punya keberatan sendiri</p> |
| | | <p>2. Bagi rakyat di kawasan Provinsi Sulawesi Selatan itu, kerbau bukan binatang sembarangan.</p> <p>Topik: Kerbau</p> <p>Komen: Bagi rakyat di kawasan Provinsi Sulawesi Selatan itu, bukan binatang sembarangan</p> |
| | | <p>3. Karembau merupakan hewan paling penting dalam kehidupan sosial, ritual, dan kepercayaan, bahkan alat ukur status sosial.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Karembau 2. Hewan 3. Ø (karembau) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merupakan 2. Paling penting dalam kehidupan sosial, ritual, dan kepercayaan 3. Bahkan alat ukur status sosial |
| 7 | Isi/ Deduktif | <p>1. Agak mengerikan membayangkan demo tandingan yang mungkin dilakukan pendukung Presiden.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agak mengerikan 2. Demo tandingan |

| | | |
|---|------------------|---|
| | | <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membayangkan 2. Yang mungkin dilakukan pendukung Presiden |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 2. Kalau mereka menganggap sang pemimpin "macan" atau "banteng", akankah Bundaran HI suatu hari nanti menjadi semacam taman margasatwa? <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mereka 2. Sang pemimpin 3. Ø (sang pemimpin) 4. Bundaran HI <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kalau menganggap 2. "macan" 3. Atau "banteng" 4. Akankah suatu hari nanti menjadi semacam taman margasatwa? |
| 8 | Isi/ Deduktif | <p>1. Kita tahu, protes memang lazim dilakukan dengan ekspresi dipompa habis.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kita 2. Protes 3. Ekspresi <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahu 2. Memang lazim dilakukan 3. Dipompa habis |
| | | <p>2. Maksudnya jelas untuk merebut perhatian dan menciptakan tekanan agar pemerintah melakukan perbaikan sesuai dengan keinginan pemrotes.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maksudnya 2. Ø (maksudnya jelas) 3. Ø (maksudnya jelas) 4. Pemerintah <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jelas 2. Untuk merebut perhatian 3. (Untuk) menciptakan tekanan 4. Agar melakukan perbaikan sesuai dengan keinginan pemrotes |
| | | <p>3. Pemerintah sangat mudah memilih: mengikuti keinginan pemrotes atau menolak.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah 2. Ø (pemerintah) 3. Ø (pemerintah) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sangat mudah memilih 2. mengikuti keinginan pemrotes 3. menolak |
| | | <p>5. Tentu pemerintah punya kaki-tangan untuk menyaring</p> |

| | | |
|---|------------------|---|
| | | <p>protes yang punya dasar kuat, dan mana yang asal njeplak.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah 2. Protes 3. Ø (mana) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tentu punya kaki-tangan untuk menyaring 2. Yang punya dasar kuat 3. Yang asal njeplak |
| | | <p>6. Perbaikan merupakan jawaban terbaik atas protes yang didukung fakta jelas.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan 2. Jawaban 3. Protes <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merupakan 2. Terbaik 3. Yang didukung fakta jelas |
| 9 | Isi/ Deduktif | <p>1. Perlu disadari, perbaikan sebaik apa pun tak akan menyenangkan semua orang.</p> <p>Topik: Perbaikan</p> <p>Komen: Perlu disadari, sebaik apa pun tak akan menyenangkan semua orang</p> |
| | | <p>2. Maka protes dan kritik-bila pemerintah tak membangkitkan kembali kebiasaan orde yang doyan membungkam pendapat kritis-akan selalu muncul.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Protes dan kritik 2. Pemerintah 3. Kebiasaan orde <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maka akan selalu muncul 2. Bila tak membangkitkan kembali 3. Yang doyan membungkam pendapat kritis |
| | | <p>3. Tanpa ketahanan saraf yang terlatih, mereka yang menerima kritik akan mudah berkeluh kesah, gampang terpancing menumpahkan unek-unek, atau mulai tergoda untuk mengambil jalan "keras".</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanpa ketahanan saraf 2. Mereka 3. Ø (mereka yang menerima kritik) 4. Ø (mereka yang menerima kritik) 5. Ø (mereka yang menerima kritik) 6. Ø (mereka yang menerima kritik) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang terlatih 2. Yang menerima kritik 3. Akan mudah berkeluh kesah |

| | | |
|----|---|---|
| | | <p>4. Gampang terpancing 5. Menumpahkan unek-unek 6. Mulai tergoda 7. Mengambil jalan "keras"</p> |
| 10 | Isi | <p>1. Sebaliknya, kritik yang disampaikan tanpa tata krama justru menurunkan mutu kritik itu. Topik: kritik Komen: Sebaliknya, yang disampaikan tanpa tata krama justru menurunkan mutu kritik itu</p> |
| | | <p>2. Salah-salah sang pemrotes malah terjerumus dalam urusan pidana. Topik: Sang pemrotes Komen: Salah-salah malah terjerumus dalam urusan pidana.</p> |
| | | <p>3. Meskipun Mahkamah Konstitusi sudah menghapus dua pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, masih tersedia sejumlah pasal untuk menghukum pelaku penghinaan. Topik: 1. Mahkamah Konstitusi 2. Sejumlah pasal untuk menghukum pelaku penghinaan Komen: 1. Meskipun sudah menghapus dua pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2. Masih tersedia</p> |
| | | <p>4. Bila Presiden terganggu, ia bisa mengadu ke polisi. Topik: 1. Presiden 2. Ia Komen: 1. Bila terganggu 2. Bisa mengadu ke polisi</p> |
| 11 | Penutup/ Induktif (dengan paragraf ke-10) | <p>1. Maka bukan aturan lebih ketat yang diperlukan, melainkan cara komunikasi yang lebih sehat. Topik: 1. Aturan lebih ketat 2. Melainkan cara komunikasi Komen: 1. Bukan yang diperlukan 2. Yang lebih sehat</p> |

LAMPIRAN 4

Teks Opini 4: "Sikap Presiden dalam Episode Akhir Century" (SPDEAC)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sesungguhnya tak punya pilihan selain mengambil alih tanggung jawab kebijakan penyelamatan Bank Century. Sebagai orang nomor satu pemerintahan negara yang menganut sistem presidensial, di pundak Presidenlah terletak tanggung jawab semua kebijakan eksekutif. Para menteri hanya membantu presiden menjalankan program sesuai dengan kebijakan yang digariskan.

Walau agak terlambat, Presiden harus berani "pasang badan" melindungi dua orang kepercayaannya yang kini menjadi sasaran tembak Panitia Khusus Hak Angket Century, yakni Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Bila benar Yudhoyono merencanakan sebuah pidato di depan rakyat tentang bailout Century, diharapkan ia tegas menjelaskan posisinya. Bahwa dialah pihak yang berkewajiban memikul risiko apa pun yang muncul dari kebijakan penyelamatan Century.

Keberanian membela anak buahnya itu seharusnya muncul sejak awal. Ketika Pansus ramai berdebat perlu-tidaknya menghadirkan Kepala Negara, tak ada salahnya dia bicara. Kalaupun para politikus Senayan ternyata bersikap tak terpuji selama berhadapan dengan Presiden, yang memang harus dihormati, toh rakyat bisa menilai mana loyang mana pula emasnya.

Jika Presiden berani mengambil oper risiko itu, niscaya banyak nilai plus untuk Yudhoyono. Ia akan dicatat sejarah sebagai pemimpin berjiwa ksatria yang siap berada di depan dalam situasi kritis manakala kebijakannya diserang habis-habisan. Ia akan dikenang sebagai pemimpin andal yang tampil manakala pembantunya sebagai "terperiksa" seperti diinterogasi-lengkap dengan kata-kata kasar sebagian legislator.

Betapapun bisingnya, kegaduhan politik ini bisa menyehatkan demokrasi kita manakala pemegang kekuasaan legislatif dan eksekutif bertindak proporsional. Panitia Khusus perlu membuka mata perihal kelemahan kebijakan penyelamatan Century itu. Sebaliknya, Presiden juga harus menjelaskan kebijakan penyelamatan yang menelan dana Rp 6,7 triliun di bank gurem itu.

Yudhoyono mempunyai kesempatan bagus untuk melakukannya karena sejauh ini tak ada pelanggaran pidana-misalnya menerima aliran dana haram atau memperkaya diri atau orang lain lewat penyelamatan Century-ditemukan atas para pembantunya. Bahkan, tidak seperti desas-desus yang berbiak cepat, belum ditemukan aliran dana Century untuk partai penyokong Presiden atau keluarga Istana.

Penegasan Presiden ini penting untuk menggarisbawahi bahwa kebijakan menyelamatkan bank gagal berdampak sistemik oleh pembantunya itu sudah benar dan atas sepengetahuannya.

Ranah politik memang tidak steril dari pelbagai kepentingan jangka pendek. Pasti ada kekuatan politik yang sedang berpikir untuk menjatuhkan Presiden dalam kasus Century ini. Tapi, bila demi kekuasaan Presiden harus mengorbankan pembantunya yang tak bersalah-melalui reshuffle kabinet atau barter atau pertukaran bentuk apa pun-perlu disadari bahwa "rongrongan" lawan

politik itu tak akan berhenti sampai di situ. Target berikutnya pastilah kursi yang sedang diduduki Presiden sendiri.

Karena itu, Presiden harus secara terbuka menyatakan tutup pintu untuk tawar-menawar ini. Bila Yudhoyono menegaskan tak akan mencopot Boediono dan Sri Mulyani, posisi itu niscaya akan merontokkan upaya sebagian anggota Panitia Khusus yang terkesan ngebet menjatuhkan dua orang itu ketimbang mencari kebenaran.

Proses politik skandal Century sebentar lagi akan berakhir. Kalaupun, misalnya, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan rekomendasi terhadap pejabat tertentu yang diduga bersalah dalam proses bailout, tak usah panik. Hal itu harus dipahami sebagai sebuah pernyataan politik atas hasil penyelidikan. Kebenarannya harus diuji lebih jauh.

Bila Panitia Khusus menduga ada pelanggaran pidana, temuan itu harus dibawa ke ranah hukum. Proses hukumlah yang bisa memastikan apakah seseorang bersalah atau sebaliknya. Komisi Pemberantasan Korupsi bisa mengambil peran penting kalau dalam skandal ini ada indikasi korupsi. Polisi dan jaksa juga bisa menindaklanjuti rekomendasi Pansus jika sekiranya diduga telah terjadi kejahatan perbankan.

Setelah itu, tinggallah Presiden dan partai pendukungnya mengevaluasi koalisi partai penyokong pemerintah yang ternyata semu. Kasus Century semestinya membuka mata bahwa koalisi pendukung Yudhoyono tak ubahnya kumpulan "musuh dalam selimut" yang siap menikam dari belakang. Terlalu naif bila koalisi dipertahankan, sementara tusukan demi tusukan terus dihunjamkan ke kubu yang berkuasa.

Presiden Yudhoyono harus berani menegaskan sikap untuk tidak lagi berkompromi. Apa pun risikonya. (*TEMPO*, 1 Maret 2010).

Penjabaran Teks Opini 4

| Paragraf | Komposisi Paragraf/ Penalaran | Kalimat |
|----------|-------------------------------|--|
| 1 | Pembuka/ Deduktif | <p>1. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sesungguhnya tak punya pilihan selain mengambil alih tanggung jawab kebijakan penyelamatan Bank Century.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2. Ø (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesungguhnya tak punya pilihan 2. Selain mengambil alih tanggung jawab kebijakan penyelamatan Bank Century. |
| | | <p>2. Sebagai orang nomor satu pemerintahan negara yang menganut sistem presidensial, di pundak Presidenlah terletak tanggung jawab semua kebijakan eksekutif.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ø (presiden) 2. Negara 3. Tanggung jawab semua kebijakan eksekutif |

| | | |
|---|------------------|--|
| | | <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai orang nomor satu pemerintahan 2. Yang menganut sistem presidensial 3. Terletak di pundak Presiden |
| | | <p>3. Para menteri hanya membantu presiden menjalankan program sesuai dengan kebijakan yang digariskan.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Para menteri 2. Ø (para menteri hanya membantu presiden) 3. Sesuai dengan kebijakan <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hanya membantu presiden 2. Menjalankan program 3. Yang digariskan |
| 2 | Isi/ Induktif | <p>1. Walau agak terlambat, Presiden harus berani "pasang badan" melindungi dua orang kepercayaannya yang kini menjadi sasaran tembak Panitia Khusus Hak Angket Century, yakni Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden 2. Ø (presiden) 3. Dua orang kepercayaannya, yakni Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Walau agak terlambat, harus berani "pasang badan" 2. Melindungi 3. Yang kini menjadi sasaran tembak Panitia Khusus Hak Angket Century |
| | | <p>2. Bila benar Yudhoyono merencanakan sebuah pidato di depan rakyat tentang bailout Century, diharapkan ia tegas menjelaskan posisinya.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yudhoyono 3. Ia <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bila benar merencanakan sebuah pidato di depan rakyat tentang bailout Century 2. diharapkan tegas menjelaskan posisinya. |
| | | <p>3. Bahwa dialah pihak yang berkewajiban memikul risiko apa pun yang muncul dari kebijakan penyelamatan Century.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dialah 2. Risiko apa pun <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak yang berkewajiban memikul 2. Yang muncul dari kebijakan penyelamatan Century |
| 3 | Isi/ Deduktif | <p>1. Keberanian membela anak buahnya itu seharusnya muncul sejak awal.</p> |

| | | |
|---|------------------|---|
| | | <p>Topik: Keberanian membela anak buahnya itu</p> <p>Komen: seharusnya muncul sejak awal.</p> |
| | | <p>2. Ketika Pansus ramai berdebat perlu-tidaknya menghadirkan Kepala Negara, tak ada salahnya dia bicara.</p> <p>Topik: 1. Pansus 2. Dia</p> <p>Komen: 1. Ketika ramai berdebat perlu-tidaknya menghadirkan Kepala Negara 2. Tak ada salahnya bicara</p> |
| | | <p>3. Walaupun para politikus Senayan ternyata bersikap tak terpuji selama berhadapan dengan Presiden, yang memang harus dihormati, toh rakyat bisa menilai mana loyang mana pula emasnya.</p> <p>Topik: 1. Para politikus Senayan 2. Ø (presiden) 3. Rakyat</p> <p>Komen: 1. Walaupun ternyata bersikap tak terpuji selama berhadapan dengan Presiden 2. Yang memang harus dihormati 3. Toh bisa menilai mana loyang mana pula emasnya</p> |
| 4 | Isi/ Deduktif | <p>1. Jika Presiden berani mengambil oper risiko itu, niscaya banyak nilai plus untuk Yudhoyono.</p> <p>Topik: 1. Presiden 2. Banyak nilai plus</p> <p>Komen: 1. Jika berani mengambil oper risiko itu 2. Niscaya untuk Yudhoyono.</p> |
| | | <p>2. Ia akan dicatat sejarah sebagai pemimpin berjiwa ksatria yang siap berada di depan dalam situasi kritis manakala kebijakannya diserang habis-habisan.</p> <p>Topik: 1. Ia 2. Sebagai pemimpin 3. Ø (pemimpin) 4. Manakala kebijakannya</p> <p>Komen: 1. Akan dicatat sejarah 2. Berjiwa ksatria 3. Yang siap berada di depan dalam situasi kritis 4. Diserang habis-habisan</p> |
| | | <p>3. Ia akan dikenang sebagai pemimpin andal yang tampil manakala pembantunya sebagai "terperiksa" seperti diinterogasi-lengkap dengan kata-kata kasar sebagian legislator.</p> |

| | | |
|---|------------------|--|
| | | <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ia 2. Pemimpin andal 3. Pembantunya sebagai "terperiksa" <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akan dikenang 2. Yang tampil 3. Seperti diinterogasi-lengkap dengan kata-kata kasar sebagian legislator |
| 5 | Isi/ Deduktif | <p>1. Betapapun bisingnya, kegaduhan politik ini bisa menyehatkan demokrasi kita manakala pemegang kekuasaan legislatif dan eksekutif bertindak proporsional.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegaduhan politik ini 2. Pemegang kekuasaan legislatif dan eksekutif <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Betapapun bisingnya, bisa menyehatkan demokrasi kita 2. Manakala bertindak proporsional |
| | | <p>2. Panitia Khusus perlu membuka mata perihal kelemahan kebijakan penyelamatan Century itu.</p> <p>Topik: Panitia Khusus</p> <p>Komen: Perlu membuka mata perihal kelemahan kebijakan penyelamatan Century itu</p> |
| | | <p>2. Sebaliknya, Presiden juga harus menjelaskan kebijakan penyelamatan yang menelan dana Rp 6,7 triliun di bank gurem itu.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden 2. Kebijakan penyelamatan <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebaliknya, juga harus menjelaskan 2. Yang menelan dana Rp 6,7 triliun di bank gurem itu |
| 6 | Isi | <p>1. Yudhoyono mempunyai kesempatan bagus untuk melakukannya karena sejauh ini tak ada pelanggaran pidana-misalnya menerima aliran dana haram atau memperkaya diri atau orang lain lewat penyelamatan Century-ditemukan atas para pembantunya.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yudhoyono 2. Tak ada Pelanggaran pidana 3. Ø (para pembantunya) 4. Ø (para pembantunya) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai kesempatan bagus untuk melakukannya 2. Sejauh ini ditemukan atas para pembantunya 3. Misalnya menerima aliran dana haram 4. Memperkaya diri atau orang lain lewat penyelamatan Century |

| | | |
|---|--|---|
| | | <p>2. Bahkan, tidak seperti desas-desus yang berbiak cepat, belum ditemukan aliran dana Century untuk partai penyokong Presiden atau keluarga Istana.</p> <p>Topik: Aliran dana Century</p> <p>Komen: Bahkan, tidak seperti desas-desus yang berbiak cepat, belum ditemukan untuk partai penyokong Presiden atau keluarga Istana</p> |
| 7 | Isi/ Induktif (dengan paragraf ke-6) | <p>1. Penegasan Presiden ini penting untuk menggarisbawahi bahwa kebijakan menyelamatkan bank gagal berdampak sistemik oleh pembantunya itu sudah benar dan atas sepengetahuannya.</p> <p>Topik: 1. Penegasan Presiden ini 2. Kebijakan menyelamatkan bank gagal berdampak sistemik oleh pembantunya itu</p> <p>Komen: 1. Penting untuk menggarisbawahi 2. Sudah benar dan atas sepengetahuannya</p> |
| 8 | Isi/ Deduktif | <p>1. Ranah politik memang tidak steril dari pelbagai kepentingan jangka pendek.</p> <p>Topik: Ranah politik</p> <p>Komen: Memang tidak steril dari pelbagai kepentingan jangka pendek</p> |
| | | <p>2. Pasti ada kekuatan politik yang sedang berpikir untuk menjatuhkan Presiden dalam kasus Century ini.</p> <p>Topik: 1. Kekuatan politik 2. Ø (kekuatan politik yang sedang berpikir untuk menjatuhkan Presiden dalam kasus Century ini)</p> <p>Komen: 1. Yang sedang berpikir untuk menjatuhkan Presiden dalam kasus Century ini 2. Pasti ada</p> |
| | | <p>3. Tapi, bila demi kekuasaan Presiden harus mengorbankan pembantunya yang tak bersalah-melalui reshuffle kabinet atau barter atau pertukaran bentuk apa pun-perlu disadari bahwa "rongrongan" lawan politik itu tak akan berhenti sampai di situ.</p> <p>Topik: 1. Presiden 2. Pembantunya 3. Ø (tapi, bila demi kekuasaan Presiden harus mengorbankan pembantunya yang tak bersalah) 4. Ø (presiden) 5. "Rongrongan" lawan politik itu</p> <p>Komen: 1. Tapi, bila demi kekuasaan harus mengorbankan 2. Yang tak bersalah 3. Melalui reshuffle kabinet atau barter atau pertukaran</p> |

| | | |
|----|----------------------|--|
| | | <p>bentuk apa pun-</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Perlu disadari 5. Tak akan berhenti sampai di situ |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 4. Target berikutnya pastilah kursi yang sedang diduduki Presiden sendiri. <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pastilah kursi 2. Ø (pastilah kursi yang sedang diduduki Presiden sendiri) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang sedang diduduki Presiden sendiri 2. Target berikutnya |
| 9 | Isi/ Deduktif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Karena itu, Presiden harus secara terbuka menyatakan tutup pintu untuk tawar-menawar ini. <p>Topik: Presiden</p> <p>Komen: Karena itu, harus secara terbuka menyatakan tutup pintu untuk tawar-menawar ini</p> |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 2. Bila Yudhoyono menegaskan tak akan mencopot Boediono dan Sri Mulyani, posisi itu niscaya akan merontokkan upaya sebagian anggota Panitia Khusus yang terkesan ngebet menjatuhkan dua orang itu ketimbang mencari kebenaran. <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yudhoyono 2. Posisi itu 3. Upaya sebagian anggota Panitia Khusus 4. ø (upaya sebagian anggota Panitia Khusus) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bila menegaskan tak akan mencopot Boediono dan Sri Mulyani 2. Niscaya akan merontokkan 3. Yang terkesan ngebet menjatuhkan dua orang itu 4. Ketimbang mencari kebenaran |
| 10 | Penutup/ Deduktif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses politik skandal Century sebentar lagi akan berakhir. <p>Topik: Proses politik skandal Century</p> <p>Komen: Sebentar lagi akan berakhir</p> |
| | | <p>2. Kalaupun, misalnya, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan rekomendasi terhadap pejabat tertentu yang diduga bersalah dalam proses bailout, tak usah panik.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat 2. Pejabat tertentu 3. ø (presiden) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kalaupun, misalnya, menetapkan rekomendasi 2. Yang diduga bersalah dalam proses bailout |

| | | |
|----|----------------------|---|
| | | 3. Tak usah panik. |
| | | 3. Hal itu harus dipahami sebagai sebuah pernyataan politik atas hasil penyelidikan. Topik: 1. Hal itu 2. Sebagai sebuah pernyataan politik Komen : 1. Harus dipahami 2. Atas hasil penyelidikan |
| | | 4. Kebenarannya harus diuji lebih jauh. Topik: Kebenarannya Komen: Harus diuji lebih jauh |
| 11 | Penutup/ Deduktif | 1. Bila Panitia Khusus menduga ada pelanggaran pidana, temuan itu harus dibawa ke ranah hukum. Topik: 1. Panitia khusus 2. Temuan itu Komen: 1. Bila menduga ada pelanggaran pidana 2. Harus dibawa ke ranah hukum |
| | | 2. Proses hukumlah yang bisa memastikan apakah seseorang bersalah atau sebaliknya. Topik: 1. Proses hukumlah 2. Seseorang Komen: 1. Yang bisa memastikan 2. Apakah bersalah atau sebaliknya |
| | | 3. Komisi Pemberantasan Korupsi bisa mengambil peran penting kalau dalam skandal ini ada indikasi korupsi. Topik: 1. Komisi Pemberantasan Korupsi 2. Indikasi korupsi Komen: 1. Bisa mengambil peran penting 2. Kalau dalam skandal ini ada |
| | | 4. Polisi dan jaksa juga bisa menindaklanjuti rekomendasi Pansus jika sekiranya diduga telah terjadi kejahatan perbankan. Topik: 1. Polisi dan jaksa 2. Kejahatan perbankan Komen: 1. Juga bisa menindaklanjuti rekomendasi Pansus 2. Jika sekiranya diduga telah terjadi |
| 12 | Penutup/ Deduktif | 1. Setelah itu, tinggallah Presiden dan partai pendukungnya mengevaluasi koalisi partai penyokong pemerintah yang ternyata semu. Topik: 1. Tinggallah Presiden dan partai pendukungnya |

| | | |
|----|----------------------|--|
| | | <p>2. Koalisi partai penyokong pemerintah</p> <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah itu, mengevaluasi 2. Yang ternyata semu. |
| | | <p>2. Kasus Century semestinya membuka mata bahwa koalisi pendukung Yudhoyono tak ubahnya kumpulan "musuh dalam selimut" yang siap menikam dari belakang.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kasus Century 2. Koalisi pendukung Yudhoyono 3. Kumpulan "musuh dalam selimut" <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semestinya membuka mata 2. Tak ubahnya 3. Yang siap menikam dari belakang |
| | | <p>3. Terlalu naif bila koalisi dipertahankan, sementara tusukan demi tusukan terus dihunjamkan ke kubu yang berkuasa.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koalisi 2. Tusukan demi tusukan 3. Ke kubu <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlalu naif bila dipertahankan 2. Sementara terus dihunjamkan 3. Yang berkuasa |
| 13 | Penutup/ Deduktif | <p>1. Presiden Yudhoyono harus berani menegaskan sikap untuk tidak lagi berkompromi.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden Yudhoyono 2. Ø (Presiden Yudhoyono) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harus berani menegaskan sikap 2. Tidak lagi berkompromi |
| | | <p>2. Apa pun risikonya.</p> <p>Topik: Risikonya</p> <p>Komen: Apa pun</p> |

LAMPIRAN 5**Teks Opini 5: “Kembali Kunjungi Negeri Belanda” (KKNB)**

Mestinya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak secara mendadak membatalkan keberangkatannya ke Belanda. Membatalkan kunjungan kenegaraan adalah hal biasa, tapi jika itu dilakukan hanya beberapa menit sebelum pesawat lepas landas-saat rombongan sudah dijamu minuman selamat datang dan bagasi sudah dinaikkan ke pesawat-artinya ada yang tak beres dalam manajemen pemerintahan kita.

Barangkali ini soal informasi yang tak lengkap. Semula, Presiden mendapat kabar bahwa aktivis Republik Maluku Selatan menggugat ke pengadilan Belanda meminta Yudhoyono ditangkap. Yang dipersalahkan adalah pelanggaran hak asasi manusia di Maluku. Gugatan dimasukkan beberapa hari sebelum Yudhoyono bertolak. Nyatanya gugatan itu ditolak pengadilan. Keputusan itu keluar sehari setelah Presiden membatalkan kunjungan.

Tak semestinya Presiden curiga bahwa pengadilan itu digelar untuk menghina dirinya. Kort Geding, mahkamah yang menyidangkan gugatan RMS, memang didesain untuk secara cepat mengadili kasus perdata. Ini bukan pengadilan hak asasi. Tingkatnya cuma setara dengan mahkamah praperadilan di pengadilan negeri. Apalagi, sebagai kepala negara, Presiden punya kekebalan diplomatik-dan dijamin berulang kali oleh tuan rumah. Karena itulah siapa pun yang memberikan informasi keliru kepada Presiden mestinya ditindak.

Sikap Presiden Yudhoyono yang mendadak balik kanan justru "kemenangan" bagi RMS. Menjadikan gugatan kelompok separatis itu sebagai alasan pembatalan hanya membesar-besarkan mereka yang sesungguhnya sudah tak punya gigi. Di Belanda, keberadaan mereka tak diakui pemerintah. Aktivis RMS di pengasingan saat ini umumnya orang tua yang tak punya banyak aktivitas. RMS bukan apa-apa jika dibandingkan dengan aktivis Gerakan Aceh Merdeka di Swedia, sebelum perjanjian damai Helsinki.

Patut disayangkan jika Presiden mengharapkan simpati dalam negeri melalui pembatalan kunjungan kenegaraan itu. Beberapa kalangan nasionalis memang memuji keputusan itu. Juga sebagian kalangan Islam yang menganggap Belanda patut diberi pelajaran. Sebelum ini, dunia Islam sempat heboh dengan beredarnya film Fitna yang menghina Islam dan Al-Quran karya Geert Wilders. Geert adalah anggota parlemen Belanda dari Partai Kebebasan (PVV). Ia dikenal kerap bersuara keras terhadap Islam dan kaum imigran.

Dampak dari pembatalan itu jelas merugikan Indonesia. Hubungan diplomatik jadi terganggu. Belanda memang tak mengeluarkan protes yang berlebihan. Tapi sejumlah kerja sama yang siap di depan mata jadi terbengkalai. Sebelum penundaan, Belanda tengah menyiapkan kerja sama di bidang penanggulangan banjir di Ibu Kota. Juga menyiapkan kerja bareng di bidang pertanian, sosial, dan kebudayaan.

Kekeliruan Presiden tak boleh diulangi. Mengorbankan hubungan luar negeri untuk memperbaiki citra di dalam negeri bukan sikap yang elok. Tak perlu lagi bersikap play victim-memotretkan diri sebagai korban untuk mendapat simpati publik. Presiden harus menjadwalkan ulang kunjungan kenegaraan yang sudah dipersiapkan matang oleh tuan rumah tersebut.

Tak ada salahnya jika Presiden memberikan sinyal kepada pemerintah Belanda bahwa ia menyadari kekeliruannya. Toh, mengakui kesalahan adalah sikap kesatria yang terpuji dan tak akan mengurangi wibawa Kepala Negara. Hubungan diplomatik dengan Belanda harus diperbaiki dengan menjadwalkan ulang kunjungan. Hal itu harus dilakukan dengan sikap tegas, karena "gangguan" RMS bukan mustahil tetap akan muncul dalam rupa berbeda. (*TEMPO*, 11 Oktober 2010).

Penjabaran Teks Opini 5

| Paragraf | Komposisi Paragraf/ Penalaran | Kalimat |
|----------|-------------------------------|---|
| 1 | Pembuka/ Deduktif | <p>1. Mestinya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak secara mendadak membatalkan keberangkatannya ke Belanda.</p> <p>Topik: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono</p> <p>Komen: Mestinya tidak secara mendadak membatalkan keberangkatannya ke Belanda</p> |
| | | <p>2. Membatalkan kunjungan kenegaraan adalah hal biasa, tapi jika itu dilakukan hanya beberapa menit sebelum pesawat lepas landas-saat rombongan sudah dijamu minuman selamat datang dan bagasi sudah dinaikkan ke pesawat-artinya ada yang tak beres dalam manajemen pemerintahan kita.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membatalkan kunjungan kenegaraan 2. Itu (membatalkan kunjungan kenegaraan) 3. Saat rombongan 4. Bagasi 5. Artinya <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adalah hal biasa, 2. Tapi jika dilakukan hanya beberapa menit sebelum pesawat lepas landas- 3. Sudah dijamu minuman selamat datang 4. Sudah dinaikkan ke pesawat- 5. Ada yang tak beres dalam manajemen pemerintahan kita |
| 2 | Isi/ Deduktif | <p>1. Barangkali ini soal informasi yang tak lengkap.</p> <p>Topik: Ini</p> <p>Komen: Barangkali soal informasi yang tak lengkap</p> |
| | | <p>2. Semula, Presiden mendapat kabar bahwa aktivis Republik Maluku Selatan menggugat ke pengadilan Belanda meminta Yudhoyono ditangkap.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden 2. Aktivis Republik Maluku Selatan 3. Ø (Aktivis Republik Maluku Selatan) |

| | | |
|---|------------------|--|
| | | <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semula, mendapat kabar bahwa 2. Menggugat ke pengadilan Belanda 3. Meminta Yudhoyono ditangkap |
| | | <p>3. Yang dipersoalkan adalah pelanggaran hak asasi manusia di Maluku.</p> <p>Topik: Yang dipersoalkan</p> <p>Komen: Adalah pelanggaran hak asasi manusia di Maluku</p> |
| | | <p>4. Gugatan dimasukkan beberapa hari sebelum Yudhoyono bertolak.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gugatan 2. Yudhoyono <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dimasukkan 2. Beberapa hari sebelum bertolak |
| | | <p>5. Nyatanya gugatan itu ditolak pengadilan.</p> <p>Topik: Gugatan itu</p> <p>Komen: Nyatanya ditolak pengadilan</p> |
| | | <p>6. Keputusan itu keluar sehari setelah Presiden membatalkan kunjungan.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan itu 2. Presiden <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluar 2. Sehari setelah membatalkan kunjungan |
| 3 | Isi/ Deduktif | <p>1. Tak semestinya Presiden curiga bahwa pengadilan itu digelar untuk menghina dirinya.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden 2. Pengadilan itu <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tak semestinya curiga 2. Digelar untuk menghina dirinya |
| | | <p>2. Kort Geding, mahkamah yang menyidangkan gugatan RMS, memang didesain untuk secara cepat mengadili kasus perdata.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kort Geding 2. Mahkamah 3. Ø (Kort Geding, mahkamah yang menyidangkan gugatan RMS,) 4. Kort Geding <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memang didesain 2. Yang menyidangkan gugatan RMS, 3. Memang didesain |

| | | |
|---|------------------|--|
| | | 5. Secara cepat mengadili kasus perdata |
| | | 3. Ini bukan pengadilan hak asasi. Topik: Ini Komen: Bukan pengadilan hak asasi |
| | | 4. Tingkatnya cuma setara dengan mahkamah praperadilan di pengadilan negeri. Topik: Tingkatnya Komen: Cuma setara dengan mahkamah praperadilan di pengadilan negeri |
| | | 5. Apalagi, sebagai kepala negara, Presiden punya kekebalan diplomatik-dan dijamin berulang kali oleh tuan rumah. Topik: 1. Presiden 2. Ø (presiden) Komen: 1. Apalagi, sebagai kepala negara, punya kekebalan diplomatik- 2. Dijamin berulang kali oleh tuan rumah |
| | | 6. Karena itulah siapa pun yang memberikan informasi keliru kepada Presiden mestinya ditindak. Topik: 1. Siapa pun 2. Ø (siapa pun yang memberikan informasi keliru kepada Presiden) Komen: 1. Karena itulah yang memberikan informasi keliru kepada Presiden 2. Mestinya ditindak |
| 4 | Isi/ Induktif | 1. Sikap Presiden Yudhoyono yang mendadak balik kanan justru "kemenangan" bagi RMS. Topik: 1. Sikap Presiden Yudhoyono 2. Ø (sikap Presiden Yudhoyono yang mendadak balik kanan) Komen: 1. Yang mendadak balik kanan 3. justru "kemenangan" bagi RMS |
| | | 2. Menjadikan gugatan kelompok separatis itu sebagai alasan pembatalan hanya membesar-besarkan mereka yang sesungguhnya sudah tak punya gigi. Topik: 1. Menjadikan gugatan kelompok separatis itu sebagai alasan pembatalan 2. Mereka Komen: 1. Hanya membesar-besarkan 2. Yang sesungguhnya sudah tak punya gigi |

| | | |
|---|------------------|---|
| | | <p>3. Di Belanda, keberadaan mereka tak diakui pemerintah.</p> <p>Topik: Keberadaan mereka</p> <p>Komen: Di Belanda, tak diakui pemerintah</p> |
| | | <p>4. Aktivis RMS di pengasingan saat ini umumnya orang tua yang tak punya banyak aktivitas.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktivis RMS di pengasingan 2. Orang tua <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saat ini umumnya 2. Yang tak punya banyak aktivitas |
| | | <p>5. RMS bukan apa-apa jika dibandingkan dengan aktivis Gerakan Aceh Merdeka di Swedia, sebelum perjanjian damai Helsinki.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RMS 2. Ø (RMS) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukan apa-apa 2. Jika dibandingkan dengan aktivis Gerakan Aceh Merdeka di Swedia, sebelum perjanjian damai Helsinki |
| 5 | Isi/ Deduktif | <p>1. Patut disayangkan jika Presiden mengharapkan simpati dalam negeri melalui pembatalan kunjungan kenegaraan itu.</p> <p>Topik: Presiden</p> <p>Komen: Patut disayangkan jika mengharapkan simpati dalam negeri melalui pembatalan kunjungan kenegaraan itu</p> |
| | | <p>2. Beberapa kalangan nasionalis memang memuji keputusan itu.</p> <p>Topik: Beberapa kalangan nasionalis</p> <p>Komen: memang memuji keputusan itu</p> |
| | | <p>3. Juga sebagian kalangan Islam yang menganggap Belanda patut diberi pelajaran.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Juga sebagian kalangan Islam 2. Belanda <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang menganggap 2. Patut diberi pelajaran |
| | | <p>4. Sebelum ini, dunia Islam sempat heboh dengan beredarnya film Fitna yang menghina Islam dan Al-Quran karya Geert Wilders.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dunia Islam 2. Dengan beredarnya film Fitna karya Geert Wilders |

| | | |
|---|------------------|--|
| | | <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum ini, sempat heboh 2. Yang menghina Islam dan Al-Quran |
| | | <p>5. Geert adalah anggota parlemen Belanda dari Partai Kebebasan (PVV).</p> <p>Topik: Geert</p> <p>Komen: Adalah anggota parlemen Belanda dari Partai Kebebasan (PVV)</p> |
| | | <p>6. Ia dikenal kerap bersuara keras terhadap Islam dan kaum imigran.</p> <p>Topik: Ia</p> <p>Komen: Dikenal kerap bersuara keras terhadap Islam dan kaum imigran</p> |
| 6 | Isi/ Deduktif | <p>1. Dampak dari pembatalan itu jelas merugikan Indonesia.</p> <p>Topik: Dampak dari pembatalan itu</p> <p>Komen: Jelas merugikan Indonesia</p> |
| | | <p>2. Hubungan diplomatik jadi terganggu.</p> <p>Topik: Hubungan diplomatik</p> <p>Komen: Jadi terganggu</p> |
| | | <p>3. Belanda memang tak mengeluarkan protes yang berlebihan.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanda 2. Protes <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memang tak mengeluarkan 2. Yang berlebihan |
| | | <p>4. Tapi sejumlah kerja sama yang siap di depan mata jadi terbengkalai.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sejumlah kerja sama 2. Ø (sejumlah kerja sama yang siap di depan mata) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang siap di depan mata 2. Tapi jadi terbengkalai |
| | | <p>5. Sebelum penundaan, Belanda tengah menyiapkan kerja sama di bidang penanggulangan banjir di Ibu Kota.</p> <p>Topik: Belanda</p> <p>Komen: Sebelum penundaan, tengah menyiapkan kerja sama di bidang penanggulangan banjir di Ibu Kota</p> |

| | | |
|---|----------------------|---|
| | | <p>6. Juga menyiapkan kerja bareng di bidang pertanian, sosial, dan kebudayaan.</p> <p>Topik: Ø (Belanda)</p> <p>Komen: Juga menyiapkan kerja bareng di bidang pertanian, sosial, dan kebudayaan</p> |
| 7 | Penutup/ Induktif | <p>1. Kekeliruan Presiden tak boleh diulangi.</p> <p>Topik: Kekeliruan Presiden</p> <p>Komen: Tak boleh diulangi</p> |
| | | <p>2. Mengorbankan hubungan luar negeri untuk memperbaiki citra di dalam negeri bukan sikap yang elok.</p> <p>Topik: Mengorbankan hubungan luar negeri untuk memperbaiki citra di dalam negeri</p> <p>Komen: Bukan sikap yang elok</p> |
| | | <p>3. Tak perlu lagi bersikap play victim-memotretkan diri sebagai korban untuk mendapat simpati publik.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ø (presiden) 2. Ø (presiden) 3. Ø (presiden) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tak perlu lagi bersikap play victim 2. Memotretkan diri sebagai korban 3. Mendapat simpati publik |
| | | <p>4. Presiden harus menjadwalkan ulang kunjungan kenegaraan yang sudah dipersiapkan matang oleh tuan rumah tersebut.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden 2. Kunjungan kenegaraan <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harus menjadwalkan ulang 2. Yang sudah dipersiapkan matang oleh tuan rumah tersebut |
| 8 | Penutup/ Induktif | <p>1. Tak ada salahnya jika Presiden memberikan sinyal kepada pemerintah Belanda bahwa ia menyadari kekeliruannya.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden 2. Ia <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tak ada salahnya jika memberikan sinyal kepada pemerintah Belanda 2. Menyadari kekeliruannya |
| | | <p>2. Toh, mengakui kesalahan adalah sikap kesatria yang terpuji dan tak akan mengurangi wibawa Kepala Negara.</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengakui kesalahan 2. Sikap kesatria 3. Ø (mengakui kesalahan) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toh, adalah 2. Yang terpuji 3. Tak akan mengurangi wibawa Kepala Negara |
| | | <p>3. Hubungan diplomatik dengan Belanda harus diperbaiki dengan menjadwalkan ulang kunjungan.</p> <p>Topik: Hubungan diplomatik dengan Belanda</p> <p>Komen: Harus diperbaiki dengan menjadwalkan ulang kunjungan</p> |
| | | <p>4. Hal itu harus dilakukan dengan sikap tegas, karena "gangguan" RMS bukan mustahil tetap akan muncul dalam rupa berbeda.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hal itu 2. "gangguan" RMS <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harus dilakukan dengan sikap tegas 2. Karena bukan mustahil tetap akan muncul dalam rupa berbeda |

LAMPIRAN 6

Teks Opini 6: “SBY dan RMS” (SDR)

Dalam pidatonya ketika menunda kunjungan ke Negeri Belanda pada 5 Oktober lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan: akhir-akhir ini ada gerakan yang mengajukan persoalan hak asasi manusia ke pengadilan Den Haag, dan menuntut agar Presiden RI ditangkap. Mereka mengaku dirinya bagian dari Republik Maluku Selatan (RMS). Dan, SBY tak bisa menerima jika "di saat Presiden RI berada di Belanda atas undangan Ratu dan PM Belanda, pada saat itu digelar pengadilan minta ditangkapnya Presiden RI".

Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Belanda pada 7 Oktober mempublikasikan putusan pengadilan Den Haag yang berkaitan dengan Kort Geding oleh RMS versi terjemahan tidak resmi dalam situsnya (<http://www.id.indonesia.nl/content/view/622/69/>). Tapi, dari isi putusan pengadilan Den Haag, ternyata proses hukum yang dilancarkan oleh RMS tidaklah sespektakuler yang disampaikan oleh para pejabat Indonesia yang berakibat pada penundaan kunjungan Presiden ke Negeri Belanda.

Keberadaan pengadilan Den Haag dalam sistem hukum Belanda adalah pengadilan rendah (district court atau Rechtbank) yang berjumlah 19. Pengadilan rendah terbagi dalam beberapa sektor, di antaranya subdistrict, criminal law sector, civil/family sector. Dan RMS mengajukan upaya hukum berupa gugatan yang dikategorikan dalam ranah hukum perdata. Hal ini dapat terlihat pada sektor pengadilan Den Haag, yaitu sektor perdata.

Karena ini merupakan gugatan perdata, sebenarnya tidak ada proses penangkapan atau penahanan. Hukum perdata tidak mengenal penangkapan atau penahanan. Karena itu, sulit memahami keterangan dari para pejabat di Indonesia, yang mengungkap bahwa pengadilan diminta melakukan penangkapan atau penahanan atas Presiden RI.

Penangkapan ataupun penahanan hanya dapat dilakukan dalam ranah hukum pidana. Inisiatif dimulainya proses perkara pidana haruslah institusi negara, seperti kejaksaan atau kepolisian. Tidak mungkin perkara pidana dilakukan oleh individu yang tidak memegang jabatan dalam institusi negara.

Kekhawatiran Presiden sebenarnya tidak perlu berlebihan, mengingat yang menjadi pihak tergugat dalam gugatan bukanlah pemerintah, Presiden ataupun Negara Republik Indonesia. Pihak tergugat adalah Negara Belanda, yang dalam hal ini ditujukan kepada Kementerian Urusan Umum dan Kementerian Luar Negeri Belanda. Untuk diketahui pihak penggugat antara lain adalah pemerintahan pengasingan Republik Maluku Selatan, Johannes Gerardus Watilette dan Johnson Panjaitan.

Bila para pembantu Presiden cermat, yang dimintakan oleh para penggugat pun bukan hal yang menakutkan. Para penggugat meminta kepada pengadilan agar memerintahkan Kementerian Luar Negeri Belanda untuk mencabut imunitas yang ada pada SBY sebagai kepala negara ketika beliau berkunjung ke Belanda.

Kalaupun pengadilan Den Haag mengabulkan tuntutan agar imunitas Presiden Yudhoyono selama di Belanda dicabut oleh Kementerian Luar Negeri Belanda, ini tidak akan dilakukan. Hal ini mengingat dalam hukum internasional dalam diri kepala negara melekat imunitas atau kekebalan yang harus dihormati oleh negara pengundang. Pencabutan imunitas akan memermalukan negara

pengundang dan tentu akan berakibat pada memburuknya hubungan kedua negara dan rakyat.

Keengganan Presiden untuk hadir di Belanda karena timing yang bersamaan dengan dikeluarkannya putusan pun sebenarnya tidak perlu dirisaukan. Bila saja pembisik Presiden tahu bahwa Kort Geding adalah permintaan putusan sela oleh para penggugat, dalam hukum acara hal tersebut bukan sesuatu yang aneh.

Dalam suatu gugatan para penggugat biasanya meminta putusan sela karena putusan tersebut penting untuk merespons suatu peristiwa. Dalam perkara ini, peristiwa yang dianggap penting adalah kedatangan Presiden RI. Karena itu, para penggugat mengajukan Kort Geding karena tahu Presiden akan datang di Belanda pada 6 Oktober. Logikanya, bila putusan tidak dilakukan bersamaan dengan kedatangan Presiden, pencabutan imunitas akan kehilangan relevansinya.

Harus dipahami bahwa dipercepatnya proses dalam bentuk putusan sela merupakan kehendak dari RMS, dan untuk ini pengadilan Den Haag pun, berdasarkan hukum acara mereka, tidak memiliki otoritas untuk menunda. Dalam hal ini harus diakui kelihaihan RMS dalam memanfaatkan sistem hukum yang ada. RMS telah melakukan akrobat hukum yang bertujuan mengintimidasi pemerintah dan Presiden RI. Bagi pihak yang mengetahui proses beracara dan memahami hukum, manuver yang dilakukan oleh RMS bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan.

Sayangnya, pemerintah Indonesia termakan oleh intimidasi yang dilakukan RMS. Bahkan pemerintah Indonesia cenderung membesar-besarkan proses di pengadilan Den Haag seolah dan terkesan ingin mengajak rakyat untuk dapat membenarkan keputusan menunda kunjungan. Sentimen anti-Belanda pun mulai muncul. Anehnya, pemerintah buru-buru mengatakan hubungan Indonesia dengan Belanda baik. Ini merupakan kontradiksi.

Semakin aneh respons pemerintah atas ketersinggungan Presiden, bukannya diterbitkan nota protes diplomatik, melainkan justru pemerintah menjelaskan kepada pemerintah Belanda alasan penundaan kunjungan. Aneh karena bila Presiden tersinggung seharusnya Presiden meminta dan menunggu surat permohonan maaf dari pemerintah Belanda.

Kejanggalan-kejanggalan ini mengindikasikan betapa lemah kemampuan orang-orang di sekitar Presiden dalam memberikan informasi yang akurat dan lengkap ihwal persidangan di pengadilan Den Haag. Seharusnya KBRI Den Haag ataupun Kementerian Luar Negeri meminta para ahli hukum, baik di Belanda maupun Indonesia, untuk mempelajari upaya hukum yang dilancarkan oleh RMS sebelum memberikan masukan kepada Presiden. (*TEMPO*, 11 Oktober 2010).

Penjabaran Teks Opini 6

| Paragraf | Komposisi Paragraf | Kalimat |
|----------|----------------------|---|
| 1 | Pembuka/ Deduktif | <p>1. Dalam pidatonya ketika menunda kunjungan ke Negeri Belanda pada 5 Oktober lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan: akhir-akhir ini ada gerakan yang mengajukan persoalan hak asasi manusia ke pengadilan Den Haag dan menuntut agar Presiden RI ditangkap.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2. Ada gerakan 3. Presiden RI <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam pidatonya ketika menunda kunjungan ke Negeri Belanda pada 5 Oktober lalu, mengatakan 2. Akhir-akhir ini yang mengajukan persoalan hak asasi manusia ke pengadilan Den Haag dan menuntut 3. Agar ditangkap |
| | | <p>2. Mereka mengaku dirinya bagian dari Republik Maluku Selatan (RMS).</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mereka 2. Dirinya <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengaku 2. Bagian dari Republik Maluku Selatan (RMS) |
| | | <p>3. Dan, SBY tak bisa menerima jika "di saat Presiden RI berada di Belanda atas undangan Ratu dan PM Belanda, pada saat itu digelar pengadilan minta ditangkapnya Presiden RI".</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SBY 2. Presiden RI 3. Digelar pengadilan <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tak bisa menerima 2. Jika di saat berada di Belanda atas undangan Ratu dan PM Belanda 3. Pada saat itu minta ditangkapnya Presiden RI |
| 2 | Pembuka/ Deduktif | <p>1. Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Belanda pada 7 Oktober mempublikasikan putusan pengadilan Den Haag yang berkaitan dengan Kort Geding oleh RMS versi terjemahan tidak resmi dalam situsnya (http://www.id.indonesia.nl/content/view/622/69/).</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Belanda 2. Putusan pengadilan Den Haag <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada 7 Oktober mempublikasikan 2. Yang berkaitan dengan Kort Geding oleh RMS versi terjemahan tidak resmi dalam situsnya |

| | | |
|---|------------------|---|
| | | <p>(http://www.id.indonesia.nl/content/view/622/69/)</p> |
| | | <p>2. Tapi, dari isi putusan pengadilan Den Haag, ternyata proses hukum yang dilancarkan oleh RMS tidaklah sespektakuler yang disampaikan oleh para pejabat Indonesia yang berakibat pada penundaan kunjungan Presiden ke Negeri Belanda.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses hukum 2. Ø (proses hukum yang dilancarkan oleh RMS) 3. Ø (tapi, dari isi putusan pengadilan Den Haag, ternyata proses hukum yang dilancarkan oleh RMS tidaklah sespektakuler yang disampaikan oleh para pejabat Indonesia) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang dilancarkan oleh RMS 2. Dari isi putusan pengadilan Den Haag, ternyata tidaklah sespektakuler yang disampaikan oleh para pejabat Indonesia 3. Yang berakibat pada penundaan kunjungan Presiden ke Negeri Belanda |
| 3 | Isi/ Deduktif | <p>1. Keberadaan pengadilan Den Haag dalam sistem hukum Belanda adalah pengadilan rendah (district court atau Rechtbank) yang berjumlah 19.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan pengadilan Den Haag dalam sistem hukum Belanda 2. Pengadilan rendah (district court atau Rechtbank) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adalah 2. Yang berjumlah 19 |
| | | <p>2. Pengadilan rendah terbagi dalam beberapa sektor, di antaranya subdistrict, criminal law sector, civil/family sector.</p> <p>Topik: Pengadilan rendah</p> <p>Komen: terbagi dalam beberapa sektor, di antaranya subdistrict, criminal law sector, civil/family sector</p> |
| | | <p>3. Dan RMS mengajukan upaya hukum berupa gugatan yang dikategorikan dalam ranah hukum perdata.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RMS 2. Gugatan <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan upaya hukum 2. Yang dikategorikan dalam ranah hukum perdata |
| | | <p>4. Hal ini dapat terlihat pada sektor pengadilan Den Haag, yaitu sektor perdata.</p> <p>Topik: Hal ini</p> <p>Komen: Dapat terlihat pada sektor pengadilan Den Haag, yaitu sektor</p> |

| | | |
|---|------------------|---|
| | | perdata |
| 4 | Isi/ Induktif | <p>1. Karena ini merupakan gugatan perdata, sebenarnya tidak ada proses penangkapan atau penahanan.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ini 2. Proses penangkapan atau penahanan <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Karena merupakan gugatan perdata 2. Sebenarnya tidak ada |
| | | <p>2. Hukum perdata tidak mengenal penangkapan atau penahanan.</p> <p>Topik: Hukum perdata</p> <p>Komen: Tidak mengenal penangkapan atau penahanan</p> |
| | | <p>3. Karena itu, sulit memahami keterangan dari para pejabat di Indonesia, yang mengungkap bahwa pengadilan diminta melakukan penangkapan atau penahanan atas Presiden RI.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ø 2. Keterangan dari para pejabat di Indonesia 3. Pengadilan <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sulit memahami 2. Yang mengungkap 3. Diminta melakukan penangkapan atau penahanan atas Presiden RI |
| 5 | Isi/ Deduktif | <p>1. Penangkapan ataupun penahanan hanya dapat dilakukan dalam ranah hukum pidana.</p> <p>Topik: Penangkapan ataupun penahanan</p> <p>Komen: Hanya dapat dilakukan dalam ranah hukum pidana</p> |
| | | <p>2. Inisiatif dimulainya proses perkara pidana haruslah institusi negara, seperti kejaksaan atau kepolisian.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inisiatif 2. Ø (Inisiatif dimulainya proses perkara pidana) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dimulainya proses perkara pidana 2. Haruslah institusi negara, seperti kejaksaan atau kepolisian |
| | | <p>3. Tidak mungkin perkara pidana dilakukan oleh individu yang tidak memegang jabatan dalam institusi negara.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkara pidana 2. Individu <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mungkin dilakukan 2. Yang tidak memegang jabatan dalam institusi negara |

| | | |
|---|------------------|--|
| 6 | Isi/ Deduktif | <p>1. Kekhawatiran Presiden sebenarnya tidak perlu berlebihan, mengingat yang menjadi pihak tergugat dalam gugatan bukanlah pemerintah, Presiden ataupun Negara Republik Indonesia.</p> <p>Topik: 1. Kekhawatiran Presiden 2. Mengingat yang menjadi pihak tergugat dalam gugatan</p> <p>Komen: 1. Sebenarnya tidak perlu berlebihan 2. Bukanlah pemerintah, Presiden ataupun Negara Republik Indonesia</p> |
| | | <p>2. Pihak tergugat adalah Negara Belanda, yang dalam hal ini ditujukan kepada Kementerian Urusan Umum dan Kementerian Luar Negeri Belanda.</p> <p>Topik: 1. Pihak tergugat 2. Yang dalam hal ini</p> <p>Komen: 1. Adalah Negara Belanda 2. Ditujukan kepada Kementerian Urusan Umum dan Kementerian Luar Negeri Belanda</p> |
| | | <p>3. Untuk diketahui pihak penggugat antara lain adalah pemerintahan pengasingan Republik Maluku Selatan, Johannes Gerardus Watilete dan Johnson Panjaitan.</p> <p>Topik: Pihak penggugat</p> <p>Komen: Untuk diketahui antara lain adalah pemerintahan pengasingan Republik Maluku Selatan, Johannes Gerardus Watilete dan Johnson Panjaitan</p> |
| 7 | Isi/ Deduktif | <p>1. Bila para pembantu Presiden cermat, yang dimintakan oleh para penggugat pun bukan hal yang menakutkan.</p> <p>Topik: 1. Para pembantu Presiden 2. Yang dimintakan oleh para penggugat pun</p> <p>Komen: 1. Bila cermat 2. Bukan hal yang menakutkan</p> |
| | | <p>2. Para penggugat meminta kepada pengadilan agar memerintahkan Kementerian Luar Negeri Belanda untuk mencabut imunitas yang ada pada SBY sebagai kepala negara ketika beliau berkunjung ke Belanda.</p> <p>Topik: 1. Para penggugat 2. Pengadilan 3. Kementerian Luar Negeri Belanda 4. Beliau</p> <p>Komen: 1. Meminta kepada pengadilan 2. Agar memerintahkan Kementerian Luar Negeri Belanda 3. Untuk mencabut imunitas yang ada pada SBY sebagai kepala negara</p> |

| | | |
|---|------------------|---|
| | | 4. Ketika berkunjung ke Belanda |
| 8 | Isi/ Deduktif | <p>1. Kalaupun pengadilan Den Haag mengabulkan tuntutan agar imunitas Presiden Yudhoyono selama di Belanda dicabut oleh Kementerian Luar Negeri Belanda, ini tidak akan dilakukan.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadilan Den Haag 2. Imunitas Presiden Yudhoyono selama di Belanda 3. Ini <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kalaupun mengabulkan tuntutan 2. Agar dicabut oleh Kementerian Luar Negeri Belanda 3. Tidak akan dilakukan |
| | | <p>2. Hal ini mengingat dalam hukum internasional dalam diri kepala negara melekat imunitas atau kekebalan yang harus dihormati oleh negara pengundang.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hal ini 2. Dalam diri kepala negara 3. Imunitas atau kekebalan <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengingat 2. Dalam hukum internasional melekat 3. Yang harus dihormati oleh negara pengundang |
| | | <p>3. Pencabutan imunitas akan mempermalukan negara pengundang dan tentu akan berakibat pada memburuknya hubungan kedua negara dan rakyat.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencabutan imunitas 2. Ø (pencabutan imunitas) 3. Memburuknya <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akan mempermalukan negara pengundang 2. Tentu akan berakibat 3. Hubungan kedua negara dan rakyat |
| 9 | Isi/ Induktif | <p>1. Keengganan Presiden untuk hadir di Belanda karena timing yang bersamaan dengan dikeluarkannya putusan pun sebenarnya tidak perlu dirisaukan.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keengganan Presiden 2. Timing 3. Ø (keengganan Presiden untuk hadir di Belanda karena timing yang bersamaan dengan dikeluarkannya putusan pun) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk hadir di Belanda 2. Yang bersamaan dengan dikeluarkannya putusan 3. Sebenarnya tidak perlu dirisaukan |
| | | <p>2. Bila saja pembisik Presiden tahu bahwa Kort Geding adalah permintaan putusan sela oleh para penggugat, dalam hukum acara hal tersebut bukan sesuatu yang aneh.</p> |

| | | |
|----|------------------|---|
| | | <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembisik Presiden 2. Kort Geding 3. Hal tersebut <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bila saja tahu 2. Adalah permintaan putusan sela oleh para penggugat 3. Dalam hukum acara bukan sesuatu yang aneh |
| 10 | Isi/ Deduktif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam suatu gugatan para penggugat biasanya meminta putusan sela karena putusan tersebut penting untuk merespons suatu peristiwa. <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Para penggugat 2. Putusan tersebut <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam suatu gugatan biasanya meminta putusan sela 2. Penting untuk merespons suatu peristiwa |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 2. Dalam perkara ini, peristiwa yang dianggap penting adalah kedatangan Presiden RI. <p>Topik: Peristiwa yang dianggap penting</p> <p>Komen: Dalam perkara ini, adalah kedatangan Presiden RI</p> |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 3. Karena itu, para penggugat mengajukan Kort Geding karena tahu Presiden akan datang di Belanda pada 6 Oktober. <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Para penggugat 2. ∅ (para penggugat) 3. Presiden <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Karena itu, mengajukan Kort Geding 2. Tahu 3. Akan datang di Belanda pada 6 Oktober |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 4. Logikanya, bila putusan tidak dilakukan bersamaan dengan kedatangan Presiden, pencabutan imunitas akan kehilangan relevansinya. <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Putusan 2. Pencabutan imunitas <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Logikanya, bila tidak dilakukan bersamaan dengan kedatangan Presiden 2. Akan kehilangan relevansinya |
| 11 | Isi/ Induktif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Harus dipahami bahwa dipercepatnya proses dalam bentuk putusan sela merupakan kehendak dari RMS, dan untuk ini pengadilan Den Haag pun, berdasarkan hukum acara mereka, tidak memiliki otoritas untuk menunda. <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dipercepatnya proses dalam bentuk putusan sela 2. Pengadilan Den Haag pun |

| | | |
|----|------------------|--|
| | | <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harus dipahami merupakan kehendak dari RMS, 2. Untuk ini, berdasarkan hukum acara mereka, tidak memiliki otoritas untuk menunda |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 2. Dalam hal ini harus diakui kelihaiian RMS dalam memanfaatkan sistem hukum yang ada. <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelihaiian RMS 2. Ø (kelihaiian RMS dalam memanfaatkan sistem hukum yang ada) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam memanfaatkan sistem hukum yang ada 2. Dalam hal ini harus diakui |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 3. RMS telah melakukan akrobat hukum yang bertujuan mengintimidasi pemerintah dan Presiden RI. <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RMS 2. Akrobat hukum <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah melakukan 2. Yang bertujuan mengintimidasi pemerintah dan Presiden RI |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 4. Bagi pihak yang mengetahui proses beracara dan memahami hukum, manuver yang dilakukan oleh RMS bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak 2. Manuver 3. Ø (manuver yang dilakukan oleh RMS) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang mengetahui proses beracara dan memahami hukum, 2. Yang dilakukan oleh RMS 3. Bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan |
| 12 | Isi/ Deduktif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sayangnya, pemerintah Indonesia termakan oleh intimidasi yang dilakukan RMS. <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Indonesia 2. Intimidasi <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Sayangnya, termakan 4. Yang dilakukan RMS |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 2. Bahkan pemerintah Indonesia cenderung membesar-besarkan proses di pengadilan Den Haag seolah dan terkesan ingin mengajak rakyat untuk dapat membenarkan keputusan menunda kunjungan. <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Indonesia 2. Ø (pemerintah Indonesia) 3. Ø (rakyat) 4. Keputusan |

| | | |
|----|------------------|--|
| | | <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahkan cenderung membesar-besarkan proses di pengadilan Den Haag 2. Seolah dan terkesan ingin mengajak rakyat 3. Dapat membenarkan 4. menunda kunjungan |
| | | <p>3. Sentimen anti-Belanda pun mulai muncul.</p> <p>Topik: Sentimen anti-Belanda pun</p> <p>Komen: Mulai muncul</p> |
| | | <p>4. Anehnya, pemerintah buru-buru mengatakan hubungan Indonesia dengan Belanda baik. Ini merupakan kontradiksi.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah 2. Hubungan Indonesia dengan Belanda <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anehnya, buru-buru mengatakan 2. Baik |
| | | <p>5. Ini merupakan kontradiksi</p> <p>Topik: Ini</p> <p>Komen: Merupakan kontradiksi</p> |
| 13 | Isi/ Deduktif | <p>1. Semakin aneh respons pemerintah atas ketersinggungan Presiden, bukannya diterbitkan nota protes diplomatik, melainkan justru pemerintah menjelaskan kepada pemerintah Belanda alasan penundaan kunjungan.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Respons pemerintah atas ketersinggungan Presiden 2. Nota protes diplomatik 3. Pemerintah <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semakin aneh 2. Bukannya diterbitkan 3. Justru menjelaskan kepada pemerintah Belanda alasan penundaan kunjungan |
| | | <p>2. Aneh karena bila Presiden tersinggung seharusnya Presiden meminta dan menunggu surat permohonan maaf dari pemerintah Belanda.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ø (respons pemerintah) 2. Presiden 3. Presiden <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aneh 2. Bila tersinggung 3. Seharusnya meminta dan menunggu surat permohonan maaf dari pemerintah Belanda |

| | | |
|----|----------------------|--|
| 14 | Penutup/ Deduktif | <p>1. Kejanggalan-kejanggalan ini mengindikasikan betapa lemah kemampuan orang-orang di sekitar Presiden dalam memberikan informasi yang akurat dan lengkap ihwal persidangan di pengadilan Den Haag.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kejanggalan-kejanggalan ini 2. Betapa lemah 3. Orang-orang di sekitar Presiden <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengindikasikan 2. Kemampuan 3. Dalam memberikan informasi yang akurat dan lengkap ihwal persidangan di pengadilan Den Haag |
| | | <p>2. Seharusnya KBRI Den Haag ataupun Kementerian Luar Negeri meminta para ahli hukum, baik di Belanda maupun Indonesia, untuk mempelajari upaya hukum yang dilancarkan oleh RMS sebelum memberikan masukan kepada Presiden.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KBRI Den Haag ataupun Kementerian Luar Negeri 2. Para ahli hukum, baik di Belanda maupun Indonesia 3. Ø (KBRI Den Haag ataupun Kementerian Luar Negeri) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seharusnya meminta para ahli hukum, baik di Belanda maupun Indonesia 2. Untuk mempelajari upaya hukum yang dilancarkan oleh RMS 3. Sebelum memberikan masukan kepada Presiden |

LAMPIRAN 7

Teks Opini 7: “Orang-orang Sekitar Presiden” (OSP)

Setahun belakangan, Istana semakin ingar-bingar saja. Kebijakan dan sikap presiden yang tadinya- dimaklumkan Menteri Sekretaris- Negara atau juru bicara kepresidenan, kini ikut disiarkan staf khusus presiden. Mereka yang semestinya bekerja “diam-diam” dan melapor hanya kepada presiden, sekarang giat angkat bicara di televisi, surat kabar, media online, bahkan aktif mengirim berita melalui pesan pendek atau pesan Blackberry.

Perubahan “wujud” ini membuat kisruh. Mereka seperti menggantikan peran menteri untuk menyampaikan informasi ke publik. Ini pun dijalankan dengan sangat “vulgar”, sehingga staf khusus terasa lebih berperan sebagai bumper atau juru bantah presiden.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono barangkali beranggapan bahwa ada sejumlah menteri yang tak cukup tangkas buat menjelaskan pelbagai masalah kepada masyarakat. Solusi meminta staf khusus ikut bicara tidaklah tepat. Semestinya kekurangan ini bisa ditambal dengan menunjuk juru bicara yang kuat dan tangkas-dan juru bicara yang kini bertugas bukanlah figur yang memadai.

Yang menuntut penyelesaian cepat adalah pembagian tugas antara “all the President’s men” itu dengan kementerian. Tumpang-tindih mesti dihindari dan ini tak terlalu mudah karena tugas staf khusus bidang informasi, misalnya, bersinggungan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Staf khusus bidang internasional sangat dekat wilayah kerjanya dengan Menteri Luar Negeri. Lalu staf khusus bidang hukum, hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi berdekatan wilayah kerja dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Staf khusus bidang bantuan sosial dan bencana sangat mungkin overlapping dengan tugas Menteri Sosial.

Kericuhan terlihat manakala datang bencana alam. Staf khusus bidang bantuan sosial dan bencana lebih sering tampil daripada Menteri Sosial atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Staf khusus bidang bantuan sosial ini ternyata mempunyai banyak tugas “sampingan”, umpamanya menjadi tameng ketika politi-kus Senayan menyerang Istana dalam penyelamatan Bank Century. Akhirnya ada begitu banyak mulut yang bicara dari Istana. Bising dan membingungkan.

Presiden memang berhak mengangkat staf khusus. Orang-orang kepercayaan presiden ini bisa difungsikan mengatasi kelembaman, juga resistansi, para birokrat dalam menjalankan kebijakan pemerintah. Tapi tak perlu menjadikan staf khusus ini sebagai semacam “ujung tombak” pemerintahan. Memberikan panggung berlebihan kepada staf khusus mengesankan presiden tak mempercayai para menterinya. Padahal kita tahu Presiden Yudhoyono memilih anggota kabinetnya dengan rigid-antara lain dengan memperhitungkan asal-usul partai, daerah, dan gender. Bila hasil kerja menteri tak memuaskannya, bukan staf khusus obatnya, melainkan segera mengganti menteri yang tak cakap.

Jika tidak dibenahi, cara kerja staf khusus presiden itu bisa berbahaya. Menteri-menteri akan gamang melangkah, khawatir bertabrakan dengan orang-orang kepercayaan presiden. Kepala negara pun bisa salah memahami persoalan masyarakat, bila benar kisah bahwa para staf khusus sekarang ini tak berani menyampaikan pandangan yang berbeda dengan kemauan bosnya.

Belum terlambat membenahi kantor orang nomor satu RI itu. Presiden mesti mengacu kembali pada tugas staf khusus seperti diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 43A Tahun 2009. Staf khusus, dalam aturan tadi, hanya menjalankan tugas tertentu di luar tugas organisasi departemen, kementerian, dan instansi pemerintah lainnya.

Presiden, misalnya, bisa memanfaatkan staf khusus untuk mengawasi jalannya koalisi pendukungnya di Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka juga perlu ditugasi menjadi penghubung Istana dan DPR untuk urusan legislasi. Peran legislative liaison selama ini dimainkan oleh para birokrat Sekretariat Negara dengan kedodoran. Padahal peran sebagai jembatan ini penting untuk memuluskan komunikasi Istana dan Senayan dalam banyak hal, misalnya dalam proses pembuatan undang-undang.

“Meraba” sentimen masyarakat juga merupakan pekerjaan yang bisa digarap staf khusus. Mereka bisa saja menyelenggarakan survei rutin buat mengetahui respons masyarakat dalam berbagai kebijakan. Survei ini memungkinkan presiden memilih kebijakan yang selaras dengan keinginan orang banyak.

Staf khusus yang kuat dan bekerja sesuai porsi bisa sangat membantu presiden mengeluarkan kebijakan dengan tepat dan cepat. Presiden mesti segera mengoreksi kerja staf khusus dan tak menjadikan mereka sekadar pemberi reaksi atas pandangan publik yang berbeda dengan pemerintah.

Serangkaian perbaikan itu diperlukan untuk mendongkrak kembali citra dan kepuasan publik terhadap pemerintahan Yudhoyono-yang sedang meluncur deras ke bawah dalam periode kedua ini.

Penjabaran Teks Opini 7

| Paragraf | Komposisi Paragraf | Kalimat |
|----------|----------------------|--|
| 1 | Pembuka/ Deduktif | 1. Setahun belakangan, Istana semakin ingar-bingar saja. Topik: Istana Komen: Setahun belakangan, semakin ingar-bingar saja |
| | | 2. Kebijakan dan sikap presiden yang tadinya- dimaklumkan Menteri Sekretaris- Negara atau juru bicara kepresidenan, kini ikut disiarkan staf khusus presiden. Topik: 1. Kebijakan dan sikap presiden 2. Ø (Kebijakan dan sikap presiden yang tadinya- dimaklumkan Menteri Sekretaris- Negara atau juru bicara kepresidenan) Komen: 1. Yang tadinya- dimaklumkan Menteri Sekretaris- Negara atau juru bicara kepresidenan 2. Kini ikut disiarkan staf khusus presiden |
| | | 3. Mereka yang semestinya bekerja “diam-diam” dan melapor hanya kepada presiden, sekarang giat angkat bicara di televisi, surat kabar, media online, bahkan aktif mengirim berita melalui pesan pendek atau pesan Blackberry. |

| | | |
|---|----------------------|--|
| | | <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mereka 2. Ø (mereka) 3. Ø (mereka) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang semestinya bekerja “diam-diam” dan melapor hanya kepada presiden 2. Sekarang giat angkat bicara di televisi, surat kabar, media online 3. Bahkan aktif mengirim berita melalui pesan pendek atau pesan Blackberry |
| 2 | Pembuka/ Deduktif | <p>1. Perubahan “wujud” ini membuat kisruh.</p> <p>Topik: Perubahan “wujud” ini</p> <p>Komen: Membuat kisruh</p> |
| | | <p>2. Mereka seperti menggantikan peran menteri untuk menyampaikan informasi ke publik.</p> <p>Topik: Mereka</p> <p>Komen: Seperti menggantikan peran menteri untuk menyampaikan informasi ke publik</p> |
| | | <p>3. Ini pun dijalankan dengan sangat “vulgar”, sehingga staf khusus terasa lebih berperan sebagai bumper atau juru bantah presiden.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ini pun 2. Staf khusus <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dijalankan dengan sangat “vulgar” 2. Terasa lebih berperan sebagai bumper atau juru bantah presiden |
| 3 | Isi/ Deduktif | <p>1. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono barangkali beranggapan bahwa ada sejumlah menteri yang tak cukup tangkas buat menjelaskan pelbagai masalah kepada masyarakat.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2. Ada sejumlah menteri <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barangkali beranggapan 2. Yang tak cukup tangkas buat menjelaskan pelbagai masalah kepada masyarakat |
| | | <p>2. Solusi meminta staf khusus ikut bicara tidaklah tepat.</p> <p>Topik: Solusi meminta staf khusus ikut bicara</p> <p>Komen: Tidaklah tepat</p> |
| | | <p>3. Semestinya kekurangan ini bisa ditambal dengan menunjuk juru bicara yang kuat dan tangkas-dan juru bicara yang kini bertugas bukanlah figur yang memadai.</p> |

| | | |
|---|------------------|---|
| | | <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kekurangan ini 2. Ø (presiden) 3. Juru bicara 4. Juru bicara 5. Ø (Juru bicara yang kini bertugas) 6. Figur <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semestinya bisa ditambah 2. Dengan menunjuk 3. Yang kuat dan tangkas 4. Yang kini bertugas 5. Bukanlah figur yang memadai 6. Yang memadai |
| 4 | Isi/ Deduktif | <p>1. Yang menuntut penyelesaian cepat adalah pembagian tugas antara “all the President’s men” itu dengan kementerian.</p> <p>Topik: Yang menuntut penyelesaian cepat</p> <p>Komen: Adalah pembagian tugas antara “all the President’s men” itu dengan kementerian</p> |
| | | <p>2. Tumpang-tindih mesti dihindari dan ini tak terlalu mudah karena tugas staf khusus bidang informasi, misalnya, bersinggungan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tumpang-tindih 2. Ini 3. Tugas staf khusus bidang informasi, misalnya, <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mesti dihindari 2. Tak terlalu mudah 3. Bersinggungan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika |
| | | <p>3. Staf khusus bidang internasional sangat dekat wilayah kerjanya dengan Menteri Luar Negeri.</p> <p>Topik: Staf khusus bidang internasional</p> <p>Komen: Sangat dekat wilayah kerjanya dengan Menteri Luar Negeri</p> |
| | | <p>4. Lalu staf khusus bidang hukum, hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi berdekatan wilayah kerja dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p> <p>Topik: Staf khusus bidang hukum, hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi</p> <p>Komen: Berdekatan wilayah kerja dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> |
| | | <p>5. Staf khusus bidang bantuan sosial dan bencana sangat mungkin overlapping dengan tugas Menteri Sosial.</p> |

| | | |
|---|------------------|---|
| | | <p>Topik: Staf khusus bidang bantuan sosial dan bencana</p> <p>Komen: Sangat mungkin overlapping dengan tugas Menteri Sosial</p> |
| 5 | Isi/ Induktif | <p>1. Kericuhan terlihat manakala datang bencana alam.</p> <p>Topik: 1. Kericuhan 2. Bencana alam</p> <p>Komen: 1. Terlihat 2. Manakala datang</p> |
| | | <p>2. Staf khusus bidang bantuan sosial dan bencana lebih sering tampil daripada Menteri Sosial atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.</p> <p>Topik: Staf khusus bidang bantuan sosial dan bencana</p> <p>Komen: Lebih sering tampil daripada Menteri Sosial atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana</p> |
| | | <p>3. Staf khusus bidang bantuan sosial ini ternyata mempunyai banyak tugas “sampingan”, umpamanya menjadi tameng ketika politi-kus Senayan menyerang Istana dalam penyelamatan Bank Century.</p> <p>Topik: 1. Staf khusus bidang bantuan sosial ini 2. Ø (Staf khusus bidang bantuan sosial ini) 3. Politikus Senayan</p> <p>Komen: 1. Ternyata mempunyai banyak tugas “sampingan”, 2. Umpamanya menjadi tameng 3. Ketika menyerang Istana dalam penyelamatan Bank Century</p> |
| | | <p>4. Akhirnya ada begitu banyak mulut yang bicara dari Istana.</p> <p>Topik: Ada begitu banyak mulut</p> <p>Komen: Akhirnya yang bicara dari Istana</p> |
| | | <p>5. Bising dan membingungkan.</p> <p>Topik: Ø</p> <p>Komen: Bising dan membingungkan</p> |
| 6 | Isi/ Deduktif | <p>1. Presiden memang berhak mengangkat staf khusus.</p> <p>Topik: Presiden</p> <p>Komen: Memang berhak mengangkat staf khusus</p> |
| | | <p>2. Orang-orang kepercayaan presiden ini bisa difungsikan mengatasi kelembaman, juga resistansi, para birokrat dalam menjalankan kebijakan pemerintah.</p> <p>Topik: 1. Orang-orang kepercayaan presiden ini</p> |

| | | |
|---|------------------|---|
| | | <p>2. Ø (para birokrat)</p> <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bisa difungsikan mengatasi kelembaman, juga resistansi 2. Dalam menjalankan kebijakan pemerintah |
| | | <p>3. Tapi tak perlu menjadikan staf khusus ini sebagai semacam “ujung tombak” pemerintahan.</p> <p>Topik:</p> <p>Ø (Presiden)</p> <p>Komen:</p> <p>Tapi tak perlu menjadikan staf khusus ini sebagai semacam “ujung tombak” pemerintahan</p> |
| | | <p>4. Memberikan panggung berlebihan kepada staf khusus mengesankan presiden tak mempercayai para menteri.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan panggung berlebihan kepada staf khusus 2. Presiden <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengesankan 2. Tak mempercayai para menteri |
| | | <p>5. Padahal kita tahu Presiden Yudhoyono memilih anggota kabinetnya dengan rigid-antara lain dengan memperhitungkan asal-usul partai, daerah, dan gender.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kita 2. Presiden Yudhoyono 3. Ø (Presiden Yudhoyono) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Padahal tahu 2. Memilih anggota kabinetnya dengan rigid-antara lain 3. Dengan memperhitungkan asal-usul partai, daerah, dan gender |
| | | <p>6. Bila hasil kerja menteri tak memuaskannya, bukan staf khusus obatnya, melainkan segera mengganti menteri yang tak cakap.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil kerja menteri 2. Obatnya 3. Ø (presiden) 4. Menteri <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bila tak memuaskannya 2. Bukan staf khusus 3. Segera mengganti 4. Yang tak cakap |
| 7 | Isi/ Deduktif | <p>1. Jika tidak dibenahi, cara kerja staf khusus presiden itu bisa berbahaya.</p> <p>Topik:</p> <p>Cara kerja staf khusus presiden itu</p> <p>Komen:</p> <p>Jika tidak dibenahi, bisa berbahaya</p> |

| | | |
|---|----------------------|--|
| | | <p>2. Menteri-menteri akan gamang melangkah, khawatir bertabrakan dengan orang-orang kepercayaan presiden.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri-menteri 2. Ø (menteri-menteri) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akan gamang melangkah 2. Khawatir bertabrakan dengan orang-orang kepercayaan presiden |
| | | <p>3. Kepala negara pun bisa salah memahami persoalan masyarakat, bila benar kisah bahwa para staf khusus sekarang ini tak berani menyampaikan pandangan yang berbeda dengan kemauan bosnya.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala negara pun 2. Kisah 3. Para staf khusus <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bisa salah memahami persoalan masyarakat, 2. Bila benar 3. Sekarang ini tak berani menyampaikan pandangan yang berbeda dengan kemauan bosnya |
| 8 | Penutup/ Deduktif | <p>1. Belum terlambat membenahi kantor orang nomor satu RI itu.</p> <p>Topik: Membenahi kantor orang nomor satu RI itu</p> <p>Komen: Belum terlambat</p> |
| | | <p>2. Presiden mesti mengacu kembali pada tugas staf khusus seperti diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 43A Tahun 2009.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden 2. Tugas staf khusus <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mesti mengacu kembali 2. Seperti diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 43A Tahun 2009 |
| | | <p>3. Staf khusus, dalam aturan tadi, hanya menjalankan tugas tertentu di luar tugas organisasi departemen, kementerian, dan instansi pemerintah lainnya.</p> <p>Topik: Staf khusus</p> <p>Komen: Dalam aturan tadi, hanya menjalankan tugas tertentu di luar tugas organisasi departemen, kementerian, dan instansi pemerintah lainnya</p> |
| 9 | Penutup/ Deduktif | <p>1. Presiden, misalnya, bisa memanfaatkan staf khusus untuk mengawasi jalannya koalisi pendukungnya di Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden |

| | | |
|----|------------------------------|---|
| | | <p>2. Ø (staf khusus)</p> <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> Misalnya, bisa memanfaatkan staf khusus Mengawasi jalannya koalisi pendukungnya di Dewan Perwakilan Rakyat |
| | | <p>2. Mereka juga perlu ditugasi menjadi penghubung Istana dan DPR untuk urusan legislasi.</p> <p>Topik: Mereka</p> <p>Komen: Juga perlu ditugasi menjadi penghubung Istana dan DPR untuk urusan legislasi</p> |
| | | <p>3. Peran legislative liaison selama ini dimainkan oleh para birokrat Sekretariat Negara dengan kedodoran.</p> <p>Topik: Peran legislative liaison</p> <p>Komen: Selama ini dimainkan oleh para birokrat Sekretariat Negara dengan kedodoran</p> |
| | | <p>4. Padahal peran sebagai jembatan ini penting untuk memuluskan komunikasi Istana dan Senayan dalam banyak hal, misalnya dalam proses pembuatan undang-undang.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peran sebagai jembatan ini Ø (padahal peran sebagai jembatan ini penting) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> Padahal penting Untuk memuluskan komunikasi Istana dan Senayan dalam banyak hal, misalnya dalam proses pembuatan undang-undang |
| 10 | Penutup/ Deduktif | <p>1. “Meraba” sentimen masyarakat juga merupakan pekerjaan yang bisa digarap staf khusus.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> “Meraba” sentimen masyarakat Pekerjaan <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> Juga merupakan Yang bisa digarap staf khusus |
| | | <p>2. Mereka bisa saja menyelenggarakan survei rutin buat mengetahui respons masyarakat dalam berbagai kebijakan.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mereka Ø (mereka) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bisa saja menyelenggarakan survei rutin Mengetahui respons masyarakat dalam berbagai kebijakan |
| | | <p>3. Survei ini memungkinkan presiden memilih kebijakan yang selaras dengan keinginan orang banyak.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> Survei ini Presiden |

| | | |
|----|---|---|
| | | <p>3. Kebijakan</p> <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memungkinkan 2. Memilih 3. Yang selaras dengan keinginan orang banyak |
| 11 | Penutup/ Induktif (dengan paragraf ke-12) | <p>1. Staf khusus yang kuat dan bekerja sesuai porsi bisa sangat membantu presiden mengeluarkan kebijakan dengan tepat dan cepat.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Staf khusus 2. Ø (staf khusus yang kuat dan bekerja sesuai porsi) 3. Presiden <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang kuat dan bekerja sesuai porsi 2. Bisa sangat membantu 3. Mengeluarkan kebijakan dengan tepat dan cepat |
| | | <p>2. Presiden mesti segera mengoreksi kerja staf khusus dan tak menjadikan mereka sekadar pemberi reaksi atas pandangan publik yang berbeda dengan pemerintah.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden 2. Ø (presiden) 3. Pandangan publik <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mesti segera mengoreksi kerja staf khusus 2. Tak menjadikan mereka sekadar pemberi reaksi 3. Yang berbeda dengan pemerintah |
| 12 | | <p>1. Serangkaian perbaikan itu diperlukan untuk mendongkrak kembali citra dan kepuasan publik terhadap pemerintahan Yudhoyono-yang sedang meluncur deras ke bawah dalam periode kedua ini.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Serangkaian perbaikan itu 2. Ø (serangkaian perbaikan itu diperlukan) 3. Citra dan kepuasan publik terhadap pemerintahan Yudhoyono <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diperlukan 2. Untuk mendongkrak kembali 3. Yang sedang meluncur deras ke bawah dalam periode kedua ini |

LAMPIRAN 8**Teks Opini 8: “Istana Bising Yudhoyono” (IBY)**

Hasil survei yang tak bersahabat adalah salah satu bingkisan penting untuk ulang tahun pertama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Survei Kompas yang dilansir pekan lalu menyebutkan, dalam rentang waktu April 2009-Oktober 2010, citra positif Yudhoyono melorot dari 93,5 persen menjadi 67,8 persen.

Kebanggaan publik terhadap Yudhoyono juga turun dari 90,8 menjadi 68,8 persen. Penurunan yang lebih bermakna terjadi dalam kepuasan publik terhadap kerja Yudhoyono dalam memimpin pemerintahan (76,6 menjadi 44,3 persen). Elektabilitas Yudhoyono merosot tajam dari 82,6 persen pada April 2009 menjadi 34,2 persen pada Oktober 2010.

Hasil survei itu menunjukkan kegagalan Yudhoyono-Boediono mendayagunakan modal potensial yang sudah dalam genggamannya. Secara potensial, postur politik Yudhoyono sesungguhnya amat meyakinkan.

Ia sukses mendongkrak suara Partai Demokrat nyaris tiga kali lipat dari Pemilihan Umum 2004 ke Pemilu 2009. Bersama Boediono, ia menang pemilu presiden dalam satu putaran dengan 60,8 persen suara. Ia sukses menyertakan enam partai dalam koalisi penyokong pemerintah dengan persentase kursi legislatif 75,5 persen. Tapi modal besar itu berhenti sebagai energi potensial dan tak bergerak menjadi energi kinetik.

Ada banyak kemungkinan jawaban. Di antaranya selama setahun ini-melanjutkan kecenderungan lima tahun sebelumnya-Yudhoyono tak memiliki "kantor eksekutif presiden" yang berkemampuan menyokong kerja presiden (dan wakil presiden) secara optimal.

Yang dimiliki Yudhoyono adalah beberapa lapis organisasi yang tambun di Istana, yang terbukti tak bekerja efektif serta kurang mampu menjaga komunikasi, koordinasi, dan sinergi. Yudhoyono dikelilingi beberapa lapis lingkaran pendukung yang berkerumun dengan semangat kerja politik yang berapi-api tapi payah dalam kecermatan birokratis dan teknokratis.

Kerumunan di seputar Presiden itulah yang sejak Oktober tahun lalu menorehkan sejumlah "prestasi mengagumkan". Misalnya, pembatalan pelantikan Anggito Abimanyu sebagai Wakil Menteri Keuangan beserta epilognya yang kisruh, penundaan pelantikan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Gita Wiryawan, dan banyak kekeliruan fatal dalam komunikasi publik dari kantor kepresidenan. "Prestasi" paling mutakhir dan menggetarkan adalah kealpaan administrasi dan hukum yang membuat keabsahan Jaksa Agung Hendarman Supandji cedera, juga kisruh di balik pembatalan mendadak kunjungan kenegaraan Presiden ke Belanda.

Yang kita saksikan selama setahun ini adalah lingkaran di seputar Presiden yang bising. Banyak anggota staf khusus dibiarkan bertindak menjadi "juru bicara" untuk beragam urusan. Kepentingan dan sikap Istana dikomunikasikan melalui banyak mulut dan celakanya dengan kualitas pesan yang kurang terjaga.

Dalam praktek presidensialisme yang mapan, kerja di seputar presiden adalah kerja yang senyap, jauh dari liputan media dan sorot kamera. Selama masa kepresidenan Yudhoyono-dan makin menjadi-jadi pada setahun terakhir-lingkaran politik di sekitar Presiden seperti berlomba tampil ke atas pentas. Mereka seolah

ingin membuktikan sudah memberikan layanan terbaik untuk sang majikan, sambil mengais-ngais simpati, dukungan, dan popularitas.

Kebisingan itu jadi terasa mengganggu karena berjalan di tengah miskinnya komunikasi, koordinasi, dan sinergi di antara kalangan dekat Presiden itu. Kredibilitas, akurasi, serta akuntabilitas informasi dan pesan yang diterima publik dari mereka layak dipertanyakan. Semakin hari semakin terbukti bahwa Presiden dikelilingi staf yang sangat bersemangat-berpolitik penuh atraksi seperti peserta karnaval-tapi miskin kemauan dan ketekunan untuk bekerja secara birokratis dan teknokratis dalam senyap.

Dipandang dari perspektif ilmu politik dan pemerintahan, kesimpulannya sederhana belaka: Presiden dan Wakil Presiden bekerja di tengah absennya kantor eksekutif presiden yang kuat dan kredibel.

Kantor eksekutif presiden mudah ditemukan dalam setiap sistem presidensial dalam pengertian yang sesungguhnya. Model awal kantor ini bisa ditemukan di Amerika Serikat sejak periode kedua masa kepresidenan Franklin D. Roosevelt pada 1939. Terlepas dari perkembangan dan penyesuaian yang dilakukan dari waktu ke waktu, kantor ini-biasa disebut sebagai Gedung Putih-dijalankan dengan beberapa ciri pokok.

Untuk tujuan efisiensi dan efektivitas kerja, Gedung Putih biasanya dikelola oleh kantor berstruktur ramping. Penjenjangan jabatan, misalnya, dibuat amat bersahaja sehingga tak merumitkan birokrasi Istana. Di kantor eksekutif Presiden Barack Obama saat ini hanya ada tiga jenjang jabatan: asisten, wakil asisten, dan asisten khusus untuk presiden.

Kepala Staf Gedung Putih, sang pemimpin kantor (di bawah koordinasi Presiden), Pete Rouse, dan dua wakilnya, Mona Sutphen dan Jim Messina, menduduki jenjang "Asisten untuk Presiden". Birokrasi yang ramping juga tecermin dalam pembagian urusan: kebijakan dan operasional-masing-masing dikendalikan oleh wakil kepala staf.

Di Gedung Putih memang ada tiga dewan, dua badan, dan tujuh kantor, tapi semuanya dikendalikan dalam sistem kerja yang jelas. Ada mekanisme baku untuk menjahit komunikasi, koordinasi, dan sinergi berbagai unsur.

Kesalahan bukan tak pernah terjadi. Beberapa pekan lalu, miskoordinasi menyebabkan sejumlah besar duta besar tak bisa masuk Gedung Putih untuk menghadiri acara yang diadakan Presiden Obama untuk menghormati diplomat asing.

Dalam masa kepresidenan tertentu, prinsip organisasi Gedung Putih yang ramping itu pernah dilanggar. Namun biasanya itu dilakukan untuk mengimbangi kabinet sangat ramping yang dibentuk presiden. Gedung Putih bertugas menambal lubang-lubang yang tak terjangkau kabinet dengan membentuk sejumlah dewan.

Tentu saja model Amerika tak bisa sepenuhnya kita gunakan. Sistem presidensial mereka jauh lebih sederhana (disokong sistem dwipartai) dibanding kita (yang bersistem multipartai). Kantor eksekutif presiden di berbagai negara Amerika Latin-yang mengawinkan presidensialisme dengan sistem multipartai-bisa jadi pembanding yang lebih layak.

Terlepas dari keragaman operasi sistemnya, umumnya demokrasi presidensial di Amerika Latin bersungguh-sungguh membangun kantor eksekutif presiden. Ada ikhtiar untuk menggabungkan sifat ramping organisasi,

kesederhanaan penjenjangan birokrasi, dan jahitan komunikasi-koordinasi-sinergi dengan kebutuhan mengakomodasi sistem multipartai.

Konsekuensinya, sekadar misal, ada organ-organ khusus untuk mengurus hubungan kabinet dengan partai-partai serta lembaga legislatif. Organ ini bersifat permanen, bekerja penuh untuk tujuan itu, sehingga bisa menjadi instrumen presiden untuk membangun disiplin koalisi pemerintahan. Juga memastikan dukungan politik dari partai dan parlemen terhadap kebijakan presiden serta mengatasi hubungan presiden dengan partai-partai.

Andai Yudhoyono memiliki organ semacam itu, anggota staf khusus bidang bencana alam, Andi Arief, tak perlu sibuk melobi tokoh-tokoh politik seperti yang kerap ia lakukan. Adanya organ khusus semacam itu juga tak akan membuat pihak-pihak yang dilobi salah paham karena merasa dinilai sebagai "sumber bencana" oleh Presiden.

Belajar dari pengalaman setahun terakhir, ada baiknya Presiden Yudhoyono menata ulang kantor eksekutif presiden dengan mereformasi lapis demi lapis organisasi dan birokrasi Istana yang tambun, tak efisien, dan tak efektif itu. Jika Yudhoyono abai, saya khawatir, ia akan terkurung di dalam Istana dengan kaca-kacanya yang buram.

Kaca buram Istana adalah sebuah penyakit yang biasa diidap presiden yang tak memiliki kantor pendukung yang sigap dan cakap. Kaca Istana dibuat buram karena informasi dan data yang sampai ke presiden bermutu rendah. Kaca yang buram membuat presiden silap mata. Publik di luar Istana yang cemas, kecewa, marah, dan menuntut dilihat presiden seperti rombongan pendukung yang bahagia, nyaman, dan bersuka ria.

Sebagai warga negara, saya mendambakan presiden yang kuat, sigap, dan tangkas mengelola berbagai persoalan. Presiden patut menata ulang istananya agar dalam empat tahun tersisa, ia tak selalu merasa cemas karena merasa kekuasaannya hendak direbut orang lain. (*TEMPO*, 25 Oktober 2010).

Penjabaran Teks Opini 8

| Paragraf | Komposisi Paragraf | Kalimat |
|----------|---|--|
| 1 | Pembuka/ Deduktif (dengan paragraf ke-2) | 1. Hasil survei yang tak bersahabat adalah salah satu bingkisan penting untuk ulang tahun pertama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Topik: 1. Hasil survei 2. Ø (hasil survei yang tak bersahabat) 3. Salah satu bingkisan Komen: 1. Yang tak bersahabat 2. Adalah 3. penting untuk ulang tahun pertama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono |
| | | 2. Survei Kompas yang dilansir pekan lalu menyebutkan, dalam rentang waktu April 2009-Oktober 2010, citra positif Yudhoyono melorot dari 93,5 persen menjadi 67,8 persen. Topik: 1. Survei Kompas |

| | | |
|---|--|--|
| | | <p>2. Ø (survei Kompas yang dilansir pekan lalu)</p> <p>3. Citra positif Yudhoyono</p> <p>Komen:</p> <p>1. Yang dilansir pekan lalu</p> <p>2. Menyebutkan</p> <p>3. Dalam rentang waktu April 2009-Oktober 2010, melorot dari 93,5 persen menjadi 67,8 persen</p> |
| 2 | Pembuka | <p>1. Kebanggaan publik terhadap Yudhoyono juga turun dari 90,8 menjadi 68,8 persen.</p> <p>Topik:</p> <p>1. Kebanggaan publik</p> <p>2. Ø (kebanggaan publik terhadap Yudhoyono)</p> <p>Komen:</p> <p>1. Terhadap Yudhoyono</p> <p>2. Juga turun dari 90,8 menjadi 68,8 persen</p> |
| | | <p>2. Penurunan yang lebih bermakna terjadi dalam kepuasan publik terhadap kerja Yudhoyono dalam memimpin pemerintahan (76,6 menjadi 44,3 persen).</p> <p>Topik:</p> <p>1. Penurunan</p> <p>2. Ø (penurunan yang lebih bermakna)</p> <p>3. Kepuasan publik</p> <p>4. Kerja Yudhoyono</p> <p>Komen:</p> <p>1. Yang lebih bermakna</p> <p>2. Terjadi</p> <p>3. Terhadap</p> <p>4. Dalam memimpin pemerintahan (76,6 menjadi 44,3 persen)</p> |
| | | <p>3. Elektabilitas Yudhoyono merosot tajam dari 82,6 persen pada April 2009 menjadi 34,2 persen pada Oktober 2010.</p> <p>Topik:</p> <p>Elektabilitas Yudhoyono</p> <p>Komen:</p> <p>Merosot tajam dari 82,6 persen pada April 2009 menjadi 34,2 persen pada Oktober 2010</p> |
| 3 | Pembuka/ Deduktif (dengan paragraf ke-4) | <p>1. Hasil survei itu menunjukkan kegagalan Yudhoyono-Boediono mendayagunakan modal potensial yang sudah dalam genggaman.</p> <p>Topik:</p> <p>1. Hasil survei itu</p> <p>2. Kegagalan Yudhoyono-Boediono</p> <p>3. Modal potensial</p> <p>Komen:</p> <p>1. Menunjukkan</p> <p>2. Mendayagunakan</p> <p>3. Yang sudah dalam genggaman</p> |
| | | <p>2. Secara potensial, postur politik Yudhoyono sesungguhnya amat meyakinkan.</p> <p>Topik:</p> <p>Postur politik Yudhoyono</p> |

| | | |
|---|--|--|
| | | <p>Komen: Secara potensial, sesungguhnya amat meyakinkan</p> |
| 4 | Pembuka | <p>1. Ia sukses mendongkrak suara Partai Demokrat nyaris tiga kali lipat dari Pemilihan Umum 2004 ke Pemilu 2009.</p> <p>Topik: 1. Ia 2. Ø (ia sukses mendongkrak suara Partai Demokrat)</p> <p>Komen: 1. Sukses mendongkrak suara Partai Demokrat 2. Nyaris tiga kali lipat dari Pemilihan Umum 2004 ke Pemilu 2009</p> |
| | | <p>2. Bersama Boediono, ia menang pemilu presiden dalam satu putaran dengan 60,8 persen suara.</p> <p>Topik: 1. Ia 2. Ø (ia bersama Boediono)</p> <p>Komen: 1. Bersama Boediono 2. Menang pemilu presiden dalam satu putaran dengan 60,8 persen suara</p> |
| | | <p>3. Ia sukses menyertakan enam partai dalam koalisi penyokong pemerintah dengan persentase kursi legislatif 75,5 persen.</p> <p>Topik: Ia</p> <p>Komen: Sukses menyertakan enam partai dalam koalisi penyokong pemerintah dengan persentase kursi legislatif 75,5 persen</p> |
| | | <p>4. Tapi modal besar itu berhenti sebagai energi potensial dan tak bergerak menjadi energi kinetik.</p> <p>Topik: 1. Modal besar itu 2. Ø (modal besar itu)</p> <p>Komen: 1. Tapi berhenti sebagai energi potensial 2. Tak bergerak menjadi energi kinetik</p> |
| 5 | Isi/ Deduktif (dengan paragraf ke-6) | <p>1. Ada banyak kemungkinan jawaban.</p> <p>Topik: Kemungkinan jawaban</p> <p>Komen: Ada banyak</p> |
| | | <p>2. Di antaranya selama setahun ini-melanjutkan kecenderungan lima tahun sebelumnya-Yudhoyono tak memiliki "kantor eksekutif presiden" yang berkemampuan menyokong kerja presiden (dan wakil presiden) secara optimal.</p> <p>Topik: 1. Yudhoyono 2. "Kantor eksekutif presiden"</p> <p>Komen: 1. Di antaranya selama setahun ini-melanjutkan kecenderungan lima tahun sebelumnya- tak memiliki</p> |

| | | |
|---|------------------|--|
| | | 2. Yang berkemampuan menyokong kerja presiden (dan wakil presiden) secara optimal |
| 6 | Isi | <p>1. Yang dimiliki Yudhoyono adalah beberapa lapis organisasi yang tambun di Istana, yang terbukti tak bekerja efektif serta kurang mampu menjaga komunikasi, koordinasi, dan sinergi.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang dimiliki Yudhoyono 2. Beberapa lapis organisasi 3. Ø (beberapa lapis organisasi yang tambun di Istana) 4. Ø (beberapa lapis organisasi yang tambun di Istana) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adalah 2. Yang tambun di Istana 3. Yang terbukti tak bekerja efektif 4. Kurang mampu menjaga komunikasi, koordinasi, dan sinergi |
| | | <p>2. Yudhoyono dikelilingi beberapa lapis lingkaran pendukung yang berkerumun dengan semangat kerja politik yang berapi-api tapi payah dalam kecermatan birokratis dan teknokratis.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yudhoyono 2. Beberapa lapis lingkaran pendukung 3. Semangat kerja politik 4. Ø (lingkaran pendukung) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dikelilingi 2. Yang berkerumun 3. Yang berapi-api 4. tapi payah dalam kecermatan birokratis dan teknokratis |
| 7 | Isi/ Deduktif | <p>1. Kerumunan di seputar Presiden itulah yang sejak Oktober tahun lalu menorehkan sejumlah "prestasi mengagumkan".</p> <p>Topik: Kerumunan di seputar Presiden itulah</p> <p>Komen: Yang sejak Oktober tahun lalu menorehkan sejumlah "prestasi mengagumkan"</p> |
| | | <p>2. Misalnya, pembatalan pelantikan Anggito Abimanyu sebagai Wakil Menteri Keuangan beserta epilognya yang kisruh, penundaan pelantikan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Gita Wiryawan, dan banyak kekeliruan fatal dalam komunikasi publik dari kantor kepresidenan.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ø (sejumlah "prestasi mengagumkan") 2. Pembatalan pelantikan Anggito Abimanyu 3. Epilognya 4. Penundaan pelantikan Gita Wiryawan 5. Kekeliruan fatal |

| | | |
|---|---|--|
| | | <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> Misalnya Sebagai Wakil Menteri Keuangan Yang kisruh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Banyak dalam komunikasi publik dari kantor kepresidenan |
| | | <ol style="list-style-type: none"> "Prestasi" paling mutakhir dan menggetarkan adalah kealpaan administrasi dan hukum yang membuat keabsahan Jaksa Agung Hendarman Supandji cedera, juga kisruh di balik pembatalan mendadak kunjungan kenegaraan Presiden ke Belanda. <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> "Prestasi" Ø ("prestasi") Ø ("prestasi" paling mutakhir dan menggetarkan) Kealpaan administrasi dan hukum Di balik pembatalan mendadak kunjungan kenegaraan Presiden ke Belanda <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> Paling mutakhir Paling menggetarkan Adalah Yang membuat keabsahan Jaksa Agung Hendarman Supandji cedera Kisruh |
| 8 | Isi/ Deduktif (dengan paragraf 9) | <p>1. Yang kita saksikan selama setahun ini adalah lingkaran di seputar Presiden yang bising.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> Yang kita saksikan selama setahun ini Lingkaran di seputar Presiden <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> Adalah Yang bising |
| | | <ol style="list-style-type: none"> Banyak anggota staf khusus dibiarkan bertindak menjadi "juru bicara" untuk beragam urusan. <p>Topik:</p> <p>Banyak anggota staf khusus</p> <p>Komen:</p> <p>Dibiarkan bertindak menjadi "juru bicara" untuk beragam urusan</p> |
| | | <p>3. Kepentingan dan sikap Istana dikomunikasikan melalui banyak mulut dan celaknya dengan kualitas pesan yang kurang terjaga.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kepentingan dan sikap Istana Celaknya dengan kualitas pesan <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dikomunikasikan melalui banyak mulut Yang kurang terjaga |

| | | |
|----|------------------|---|
| 9 | Isi/ Deduktif | <p>1. Dalam praktek presidensialisme yang mapan, kerja di seputar presiden adalah kerja yang senyap, jauh dari liputan media dan sorot kamera.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam praktek presidensialisme 2. Kerja di seputar presiden 3. Kerja 4. Ø (kerja) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang mapan 2. Adalah 3. Yang senyap 4. Jauh dari liputan media dan sorot kamera |
| | | <p>2. Selama masa kepresidenan Yudhoyono-dan makin menjadi-jadi pada setahun terakhir-lingkaran politik di sekitar Presiden seperti berlomba tampil ke atas pentas.</p> <p>Topik: Lingkaran politik di sekitar Presiden</p> <p>Komen: Selama masa kepresidenan Yudhoyono-dan makin menjadi-jadi pada setahun terakhir- seperti berlomba tampil ke atas pentas</p> |
| | | <p>3. Mereka seolah ingin membuktikan sudah memberikan layanan terbaik untuk sang majikan, sambil mengais-ngais simpati, dukungan, dan popularitas.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mereka 2. Ø (mereka) 3. Ø (mereka) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seolah ingin membuktikan 2. Sudah memberikan layanan terbaik untuk sang majikan, 3. Sambil mengais-ngais simpati, dukungan, dan popularitas |
| 10 | Isi/ Induktif | <p>1. Kebisingan itu jadi terasa mengganggu karena berjalan di tengah miskinnya komunikasi, koordinasi, dan sinergi di antara kalangan dekat Presiden itu.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebisingan itu 2. Ø (kebisingan itu) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jadi terasa mengganggu 2. Berjalan di tengah miskinnya komunikasi, koordinasi, dan sinergi di antara kalangan dekat Presiden itu |
| | | <p>2. Kredibilitas, akurasi, serta akuntabilitas informasi dan pesan yang diterima publik dari mereka layak dipertanyakan.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kredibilitas, akurasi, serta akuntabilitas informasi dan pesan 2. Ø (Kredibilitas, akurasi, serta akuntabilitas informasi dan pesan yang diterima publik dari mereka) |

| | | |
|----|---|---|
| | | <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang diterima publik dari mereka 2. Layak dipertanyakan |
| | | <p>3. Semakin hari semakin terbukti bahwa Presiden dikelilingi staf yang sangat bersemangat-berpolitik penuh atraksi seperti peserta karnaval-tapi miskin kemauan dan ketekunan untuk bekerja secara birokratis dan teknokratis dalam senyap.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden 2. staf 3. Ø (staf) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semakin hari semakin terbukti bahwa dikelilingi 2. Yang sangat bersemangat-berpolitik penuh atraksi seperti peserta karnaval 3. Miskin kemauan dan ketekunan untuk bekerja secara birokratis dan teknokratis dalam senyap |
| 11 | Isi/ Deduktif (dengan paragraf ke-12) | <p>1. Dipandang dari perspektif ilmu politik dan pemerintahan, kesimpulannya sederhana belaka: Presiden dan Wakil Presiden bekerja di tengah absennya kantor eksekutif presiden yang kuat dan kredibel.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesimpulannya 2. Presiden dan Wakil Presiden <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dipandang dari perspektif ilmu politik dan pemerintahan, sederhana belaka 2. Bekerja di tengah absennya kantor eksekutif presiden yang kuat dan kredibel |
| 12 | Isi | <p>1. Kantor eksekutif presiden mudah ditemukan dalam setiap sistem presidensial dalam pengertian yang sesungguhnya.</p> <p>Topik: Kantor eksekutif presiden</p> <p>Komen: Mudah ditemukan dalam setiap sistem presidensial dalam pengertian yang sesungguhnya</p> |
| | | <p>2. Model awal kantor ini bisa ditemukan di Amerika Serikat sejak periode kedua masa kepresidenan Franklin D. Roosevelt pada 1939.</p> <p>Topik: Model awal kantor ini</p> <p>Komen: Bisa ditemukan di Amerika Serikat sejak periode kedua masa kepresidenan Franklin D. Roosevelt pada 1939</p> |
| | | <p>3. Terlepas dari perkembangan dan penyesuaian yang dilakukan dari waktu ke waktu, kantor ini-biasa disebut sebagai Gedung Putih-dijalankan dengan beberapa ciri pokok.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor ini |

| | | |
|----|---|---|
| | | <p>2. Ø (kantor ini)</p> <p>3. Ø (kantor ini)</p> <p>Komen:</p> <p>1. -Biasa disebut sebagai Gedung Putih-</p> <p>2. Terlepas dari perkembangan dan penyesuaian yang dilakukan dari waktu ke waktu,</p> <p>3. Dijalankan dengan beberapa ciri pokok</p> |
| 13 | Isi/ Deduktif (dengan paragraf ke-14) | <p>1. Untuk tujuan efisiensi dan efektivitas kerja, Gedung Putih biasanya dikelola oleh kantor berstruktur ramping.</p> <p>Topik:</p> <p>1. Gedung Putih</p> <p>2. Kantor</p> <p>Komen:</p> <p>1. Untuk tujuan efisiensi dan efektivitas kerja, biasanya dikelola</p> <p>2. Berstruktur ramping</p> |
| | | <p>2. Penjenjangan jabatan, misalnya, dibuat amat bersahaja sehingga tak merumitkan birokrasi Istana.</p> <p>Topik:</p> <p>1. Penjenjangan jabatan, misalnya</p> <p>2. Ø (penjenjangan jabatan)</p> <p>Komen:</p> <p>1. Dibuat amat bersahaja</p> <p>2. Sehingga tak merumitkan birokrasi Istana</p> |
| | | <p>3. Di kantor eksekutif Presiden Barack Obama saat ini hanya ada tiga jenjang jabatan: asisten, wakil asisten, dan asisten khusus untuk presiden.</p> <p>Topik:</p> <p>1. Di kantor eksekutif Presiden Barack Obama saat ini</p> <p>2. Tiga jenjang jabatan</p> <p>Komen:</p> <p>1. hanya ada</p> <p>2. Asisten, wakil asisten, dan asisten khusus untuk presiden</p> |
| 14 | | <p>1. Kepala Staf Gedung Putih, sang pemimpin kantor (di bawah koordinasi Presiden), Pete Rouse, dan dua wakilnya, Mona Sutphen dan Jim Messina, menduduki jenjang "Asisten untuk Presiden".</p> <p>Topik:</p> <p>Kepala Staf Gedung Putih, sang pemimpin kantor (di bawah koordinasi Presiden), Pete Rouse, dan dua wakilnya, Mona Sutphen dan Jim Messina</p> <p>Komen:</p> <p>Menduduki jenjang "Asisten untuk Presiden"</p> |
| | | <p>2. Birokrasi yang ramping juga tecermin dalam pembagian urusan: kebijakan dan operasional-masing-masing dikendalikan oleh wakil kepala staf.</p> <p>Topik:</p> <p>1. Birokrasi yang ramping</p> <p>2. Kebijakan dan operasional</p> <p>Komen:</p> <p>1. Juga tecermin dalam pembagian urusan</p> <p>2. Masing-masing dikendalikan oleh wakil kepala staf</p> |

| | | |
|----|------------------|--|
| 15 | Isi/ Deduktif | <p>1. Di Gedung Putih memang ada tiga dewan, dua badan, dan tujuh kantor, tapi semuanya dikendalikan dalam sistem kerja yang jelas.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tiga dewan, dua badan, dan tujuh kantor 2. Semuanya 3. Dalam sistem kerja <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Di Gedung Putih memang ada 2. Tapi dikendalikan 3. Yang jelas |
| | | <p>2. Ada mekanisme baku untuk menjahit komunikasi, koordinasi, dan sinergi berbagai unsur.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme baku 2. Ø (mekanisme baku) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada 2. Menjahit komunikasi, koordinasi, dan sinergi berbagai unsur |
| 16 | Isi/ Deduktif | <p>1. Kesalahan bukan tak pernah terjadi.</p> <p>Topik: Kesalahan</p> <p>Komen: Bukan tak pernah terjadi</p> |
| | | <p>2. Beberapa pekan lalu, miskoordinasi menyebabkan sejumlah besar duta besar tak bisa masuk Gedung Putih untuk menghadiri acara yang diadakan Presiden Obama untuk menghormati diplomat asing.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Miskoordinasi 2. Sejumlah besar duta besar 3. Acara 4. Ø (acara) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beberapa pekan lalu, menyebabkan 2. Tak bisa masuk Gedung Putih 3. Untuk menghadiri 4. Yang diadakan Presiden Obama 5. Untuk menghormati diplomat asing |
| 17 | Isi/ Deduktif | <p>1. Dalam masa kepresidenan tertentu, prinsip organisasi Gedung Putih yang ramping itu pernah dilanggar.</p> <p>Topik: Prinsip organisasi Gedung Putih yang ramping itu</p> <p>Komen: Dalam masa kepresidenan tertentu, pernah dilanggar</p> |
| | | <p>2. Namun biasanya itu dilakukan untuk mengimbangi kabinet sangat ramping yang dibentuk presiden.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Itu 2. ø (namun biasanya itu dilakukan) 3. Kabinet sangat ramping |

| | | |
|----|-----------------------------|--|
| | | <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biasanya dilakukan 2. Untuk mengimbangi 3. Yang dibentuk presiden |
| | | <p>3. Gedung Putih bertugas menambal lubang-lubang yang tak terjangkau kabinet dengan membentuk sejumlah dewan.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung Putih 2. Lubang-lubang 3. Ø (Gedung Putih) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertugas menambal 2. Yang tak terjangkau kabinet 3. Dengan membentuk sejumlah dewan |
| 18 | Isi/ Deduktif | <p>1. Tentu saja model Amerika tak bisa sepenuhnya kita gunakan.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Model Amerika 2. Kita <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tentu saja tak bisa sepenuhnya 2. Gunakan |
| | | <p>2. Sistem presidensial mereka jauh lebih sederhana (disokong sistem dwipartai) dibanding kita (yang bersistem multipartai).</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem presidensial mereka 2. Ø (sistem presidensial mereka) 3. Ø (sistem presidensial mereka jauh lebih sederhana) 4. Kita <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jauh lebih sederhana 2. (disokong sistem dwipartai) 3. Dibanding 4. (yang bersistem multipartai) |
| | | <p>3. Kantor eksekutif presiden di berbagai negara Amerika Latin-yang mengawinkan presidensialisme dengan sistem multipartai-bisa jadi pembanding yang lebih layak.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor eksekutif presiden di berbagai negara Amerika Latin- 2. Ø (Kantor eksekutif presiden di berbagai negara Amerika Latin-yang mengawinkan presidensialisme dengan sistem multipartai-) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang mengawinkan presidensialisme dengan sistem multipartai- 2. Bisa jadi pembanding yang lebih layak |
| 19 | Isi/ Deduktif (dengan | <p>1. Terlepas dari keragaman operasi sistemnya, umumnya demokrasi presidensial di Amerika Latin bersungguh-sungguh membangun kantor eksekutif presiden.</p> |

| | | |
|-----------|------------------------|---|
| | paragraf ke-20) | <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Demokrasi presidensial di Amerika Latin 2. Ø (terlepas dari keragaman operasi sistemnya, umumnya demokrasi presidensial di Amerika Latin) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlepas dari keragaman operasi sistemnya, 2. bersungguh-sungguh membangun kantor eksekutif presiden |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 2. Ada ikhtiar untuk menggabungkan sifat ramping organisasi, kesederhanaan penjenjangan birokrasi, dan jahitan komunikasi-koordinasi-sinergi dengan kebutuhan mengakomodasi sistem multipartai. <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ikhtiar 2. Ø (ikhtiar untuk menggabungkan sifat ramping organisasi, kesederhanaan penjenjangan birokrasi, dan jahitan komunikasi-koordinasi-sinergi dengan kebutuhan mengakomodasi sistem multipartai) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk menggabungkan sifat ramping organisasi, kesederhanaan penjenjangan birokrasi, dan jahitan komunikasi-koordinasi-sinergi dengan kebutuhan mengakomodasi sistem multipartai 2. Ada |
| 20 | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsekuensinya, sekadar misal, ada organ-organ khusus untuk mengurus hubungan kabinet dengan partai-partai serta lembaga legislatif. <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsekuensinya, sekadar misal, 2. Ø (konsekuensinya, sekadar misal, ada organ-organ khusus) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada Organ-organ khusus 2. Untuk mengurus hubungan kabinet dengan partai-partai serta lembaga legislatif |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 2. Organ ini bersifat permanen, bekerja penuh untuk tujuan itu, sehingga bisa menjadi instrumen presiden untuk membangun disiplin koalisi pemerintahan. <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organ ini 2. Ø (organ ini) 3. Ø (organ ini) 4. Instrumen presiden <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bersifat permanen, 2. Bekerja penuh untuk tujuan itu, 3. Bisa menjadi 4. Untuk membangun disiplin koalisi pemerintahan |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 3. Juga memastikan dukungan politik dari partai dan parlemen terhadap kebijakan presiden serta mengatasi hubungan presiden dengan partai-partai. |

| | | |
|----|----------------------|--|
| | | <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ø (organ ini) 2. Ø (organ ini) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Juga memastikan dukungan politik dari partai dan parlemen terhadap kebijakan presiden 2. Mengatasi hubungan presiden dengan partai-partai |
| 21 | Isi/ Deduktif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Andai Yudhoyono memiliki organ semacam itu, anggota staf khusus bidang bencana alam, Andi Arief, tak perlu sibuk melobi tokoh-tokoh politik seperti yang kerap ia lakukan. <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yudhoyono 2. Andi Arief 3. Ia <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Andai memiliki organ semacam itu, 2. Anggota staf khusus bidang bencana alam, tak perlu sibuk melobi tokoh-tokoh politik 3. Yang kerap lakukan |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 2. Adanya organ khusus semacam itu juga tak akan membuat pihak-pihak yang dilobi salah paham karena merasa dinilai sebagai "sumber bencana" oleh Presiden. <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya organ khusus semacam itu 2. Pihak-pihak yang dilobi 3. Ø (pihak-pihak yang dilobi) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Juga tak akan membuat 2. Salah paham 3. Merasa dinilai sebagai "sumber bencana" oleh Presiden |
| 22 | Penutup/ Deduktif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belajar dari pengalaman setahun terakhir, ada baiknya Presiden Yudhoyono menata ulang kantor eksekutif presiden dengan mereformasi lapis demi lapis organisasi dan birokrasi Istana yang tambun, tak efisien, dan tak efektif itu. <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden Yudhoyono 2. Ø (Presiden Yudhoyono) 3. Ø (Presiden Yudhoyono) 4. Lapis demi lapis organisasi dan birokrasi Istana 5. Ø (lapis demi lapis organisasi dan birokrasi Istana) 6. Ø (lapis demi lapis organisasi dan birokrasi Istana) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belajar dari pengalaman setahun terakhir 2. Ada baiknya menata ulang kantor eksekutif presiden 3. Mereformasi 4. Yang tambun 5. (yang) Tak efisien 6. (yang) Tak efektif itu |

| | | |
|----|------------------------------|--|
| | | <p>2. Jika Yudhoyono abai, saya khawatir, ia akan terkurung di dalam Istana dengan kaca-kacanya yang buram.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yudhoyono 2. Saya 3. Ia 4. Kaca-kacanya <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika abai 2. Khawatir 3. Akan terkurung di dalam Istana 4. Yang buram |
| 23 | Penutup/ Induktif | <p>1. Kaca buram Istana adalah sebuah penyakit yang biasa diidap presiden yang tak memiliki kantor pendukung yang sigap dan cakap.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kaca buram Istana 2. Sebuah penyakit 3. Presiden 4. Kantor pendukung <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adalah 2. Yang biasa diidap 3. Yang tak memiliki 4. Yang sigap dan cakap |
| | | <p>2. Kaca Istana dibuat buram karena informasi dan data yang sampai ke presiden bermutu rendah.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kaca Istana 2. Informasi dan data 3. Ø (informasi dan data yang sampai ke presiden) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dibuat buram 2. Yang sampai ke presiden 3. Bermutu rendah |
| | | <p>3. Kaca yang buram membuat presiden silap mata.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kaca yang buram 2. Presiden <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat 2. Silap mata |
| | | <p>4. Publik di luar Istana yang cemas, kecewa, marah, dan menuntut dilihat presiden seperti rombongan pendukung yang bahagia, nyaman, dan bersuka ria.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publik di luar Istana yang cemas, kecewa, marah, dan menuntut 2. Seperti rombongan pendukung <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilihat presiden 2. Yang bahagia, nyaman, dan bersuka ria |

| | | |
|----|------------------------------|--|
| 24 | Penutup/ Induktif | <p>1. Sebagai warga negara, saya mendambakan presiden yang kuat, sigap, dan tangkas mengelola berbagai persoalan.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saya 2. Presiden <p>Komen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai warga negara, mendambakan 2. Yang kuat, sigap, dan tangkas mengelola berbagai persoalan |
| | | <p>2. Presiden patut menata ulang istananya agar dalam empat tahun tersisa, ia tak selalu merasa cemas karena merasa kekuasaannya hendak direbut orang lain.</p> <p>Topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden 2. Ia 3. Ø (ia) <p>Komen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Patut menata ulang istananya 2. Agar dalam empat tahun tersisa, tak selalu merasa cemas 3. Merasa kekuasaannya hendak direbut orang lain |

LAMPIRAN 9

Judul Opini dengan Perulangan Topik di Majalah *TEMPO* Tahun 2010(Diunduh dari laman <http://majalah.tempointeraktif.com>)

| No. | Topik | Judul | Jumlah |
|-----|----------------|--|--------|
| 1. | Presiden SBY | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jangan Korupsi Bila Menolak Penjara 2. Seratus Hari Tak bergigi 3. Sang Kerbau Masuk Istana 4. Sikap Presiden dalam Episode Akhir Century 5. Kembali Kunjungi Negeri belanda 6. SBY dan RMS 7. Orang-Orang Sekitar Presiden 8. Istana Bising Yudhoyono | 8 |
| 2. | Century | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengungkap Juru Selamat Century 2. Di Mana Etika Anggota Pansus 3. Siapa Jadi Korban 4. Superioritas Yang Tiba-tiba Kempis 5. Sekutu dan Seteru dalam Konflik Century 6. Skandal Century: Alpa atau Sengaja 7. Vonis Ringan Misbakhun | 7 |
| 2. | Sri Mulyani | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jangan Gantung Barbertje 2. Peluru Kosong Ancaman Boikot 3. Jalan Tuhan Menteri Sri Mulyani 4. Sri Mulyani Kembali ke Habitat 5. Ini Bukan Soal Sri Mulyani 6. Sri Mulyani, Nasionalisme, dan Tinju 7. Mencoba Berpisah dari Sri Mulyani | 7 |
| 3. | Gayus Tambunan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bongkar Tuntas 'Kegayusan' 2. Sikap Lembek Jaksa Agung 3. Gayus dan Rahasia Pajak Bakrie 4. Adili Para Penyuap Gayus 5. Skandal Pelesiran Gayus Tambunan 6. Mengusut Asal-Muasal Duit Gayus 7. Bebaskan Polisi dari Gayus | 7 |
| 4. | Sepak Bola | <ol style="list-style-type: none"> 1. Cintai Sepak Bola, Lupakan PSSI 2. Ketika Musim Gol Tiba 3. Keindahan, Kemenangan, Keberpihakan 4. Sepak Bola Bapak Bangsa 5. Ketika Polisi Mengatur Wasit 6. Tunggu Dulu, Garuda 7. Garuda di Dada Tim Nasional | 7 |
| 5. | Susno Duadji | <ol style="list-style-type: none"> 1. Cara Susno Menguji Polisi 2. Perang Bintang di Trunojoyo 3. Trio Makelar di Markas Besar 4. Kesempatan Terbaik Merombak Kepolisian | 6 |

| | | | |
|-----|---------------------|--|---|
| | | 5. Serangan Balik untuk Susno 6. Overacting Melindungi Susno | |
| 6. | DPR | 1. Pertemuan Besar Lepas kendali 2. Ganti Wakil Rakyat Pembolos 3. Kebangkitan Aliansi Pro-korupsi 4. Campur Tangan Anggota Dewan 5. Kabar Seratus Miliar Rupiah Itu 6. Tak Perlu Gedung Baru Dewan | 6 |
| 7. | Mahkamah Konstitusi | 1. Kekerasan di Mahkamah Konstitusi 2. Berdemokrasi Lewat Mahkamah Konstitusi 3. Beri Mahkamah Konstitusi Kesempatan 4. Perang Setengah Jalan Mahfud Md. 5. Noda di Mahkamah Konstitusi | 5 |
| 8. | KPK | 1. Mafia di Sekitar KPK 2. Empat Serangkai Terus maju 3. KPK Diserang Balik 4. Tunggu Apa Lagi | 4 |
| 9. | Obama | 1. Kunjungan Obama dan Maknanya bagi Indonesia 2. Belajar dari Reformasi Kesehatan Amerika 3. Pelajaran dari Ketegasan Obama 4. Obama Pulang | 4 |
| 10. | Bahan Bakar | 1. Ramah lingkungan Murah Pula 2. Target Mimpi Produksi Minyak 3. Sudah Kompor Gas, Premium Pula 4. Jangan Umbar BBM Bersubsidi | 4 |
| 11. | Nunun Nurbaetie | 1. Penyakit Lupa Nyonya Sosialita 2. Bawalah Nunun ke Meja Hijau 3. Jangan Menyerah Menghadapi Nunun 4. Begitu Sulitkah Menjerat Nunun | |
| 12. | Kebebasan Pers | 1. Pers Kita Belum Bebas? 2. Penjara untuk Sang Kelinci 3. Kemerdekaan Pers dan Kebebasan Informasi Publik 4. Molotov untuk Kebebasan Pers | 4 |
| 13. | Calon Kapolri | 1. Bursa Panas Calon Kapolri 2. Reformasi Kedua Kepolisian Republik 3. Pilih Kapolri Tanpa Koalisi 4. Mengapa Harus Timur | 4 |
| 14. | Video Porno | 1. Seks, Video, dan Kita 2. Berita Video Mesum dan Hak Publik 3. Kusut Masai Kasus Ariel | 3 |
| 15 | <i>Infotainment</i> | 1. <i>Infotainment</i> Bukan Produk Jurnalistik 2. Infotainment, Sensor, dan Kebebasan Pers 3. Perlu Takaran Sanksi | 3 |
| 16. | Monarki Yogya | 1. Menuju Monarki 'Demokrasi' | 3 |

| | | | |
|-----|-------------------------|--|---|
| | | Yogyakarta 2. Untung-Rugi Opsi Penetapan 3. Keistimewaan Yogyakarta Landasan Sejarah | |
| 17. | Bank Indonesia | 1. Mengapa BI Berkali Terperosok 2. Koalisi Setelah Sidang Paripurna 3. Skandal Suap di Bank Sentral | 3 |
| 18. | Anggodo | 1. Anggodo di Tangan KPK 2. Akhir Petualangan Anggodo | 2 |
| 29. | Gus Dur | 1. Perginya Penakluk Hati Rakyat 2. Pluralisme dan Nasionalisme: Gus Dur dan Frans Seda | 2 |
| 20. | Artalyta | 1. Sulitnya Memberantas Mafia Hukum 2. Bila Hakim Pendek Ingatan | 2 |
| 21. | Pembobolan ATM | 1. Transparansi dalam Pembobolan ATM 2. Kartu Chip Terhambat Biaya | 2 |
| 22. | Antasari | 1. Apakah Antasari membunuh 2. Mudarat Seleksi Pengganti Antasari | 2 |
| 23. | Partai Demokrat | 1. Sang Pemimpi di Konggres Demokrat 2. Saat Demokrat Melecehkan Hukum | 2 |
| 24. | Haji | 1. Tangan Kotor 'Proyek' Haji 2. Jangan Permainkan Uang Haji | 2 |
| 25. | Gentong Babi | 1. Gentong Babi 2. Akrobat Politik Gentong Babi | 2 |
| 26. | Perwira Polisi | 1. Sebuah Cermin untuk Kepolisian 2. Rekening Gendut Perwira Polisi | 2 |
| 27. | Yusril Ihza Mahendra | 1. Kejaksaan dan Tantangan Dua Tersangka 2. Atraksi Hukum Yusril Ihza Mahendra | 2 |
| 28. | Ahmadiyah | 1. Ahmadiyah 2. Siapa Suruh Bubarkan Ahmadiyah | 2 |
| 29. | Satgas Antimafia | 1. Kocok Ulang Satgas Antimafia 2. Serang Satgas, Lupa Etika | 2 |
| 30. | Kapolri dan Jaksa Agung | 1. Ceroboh merobohkan Citra 2. Beban Kapolri dan Jaksa Agung | 2 |
| 31. | Indonesia—Malaysia | 1. Pagar Baik, Tetangga Pun Baik 2. Sudahi Sengketa Tanpa Perang | 2 |
| 32. | PT Krakatau Steel | 1. Privatisasi Krakatau Yang Kacau 2. Kewajaran Saham Krakatau Steel | 2 |

LAMPIRAN 10

Daftar Sumber Data untuk Contoh

- Contoh (1) : *TEMPO*, 25 Januari 2010 dalam “Seratus Hari Tak Bergigi”
majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/01/25/OPI/mbm.20100125.OPI132604.id.html
- Contoh (2) : *TEMPO*, 25 Januari 2010 dalam “Jangan Korupsi Bila Menolak Penjara”
majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/01/25/OPI/mbm.20100125.OPI132602.id.html
- Contoh (3) : *TEMPO*, 7 Oktober 2010 dalam “G30S dan Peran Aidit”
majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2007/10/01/OPI/mbm.20071001.OPI125189.id.html
- Contoh (4) : *TEMPO*, 25 Januari 2010 dalam “Seratus Hari Tak Bergigi”
majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/01/25/OPI/mbm.20100125.OPI132604.id.html
- Contoh (5) : *TEMPO*, 1 Maret 2010 dalam “Sikap Presiden dalam Episode Akhir Century”
majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/03/01/OPI/mbm.20100301.OPI132870.id.html
- Contoh (6) : *TEMPO*, 25 Januari 2010 dalam “Seratus Hari Tak Bergigi”
majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/01/25/OPI/mbm.20100125.OPI132604.id.html
- Contoh (11) : *TEMPO*, 25 Januari 2010 dalam “Seratus Hari Tak Bergigi”
majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/01/25/OPI/mbm.20100125.OPI132604.id.html
- Contoh (12) : *TEMPO*, 11 Oktober 2010 dalam SBY dan RMS”
majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/10/11/KL/mbm.20101011.KL134818.id.html
- Contoh (13) : *TEMPO*, 25 Oktober 2010 dalam “Siklus Dukungan terhadap Kinerja Yudhoyono”
majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/10/25/KL/mbm.20101025.KL134914.id.html

- Contoh (14) : *TEMPO*, 25 Oktober 2010 dalam “Istana Bising Yudhoyono”
majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/10/25/KL/mbm.20101025.KL134915.id.html
- Contoh (15) : *TEMPO*, 25 Oktober 2010 dalam “Siklus Dukungan terhadap Kinerja Yudhoyono”
majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/10/25/KL/mbm.20101025.KL134914.id.html
- Contoh (16) : *TEMPO*, 1 Februari 2010 dalam “Sengkarut Honor Bank Daerah”
majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/02/01/NAS/mbm.20100201.NAS132656.id.html
- Contoh (17) : *TEMPO*, 25 Januari 2010 dalam “Monster Jalanan”
majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/01/25/OPI/mbm.20100125.OPI132603.id.html
- Contoh (18) : *TEMPO*, 25 Januari 2010 dalam “Jangan Korupsi Bila Menolak Penjara”
majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/01/25/OPI/mbm.20100125.OPI132602.id.html
- Contoh (19) : *TEMPO*, 1 Februari 2010 dalam Momen “Aksi Lempar Sepatu”
majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/02/01/ITR/mbm.20100201.ITR.132641.id.html
- Contoh (20) : *TEMPO*, 1 Februari 2010 dalam Ekonomi “Kecil Itu Emas”
majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/02/01/EB/mbm.20100201.EB.132654.id.html
- Contoh (21) : *TEMPO*, 4 Oktober 2010 dalam “Bermain Api Ayat Tembakau”
majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/10/04/OPI/mbm.20101004.OPI.134759.id.html

LAMPIRAN 11
Daftar Sumber Data

1. “Jangan Korupsi Bila Menolak Penjara”
majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/01/25/OPI/mbm.20100125.OPI132602.id.html
2. “Seratus Hari Tak Bergigi”
majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/01/25/OPI/mbm.20100125.OPI132604.id.html
3. “Sang Kerbau Masuk Istana”
majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/02/08/OPI/mbm.20100208.OPI132726.id.html
4. “Sikap Presiden dalam Episode Akhir Century”
majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/03/01/OPI/mbm.20100301.OPI132870.id.html
5. “Kembali Kunjungi Negeri Belanda”
majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/10/11/OPI/mbm.20101011.OPI134812.id.html
6. “SBY dan RMS”
majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/10/11/KL/mbm.20101011.KL134818.id.html
7. “Orang-orang Sekitar Presiden”
majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/10/25/OPI/mbm.20101025.OPI134940.id.html
8. “Istana Bising Yudhoyono”
majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/10/25/KL/mbm.20101025.KL134915.id.html